



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang lebih baik maka perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
16. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari :
 - a. Visi, Misi dan Program Bupati terpilih Tahun 2021; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (3) Selain berpedoman pada RPJPD dan RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi;
 - b. RTRW;

- c. KLHS; dan
- d. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik.
- (2) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam penyusunan RKPD, Renstra, Renja; dan
- b. seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappelbangda.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran mulai Tahun 2022-2026. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sukoharjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan evaluasi” merupakan pengendalian dan evaluasi khusus pada proses dalam rangka menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kekuatan, rahmat dan kerunia-Nya sehingga RPJMD Kabupaten Sukoharjo ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya Sekretaris Daerah dan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah (PD) yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan informasi awal kepala para calon kepala daerah untuk menyusun visi, misi dan program prioritas agar sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang relevan dengan kondisi empiris daerah,
- b. Sebagai informasi yang penting bagi masyarakat, sebagai dasar untuk menentukan pilihan berdasarkan kualitas visi, misi dan program prioritas para calon kepala daerah yang berbasis data dan informasi yang akurat,
- c. Untuk menyiapkan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo lebih awal, sehingga menjamin terlaksananya penyusunan RPJMD sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017.
- d. Data capaian, rumusan permasalahan dan isu strategis RPJMD sebagai rujukan perangkat daerah untuk persiapan penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah.

Akhir kata, kami sampaikan beribu terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini.

Sukoharjo, Agustus 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	xiv
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	I-1
BAB I Pendahuluan.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-25
1.5. Sistematika Dokumen RPJMD	I-25
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif	II-1
2.1.2 Topografi	II-2
2.1.3 Geologi	II-3
2.1.4 Hidrologi	II-4
2.1.5 Klimatologi.....	II-5
2.1.6 Penggunaan Lahan	II-7
2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.8 Wilayah Rawan Bencana	II-15
2.1.9 Kondisi Demografi.....	II-20
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-24
2.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi	II-24
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-37
2.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga	II-46
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-48
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-48
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-75
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-120
2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan.....	II-135
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-139
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-139
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-142
2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-152
BAB III Gambaran Keuangan Daerah	III-1
3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	III-1
3.2. Kondisi Perekonomian Daerah	III-2

3.3.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.3.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-3
3.3.2	Kinerja Belanja Daerah.....	III-14
3.3.3	Kinerja Pembiayaan.....	III-18
3.3.4	Neraca Daerah.....	III-20
3.4.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-25
3.4.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-26
3.4.2	Analisis Pembiayaan.....	III-26
3.4.3	Analisis Fiskal Daerah	III-30
3.5.	Kerangka Pendanaan	III-35
3.5.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-35
3.5.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-46
3.5.3	Analisa Kesehatan Kapasitas Keuangan	III-48
BAB IV	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-3
4.1.3	Urusan Pilihan	IV-7
4.1.4	Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan.....	IV-8
4.1.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	IV-9
4.1.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	IV-9
4.1.7	Unsur Kewilayahan.....	IV-9
4.1.8	Unsur Pemerintahan Umum.....	IV-9
4.2.	Isu Strategis	IV-10
4.2.1	Telaah Isu Lingkungan Strategis Global..	IV-10
4.2.2	Isu Strategis Pembangunan Dalam RPJMN	IV-14
4.2.3	Isu atau Kebijakan Provinsi Jawa Tengah.....	IV-16
4.2.4	Isu RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 ..	IV-18
4.2.5	Telaah RPJP Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025	IV-20
4.2.6	Hasil Telaahan KLHS Kabupaten Sukoharjo	IV-21
4.2.7	Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo	IV-30
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-1
5.1.	Visi.....	V-1
5.2.	Misi.....	V-2
5.3.	Program Unggulan	V-4
5.4.	Tujuan dan Sasaran	V-6
BAB VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.1.	Strategi Pembangunan Daerah.....	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-22
6.3.	Arah Kebijakan Kewilayahan	VI-33
6.4.	Program Pembangunan Daerah.....	VI-36
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.....	VII-1
7.1.	Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	VII-1
7.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	VII-6

7.1.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	VII-12
7.1.3	Urusan Pilihan	VII-22
7.1.4	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	VII-25
7.1.5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	VII-26
7.1.6	Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	VII-27
7.1.7	Unsur Kewilayahan.....	VII-28
7.1.8	Unsur Pemerintahan Umum.....	VII-28
7.2.	Kerangka Pendanaan Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.	VII-29
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.....	VIII-1
8.1.	Indikator Kinerja Utama	VIII-2
8.2.	Indikator Kinerja Daerah.....	VIII-4
BAB IX	Penutup	IX-1
9.1.	Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2.	Pedoman Transisi	IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-21
Tabel 2.1.	Banyaknya Curah Hujan Tahunan per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-6
Tabel 2.2.	Tabel Penggunaan Lahan Kabupaten Sukoharjo.....	II-7
Tabel 2.3.	Luas Penggunaan Lahan Menurut Fungsi Kawasan	II-8
Tabel 2.4.	Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukoharjo	II-9
Tabel 2.5.	Ketersediaan Air Bersih Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-15
Tabel 2.6.	Jenis Kerawanan Bencana dan Risiko Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2020	II-17
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.....	II-22
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, Rasio Ketergantungan, Dan Rasio Jenis Kelamin Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 (Orang).....	II-25
Tabel 2.9.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Seri 2010) Menurut Lapangan Usaha (Persen).....	II-27
Tabel 2.10.	PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHK (Juta Rupiah)..	II-27
Tabel 2.11.	PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)..	II-28
Tabel 2.12.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020 (%)......	II-29
Tabel 2.13.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	II-29
Tabel 2.14.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	II-30
Tabel 2.15.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 – 2020 (%)......	II-30
Tabel 2.16.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Tahun 2016-2020	II-32
Tabel 2.17.	Integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Rencana Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	II-37
Tabel 2.18.	Integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Potensi Pengembangan Wilayah	II-38
Tabel 2.19.	APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020	II-46
Tabel 2.20.	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-47

Tabel 2.21.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-47
Tabel 2.22.	Integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Rencana Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	II-48
Tabel 2.23.	Perkembangan Kepemudaan & Keolahragaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2019	II-49
Tabel 2.24.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020 Kabupaten Sukoharjo	II-50
Tabel 2.25.	Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2020 Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	II-52
Tabel 2.26.	Jumlah Guru dan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2020 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	II-53
Tabel 2.27.	Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.28.	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020	II-58
Tabel 2.29.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.30.	Rasio Dokter Persatuan Penduduk Tahun 2016-2020 Kabupaten Sukoharjo	II-59
Tabel 2.31.	Data Tenaga Paramedis per satuan penduduk tahun 2016-2020 Kabupaten Sukoharjo	II-60
Tabel 2.32.	Persentase Penduduk Pemanfaat Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2016-2020 Kab. Sukoharjo	II-60
Tabel 2.33.	Panjang Jalan Menurut Kewenangan	II-60
Tabel 2.34.	Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-61
Tabel 2.35.	Persebaran Kualitas Jalan di Kabupaten Sukoharjo	II-61
Tabel 2.36.	Kondisi Jalan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2020.....	II-62
Tabel 2.37.	Persebaran Embung di Kabupaten Sukoharjo	II-63
Tabel 2.38.	Daerah Irigasi di Kabupaten Sukoharjo.....	II-64
Tabel 2.39.	Kondisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo.....	II-66
Tabel 2.40.	Panjang Pembangunan Drainase Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2020.....	II-67
Tabel 2.41.	Persentase Penggunaan Air Minum Layak di Kabupaten Sukoharjo.....	II-68
Tabel 2.42.	Persentase Penggunaan Air Minum Aman di Kabupaten Sukoharjo.....	II-68
Tabel 2.43.	Capaian Sanitasi Layak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-69
Tabel 2.44.	Capaian Sanitasi Aman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-69

Tabel 2.45.	Jumlah IPAL Komunal Perumahan Kabupaten Sukoharjo	II-70
Tabel 2.46.	Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo	II-71
Tabel 2.47.	Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020	II-72
Tabel 2.48.	Persentase Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020	II-72
Tabel 2.49.	Data Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh.....	II_73
Tabel 2.50.	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	II-63 II-73
Tabel 2.51.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja ASN Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kab Sukoharjo 2016-2020	II-74
Tabel 2.52.	Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol Non PNS) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.53.	Rasio Jumlah Anggota Linmas Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.54.	Angka Kriminalitas, Penegakan Perda serta Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-75
Tabel 2.55.	Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016– 2020	II-76
Tabel 2.56.	Jumlah Penduduk Miskin dan Standar Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-77
Tabel 2.57.	Jumlah PMKS Kabupaten Sukoharjo	II-77
Tabel 2.58.	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.59.	Rasio Rata - Rata Upah Minimum banding KHL Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 – 2020	II-81
Tabel 2.60.	Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.61.	Persentase Tenaga Kerja Perempuan di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2020	II-82
Tabel 2.62.	Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	II-83
Tabel 2.63.	Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-84
Tabel 2.64.	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-85
Tabel 2.65.	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-86
Tabel 2.66.	Lokus Kerawanan Pangan di Kabupaten Sukoharjo	II-86
Tabel 2.67.	Skor PPH Konsumsi dan Persentase Keamanan Pangan	

	Kabupaten Sukoharjo	II-87
Tabel 2.68.	Jumlah Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.69.	Jumlah Lahan Bersertifikat yang Dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.....	II-87
Tabel 2.70.	Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020	II-90
Tabel 2.71.	Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020.....	II-91
Tabel 2.72.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	II-91
Tabel 2.73.	Jumlah TPS dan Timbulan Sampah Per Hari dan Fasilitas Persampahan yang Tersedia.....	II-93
Tabel 2.74.	Jumlah TPS 3R Kabupaten Sukoharjo	II-93
Tabel 2.75.	Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.76.	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.77.	Perkembangan Jumlah BUMDes di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2020.....	II-96
Tabel 2.78.	Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021	II-96
Tabel 2.79.	Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-97
Tabel 2.80.	Jumlah Pasar Desa Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	II-97
Tabel 2.81.	Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.82.	Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.83.	Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020	II-99
Tabel 2.84.	Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan di Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-102
Tabel 2.85.	Data Stasiun di Kabupaten Sukoharjo	II-103
Tabel 2.86.	Data Potensi Parkir di Kabupaten Sukoharjo.....	II-103
Tabel 2.87.	Data Lokasi Parkir yang Sudah Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.....	II-104
Tabel 2.88.	Rasio Izin Trayek di Kabupaten Sukoharjo.....	II-105
Tabel 2.89.	Moda Angkutan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2020.....	II-105
Tabel 2.90.	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji.....	II-105
Tabel 2.91.	Data Perlintasan Tidak Sebidang di Kabupaten Sukoharjo.....	II-106
Tabel 2.92.	Data Perlintasan Sebidang di Kabupaten Sukoharjo.....	II-106
Tabel 2.93.	Data Status JPL Perlintasan Perkeretaapian di Kabupaten Sukoharjo.....	II-109

Tabel 2.94.	Kinerja Urusan Perhubungan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2.95.	Berbagai Layanan dan Sarana/Prasarana Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.....	II-113
Tabel 2.96.	Perkembangan Teknologi Informasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2020.....	II-114
Tabel 2.97.	Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Sukoharjo.....	II-115
Tabel 2.98.	Jumlah Usaha Mikro, Makro dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2020.....	II-115
Tabel 2.99.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-116
Tabel 2.100.	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-117
Tabel 2.101.	Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-117
Tabel 2.102.	Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2020.....	II-118
Tabel 2.103.	Jumlah Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-118
Tabel 2.104.	Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-119
Tabel 2.105.	Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-121
Tabel 2.106.	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-121
Tabel 2.107.	Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-121
Tabel 2.108.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku.....	II-122
Tabel 2.109.	Cakupan Arsip Yang Berhasil Dikelola di Kabupaten Sukoharjo...	II-122
Tabel 2.110.	Produksi Perikanan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020..	II-123
Tabel 2.111.	Perkembangan Rumah Makan Yang Memiliki Izin TDUP Kabupaten Sukoharjo.....	II-124
Tabel 2.112.	Jumlah Warung Makan dan Restoran di Kabupaten Sukoharjo....	II-125
Tabel 2.113.	Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Sukoharjo	II-126
Tabel 2.114.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-126
Tabel 2.115.	Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 (Ton)	II-127
Tabel 2.116.	Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 (Ton)	II-127

Tabel 2.117. Produksi Tanaman Buah-Buahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 (Ton)	II-128
Tabel 2.118. Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 (Ton)	II-129
Tabel 2.119. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 (Ton)	II-129
Tabel 2.120. Peternakan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.121. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2020	II-131
Tabel 2.122. Rasio Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2015-2020	II-132
Tabel 2.123. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)	II-134
Tabel 2.124. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)	II-134
Tabel 2.125. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)	II-135
Tabel 2.126. Data Realisasi Ekspor Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2019	II-135
Tabel 2.127. Data Realisasi Ekspor Kabupaten Sukoharjo Menurut Negara Tujuan Tahun 2018 – 2019	II-135
Tabel 2.128. Realisasi Import Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020	II-136
Tabel 2.129. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)	II-137
Tabel 2.130. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)	II-137
Tabel 2.131. Jumlah Industri Kecil, Sedang, Besar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-137
Tabel 2.132. Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-138
Tabel 2.133. Capaian Kinerja Bidang Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-139
Tabel 2.134. Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-140
Tabel 2.135. Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-141
Tabel 2.136. Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-142
Tabel 2.137. Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-144
Tabel 2.138. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	II-145
Tabel 2.139. Tabel Perbandingan Luas Wilayah Produktif dan Budidaya	

	Kabupaten Sukoharjo	II-147
Tabel 2.140.	Perbandingan Luas Wilayah Produktif dan Budidaya Kabupaten Sukoharjo	II-148
Tabel 2.141.	Persebaran Kawasan Industri di Kabupaten Sukoharjo	II-148
Tabel 2.142.	Luasan Tingkat Resiko Banjir Kabupaten Sukoharjo	II-149
Tabel 2.143.	Persebaran Tingkat Risiko Bencana Banjir Kabupaten Sukoharjo	II-150
Tabel 2.144.	Tingkat Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sukoharjo	II-152
Tabel 2.145.	Persebaran Tingkat Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Sukoharjo	II-152
Tabel 2.146.	Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Sukoharjo	II-154
Tabel 2.147.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	II-156
Tabel 2.148.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama	II-156
Tabel 2.149.	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.....	II-157
Tabel 3.1.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-7
Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020.....	III-8
Tabel 3.3.	Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020.....	III-8
Tabel 3.4.	Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020.....	III-10
Tabel 3.5.	Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020.....	III-11
Tabel 3.6.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020	III-12
Tabel 3.7.	Kontribusi/Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020...	III-13
Tabel 3.8.	Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020 (%).....	III-15
Tabel 3.9.	Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 s.d Tahun 2020.....	III-16
Tabel 3.10.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun 2020.....	III-17
Tabel 3.11.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-19
Tabel 3.12.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sukoharjo....	III-21

Tabel 3.13.	Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-24
Tabel 3.14.	Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-25
Tabel 3.15.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sukoharjo.....	III-26
Tabel 3.16.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-27
Tabel 3.17.	Defisit dan Surplus Riil Anggaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-29
Tabel 3.18.	Komposisi Penutup Defisit Dan Surplus Riil Anggaran Tahun 2016-2020.....	III-30
Tabel 3.19.	Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-30
Tabel 3.20.	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-31
Tabel 3.21.	Gambaran Ruang Fiskal Kabupaten Sukoharjo.....	III-32
Tabel 3.22.	Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-33
Tabel 3.23.	Ratio Belanja Modal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-34
Tabel 3.24.	Ratio Belanja Pegawai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-34
Tabel 3.25.	Tax Ratio Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	III-35
Tabel 3.26.	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.....	III-40
Tabel 3.27.	Perkembangan Realisasi Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.....	III-42
Tabel 3.28.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama.....	III-44
Tabel 3.29.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah.....	III-47
Tabel 3.30.	Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026.....	III-50
Tabel 4.1.	Sasaran Strategis KLHS Kabupaten Sukoharjo	IV-22
Tabel 4.2.	Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo dengan Isu Internasional, Isu/Kebijakan Nasional, Isu/Kebijakan Provinsi Jawa Tengah, dan Isu RPJPD Kabupaten Sukoharjo, serta Isu Strategis KLHS	IV-40
Tabel 5.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.....	V-9

Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026	VI-14
Tabel 6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026	VI-22
Tabel 6.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VI-29
Tabel 6.4.	Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukoharjo	VI-34
Tabel 6.5.	Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sukoharjo (Rp 000.000)	VI-38
Tabel 7.1	Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026.....	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026..	VII-30
Tabel 8.1.	Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.....	VIII-1
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukoharjo.....	VIII-2
Tabel 8.3.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.....	VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen	I-5
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo	II-3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Sukoharjo	II-4
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kabupaten Sukoharjo	II-5
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Sukoharjo	II-6
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sukoharjo	II-8
Gambar 2.7	Peta Struktur Ruang Kabupaten Sukoharjo	II-12
Gambar 2.8	Peta Pola Ruang Kabupaten Sukoharjo	II-16
Gambar 2.9	Peta Sub DAS Kabupaten Sukoharjo	II-18
Gambar 2.10	Peta Rawan Banjir Kabupaten Sukoharjo	II-19
Gambar 2.11	Peta Rawan Longsor Kabupaten Sukoharjo	II-20
Gambar 2.12	Peta Rawan Kekeringan Kabupaten Sukoharjo	II-21
Gambar 2.13	Peta Rawan Cuaca Ekstrem Kabupaten Sukoharjo	II-22
Gambar 2.14	Piramida Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019	II-23
Gambar 2.15	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	II-26
Gambar 2.16	Tingkat Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-31
Gambar 2.17	PDRB Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-32
Gambar 2.18	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-33
Gambar 2.19	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	II-34
Gambar 2.20	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin SUBOSUKAWONOSRATEN terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2020	II-34
Gambar 2.21	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019	II-35
Gambar 2.22	Perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2015-2020.....	II-35
Gambar 2.23	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terhadap Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020	II-36
Gambar 2.24	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2016-2019	II-36
Gambar 2.25	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terhadap Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020	II-37
Gambar 2.26	Perbandingan Angka IPM Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019	II-40
Gambar 2.27	Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2020.....	II-40
Gambar 2.28	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo	

	terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2019	II-41
Gambar 2.29	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–20120.....	II-42
Gambar 2.30	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	II-43
Gambar 2.31	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020	II-44
Gambar 2.32	Perbandingan IPG Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020.....	II-45
Gambar 2.33	Komponen Pembentuk IDG Tahun 2016-2020	II-45
Gambar 2.34	Perbandingan IDG Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020	II-46
Gambar 2.35	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kasus Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-56
Gambar 2.36	Angka Kematian Balita (AKABA) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-57
Gambar 2.37	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-58
Gambar 2.38	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun keatas di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	II-79
Gambar 2.39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-79
Gambar 2.40	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Se-SUBOSUKOWONOSRATEN.....	II-80
Gambar 2.41	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Sukoharjo	II-80
Gambar 2.42	Komponen Pembentuk Indeks Disparitas Gender Tahun 2016-2020.....	II-82
Gambar 2.43	Persentase Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sukoharjo	II-88
Gambar 2.44	Perkembangan IKLH Kabupaten ukoharjo Tahun 2016-2020....	II-89
Gambar 2.45	Grafik Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah per Hari.....	II-92
Gambar 2.46	Grafik Perubahan Total Produksi Tambang dan Luas Areal Galian Bahan Tambang Jenis Tanah Urug Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2019	II-132
Gambar 2.47	Grafik Luas Areal dan Produksi Pertambangan Berdasar Kecamatan.....	II-133
Gambar 2.48	Rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan penduduk Makanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019	II-143
Gambar 2.49	Rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan penduduk Bukan Makanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019	II-143
Gambar 2.50	Jumlah Orang atau Barang Yang Terangkut Angkutan Umum...	II-146
Gambar 2.51	Grafik Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Sukoharjo ..	II-147
Gambar 2.52	Peta Persebaran Tingkat Risiko Bencana Banjir Kabupaten Sukoharjo	II-151
Gambar 2.53	Peta Persebaran Tingkat Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Sukoharjo	II-153
Gambar 2.54	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020	II-155

Gambar 2.55	Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	II-155
Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-4
Gambar 3.2	Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.....	III-5
Gambar 3.3	Kontribusi/ Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-9
Gambar 3.4	Kontribusi/ Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020...	III-11
Gambar 3.5	Kontribusi / Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020.....	III-14
Gambar 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.....	V-14
Gambar 6.1	Skema Strategi Pencapaian Misi 1.....	VI-3
Gambar 6.2	Skema Strategi Pencapaian Misi 2.....	VI-9
Gambar 6.3	Skema Strategi Pencapaian Misi 3.....	VI-11
Gambar 6.4	Skema Strategi Pencapaian Misi 4.....	VI-14
Gambar 6.5	Skema Strategi Pencapaian Misi 5.....	VI-15
Gambar 6.6	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026.....	VI-26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis.

Pada akhir tahun 2020 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Sukoharjo. Setelah terpilih dan dilantik, maka kepala daerah terpilih harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Implementasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2005–2025, telah memasuki tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat. Tahapan

Pembangunan Lima Tahun Keempat ini menjadi bagian yang integral dengan visi dan misi dalam pemerintahan Bupati Sukoharjo periode 2021–2026 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RPJMD Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Bupati sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sukoharjo, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 diarahkan pada penguatan jalannya pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, terutama yang menekankan pada keterwujudan kualitas Sumber Daya Manusia, pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah, pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, yang didukung dengan tata pemerintahan yang baik dan aparatur yang profesional serta dalam rangka penguatan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tentram melalui penegakan supremasi hukum.

Dokumen RPJMD diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat dengan mengakomodir isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Beberapa isu diantaranya adalah isu lingkungan berupa kualitas lingkungan hidup, isu ekonomi berupa kemiskinan, isu sosial berupa pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta isu hukum dan tata kelola berupa akuntabilitas kelembagaan. Adapun isu lingkungan Kabupaten Sukoharjo diantaranya pencemaran, kekeringan, penguatan cadangan pangan, pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup dan sebagainya.

Sebagai pijakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun kedepan, maka pada RPJMD Tahun 2021-2026 tercantum indikasi rencana program prioritas tahunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun. Oleh karenanya RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada kurun waktu 2021-2026. RPJMD memuat tolok ukur kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun.

1.2. DASAR HUKUM

Terdapat beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang RPJMD khususnya, dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

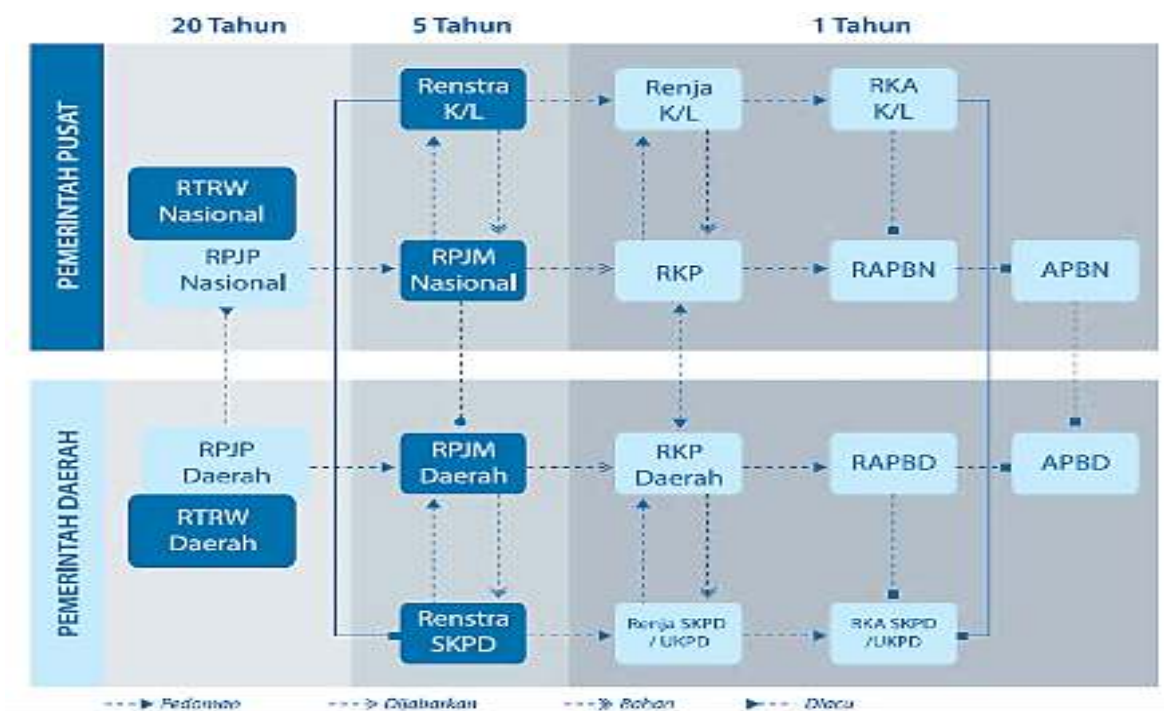
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Sukoharjo.

RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Keselarasan amanat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, dan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, ke dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut.

1. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan dengan tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020-2024, yang meliputi antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6-7,0%;
2. Tingkat inflasi sebesar 2,7%;
3. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,3%.

2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

a. Visi dan Misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi : **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 4 (empat) misi pembangunan, sebagai berikut :

1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2) Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsive diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya.

Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4) Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai

lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

b. Program Unggulan

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga didukung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu :

1) Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK

Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

2) Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama

Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

3) Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

4) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan.

Bantuan desa merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di 7.809 desa dan 750 kelurahan di Jawa Tengah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri.

5) Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda

Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar pendapatan asli daerah.

Program ekonomi lainnya adalah program kemudahan akses kredit UMKM yaitu program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa.

Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan startup wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja.

6) Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya.

Untuk program melindungi kepentingan nelayan adalah rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar.

7) Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri.

8) Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk pengembangan rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan dengan integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistic perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F (*food, feed, fuel, fertilizer, fiber*). Selain itu juga mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (*mayor sektoral*) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), integrasi berbasis organisasi pertanian contoh pertanian organik, gula semut, serta kawasan pertanian terintegrasi berbasis unggulan.

9) Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigm kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan

upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit.

Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat. Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Selain itu program lainnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan.

10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Program festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.

Program pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan meningkatkan masyarakat

tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

3. Amanat RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukoharjo yaitu “**Sukoharjo Yang Maju, Adil, dan Makmur**” diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

Adapun skala prioritas pembangunan daerah untuk RPJMD tahap IV dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.**
 - 1) Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional;
 - 2) Pemantapan mutu pendidikan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional;
 - 3) Pemantapan mutu kurikulum pendidikan sesuai dengan pangsa pasar kerja;
 - 4) Pemantapan penguasaan IPTEK oleh SDM yang handal di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
 - 5) Pemantapan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan, dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
- b. **Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.**
 - 1) Pemantapan struktur perekonomian daerah dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global;
 - 2) Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung sektor perindustrian dan perdagangan dan pariwisata yang mempunyai keunggulan di bidang teknologi informasi dalam rangka bersaing di pasar global;
 - 3) Pemantapan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
 - 4) Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agro industri guna menjamin ketahanan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pembangunan daerah;

- 5) Pemantapan pendayagunaan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang lebih besar dalam rangka penghematan sumber energi berbahan dasar fosil.

c. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

- 1) Pemantapan peran kawasan lindung dan budidaya termasuk didalamnya kawasan industri, pertanian dan kawasan lainnya berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah sehingga efisien, efektif, memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- 2) Penguatan peran rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam penetapan insentif dan disinsentif investasi pembangunan serta mengendalikan konversi lahan pertanian dan perubahan tataguna lahan lainnya;
- 3) Pemantapan kerjasama antar wilayah dalam penataan dan penanganan permasalahan tata ruang secara terkoordinasi;
- 4) Pemantapan kesadaran pemerintah, badan usaha, lembaga sosial dan masyarakat dalam hal kepastian hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau lainnya didukung cepatnya proses pengurusan sertifikat tanah;
- 5) Pemantapan pemenuhan kebutuhan sarana umum, sosial dan ekonomi untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan mengoptimalkan aset-aset daerah;
- 6) Pemantapan pemerataan kuantitas dan kualitas pembangunan prasarana dasar;
- 7) Pemantapan jaringan jalan dan jembatan sehingga tidak terdapat wilayah yang terisolasi
- 8) Pemantapan jaringan transportasi yang terus menerus, terpadu, aman dan nyaman lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan;
- 9) Pemantapan sumber air melalui mekanisme perijinan yang baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga kelestariannya dengan mengembangkan jaringan air bersih;
- 10) Pemantapan kualitas air bersih yang dihasilkan oleh PDAM menjadi air minum;
- 11) Pemantapan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dan menunjang produktifitas pertanian penghasil komoditi ekspor dan bahan baku industri serta menerapkan system pertanian yang hemat dalam penggunaan air;
- 12) Pemantapan pasokan listrik dan menjaga stabilitas tegangan, pengawasan jaringan dan meniadakan terjadinya pencurian listrik;

- 13) Pemantapan sistem jaringan prasarana dasar, desain bangunan, peralatan maupun proses produksi yang hemat energi dan mendorong pengembangan sumber energi alternatif;
- 14) Pemantapan memanfaatkan jaringan internet untuk menunjang informasi pembangunan secara umum, pengembangan ekonomi, IPTEK dan informasi lainnya dengan tetap mengupayakan minimalisasi dampak negatif yang berkembang seperti game online, pornografi dan sebagainya;
- 15) Pemantapan sistem informasi kebijakan pembangunan dalam hal database, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya mudah diakses dan real time;
- 16) Pemantapan jaringan drainase, sistem sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah yang ramah lingkungan dan terpadu serta Pemantapan peran masyarakat melalui pengolahan sampah dan limbah rumah tangga menjadi kompos dan sumber energi biogas;
- 17) Pemantapan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya;
- 18) Pemantapan jaringan gas sebagai bahan bakar utama industri makanan dan rumah tangga di perkotaan;
- 19) Pemantapan keterpaduan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan antara pengembang dan pemerintah sehingga sinergis dalam pengembangan wilayahnya;
- 20) Pemantapan peran serta masyarakat dan swasta dalam membangun fasilitas hunian berupa rumah tinggal individu maupun rumah susun ataupun rumah sewa lainnya;
- 21) Pemantapan pembangunan untuk menghindari munculnya permukiman kumuh di perkotaan dengan memfasilitasi upaya perbaikan rumah dan lingkungannya;
- 22) Peningkatan tata bangunan dan lingkungan perumahan yang sehat asri dan hemat energi;
- 23) Pemantapan taman bermain secara hirarkhial untuk tiap-tiap jenjang lingkungan permukiman serta peningkatan kuantitas dan kualitas *public space* yang ada sebagai wadah aktifitas publik bagi masyarakatnya;
- 24) Pemantapan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) diperkotaan pada *public space* yang ada serta jalur hijau, sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalan kereta api dan sebagainya untuk menjaga kualitas ekologi perkotaan;
- 25) Pemantapan pembangunan elemen rancang kota untuk mendukung Penguatan fungsi identitas wilayah, efisien sekaligus produktif, hemat energi, ekologis, berkelanjutan dan arsitektural dengan mentaati peraturan tata ruang serta tata bangunan yang ada.

d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 1) Penguatan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjalankan fungsi birokrasi dan administrasi pemerintahannya;
 - 2) Pemantapan reformasi birokrasi;
 - 3) Penguatan sanksi bagi penyalahgunaan kewenangan aparatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - 4) Penguatan *capacity building* kelembagaan dan personal untuk meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
 - 5) Pemantapan sistem informasi pemerintahan secara internal maupun eksternal dengan memanfaatkan jaringan internet dan media komunikasi lainnya;
 - 6) Pemantapan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis;
 - 7) Pemantapan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan;
 - 8) Pemantapan kemitraan strategis yang mendukung market (pasar) terhadap produk unggulan di pasar domestik maupun internasional.
- e. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.**
- 1) Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum;
 - 2) Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila;
 - 3) Pemantapan kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum;
 - 4) Pemantapan sistem pada kelembagaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penegakan supremasi hukum bagi terwujudnya keamanan, kedamaian, ketertiban dan ketentraman Pembangunan di segala bidang.
 - 5) Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.

4. Amanat Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kabupaten Sukoharjo terkait pemanfaatan ruang, baik dari sisi rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan kawasan strategis, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas. Adapun Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki meliputi:

- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- d. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, dan wisata secara berkelanjutan;
- e. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan;
- f. membentuk pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhierarki;
- g. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan dengan perdesaan secara sinergis; dan
- h. mendorong kawasan perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah meliputi:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi menghubungkan wilayah pertumbuhan dengan ibukota Kabupaten;
- c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- e. meningkatkan pelayanan dan prasarana jaringan penyediaan air dan sanitasi; dan
- f. meningkatkan prasarana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah meliputi:

- a. pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi; dan
- b. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian, industri dan permukiman serta pariwisata.

Strategi pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi meliputi:

- a. melestarikan kawasan lindung;
- b. mengembangkan mekanisme insentif dan
- c. disinsentif pada kawasan lindung;
- d. meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung;
- e. meningkatkan nilai dan fungsi kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, dan pendidikan; dan
- f. mencegah perkembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung.

Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian, industri dan permukiman serta pariwisata meliputi:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan
- b. produktifitas;
- c. mencegah alih fungsi lahan pada sawah beririgasi teknis;
- d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pada lahan pertanian pangan
- e. berkelanjutan;
- f. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perkebunan dengan kegiatan pertanian dan peternakan;
- g. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perikanan dengan kegiatan
- h. peternakan;
- i. mengembangkan kegiatan budidaya peternakan;

- j. mengembangkan lahan pada area bekas pertambangan;
- k. meningkatkan sarana prasarana pendukung kawasan industri;
- l. meningkatkan sarana prasarana penunjang pariwisata;
- m. mengembangkan permukiman perdesaan dan perkotaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat; dan
- n. mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan sesuai karakteristik fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis berupa pengembangan pemanfaatan ruang untuk fungsi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Strategi pengembangan pemanfaatan ruang untuk fungsi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai simpul utama kegiatan skala Kabupaten;
- b. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan di kawasan sekitarnya;
- c. meningkatkan kawasan industri sebagai pusat kegiatan industri; dan
- d. mengembangkan kawasan pertanian sebagai kawasan agropolitan.

5. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

6. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

7. Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 4) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 5) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Sukoharjo, 6) RAD Pangan dan Gizi

Kabupaten Sukoharjo, 7) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sukoharjo, 8) RAD Pengurangan Resiko Bencana, 9) Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten Sukoharjo, 10) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, 11) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan 12) Aksi Penanganan Konflik Sosial. Dan dalam proses penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Secara jelas, hubungan antara dokumen sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

NO	Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025)	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023		RPJMN 2020-2024	
			Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi MISI RPJMN	Agenda Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Visi	<i>Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur</i>	<i>Sukoharjo Yang Maju, Adil, dan Makmur</i>	<i>Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i>		<i>Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i>	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.	2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.	4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.	1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK	1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

NO	Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025)	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023		RPJMN 2020-2024	
			Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi MISI RPJMN	Agenda Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel</p> <p>10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan</p>	4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni	kepribadian bangsa.	
3	Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi	2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan	3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	<p>5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda</p> <p>6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani</p>	2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

NO	Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025)	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023		RPJMN 2020-2024	
			Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi MISI RPJMN	Agenda Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		berorientasi pada ekonomi kerakyatan.		serta melindungi kepentingan nelayan 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi		
4	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.	3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi	3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.	2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

NO	Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026	RPJMD Tahap IV (RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025)	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023		RPJMN 2020-2024	
			Visi Misi RPJMD Provinsi	Program Unggulan	Visi MISI RPJMN	Agenda Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan	4. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.	1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI	2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama	7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.	4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sumber : Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2021

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

- a) Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
- b) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2021-2026;
- c) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
- d) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- e) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota berbatasan); serta
- f) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RANCANGAN RPJMD

Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Sukoharjo meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

BAB IV PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif

Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 110° 57' 33,70" BT – 110° 42' 6,79" BT, dan antara 7° 32' 17,00" LS – 7° 39' 42,00" LS. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Sukoharjo berada di sebelah selatan Kota Surakarta. Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

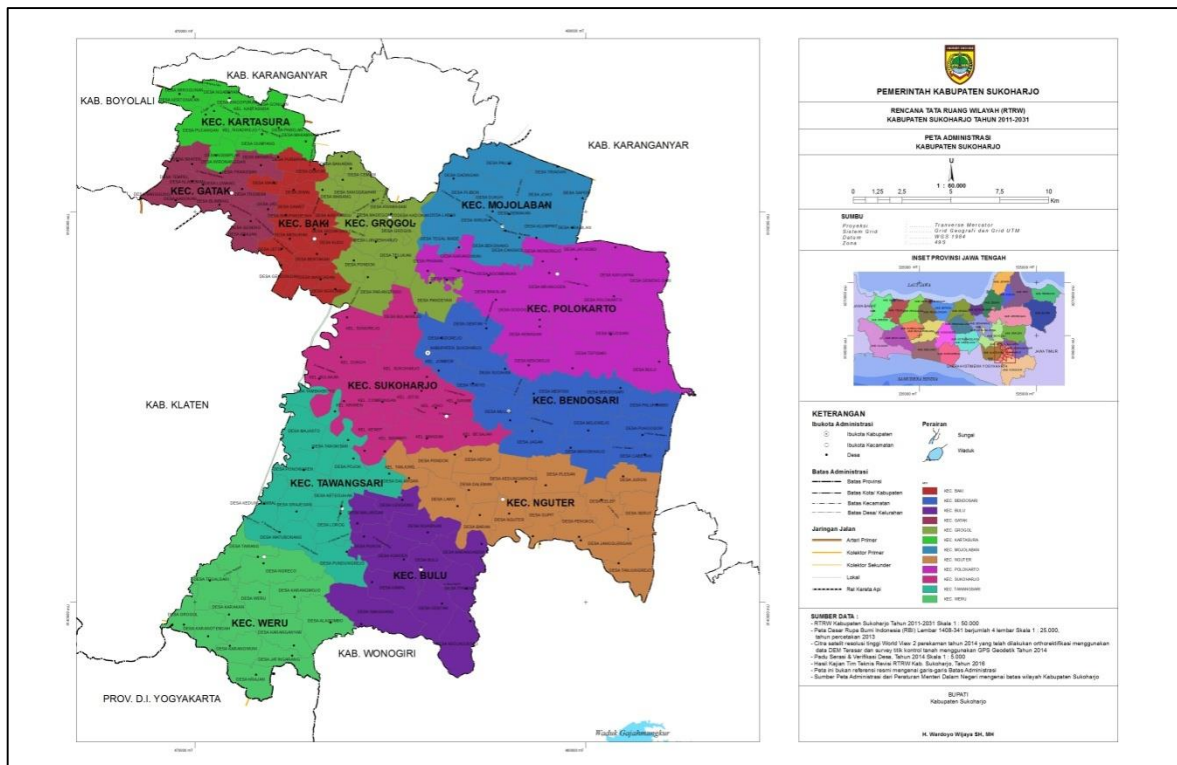
Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada:

- Permendagri 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY).
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri.
- Permendagri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Dengan Kota Surakarta Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta.
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar.
- Permendagri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali.
- Permendagri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten Provinsi Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan pada Permendagri di atas dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, maka luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah seluas 49.323 hektar.

Sedangkan mengenai letak masing-masing kecamatan dan perbatasan wilayah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo



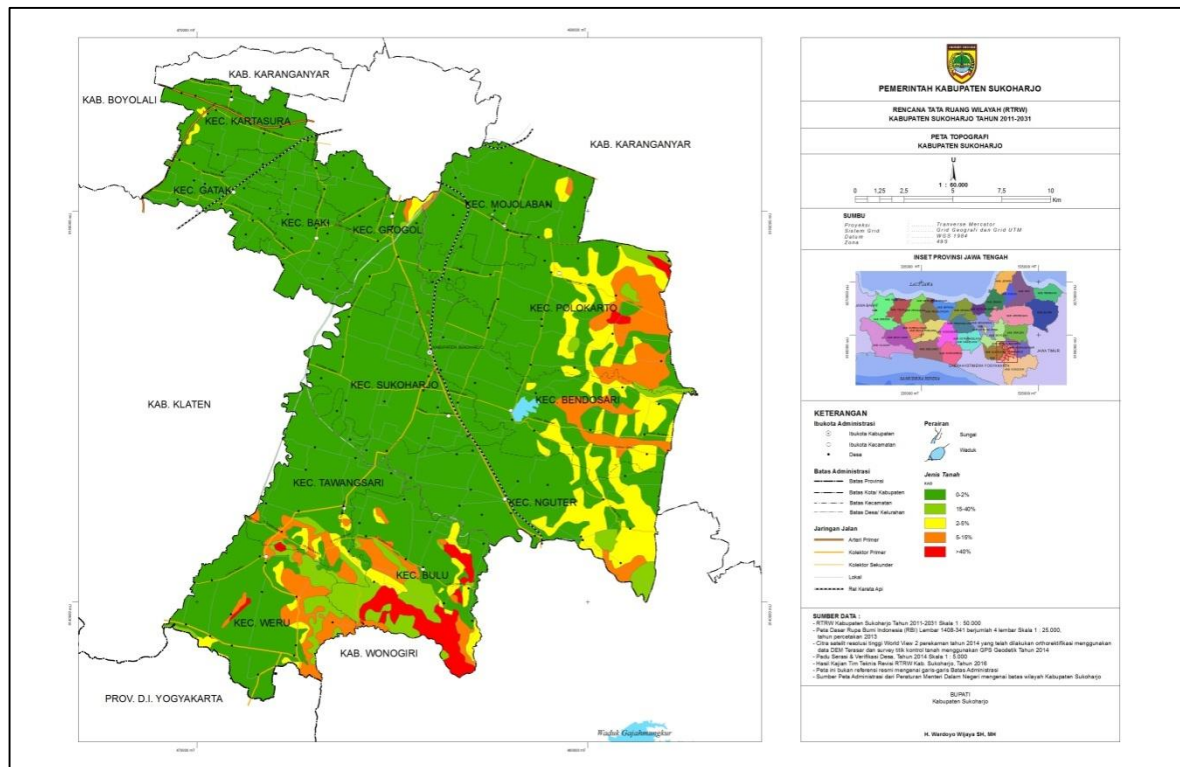
Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

2.1.2. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa dataran (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban) serta kawasan berbukit-bukit (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Tawangsari, Bulu, dan Weru). Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80 m – 125 m dpml, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Polokarto.

Jika diperhatikan Gambar 2.2. berikut, Kabupaten Sukoharjo memiliki dua kelompok besar kelerengan yaitu kelerengan landai dan kelerengan curam. Kelerengan landai memiliki kisaran kelerengan (0-8%) yang terdapat Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawangsari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Sukoharjo Grogol, dan Kartasura. Kelerengan agak landai (8-15%) terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Mojolaban, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawangsari. Sedangkan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawangsari memiliki kelerengan yang beragam karena terdiri dari kelerengan landai dan curam.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo



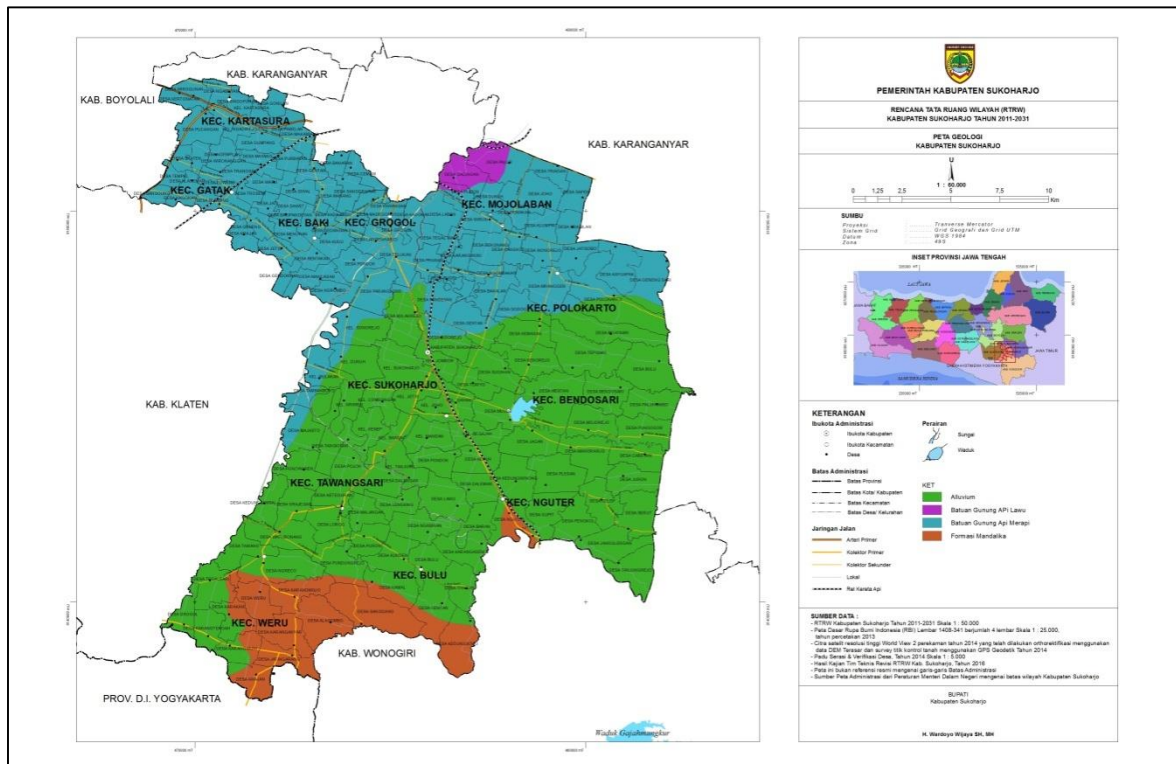
Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

2.1.3. Geologi

Ditinjau dari segi geologi terdapat empat jenis batuan yang menyusun wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu Alluvium, Batuan Gunung Api Merapi, Batuan Gunung Api Lawu dan Formasi Mandalika. Berdasarkan peta persebaran geologi di Kabupaten Sukoharjo terlihat bahwa:

- Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari dan sebagian Kecamatan Polokarto merupakan tanah Alluvium. Tanah Alluvium merupakan tanah hasil erosi yang diendapkan di dataran rendah. Ciri-ciri Tanah Alluvium adalah berwarna kelabu dan subur. Tanah ini cocok untuk tanaman padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau, dan buah-buahan.
- Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, serta sebagian kecil Kecamatan Polokarto merupakan tanah pada kawasan tersebut merupakan tanah yang subur.
- Kecamatan Weru serta sebagian Kecil Kecamatan Nguter merupakan tanah Formasi Mandalika. Tanah Formasi Mandalika merupakan salah satu formasi geologi di Pegunungan selatan Jawa Bagian Timur. Formasi ini tersusun atas breksi gunung api, lava dan tuff, sisipan batu pasir dan batu lanau.
- Tanah dengan jenis batuan Gunung Api Lawu terdapat pada sebagian kecil Kecamatan Mojolaban.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Sukoharjo



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

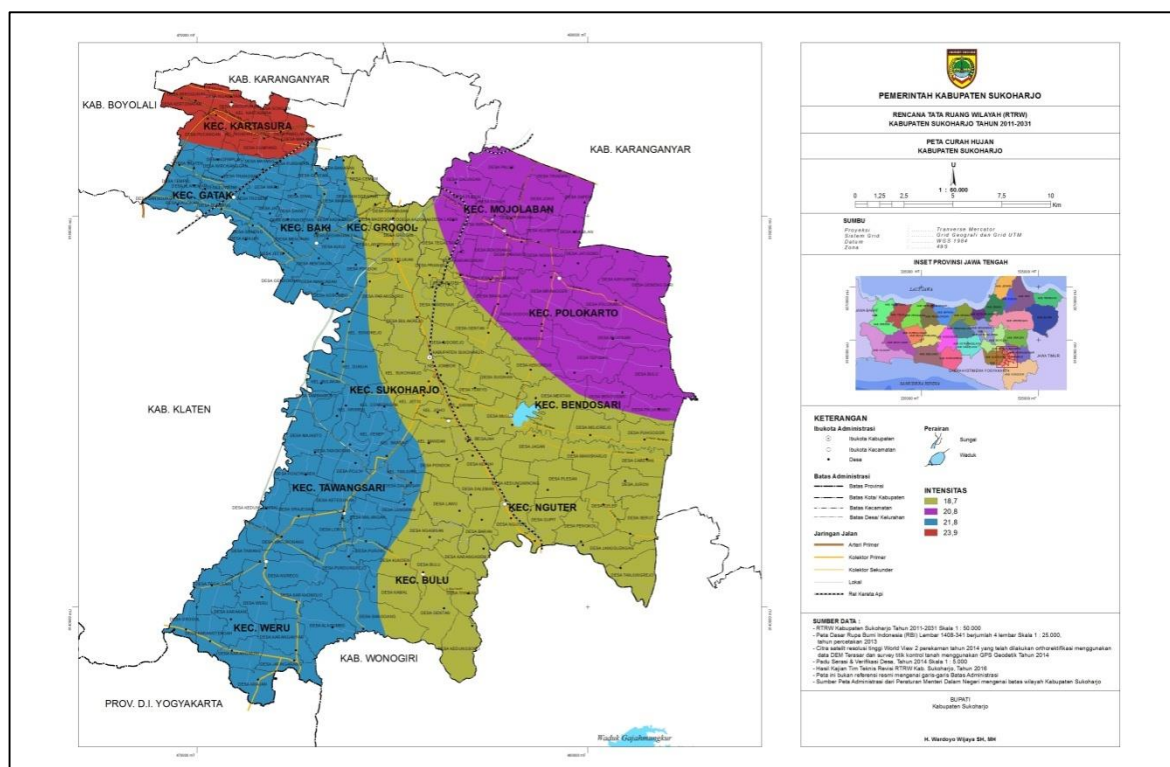
2.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan oleh keberadaan sumber daya air yang ada di Kabupaten Sukoharjo, meliputi sungai, mata air, waduk, dan embung. Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Pengembangan Sungai (DPS) Solo Hulu, Samin, dan Dengkeng yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing, dan Sungai Walikan. Kabupaten Sukoharjo dibelah sungai Bengawan Solo, dimana topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagian besar berada dibawah tanggul Sungai Bengawan Solo.

Permasalahan regional menyangkut keberadaan Sungai Bengawan Solo adalah permasalahan banjir yang tidak terlepas dari kondisi drainase. Ketika sungai meluap maka wilayah sepanjang saluran pasti akan tergenangi bagaimanapun baiknya saluran irigasi lokal yang ada tidak akan mampu mengatasi masalah ini. Maka yang perlu dilakukan nantinya adalah kerjasama dengan dengan kabupaten lain yang berada di hulu Bengawan Solo yaitu Kabupaten Wonogiri. Saat ini terdapat satu waduk yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yakni Waduk Mulur, yang mampu menampung air sejumlah kurang lebih 3.435.000 m³ dan mengairi sawah seluas 4.787 Ha. Disamping itu juga terdapat Dam Colo yang mengairi lahan seluas kurang lebih 10.577 hektar.

Mata air yang ada di Kabupaten Sukoharjo berlokasi di Banyubiru di Kecamatan Weru, Pecinan di Kecamatan Bulu, Kluyon di Kecamatan Baki, Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari, dan Wirogunan serta Gayampitu di Kecamatan Kartasura. Sedangkan embung-embung terdapat di Kecamatan Bulu (Desa Gentan, Tiyaran dan Kedungsono),

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Curah hujan rata-rata pada Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data yang tersedia tercatat berkisar 1.000 – 2.500 mm. Kabupaten Sukoharjo terbagi pada 3 kategori intensitas curah hujan, antara 1.000 – 1.500 mm, 1.500 – 2.000 mm dan 2.000 – 2.500 mm. Wilayah dengan intensitas curah hujan terbesar di Kabupaten Sukoharjo terdapat pada Kecamatan Kartasura, sedangkan wilayah dengan intensitas curah hujan sedang terdapat pada Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Weru, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto serta sebagian Kecamatan Sukoharjo, wilayah dengan intensitas curah hujan terendah terdapat pada Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bulu dan sebagian Kecamatan Bendorari.

Tabel 2.1.
Banyaknya Curah Hujan Tahunan per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Weru	2.977	2.132	1.594	1.970	2.161
Bulu	3.918	2.244	1.685	1.613	1.833
Tawang Sari	3.243	1.738	1.413	1.688	2.230
Sukoharjo	2.776	2.447	1.665	1.417	2.103
Nguter	2.697	1.902	1.897	1.564	2.249
Bendorari	3.173	2.413	1.687	1.471	1.951
Polokarto	2.141	1.650	1.984	1.006	1.852
Mojolaban	3.187	2.902	2.617	2.063	4.072
Grogol	3.480	1.809	1.555	1.599	2.048
Baki	2.874	2.137	1.689	1.351	1.779
Gatak	2.424	2.107	1.259	1.264	1.703

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kartasura	3.287	2.889	1.867	2.473	2.528

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati yang menunjukkan bahwa sekitar 42% luasan Kabupaten Sukoharjo memiliki jasa ekosistem sedang dan 24,14% luasan termasuk jasa ekosistem sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo cukup mampu dalam menyediakan ruang hidup untuk tumbuh dan berkembang bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selain itu, untuk melestarikan dan menjaga keanekaragaman hayati juga perlu dilakukan upaya dalam menjaga keseimbangan biodiversitas.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Menurut RTRW, luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 49.323,30 hektar atau sekitar 1,5% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Data Penggunaan lahan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

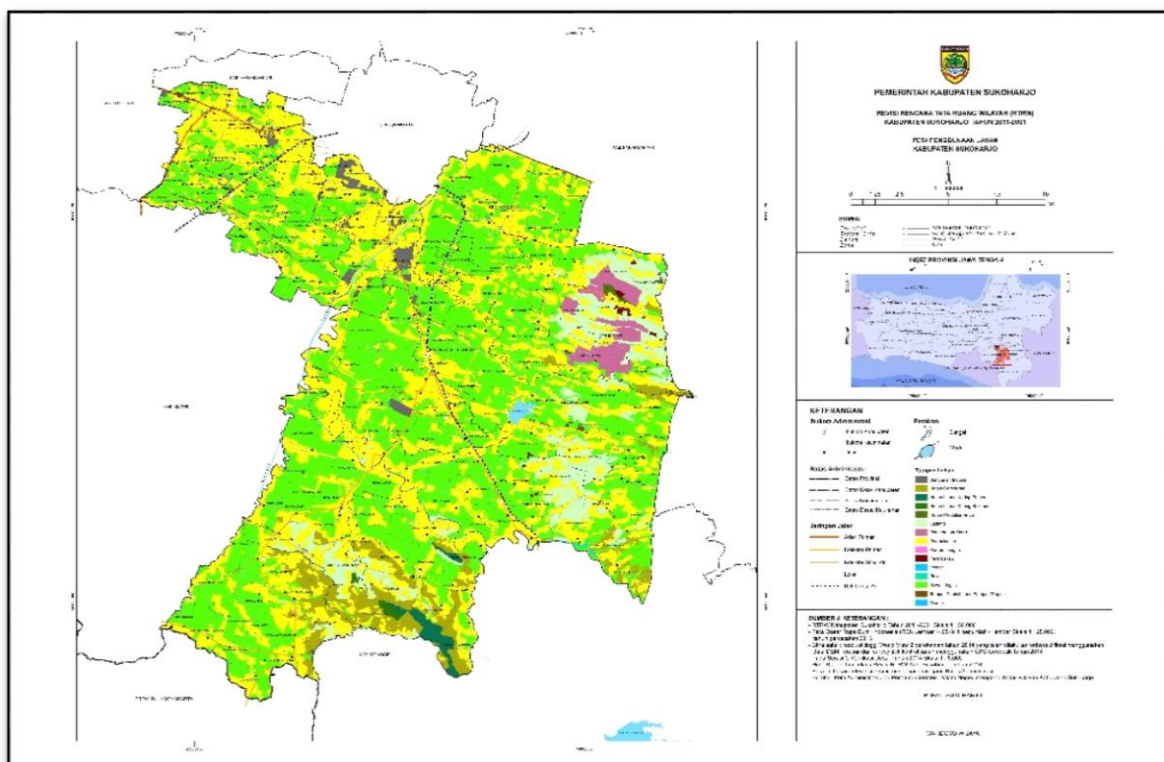
Tabel 2.2.
Tabel Penggunaan Lahan Kabupaten Sukoharjo

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Industri	591,36
2	Hutan	2.547,83
3	Ladang	3.121,69
4	Perkebunan	781,05
5	Pertambangan	1,33
6	Peternakan	88,30
7	Permukiman	20.189,97
8	Sawah	21.664,64
9	dan lain-lain	337,14
Jumlah		49.323,30

Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Menurut data Perda No. 1 Tahun 2018, penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo 43,92% (21.665 ha) digunakan sebagai lahan sawah, sebesar 40,93% (20.190 ha) merupakan lahan permukiman sedangkan sisanya sebesar 15,15% (7.467 ha) digunakan untuk penggunaan lahan selain sawah dan permukiman. Penggunaan lahan ini perlu dikendalikan dari tahun ke tahun apalagi dengan adanya perkembangan industrialisasi di Kabupaten Sukoharjo. Lahan pertanian khususnya untuk penyediaan pangan berkelanjutan harus dijaga agar tetap lestari. Berikut adalah peta penggunaan lahan yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo:

Gambar 2.6
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sukoharjo



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Menurut fungsinya, penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung adalah kawasan yang memiliki fungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Berdasarkan fungsi tersebut maka luas kawasan budidaya dan kawasan lindung Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Luas Penggunaan Lahan Menurut Fungsi Kawasan

Jenis Kawasan	Luas Lahan (ha)	Persentase (%)
Kawasan Budidaya	46.516,93	94,345
Industri	591,359	1,199
Ladang	3.121,691	6,329
Pertambangan	1,332	0,003
Peternakan	88,298	0,179
Perkebunan	781,05	1,584
Sawah Irigasi	21.664,643	43,924
Tempat Penimbunan Sampah/Deposit	8,096	0,016
Permukiman	20.189,97	40,934
Hutan Produksi Tetap	38,246	0,078
Hutan Lahan Kering Sekunder	70,495	0,1
Kawasan Lindung	2.441,304	4,993
Hutan Campuran	2.134,716	4,328

Jenis Kawasan	Luas Lahan (ha)	Persentase (%)
Hutan Lahan Kering Primer	304,372	0,617
Polder	2,216	0,004
Lain-Lainnya	326,826	0,663
Rawa	24,867	0,050
Waduk	99,834	0,202
Sungai	202,124	0,410
Total Luas (ha)	49.323,306	100

Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Kawasan budidaya mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo dengan persentase sebesar 94,345% luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menandakan bahwa lahan di Kabupaten Sukoharjo banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ekonomi. Kawasan lindung perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mengendalikan pembangunan. Upaya paling mudah yang dapat diimplementasikan yaitu meningkatkan persentase ruang terbuka hijau baik publik ataupun privat.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya. Potensi wilayah tersebut terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031, meliputi:

1. Arah pengembangan Struktur Ruang

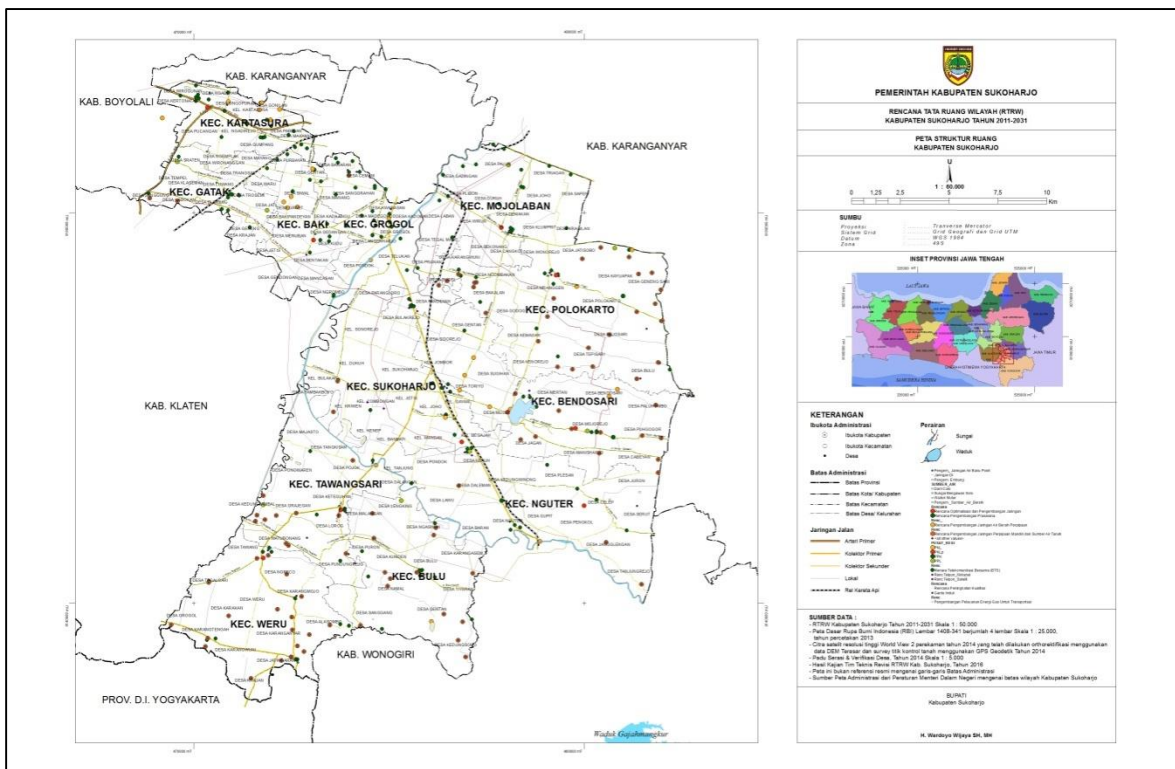
Pengembangan struktur ruang berupa pengembangan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang dikategorikan berdasar sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana.

a. Sistem perkotaan meliputi:

- 1) PKL (Pusat Kegiatan Lokal) memiliki cakupan skala layanan tingkat kabupaten atau regional terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura dan Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo.
- 2) PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kecamatan atau lintas kecamatan, terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan: Grogol, Mojolaban, Tawang Sari, Gatak, Baki, Polokarto, Bendosari, Nguter, Weru dan Bulu.
- 3) PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kawasan perdesaan, terdiri atas: Palur (Mojolaban), Sragen dan Jati (Gatak), Lengking (Bulu), Kayuapak (Polokarto), Jatingarang (Weru), Kepuh (Nguter), Mojorejo (Bendosari) dan Kedungjambal (Tawang Sari).

- b. Adapun sistem jaringan prasarana yang akan dikembangkan meliputi:
- 1) Sistem jaringan transportasi, terdiri atas sistem jaringan jalan, sistem jaringan KA dan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
 - 2) Sistem jaringan energi, terdiri atas jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - 3) Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas jaringan tetap dan jaringan bergerak.
 - 4) Sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas sumber air, prasarana sumber daya air, jaringan air baku untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
 - 5) Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas: sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase.

Gambar 2.7
Peta Struktur Ruang Kabupaten Sukoharjo



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

2. Arah Pengembangan Pola Ruang

a. Kawasan Budidaya

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031 kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan pertanian pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi
Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 70 hektar. Kawasan ini berada di Kecamatan Bulu dan Tawang Sari.
- 2) Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 3.500 hektar. Kawasan ini tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Weru, Tawang Sari, Bulu, Nguter, Bendosari dan Polokarto.
- 3) Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan pertanian Kabupaten Sukoharjo secara garis besar terbagi atas 4 peruntukan yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 26.864 hektar di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari pertanian lahan basah dan lahan kering. Untuk pertanian lahan basah memiliki luas 23.502 hektare dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sedangkan untuk pertanian lahan kering seluas 3.362 hektar hanya tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Polokarto, Weru, Bulu dan Tawang Sari. Kawasan peruntukan pertanian pangan di Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh KP2B seluas 23.742 hektar dengan pembagian 20.814 hektar untuk lahan basah dan 2.928 hektar untuk lahan kering. Kawasan peruntukan hortikultura tersebar pada lingkungan permukiman seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 708 hektar hanya terletak di Kecamatan Polokarto. Kawasan peruntukan peternakan seluas 249 hektar tersebar di Kecamatan Nguter, Polokarto, Bendosari, Weru dan Tawang Sari.
- 4) Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 194 hektar. Kawasan ini terbagi atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya air tawar. Untuk kawasan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah kabupaten sedangkan kawasan perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan yang berada pada kawasan permukiman.
- 5) Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 2 jenis yaitu penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan serta penambangan batu kapur. Lokasi penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan berupa tanah urug seluas 166 hektar tersebar di Kecamatan Bendosari, Nguter, Weru dan Polokarto. Untuk penambangan batu kapur hanya terletak di Kecamatan Weru.
- 6) Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri Kabupaten Sukoharjo dialokasikan seluas 2.351 hektar. Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Bulu, Weru dan Baki. Pengembangan industri ini diarahkan di Kecamatan Nguter dan Bendosari. Untuk industri rumah tangga tersebar di lingkungan sekitar permukiman seluruh kecamatan.

- 7) Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan peruntukan wisata di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 65 hektar. Kawasan ini terdiri atas kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Kawasan wisata alam di Kabupaten Sukoharjo terletak di Gunung Taruwangsa, Kecamatan Tawang Sari dan Batu Seribu, Kecamatan Bulu. Kawasan wisata budaya di Kabupaten Sukoharjo meliputi wisata situs bersejarah, wisata religi/ziarah dan wisata benda cagar budaya. Wisata-wisata tersebut banyak tersebar di Kecamatan Kartasura, Grogol, Weru, Bendosari dan Tawang Sari. Untuk kawasan wisata buatan secara garis besar memiliki bentuk berupa pariwisata kreatif dan wisata air. Pariwisata kreatif berupa desa dan kelurahan binaan yang memiliki potensi produk kreatif tersebar di Kecamatan Sukoharjo, Baki, Mojolaban dan Gatak sedangkan wisata air yang terletak di Bendosari berupa daya tarik wisata Waduk Mulur.
- 8) Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan permukiman di Kabupaten Sukoharjo seluas 17.102 hektar terbagi atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Untuk kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 14.077 hektar tersebar di desa/kelurahan di kawasan perkotaan seluruh kecamatan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas 3.025 hektar tersebar di seluruh kawasan perdesaan Kabupaten Sukoharjo.
- 9) Kawasan peruntukan lainnya
Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan ini memiliki luas 127 hektar meliputi Grup 2 Kopassus di Kecamatan Kartasura, Brigif 6/Kostrad dan Batalyon Infanteri 413/Bremoro di Kecamatan Mojolaban.

b. Kawasan Lindung

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031, kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi.

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Dalam RTRW, Kabupaten Sukoharjo memiliki kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 297 hektar yang berada di Kecamatan Bulu.
- 2) Kawasan perlindungan setempat
 - a) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air. Sempadan sungai memiliki luas kurang lebih 1.173 hektar meliputi garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dan sungai kecil dan/atau DAS dan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan. Sempadan

sungai tersebut melintasi wilayah Kecamatan Mojolaban, Grogol, Bendosari, Sukoharjo dan Nguter.

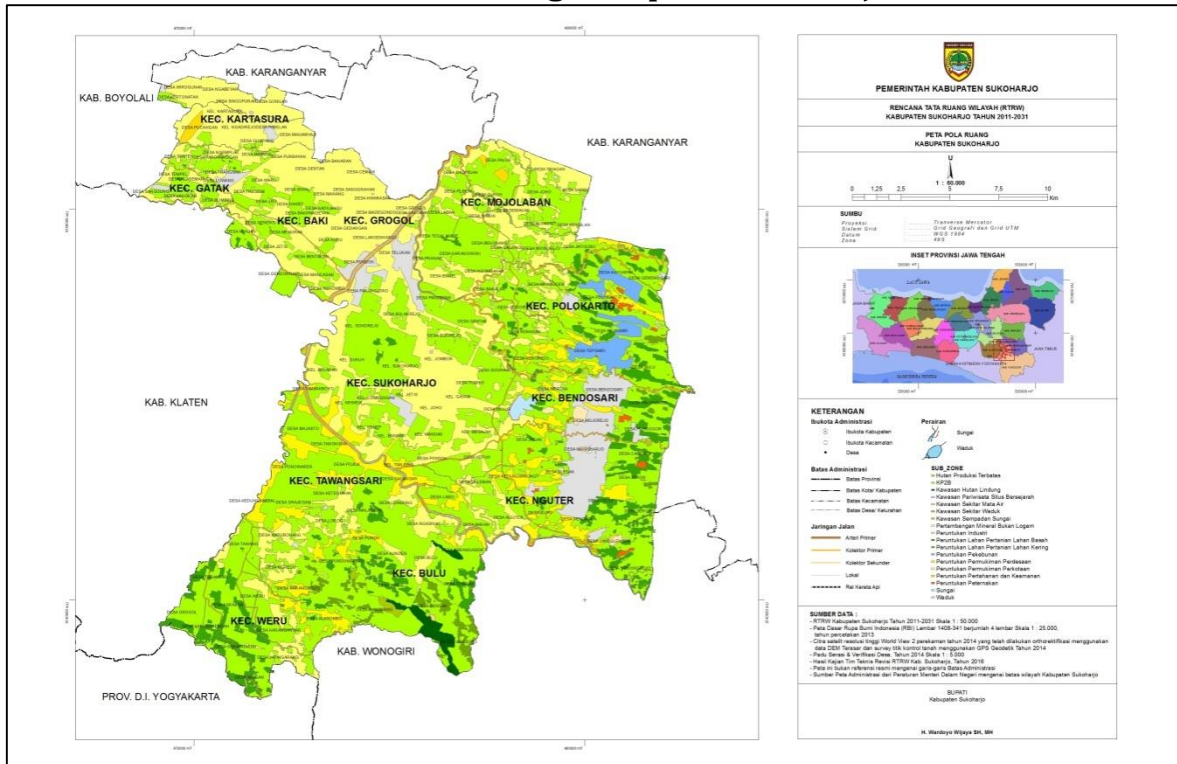
- b) Kawasan sekitar waduk yaitu kawasan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi berupa Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari.
 - c) Kawasan sekitar mata air dengan luas kurang lebih 7 hektar berupa kawasan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air meliputi mata air Pecinan di Kecamatan Bulu, mata air Baseng di Kecamatan Bulu, mata air Kamal di Kecamatan Bulu, mata air Sirahan di Kecamatan Bulu, mata air Kluyon di Kecamatan Baki, mata air Banyubiru di Kecamatan Weru, mata air Kedungdowo di Kecamatan Weru, mata air Kedunggandong di Kecamatan Weru, mata air Beji Jatingarang di Kecamatan Weru, mata air Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari, mata air Desa Wirogunan di Kecamatan Kartasura dan mata air Gayam Pitu di Kecamatan Kartasura.
- 3) Kawasan rawan bencana
- a) Kawasan rawan bencana kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin ribut, dan kawasan rawan kekeringan. Kawasan rawan bencana longsor terdiri atas rawan longsor perbukitan seluas kurang lebih 1.846 hektar di Kecamatan Bulu dan Weru serta rawan erosi sungai yang meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawang Sari, Grogol, dan Mojolaban.
 - b) Kabupaten Sukoharjo juga merupakan daerah yang rawan akan bencana angin ribut meliputi Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, Polokarto, dan Gatak.
 - c) Kawasan rawan bencana banjir ada di daerah Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawang Sari, Gatak, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Kartasura dan Baki. Selain rawan bencana banjir, terdapat beberapa daerah yang justru rawan terjadi bencana kekeringan. Daerah yang dimaksud meliputi Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, Tawang Sari, Gatak, Bendosari, dan Polokarto.
- 4) Kawasan lindung geologi
Kawasan lindung geologi Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan imbuhan air tanah Cekungan Karanganyar – Boyolali.

Tabel 2.4.
Ketersediaan Air Bersih Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Tahun	Kebutuhan air per kapita	Kemampuan Menyediakan per kapita
2016	38 m ³ /tahun	29.02 m ³ /tahun
2017	36,1 m ³ /tahun	30.00 m ³ /tahun
2018	36,2 m ³ /tahun	32.07 m ³ /tahun
2019	37,4 m ³ /tahun	32.64 m ³ /tahun
2020	37,7 m ³ /tahun	33.67 m ³ /tahun

Sumber : Analisis Berdasarkan Data Curah Hujan, 2020

Gambar 2.8
Peta Pola Ruang Kabupaten Sukoharjo



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Menurut RTRW, Kabupaten Sukoharjo memiliki daerah dengan empat jenis kerawanan bencana. Jenis kerawanan bencana tersebut antara lain kerawanan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan cuaca ekstrem. Beberapa bencana telah mengakibatkan beberapa kerugian.

Berdasarkan tabel di bawah ini, sebagian besar kerawanan bencana telah mengakibatkan kerugian terutama secara material. Kerugian paling besar terjadi pada tahun 2019 pada bencana cuaca ekstrem. Pada tahun 2020, seluruh bencana mengakibatkan kerugian material. Walaupun tidak ada korban jiwa, perlu upaya peningkatan mitigasi bencana untuk meminimalisir kerugian material.

Tabel 2.5.
Jenis Kerawanan Bencana dan Risiko Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017-2020

Jenis Bencana/ Daerah Bencana	Resiko							
	2017		2018		2019		2020	
	Nilai Kerugian (dalam juta rupiah)	Jml Korban Jiwa	Nilai Kerugian (dalam juta rupiah)	Jml Korban Jiwa	Nilai Kerugian (dalam juta rupiah)	Jml Korban Jiwa	Nilai Kerugian (dalam juta rupiah)	Jml Korban Jiwa
Banjir								
Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban	10	0	0	0	0	0	50	0
Tanah longsor								
Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari.	32	0	0	0	20	0	60	0
Kekeringan								
Kecamatan Weru, Tawang Sari dan Bulu	0	0	20,1	0	145,6	0	58,05	0
Bencana Cuaca Ektrem								
Kecamatan Nguter, Sukoharjo, Bulu, Weru, Polokarto dan Gatak	436,2	0	447	0	2.239,5	0	228,6	0

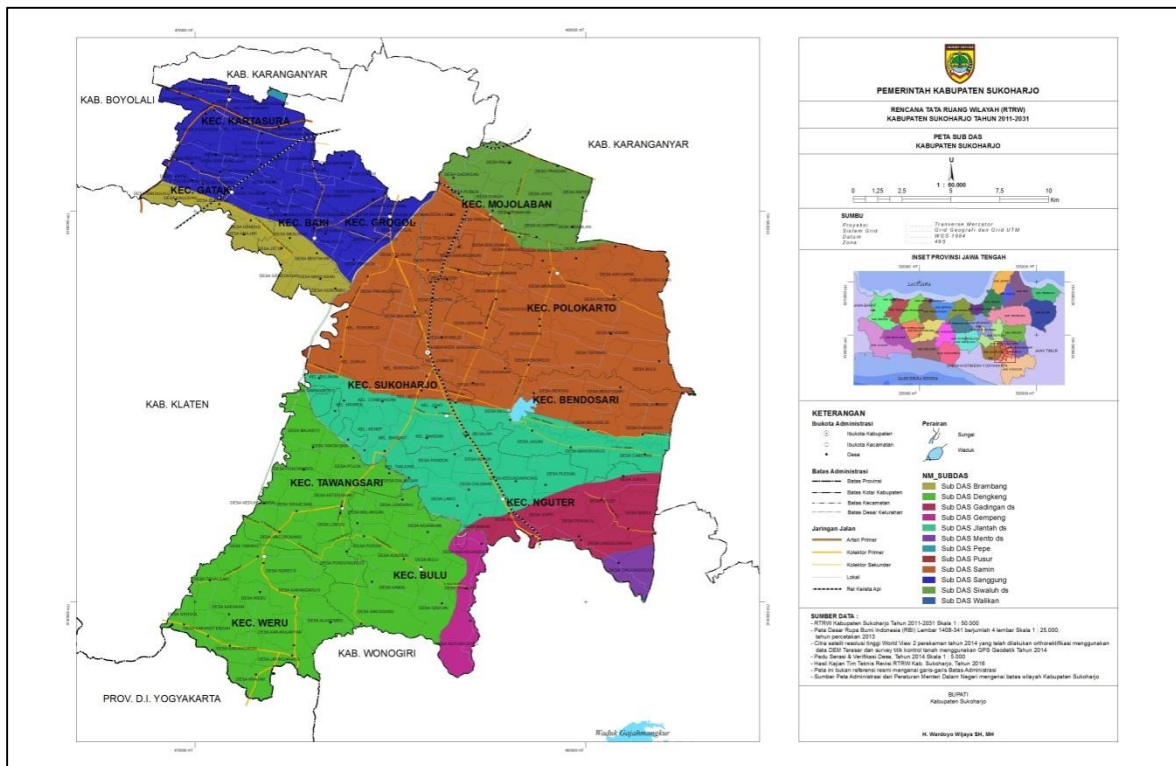
Sumber : BPBD Kab. Sukoharjo, 2017-2020

Secara lebih detail informasi kerawanan bencana dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kerawanan Bencana Banjir

Kabupaten Sukoharjo memiliki paling tidak sebelas aliran sungai, yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Jlantah, Sungai Brambang, Sungai Samin, Sungai Ranjing, Sungai Walikan, Sungai Langsur, Sungai Palur, Sungai Premulung dan Sungai Tanggul.

Gambar 2.9
Peta Sub DAS Kabupaten Sukoharjo

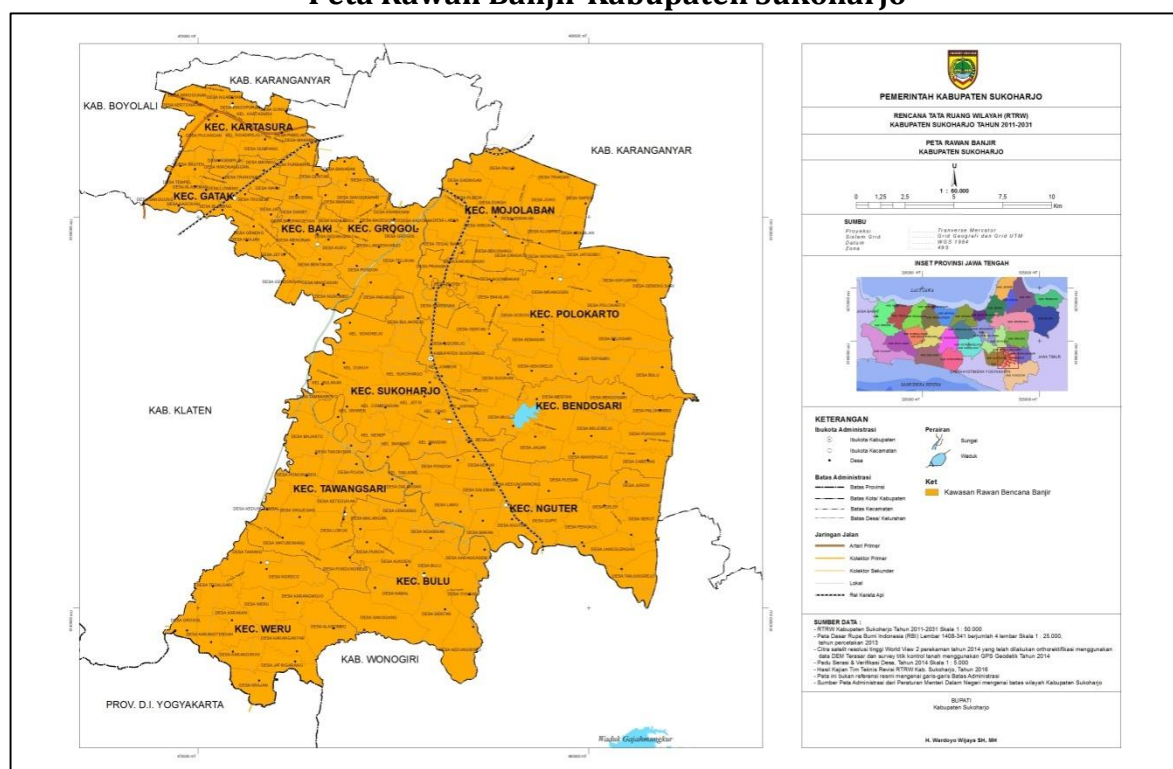


Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Keberadaan sungai-sungai tersebut di satu sisi memberikan keuntungan ketersediaan air di Kabupaten Sukoharjo, namun di sisi lain pada musim-musim penghujan misalnya pada bulan Desember hingga bulan Maret dapat memberikan ancaman banjir pada wilayah yang datar dan tidak memiliki kawasan resapan. Secara topografi, wilayah yang rentan akan bahaya banjir meliputi Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban. Hal ini dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah yang datar dan merupakan kawasan bertemunya beberapa sungai, misalnya Kecamatan Nguter (pertemuan antara Kali Jlantah dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Tawangsari (pertemuan antara Kali Brambang dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Grogol (aliran Sungai Bengawan Solo).

Selain itu dari segi tanah, sebagian besar Kabupaten Sukoharjo memiliki jenis tanah aluvial yang sulit menyerap air sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi kerawanan banjir di seluruh wilayah.

Gambar 2.10
Peta Rawan Banjir Kabupaten Sukoharjo

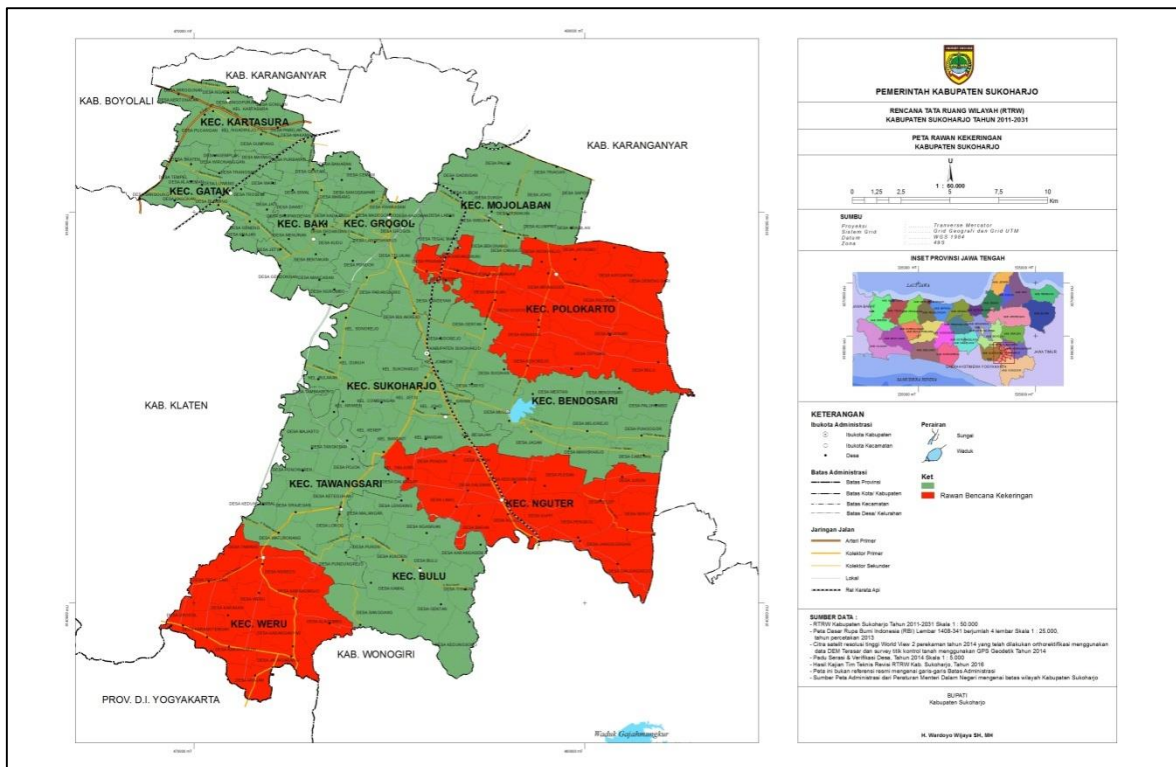


Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

2. Kerawanan Bencana Longsor

Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga kecamatan yang memiliki ancaman terhadap longsor, yakni Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawangsari. Penyebabnya adalah kondisi topografi kemiringan lahan, ketiga kecamatan tersebut memiliki wilayah yang bergelombang (5-15%), curam (15-40%) hingga sangat curam (40%). Selain itu, apabila dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar tanah yang berada jenis tanah litosol rentan mengalami erosi.

Gambar 2.12
Peta Rawan Kekeringan Kabupaten Sukoharjo



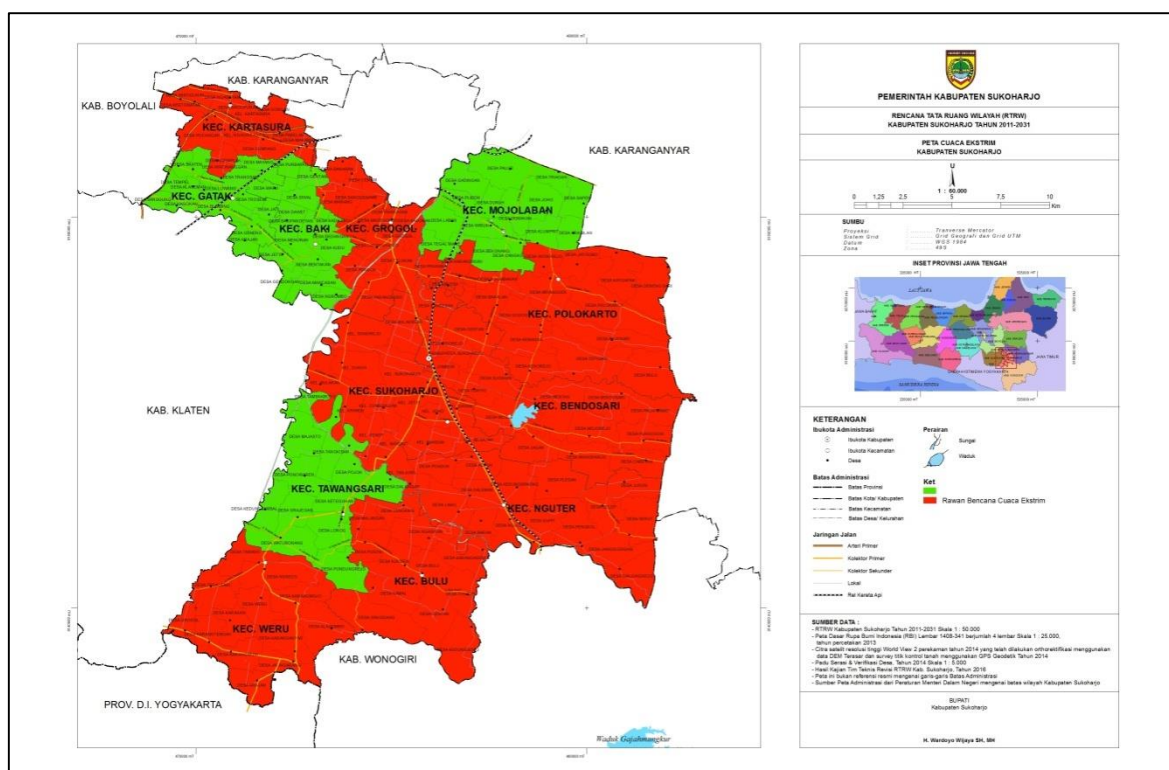
Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRWKabupaten Sukoharjo, 2018

4. Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrem

Di Kabupaten Sukoharjo wilayah yang memiliki rawan bencana cuaca ekstrem ini sebagian besar terdapat 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo antara lain Kecamatan Kartasura, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Weru wilayah yang terlanda cuaca ekstrem biasanya wilayah yang terbuka.

Cuaca ekstrem yang melanda daerah tersebut biasanya berupa hujan lebat disertai angin kencang. Menurut beberapa penelitian, wilayah yang pernah terlanda cuaca ekstrem secara umum memiliki ancaman terhadap cuaca ekstrem di masa datang. Sedangkan bukan daerah rawan bencana terdapat di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Tawangsari.

Gambar 2.13
Peta Rawan Cuaca Ekstrem Kabupaten Sukoharjo



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

2.1.9. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Laki-laki + Perempuan)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	WERU	4.561	29.651	29.844	59.495	13,04
2	BULU	4.640	19.913	19.607	39.520	8,52
3	TAWANGSARI	3.932	29.011	28.804	57.815	14,70
4	SUKOHARJO	4.682	49.040	49.004	98.044	20,94
5	NGUTER	5.783	28.842	28.443	57.285	9,91
6	BENDOSARI	5.572	32.558	32.702	65.260	11,71
7	POLOKARTO	6.691	43.865	43.746	87.611	13,09
8	MOJOLABAN	3.830	45.909	45.866	91.775	23,96

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Laki-laki + Perempuan)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	GROGOL	3.132	60.937	60.477	121.414	38,77
10	BAKI	2.339	35.587	35.254	70.841	30,29
11	GATAK	1.995	26.635	26.547	53.182	26,66
12	KARTASURA	2.166	54.401	55.323	109.724	50,66
JUMLAH		49.323	456.349	455.617	911.966	18,49

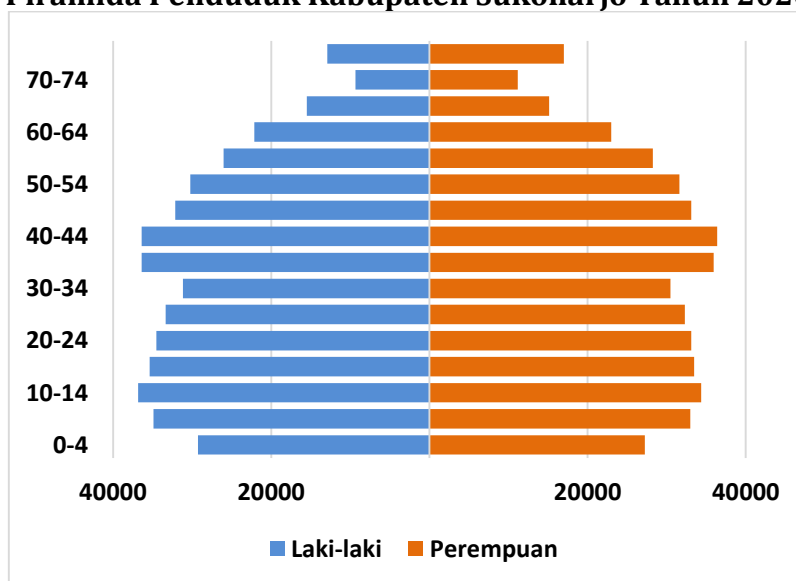
Sumber : Analisis Berdasarkan Data Luas RTRW dan Dispendukcapil Kab. Sukoharjo, 2020

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 911.966 orang dengan perincian jumlah penduduk sebanyak penduduk laki-laki 456.349 dan 455.617 penduduk perempuan. Tabel berikut menampilkan sebaran jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan tabel tersebut, maka Kecamatan Bulu yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah juga merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Sukoharjo. Adapun Kecamatan Kartasura merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Jika diperhatikan, maka kecamatan dengan kepadatan penduduk melebihi kepadatan rata-rata kabupaten adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki wilayah berciri khas perkotaan lebih banyak, seperti Kecamatan Kartasura, Grogol, Baki, Gatak, Mojolaban, dan Sukoharjo.

Jika diperhatikan tabel tersebut, maka Kecamatan Grogol merupakan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dari tahun ke tahun, sedangkan Kecamatan Bulu merupakan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Adapun jika dibandingkan dengan luas wilayah masing masing kecamatan, maka akan diperoleh data persebaran kepadatan penduduk, sebagai berikut.

Gambar 2.14
Piramida Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020



Sumber : Olahan Bappelbangda, 2020

Berdasarkan Gambar Piramida Penduduk terlihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Sukoharjo cenderung pada komposisi penduduk muda, dikarenakan angka usia produktif lebih banyak dari pada usia yang dan/atau yang sudah tidak produktif. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi sumberdaya manusia yang membutuhkan lapangan kerja.

Dari tabel komposisi penduduk juga dapat diketahui Angka Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukoharjo sebesar 46%. Angka ini menunjukkan persentase banyaknya usia produktif dibandingkan dengan jumlah usia yg belum/tidak produktif. Artinya, setiap 100 orang penduduk produktif, terdapat sejumlah 46 penduduk usia belum/tidak produktif.

Data komposisi penduduk berdasarkan umur dapat menunjukkan usia produktif dan non-produktif suatu wilayah. Data ini juga akan menunjukkan potensi sumberdaya manusia berdasarkan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 (Orang)

KECAMATAN	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>=75
WERU	3.403	3.832	4.304	3.945	4.165	4.268	4.029	4.297	4.392	4.037	3.971	3.780	3.432	2.558	1.990	3.092
BULU	2.084	2.517	2.732	2.708	2.797	2.849	2.537	2.929	2.896	2.759	2.798	2.509	2.183	1.631	1.387	2.204
TAWANGSARI	3.457	4.044	4.148	4.151	4.301	4.191	3.823	4.450	4.290	4.040	3.870	3.545	3.049	2.263	1.522	2.671
SUKOHARJO	6.148	7.468	7.830	7.822	7.228	6.917	6.627	7.898	8.161	7.213	6.665	5.682	4.513	3.082	1.912	2.878
NGUTER	3.419	4.068	4.319	3.899	4.032	3.861	3.826	4.707	4.453	3.881	3.821	3.471	3.069	2.119	1.622	2.718
BENDOSARI	4.064	4.980	5.001	4.743	4.746	4.433	4.365	5.119	5.237	4.626	4.335	3.888	3.363	2.184	1.661	2.515
POLOKARTO	5.630	6.729	7.093	6.630	6.607	6.218	5.854	6.857	7.133	6.315	5.760	4.921	4.359	2.783	1.902	2.820
MOJOLABAN	5.888	7.040	7.178	7.209	6.761	6.738	6.234	7.474	7.468	6.732	6.574	5.360	4.332	2.800	1.755	2.232
GROGOL	7.698	9.365	9.626	9.406	9.351	9.121	8.632	9.910	9.407	8.474	8.320	7.377	5.993	3.897	2.171	2.666
BAKI	4.516	5.467	5.569	5.387	5.479	5.297	4.820	5.795	5.692	5.130	4.886	4.145	3.158	2.087	1.434	1.979
GATAK	3.329	4.020	4.257	3.994	3.974	3.804	3.561	4.317	4.433	3.854	3.522	3.099	2.447	1.718	1.135	1.718
KARTASURA	6.863	8.336	9.140	8.973	8.220	7.930	7.326	8.586	9.195	8.161	7.340	6.482	5.241	3.500	2.011	2.420
JUMLAH	56.499	67.866	71.197	68.867	67.661	65.627	61.634	72.339	72.757	65.222	61.862	54.259	45.139	30.622	20.502	29.913
PERSENTASE	6,20	7,44	7,81	7,55	7,42	7,20	6,76	7,93	7,98	7,15	6,78	5,95	4,95	3,36	2,25	3,28

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasarkan data penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada tahun 2020, jumlah penduduk yang terbesar terdapat pada kelompok umur 40-44 (7,93%), diikuti oleh masyarakat kelompok umur 35-39 tahun (7,93%). Hal ini tentu menjadi peluang bagi Kabupaten Sukoharjo karena penduduk dengan jumlah tersebut masih tergolong usia produktif dapat dilihat pada piramida penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sebagaimana Gambar 2.14.

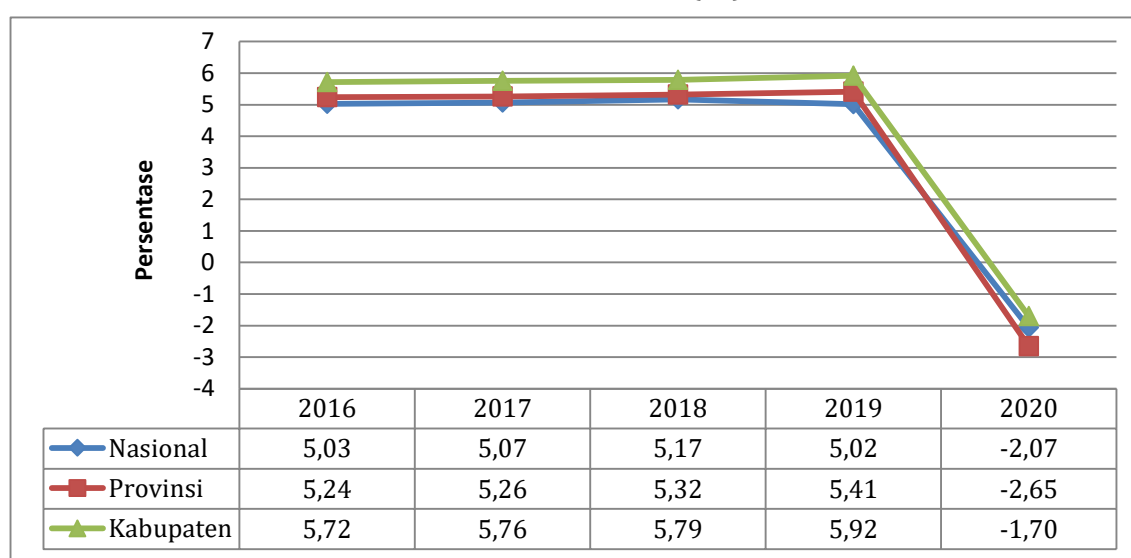
2. 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama rentang waktu empat tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo relatif stabil pada kisaran 5,72% - 5,92%, bahkan selalu lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sebesar -1,70% menurun dibandingkan tahun 2019 (5,92%), dan ini lebih baik dibandingkan provinsi (-2,65%) dan nasional (-2,07%), hal ini dikarenakan kondisi yang dialami oleh seluruh masyarakat di Indonesia karena pandemi COVID-19.

Gambar 2.15
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : BPS diolah oleh Bappelbangda, 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 didukung dengan pertumbuhan positif, kecuali pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif adalah :Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah informasi dan komunikasi, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan tiap lapangan usaha di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Seri 2010)
Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,48	1,10	0,67	3,40	0,94
Pertambangan dan Penggalian	1,94	-2,67	2,45	-1,62	-0,21
Industri Pengolahan	5,43	6,14	6,47	5,64	-2,72
Pengadaan Listrik dan Gas	5,58	4,23	4,74	5,25	-2,38

Kategori PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,65	4,29	4,25	6,89	2,35
Konstruksi	7,42	6,60	5,61	5,73	-2,86
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,69	5,08	4,62	5,53	-3,50
Transportasi dan Pergudangan	8,11	7,49	7,23	7,50	-32,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,58	6,23	7,39	7,47	-7,27
Informasi dan Komunikasi	9,42	11,04	10,13	10,38	25,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,68	3,98	4,12	3,47	2,30
Real Estate	7,51	7,71	6,45	6,37	0,08
Jasa Perusahaan	8,86	8,19	8,54	9,32	-1,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,08	2,66	4,37	3,81	-2,41
Jasa Pendidikan	7,45	7,20	7,13	8,07	-2,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,73	7,89	8,33	7,39	11,27
Jasa lainnya	5,53	6,80	9,25	9,18	-3,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,72	5,76	5,79	5,92	-1,70

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp. 25 564 065,09 juta (2018) menjadi Rp. 27.076.442,63 juta(2019), dan mengalami penurunan menjadi Rp. 26.616.937,31 juta (2020). Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Berlaku pada periode yang sama meningkat dari Rp. 34 211 246,04 juta (2018) menjadi Rp. 36 970 814,29 juta (2019), dan mengalami penurunan menjadi Rp. 36 911 517,77 juta (2020).

Rincian nilai PDRB tiap lapangan usaha baik ADHK 2010 maupun ADHB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHK
(Juta Rupiah)

Kategori PDRB	Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 025 492,05	2 047 772,75	2 061 469,09	2 131 546,44	2 151 546,15
Pertambangan dan Penggalian	93 645,51	91 148,29	93 382,78	91 869,98	91 673,67
Industri Pengolahan	8 735 531,48	9 271 979,94	9 871 777,71	10 428 612,22	10 144 769,83
Pengadaan Listrik dan Gas	30 275,57	31 556,57	33 051,58	34 785,99	33 956,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8 782,29	9 158,62	9 547,97	10 205,83	10 445,67
Konstruksi	1 467 913,25	1 564 777,65	1 652 483,47	1 747 170,77	1 697 172,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 247 120,35	4 462 750,34	4 668 998,70	4 927 396,82	4 755 069,46
Transportasi dan Pergudangan	820 587,73	882 054,55	945 856,10	1 016 762,39	690 993,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	855 384,97	908 704,75	975 839,37	1 048 730,80	972 516,09
Informasi dan Komunikasi	1 245 004,28	1 382 469,43	1 522 567,66	1 680 571,99	2 113 401,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	823 103,54	855 857,07	891 133,30	922 064,21	943 316,13
Real Estate	562 996,15	606 417,26	645 546,95	686 669,49	687 224,77
Jasa Perusahaan	86 269,91	93 338,73	101 314,51	110 757,02	108 902,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	505 638,95	519 081,74	541 761,55	562 402,67	548 837,52
Jasa Pendidikan	811 741,18	870 197,23	932 284,79	1 007 520,17	980 891,29

Kategori PDRB	Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206 440,11	222 730,44	241 277,63	259 108,05	288 321,24
Jasa lainnya	322 055,49	343 944,12	375 771,93	410 267,79	397 898,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22 847 982,81	24 163 939,48	25 564 065,09	27 076 442,63	26 616 937,31

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.10.
PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha ADHB
(Juta Rupiah)

Kategori PDRB	Harga Berlaku				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 809 993,96	2 894 164,84	3 006 496,06	3 159 075,27	3 230 819,87
Pertambangan dan Penggalian	148 152,17	149 572,90	156 873,16	155 934,66	158 787,96
Industri Pengolahan	11 271 822,77	12 233 453,02	13 359 367,03	14 441 718,34	14 447 977,90
Pengadaan Listrik dan Gas	31 417,00	35 504,71	38 348,53	40 467,08	39 236,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10 720,18	11 237,32	11 790,02	13 234,91	13 792,10
Konstruksi	1 922 351,95	2 137 039,83	2 340 889,73	2 542 715,62	2 475 837,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 171 028,67	5 573 874,22	5 943 000,51	6 415 800,96	6 274 280,95
Transportasi dan Pergudangan	954 107,38	1 043 699,22	1 131 685,33	1 239 872,39	869 056,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 091 272,56	1 171 184,29	1 273 725,41	1 394 083,39	1 307 899,68
Informasi dan Komunikasi	1 218 405,12	1 422 248,31	1 576 221,12	1 762 344,90	2 224 967,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	1 133 256,61	1 234 845,05	1 322 119,93	1 390 949,48	1 428 105,79
Real Estate	651 304,97	706 575,66	771 148,60	836 592,72	839 264,58
Jasa Perusahaan	113 432,42	128 018,88	142 480,22	159 546,63	161 600,23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	704 360,18	746 955,05	790 156,84	832 978,54	823 369,44
Jasa Pendidikan	1 216 495,97	1 385 954,16	1 522 091,17	1 678 973,85	1 666 043,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280 675,52	308 652,66	339 306,89	370 894,49	423 359,01
Jasa lainnya	401 509,55	438 434,05	485 545,49	535 631,06	527 118,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29 130 306,98	31 621 414,17	34 211 246,04	36 970 814,29	36 911 517,77

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Sementara itu, struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo menurut lapangan usaha selama tahun 2016-2020 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan (39,14%); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,00 %) dan pertanian, kehutanan dan perikanan; (8,75%).

Tabel 2.11.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 (%)

Kategori PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,65	9,15	8,79	8,54	8,75
Pertambangan dan Penggalian	0,51	0,47	0,46	0,42	0,43
Industri Pengolahan	38,69	38,69	39,05	39,06	39,14
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Kategori PDRB	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
Konstruksi	6,60	6,76	6,84	6,88	6,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,75	17,63	17,37	17,35	17,00
Transportasi dan Pergudangan	3,28	3,30	3,31	3,35	2,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,75	3,70	3,72	3,77	3,54
Informasi dan Komunikasi	4,18	4,50	4,61	4,77	6,03
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,89	3,91	3,86	3,76	3,87
Real Estate	2,24	2,23	2,25	2,26	2,27
Jasa Perusahaan	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,42	2,36	2,31	2,25	2,23
Jasa Pendidikan	4,18	4,38	4,45	4,54	4,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,98	0,99	1,00	1,15
Jasa lainnya	1,38	1,39	1,42	1,45	1,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2015-2020

Nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut pengeluaran selama tahun 2016-2019 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo adalah Perubahan Inventori, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Tabel 2.12.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah)

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20,571,823.65	22,165,433.84	23,821,932.92	25,610,569.25	25,713,536.86
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	329,389.97	352,249.64	386,200.22	438,092.91	435,379.49
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,751,215.89	1,845,665.84	1,947,113.82	2,063,575.28	1,971,593.93
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,989,792.68	7,540,870.87	8,357,936.34	9,130,166.83	8,684,869.91
Perubahan Inventori	76,689.81	(389,219.45)	(514,200.68)	(279,764.02)	102,489.01
Net Ekspor Barang dan Jasa	(588,605.02)	106,413.43	212,263.42	8,174.04	3,648.57
PDRB	29,130,306.98	31,621,414.17	34,211,246.04	36,970,814.29	36,911,517.77

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.13.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran
(Juta Rupiah)

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15,704,655.12	16,514,272.36	17,389,342.27	18,207,084.54	18,105,574.95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	229,708.90	238,598.63	254,798.42	283,290.83	276,966.26

KOMPONEN	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,154,782.52	1,185,499.73	1,230,173.65	1,292,642.49	1,239,644.14
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,265,834.74	5,597,856.62	5,918,915.73	6,234,521.55	5,926,416.33
Perubahan Inventori	95,838.69	(204,666.62)	(171,830.75)	(70,762.28)	53,665.33
Net Ekspor Barang dan Jasa	397,162.84	832,378.76	942,665.77	1,129,665.50	1,014,670.30
PDRB	22,847,982.81	24,163,939.48	25,564,065.09	27,076,442.63	26,616,937.31

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Rata-rata kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun sebesar 69,36%, yang diikuti oleh PMTB sebesar 24,72%, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,59%. Kondisi ini menggambarkan bahwa PDRB Kabupaten Sukoharjo sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga, meskipun trennya semakin tahun semakin menurun kontribusinya.

Tabel 2.14.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 - 2020 (%)

Jenis Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,62	70,09	69,67	69,36	69,66
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,11	1,13	1,19	1,18
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,01	5,84	5,69	5,59	5,43
Pembentukan Modal Tetap Bruto	23,99	23,85	24,44	24,72	23,53
Perubahan Inventori	0,26	-1,23	-1,55	-0,88	0,28
Net Ekspor Barang dan Jasa	-2,02	0,34	0,62	0,02	0,01
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

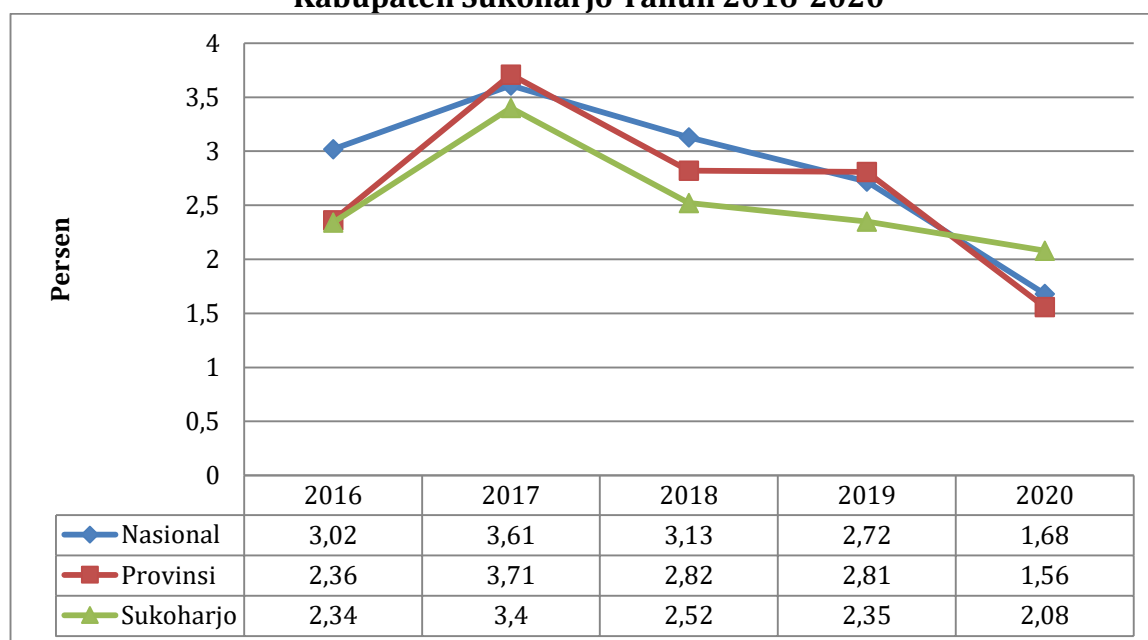
Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

2.2.1.2. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 2%-3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjodisebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo.

Namun demikian, terkendalinya tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo selama ini tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukoharjo. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

Gambar 2.16
Tingkat Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



Sumber : Bappelbangda diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2016 inflasi Kabupaten Sukoharjo itu sebesar 2,34 dibawah angka Nasional dan Provinsi. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 3,4 namun tetap berada di bawah Provinsi dan Nasional, dan pada tahun 2018 dan 2019 berada kembali dibawah provinsi dan nasional. Sedangkan pada tahun 2020 angka inflasi Kabupaten Sukoharjo berada di atas angka Nasional dan Provinsi yaitu sebesar 2,08 karena kondisi COVID-19

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi yang sedang berlangsung. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 41,45 juta rupiah. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 40,66 juta rupiah.

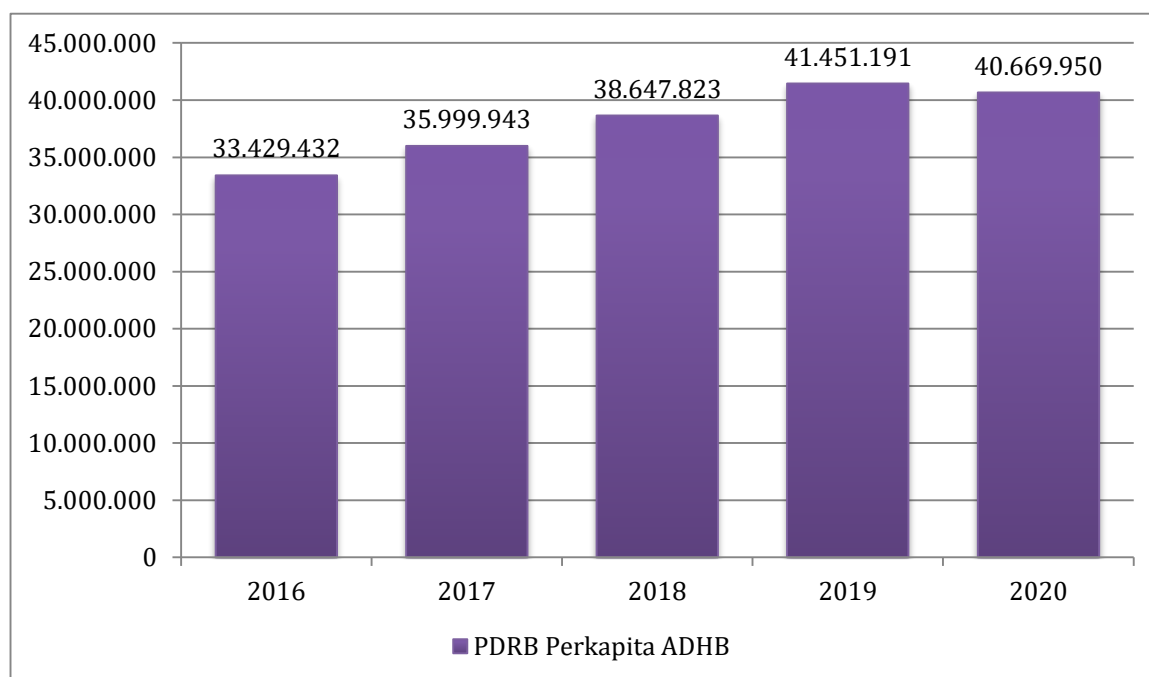
Tabel 2.16.
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB perkapita (Rp)					
• ADHB	33.429.432	35.999.943	38.647.823	41.451.191	40.669.950
• ADHK 2010	26.219.947	27.509.853	28.879.260	30.357.751	29.327.147
• Pertumbuhan ADHK	4,85	4,92	4,98	5,12	-3,39
Pertumbuhan penduduk	0,83	0,80	0,78	0,76	1,76

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Gambar 2. 17
PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020



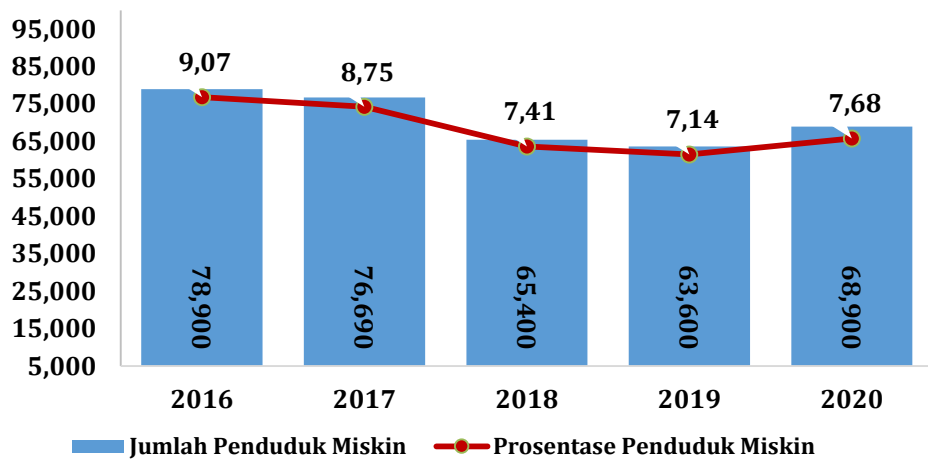
Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

2.2.1.4. Penduduk Miskin

Mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 7,68 persen, terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 7,14 persen, tahun 2018 sebesar 7,41 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tersebut merupakan salah satu adanya dampak corona virus disease 2019 yang terjadi di Indonesia.

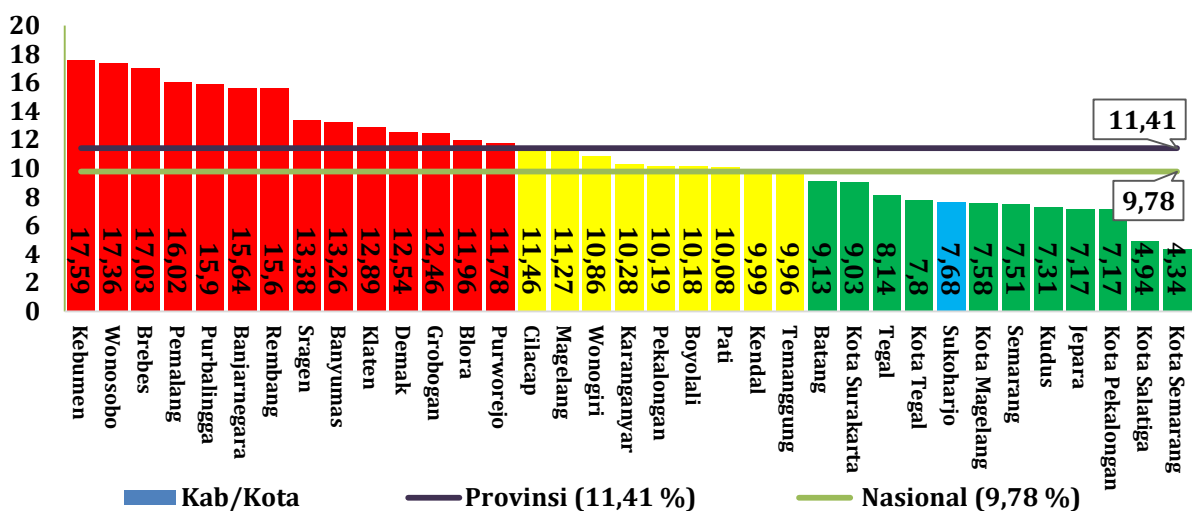
Gambar 2.18
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jika dibandingkan terhadap angka kemiskinan Nasional dan Provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo berada dibawah angka Nasional sebesar 9.78 persen dan Provinsi sebesar 11.41 persen. Bahkan Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat ke 8 Kabupaten/Kota dengan kemiskinan terendah dari 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

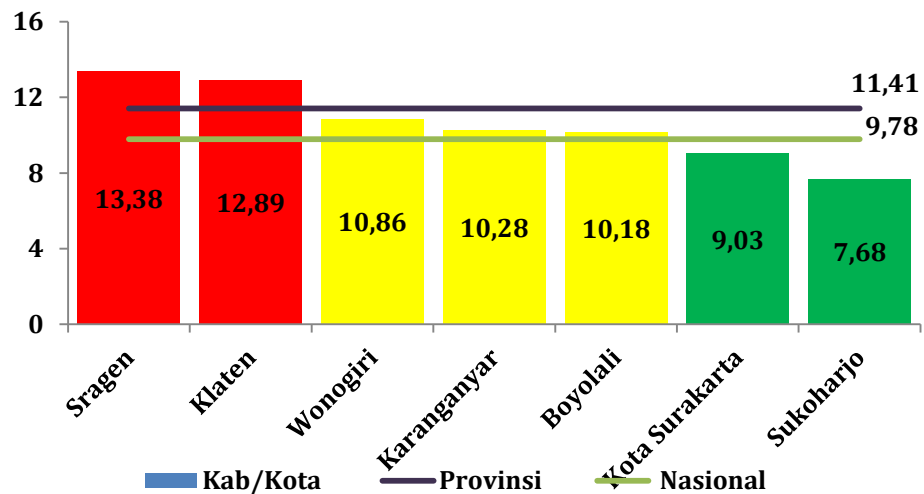
Gambar 2.19
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan
Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

Apabila dilihat dari perbandingan terhadap wilayah Subosukawonosraten persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan yang cukup menggembirakan, karena berada pada angka terendah (7.68%), hanya Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta yang berada di bawah angka kemiskinan, baik nasional maupun provinsi.

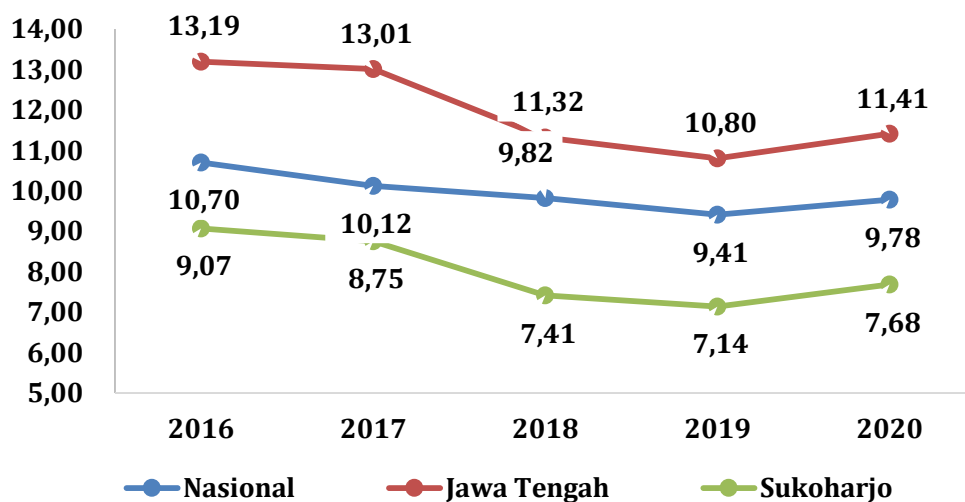
Gambar 2.20
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin SUBOSUKAWONOSRATEN
terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

Grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 mengalami penurunan dan hal tersebut menjadi salah satu penyebab penurunan tingkat kemiskinan nasional. Selama tahun 2016-2020 tingkat kemiskinan Kabupaten sukoharjo mengalami trend yang menurun.

Gambar 2.21
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



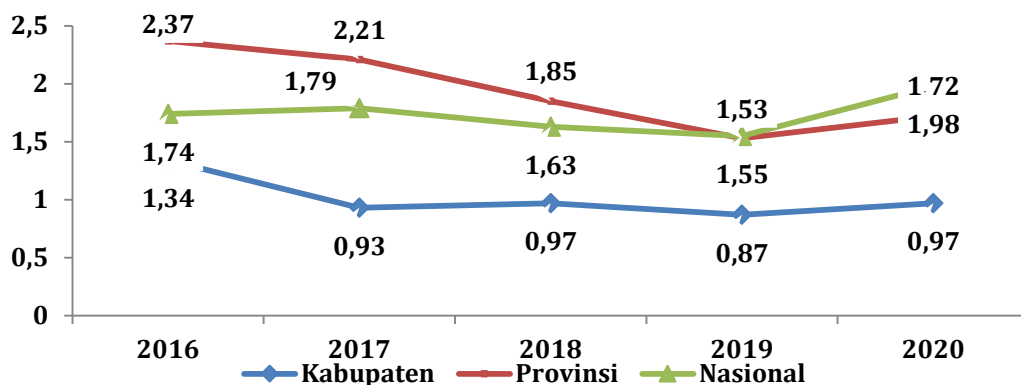
Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi dimensi lainnya yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Selain harus memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan.

a. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Besarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 1,34, turun menjadi 0,93 pada tahun 2017, kemudian turun menjadi menjadi 0,87 di tahun 2019, dan mengalami kenaikan menjadi 0,97 pada tahun 2020.

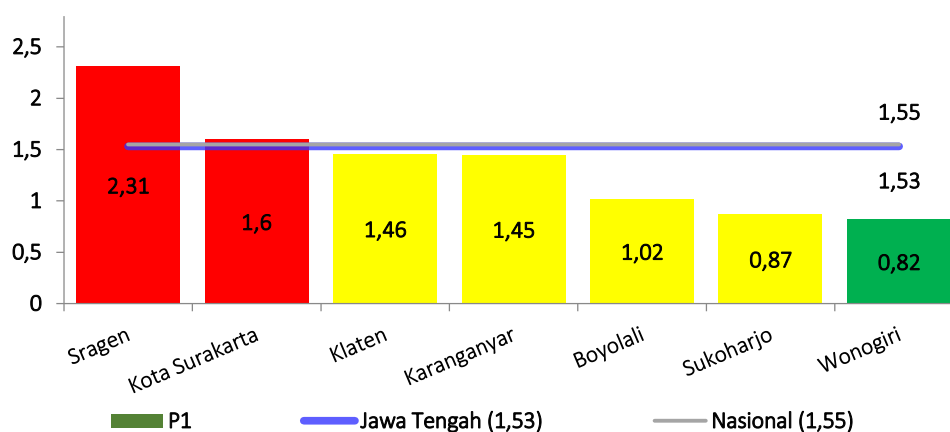
Gambar 2.22
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo Terhadap Nasional dan Provinsi Tahun 2016–2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jika dibandingkan dengan 6 kabupaten/kota dan sekitarnya, pada tahun 2020 diketahui kondisi masyarakat miskin di Sukoharjo paling baik setelah Kabupaten Wonogiri, hal ini diketahui dari besarnya indeks kedalaman kemiskinan berada pada indeks 0.87.

Gambar 2.23
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terhadap Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2020

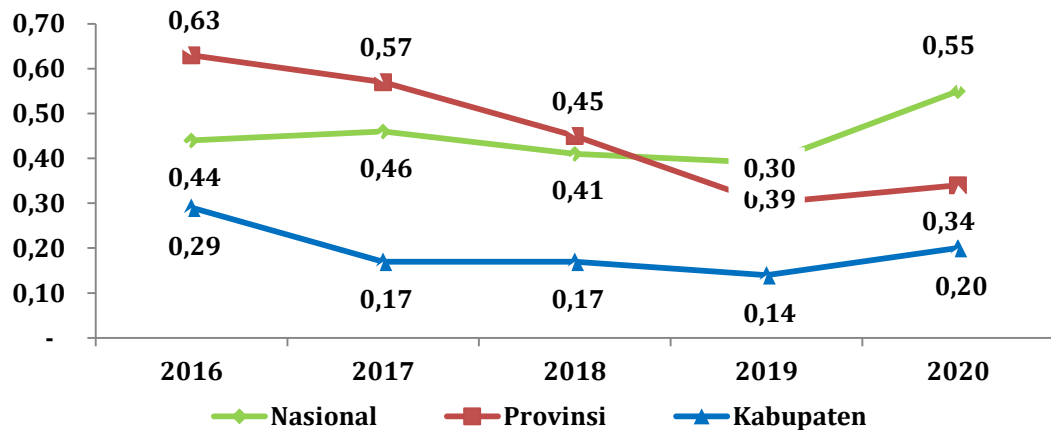


Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

b. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Makin tinggi nilai indeks, makin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan kabupaten sukoharjo cukup rendah jika dibandingkan dengan indeks keparahan kemiskinan di Provinsi dan Nasional.

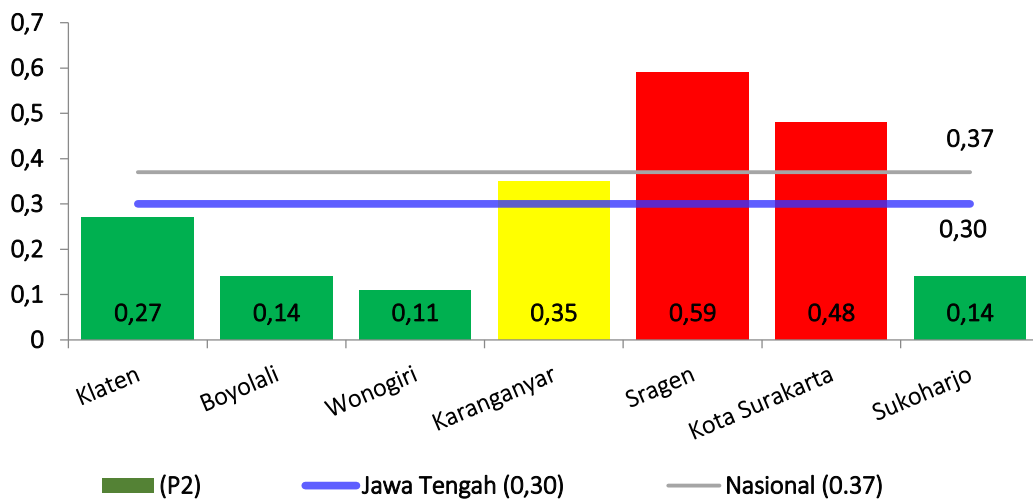
Gambar 2.24
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terhadap
Nasional dan Provinsi Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan 6 kabupaten/kota (2020) dan sekitarnya diketahui kondisi di masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo paling baik. Hal ini diketahui dari besarnya indeks kedalaman kemiskinan berada pada indeks 0,14 dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.25
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terhadap Wilayah
Subosukawonosraten Tahun 2020



Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

Perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan perlu mengintegrasikan KLHS Tujuan Pembangunan berkelanjutan, supaya sinergis dan inklusif, terutama pada tujuan berikut ini:

Tabel 2.17.
**Integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Rencana
Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**

TPB (1)	Permasalahan (2)	Sasaran (3)
Tujuan 1 Kemiskinan	Tanpa 1. Masih adanya penduduk miskin di tahun 2019 sebanyak 377.319 jiwa 2. Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan belum mencapai 95% 3. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebesar 76,01%; 4. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas masih sebesar 1,5% 5. Kualitas pengelolaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan 6. Belum memiliki sistem informasi data terkait proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan terpadu, selaras indikator TPB Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan renta	1) Meningkatnya peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 2) Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 3) Meningkatnya jumlah presentase penyandang disabilitas dan kelompok rentan lain yang miskin dan belum terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas 4) Meningkatnya pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa

Sumber : Analisis berdasarkan Rekomendasi KLHS Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo 2020

Kondisi tantangan perluasan kota ini dalam RPJMD 2021-2026 relevan untuk mengintegrasikan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis:

Tabel 2.18.
**Integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Potensi
Pengembangan Wilayah**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (1)	Permasalahan (2)	Sasaran Rencana Pembangunan sesuai Rekomendasi TPB (3)
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan	1. Belum memiliki indikator proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur dalam target daerah 2. Pengembangan kawasan industri mengurangi lahan pertanian	1) Meningkatkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur pada tahun 2030 sampai dengan 14,8%

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Sasaran Rencana Pembangunan sesuai Rekomendasi TPB
(1)	(2)	(3)
Berkelanjutan, serta mendorong Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja 4. Belum memiliki sistem informasi data terkait proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>. 5. Belum memiliki indikator proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> dalam target daerah 6. Masih kurangnya perangkat keras, kurangnya tenaga operasional dalam penggunaan teknologi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Peningkatan kerjasama dengan industri dan dunia usaha 3) Menambahkan/memasukkan indikator TPB proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur dalam target daerah (RPJMD) 4) Meningkatkan penggunaan jaminan sosial tenaga kerja 5) Peningkatan pemanfaatan teknologi 6) Pemerataan jaringan telepon 7) Peningkatan infrastruktur jaringan telepon
Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap hunian yang layak (95,17%). 2. Masih adanya rumah tidak layak huni. 3. Masih adanya kawasan permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong. 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan pendukung perumahan yang layak huni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 2) Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) belum banyak diterapkan 2. Masih terbatasnya kesadaran para pelaku usaha terhadap pengelolaan dampak lingkungan yang dihasilkan dari usahanya 3. Banyaknya pelaku industri yang belum memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 2) Meningkatkan DDDTLH terkait cakupan layanan pengolahan limbah dan peningkatan kualitas air 3) Sosialisasi kepada pihak industri terkait dengan kewajiban pengelolaan limbah 4) Peningkatan pengawasan terhadap industri yang menghasilkan limbah B3 5) Peningkatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 6) Optimalisasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

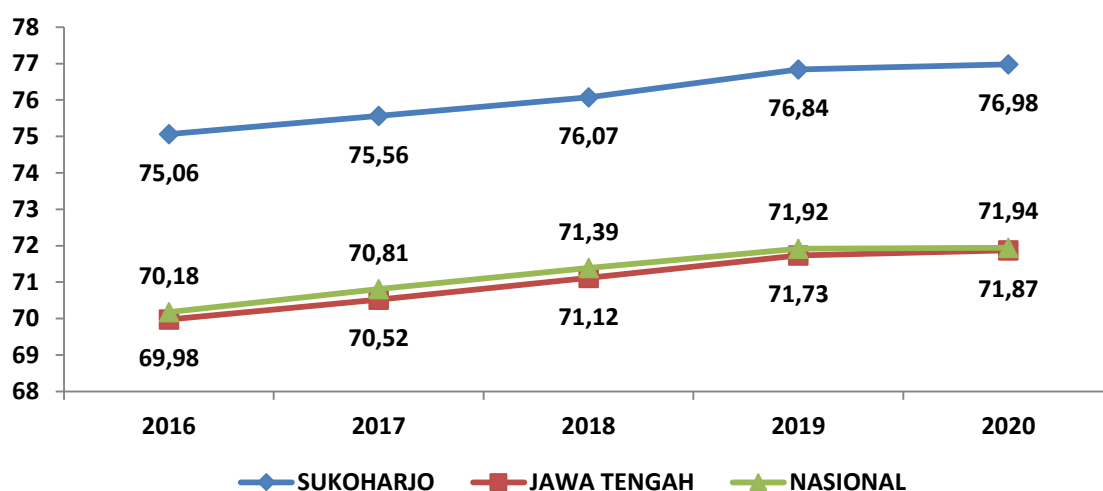
Sumber : Analisis berdasarkan Rekomendasi KLHS Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukoharjo terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2019. IPM Kabupaten Sukoharjo meningkat dari 75,06 pada tahun 2016 menjadi 76,98 pada tahun 2020, berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Tengah 71,87. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Sukoharjo rata-rata tumbuh sebesar 0,76 persen per tahun. Pada periode 2016-2020, IPM Kabupaten Sukoharjo tumbuh rata-rata 1,01 persen atau meningkat 0,3 poin. (IPM Kabupaten Sukoharjo status tinggi).

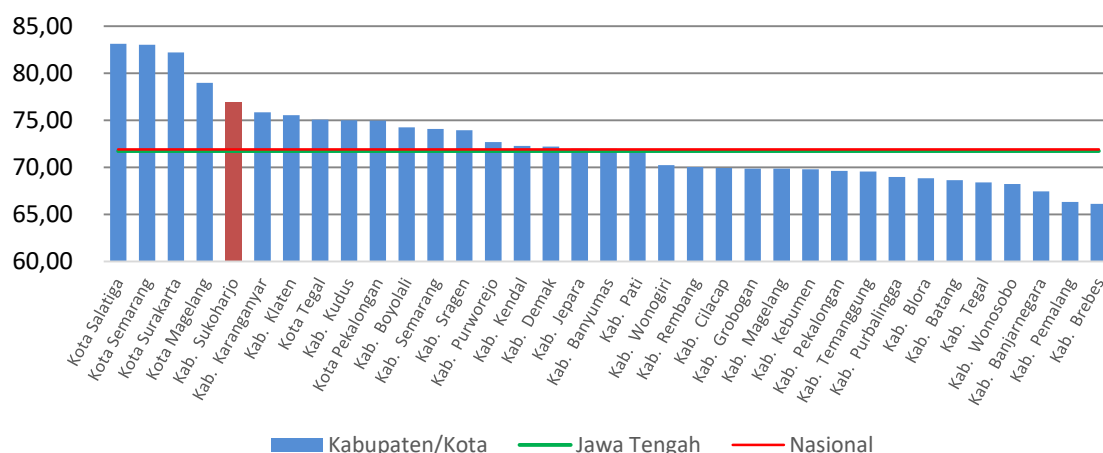
Gambar 2. 26
Perbandingan Angka IPM Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020



Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Gambaran Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukoharjo :

Gambar 2. 27
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2020



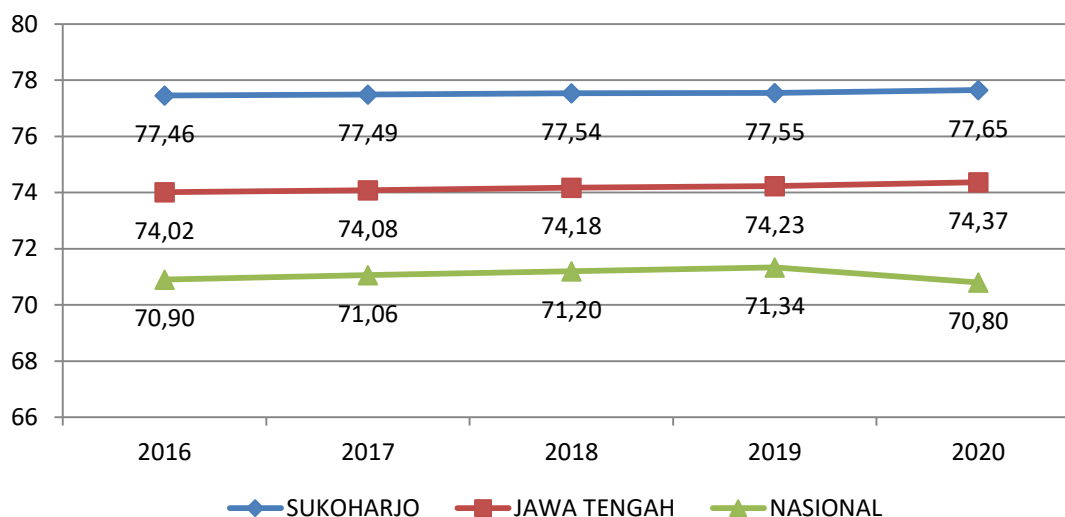
Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2020

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sukoharjo terus mengalami kemajuan selama periode 2016–2020. UHH Kabupaten Sukoharjo meningkat dari 77,46 pada

tahun 2016 menjadi 77,65 pada tahun 2020. Berada di atas UHH Provinsi Jawa Tengah 74,37. UHH kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 berada di posisi tertinggi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Meskipun secara capaian UHH Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 memiliki pertumbuhan yang rendah yaitu sebesar 0,01%.

Gambar 2. 28
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



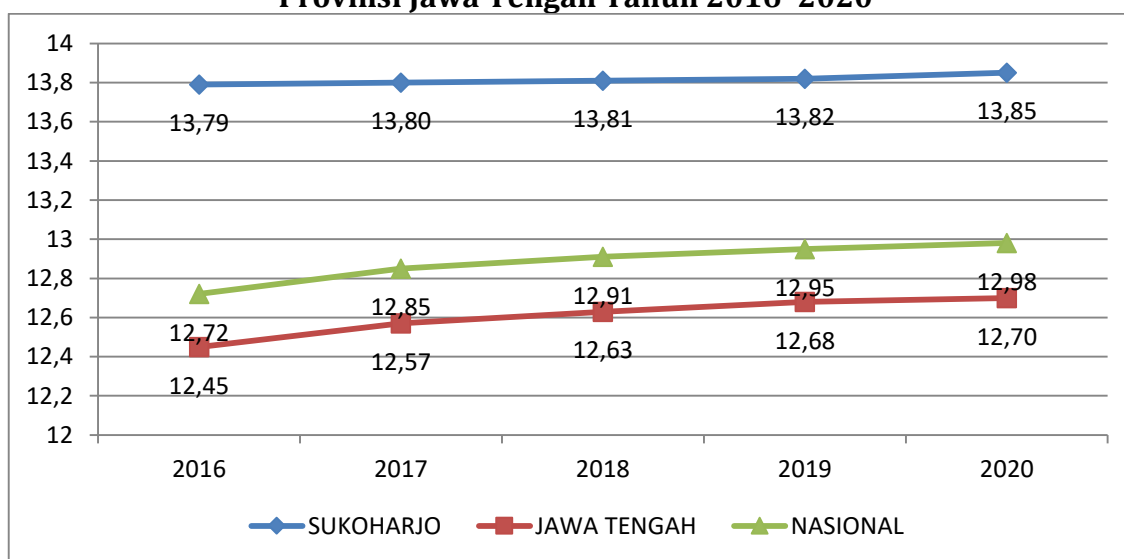
Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Hal ini menunjukkan makin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Beberapa faktor yang memengaruhi UHH bersifat kompleks, antara lain aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang memengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, diperlukan upaya melalui paradigma sehat dengan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH dipengaruhi kesehatan ibu, bayi, balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dengan pendekatan *Continuum Of Care* atau asuhan berkesinambungan yang komprehensif di sepanjang siklus hidup mulai dari kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup keluarga, komunitas, puskesmas dan fasilitas kesehatan rujukan.

2. Harapan Lama Sekolah

Indikator kinerja daerah dalam bidang pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui pembangunan bidang pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2. 29
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo terhadap
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Gambar diatas menunjukkan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2016-2020 selalu meningkat. Angka Harapan lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 13,85 meningkat dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 13,82. Pada periode 2018-2019 Harapan Lama Sekolah berada di posisi ke-4 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah atau berada di posisi teratas sebagai Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah. Walaupun secara capaian memiliki pertumbuhan yang relative rendah yaitu 0,07%. Hal ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan ooleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun keatas) dimasa mendatang adalah selama 13,82 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan Perguruan tinggi jenjang Diploma I. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah ini tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mengutamakan program pembangunan di bidang pendidikan antara lain : Bantuan Siswa Miskin, Sekolah Gratis, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan akses konektifitas.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

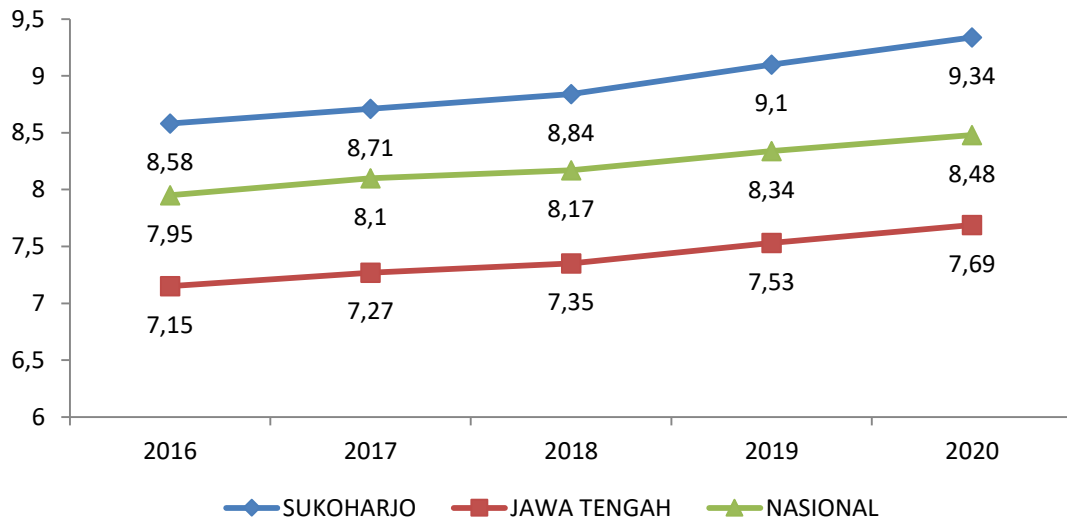
Pada periode 2016-2020, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Sukoharjo berada di posisi ke-5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dan posisi ke-1 untuk Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,90%. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi ke-dua setelah Kabupaten Temanggung yang tumbuh sebesar 2,98%

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang dijalani. Angka rata-rata lama sekolah di kabupaten Sukoharjo terus mengalami peningkatan dari 8,5 tahun pada tahun 2015 menjadi 9,1 tahun pada tahun 2019. Hal ini merupakan minat penduduk usia 15 tahun ke atas untuk

menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi makin meningkat. Meskipun angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Sukoharjo bersekolah hanya setingkat SLTP/SMP kelas 3.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukoharjo tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah melalui kebijakan bantuan operasional sekolah. Adanya peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Gambar 2. 30
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020

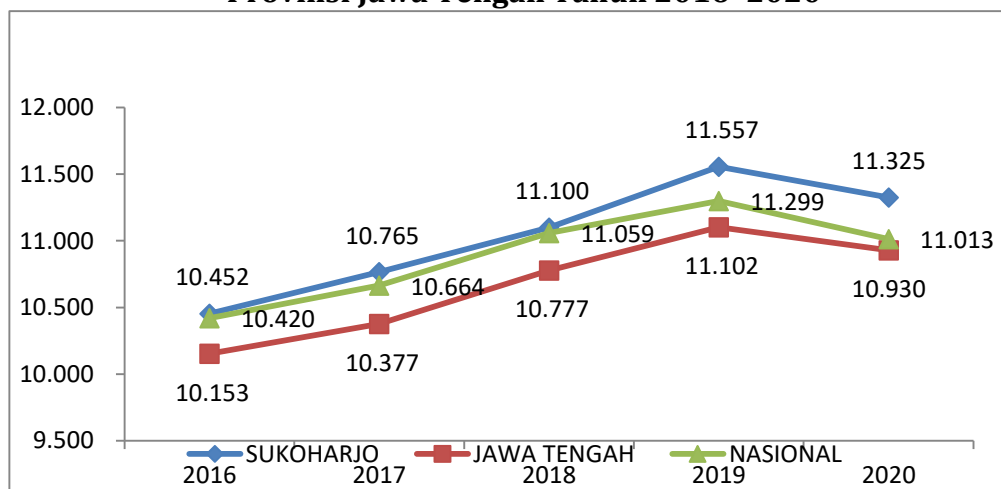


Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

4. Pengeluaran Per Kapita

Komponen terakhir dari IPM yaitu pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Gambar 2. 31
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

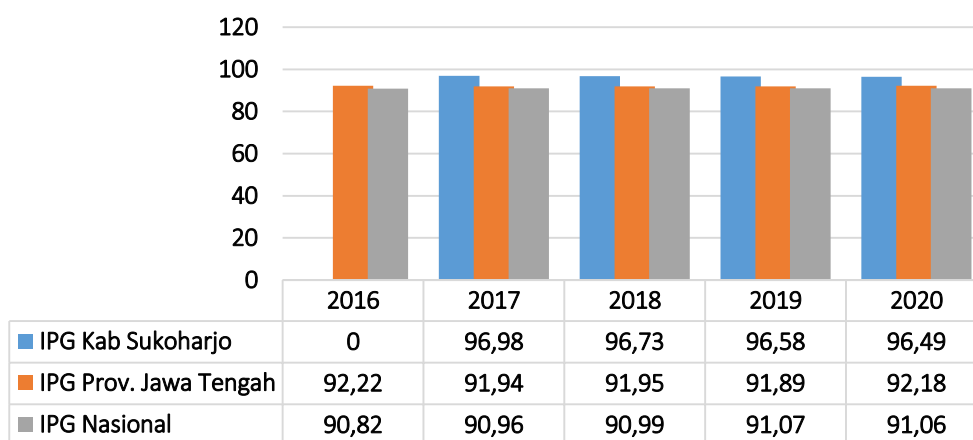
Pada periode 2018–2019, pengeluaran per kapita kabupaten sukoharjo tahun 2019 berada di posisi ke 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah dan Meskipun secara capaian pengeluaran per kapita kabupaten sukoharjo tahun 2019 umumnya berada di bawah beberapa Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, namun memiliki pertumbuhan yang relatif tinggi, yaitu sebesar 0,46 poin atau 4,03% merupakan pertumbuhan posisi ke-7 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Sukoharjo meningkat dari Rp. 10,416 Juta pada tahun 2015 menjadi Rp. 11,557 Juta pada tahun 2019. Namun pengeluaran perkapita kembali turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 11,325 juta akibat adanya pandemi Covid-19. Meskipun menurun angka tersebut masih berada di atas pengeluaran per kapita Jawa Tengah dan Nasional. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup penduduk Kabupaten Sukoharjo.

2.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender

Kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dengan melihat beberapa indikator, yaitu hidup yang lama dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukoharjo selalu menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020, dari sebesar 96,54 pada tahun 2017 menjadi 96,98 pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Sukoharjo sudah baik meskipun dalam perkembangannya ada penurunan. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi dan Nasional, Kabupaten Sukoharjo masih berada di atas IPG Provinsi dan Nasional. Perbandingan Perkembangan IPG Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. 32
Perbandingan IPG Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020

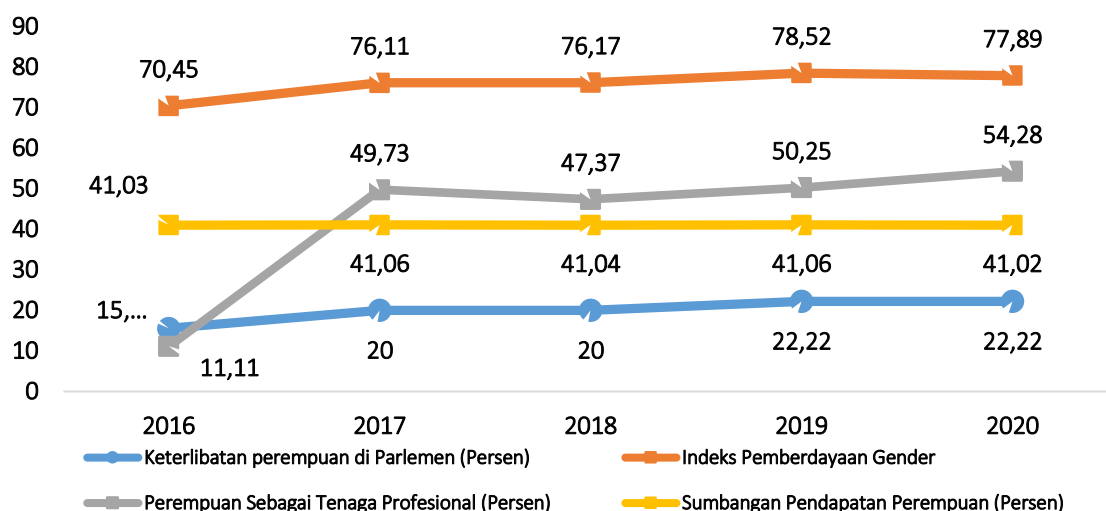


Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Apabila dilihat dari indikator pembentukan IDG selama tahun 2016-2020 trennya terus meningkat menandakan bahwa peran perempuan dalam bidang pendukung IDG

semakin membaik. Komponen pembentuk IDG dapat dilihat pada gambar dibawah :

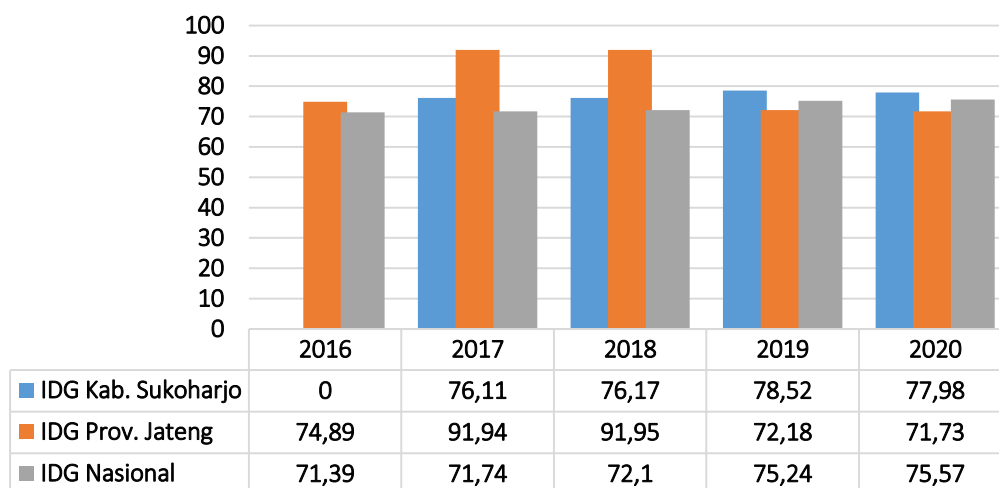
Gambar 2. 33
Komponen Pembentuk IDG Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, IDG Kabupaten Sukoharjo berada di atas IDG Provinsi dan Nasional. Perkembangan Perbandingan IDG Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi dan Nasional bisa dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2. 34
Perbandingan IDG Kabupaten Sukoharjo terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

2.2.2.3. Angka Partisipasi

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Sejak lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) untuk APK SD/MI dan APK SMP/MTs (2018-2020) sudah melebihi angka 100. Akan tetapi, pada tingkat SMA/MA, APK cenderung mengalami penurunan. Secara lengkap, berikut APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.19.
APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	APK SD/MI	106,99	101,63	101,07	103,99	102,33
2	APK SMP/MTs	94,34	99,88	100,02	103,69	101,77
3	APK SMA/MA	101,42	96,11	92,74	81,17	83,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2016-2020

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sukoharjo menurut jenis sekolah berbasis gender bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender didominasi perempuan dengan nilai 108,02. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/MTs lebih didominasi kaum laki-laki dengan nilai 112,34 dan untuk angka partisipasi kasar SMA/MA didominasi kaum perempuan dengan nilai 84,07.

Tabel 2.20.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/MI	97,33	108,29
	SMP/MTs	112,34	94,24
	SMA/MA	82,78	84,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut.

Pada tahun 2018, APM Sekolah Dasar (SD) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, demikian juga dengan APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan APM Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara urusan SMA menjadi kewenangan provinsi. Secara terperinci data APM di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21.
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM SD/MI	97,91	95,60	95,22	95,52	95,95
2.	APM SMP/MTs	86,74	82,94	79,02	81,44	82,38
3.	APM SMA/MA	68,56	68,08	64,23	63,50	64,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2016-2020

Perkembangan angka partisipasi murni berdasarkan gender di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 pada jenjang SD/MI dan SMA/MA tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs Laki-laki lebih tinggi daripada Perempuan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22.
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/MI	94,78	97,34
	SMP/MTs	87,52	78,72
	SMA/MA	65,32	63,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2020

2.2.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi tenaga kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu lima tahun (2016–2020), dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tren yang fluktuatif.

Tabel 2.21.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	66,08	67,29	66,46	68,17	68,74
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,33	2,27	2,78	3,40	6,93

Sumber : Dispernaker Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pada tahun 2016 hingga 2018 TPT cenderung turun. Kemudian pada tahun 2019 dan puncaknya pada tahun 2020 TPT mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Integrasi KLHS TPB pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.22.
Integrasi KLHS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Aspek Rencana Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

TPB	Permasalahan	Sasaran
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat belum mencapai 82,2% 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat masih 78,61% 3. Masih adanya penduduk miskin di tahun 2019 sebanyak 377.319 jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi murni SMP/MTs/ Sederajat sampai dengan 100% 2. Optimalisasi pelaksanaan program pengelolaan pendidikan

TPB	Permasalahan	Sasaran
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan 2. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Tercapainya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara Indikator mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	1. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas sebesar 0,007% 2. Memiliki potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi.	1. Menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas 2. Meningkatnya pemberdayaan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga

Sumber: Analisis berdasarkan Rekomendasi KLHS Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Kebudayaan

Pembangunan dan melestarikan kebudayaan diusahakan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keragaman suku bangsa dan bahasa. Termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa suku-bangsa, tetapi mayoritas adalah suku Jawa. Cagar Budaya yang dimiliki daerah meliputi :

1. Benda Cagar Budaya jumlah 192 buah
2. Bangunan Cagar Budaya jumlah 24 buah
3. Situs Cagar Budaya jumlah 6 lokasi
4. Kawasan Cagar Budaya jumlah 2 kawasan

Sedangkan untuk bahasa, menggunakan bahasa lokal (bahasa Jawa). Untuk kawasan wisata budaya meliputi:

1. Wisata situs bersejarah meliputi:
 - Patilasan Keraton Kartasura dan Keraton Pajang di Kecamatan Kartasura;
 - Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol;
 - Peninggalan Pabrik Gula Gembongan, Peninggalan Benteng Singopuran, dan Pesanggrahan Kandang Menjangan di kecamatan Kartasura;
2. Wisata religi/ziarah meliputi:
 - Makam Ki Ageng Purwoto Sidik dan makam Kyai Banyubiru di Kecamatan Weru;
 - Makam Balakan dan makam Mbah Marbot/Sayyidiman di Kecamatan Bendosari;
 - Makam Majasto di Kecamatan Tawang Sari;
 - Makam Kyai Shirot dan makam Patih Pringgoloyo di Kecamatan Kartasura;
3. Wisata Benda Cagar Budaya di Univet, Kecamatan Bendosari.

2.2.3.2. Olahraga

Pengembangan di bidang olahraga dibentuk untuk mewartahi prestasi atlet lokal atau para bibit atlet untuk dapat lebih berkembang di kancah yang lebih besar. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sukoharjo hingga tahun 2020 sejumlah 7 orang, dimana jumlah tersebut menurundrastis dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kondisi COVID-19.

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 memiliki 202 klub olah raga dimana terdapat 152 gedung olahraga sebagai fasilitasnya.

Tabel 2.23.
Perkembangan Kepemudaan & Keolahragaan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 – 2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Klub Olahraga	202	202	202	202	202
2	Jumlah Gedung Olahraga	124	148	152	152	152
3	Jumlah Atlet Berprestasi	268	259	184	171	7
4	Jumlah Prestasi Olahraga	253	287	329	246	8
5	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	40	40	42	46	42
6	Jumlah Organisasi / Klub Olahraga	30	30	33	37	37

Sumber : *Dispora Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020*

Upaya untuk mengoptimalkan sarpras olahraga harus terus digalakkan baik dari sisi kualitas pada sarpras yang sudah ada maupun menambah jumlah/kuantitasnya. Dari upaya perbaikan sarana prasarana keolahragaan ini diharapkan mampu memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan keolahragaan serta diharapkan juga semakin meningkatnya penyelenggaraan event-event keolahragaan yang secara otomatis akan meningkatkan minat masyarakat untuk hidup sehat melalui berolahraga.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 43,88% pada tahun 2017 sebesar 40,69% dan pada Tahun 2020 naik drastis menjadi 92,32%.

APK PAUD di Kabupaten Sukoharjo tergolong masih rendah, hal ini disebabkan dari masih rendahnya kesadaran serta pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum anak di sekolahkan ke tingkat pendidikan dasar (SD). Hal tersebut perlu dilakukan Sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat agar paham mengenai tujuan pendidikan anak usia dini.

b. Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) seluruh jenjang kelompok usia mengalami fluktuasi. Puncaknya pada tahun 2020 rata-rata angka partisipasi sekolah di seluruh kelompok usia berada pada angka terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya pandemic Covid-19 yang memaksa anak untuk belajar di rumah secara daring dan membutuhkan gawai atau perangkat lainnya untuk mengakses internet.

Tabel 2.24.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020
Kabupaten Sukoharjo

No	Kelompok Usia	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	7-12 Tahun	100	99,20	100	99,84	99,60
2	13-15 Tahun	99,35	98,63	100	99,64	98,86
3	16-18 Tahun	81,03	82,48	82,73	81,92	82,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2016-2020

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, termasuk pendidikan Non Formal turut diperhitungkan. Capaian Angka Partisipasi Kasar jenjang SD/MI di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2016s/d 2019 cenderung penurunan, dilihat dari data bahwa tahun 2016 APK SD/MI sebesar 106,99 persen menjadi 103,99 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 102,33.

Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan, pada kurun waktu yang sama bahwa APK SMP/MTs di tahun 2016 sebesar 94,34 menjadi 103,69 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 101,77.

APK SMA/MA cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 s/d 2020. Hal ini ditunjukkan dengan angka awal APK yaitu 101,42 dan pada tahun 2020 yaitu 83,41.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Pada kurun waktu tahun 2016-2020, APM Kabupaten Sukoharjo pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), SMP/MTs dan SMA/MA mengalami penurunan, dilihat dari data bahwa APS SD/MI pada tahun 2016 sebesar 97,61 persen menjadi 95,95 persen pada Tahun 2020. Sedangkan APM jenjang SMP/MTs mengalami penurunan mulai dari tahun 2016 angkanya sebesar 86,74 persen menjadi 82,38 pesen di tahun 2020. Pada APM SMA/MA angkanya dari mulai 68,56 pada tahun 2016 menjadi 64,43 pada tahun 2020.

4) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Angka putus sekolah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 pada jenjang SD/ sederajat sebesar 0,02 %, angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2018 tercatat sebesar 0,03 %.

Adapun Angka Putus Sekolah jenjang SMP/ sederajat di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,03 % dibandingkan dengan Angka Putus Sekolah tahun 2016, kemudian mengalami kenaikan Angka Putus Sekolah di tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 0,04 %.

5) Angka Kelulusan

Angka Kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2016s/d 2020 sudah mencapai 100.

6) Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat Pendidikan dasar per 10.000 jumlah usia Pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia Pendidikan Dasar

Pada kurun waktu 2016-2020, jumlah SD/MI di Kabupaten Sukoharjo, menurun pada tahun 2016 dari 557 unit menjadi 537 unit di tahun 2020, dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, sebanyak 67.270 orang, pada Tahun 2016, di tahun 2020 jumlah penduduk usia 7-12 tahun meningkat menjadi 69.465 orang, Berdasar data rasio ketersediaan SD/MI dengan jumlah penduduk usia 7-12 mengalami penurunan 82,25 menjadi 77,88 per 10.000 penduduk.

Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah ketersediaan sekolah dari 89 unit di tahun 2016 menjadi 92 unit di tahun 2020, dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun, sebanyak 35.018 orang di tahun 2016 menjadi 27.511 di tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar SMP/MTs pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 25,42 menjadi 34,54.

Tabel 2.25.
Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2020
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	SD / MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung sekolah SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Rasio	Jumlah Gedung sekolah SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Rasio
1.	Kartasura	58	4.943	117,34	13	2.949	44,08
2.	Sukoharjo	53	8.870	59,75	12	4.033	29,75
3.	Grogol	47	9.079	51,77	8	4.128	19,38
4.	Mojolaban	51	6.108	83,50	10	3.022	33,09
5.	Bendosari	46	4.816	95,51	5	2.500	20,00
6.	Polokarto	57	6.455	88,30	10	3.062	32,66
7.	Baki	35	5.277	66,33	7	2.444	28,64
8.	Weru	49	5.812	84,31	7	3.158	22,17
9.	Gatak	36	4.707	76,48	5	2.306	21,68
10.	Tawang Sari	36	5.015	71,78	6	2.366	25,36
11.	Nguter	37	4.924	75,14	5	2.742	18,23
12.	Bulu	32	3.459	92,51	4	2.282	17,53

Sumber : Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kab. Sukoharjo, 2020

7) Rasio Guru dan Siswa

Rasio guru terhadap siswa adalah perbandingan jumlah guru terhadap jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengidentifikasi ketersediaan antara jumlah pendidik dan jumlah ideal siswa untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Melihat data rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2016-2020, dapat digambarkan bahwa kondisi ketersediaan jumlah guru dan siswa cenderung tetap dengan perbandingan 1 guru paling banyak melayani 15 siswa di tahun 2020 jenjang SD dan SMP di tahun 2020 sesuai data 1 guru paling banyak melayani 15 murid. Rasio ini menunjukkan ketersediaan guru pada pelayanan Pendidikan dasar skala Kabupaten sudah baik. Tetapi sesuai data per kecamatan menunjukkan penyebaran guru kurang kurang merata.

Tabel 2.26.
Jumlah Guru dan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2020
menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	SD / MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1.	Kartasura	788	11.153	14,15	389	5.025	12,92
2.	Sukoharjo	770	10.730	13,94	486	7.159	14,73
3.	Grogol	623	9.105	14,61	284	3.750	13,20
4.	Mojolaban	610	7.899	12,95	362	5.062	13,98
5.	Bendosari	537	5.234	9,75	123	1.405	11,42
6.	Polokarto	656	7.768	11,84	292	3.423	11,72
7.	Baki	466	6.262	13,44	217	3.129	14,42
8.	Weru	531	4.688	8,83	181	2.569	14,19
9.	Gatak	403	4.222	10,48	144	1.940	13,47
10.	Tawang Sari	407	4.154	10,21	173	2.268	13,11
11.	Nguter	400	3.905	9,76	127	1.495	11,77
12.	Bulu	347	2.444	7,04	96	1.044	10,88

Sumber : Dapodik Kemendikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo, 2020

8) Fasilitas Pendidikan

Salah satu bentuk pelayanan pendidikan adalah penyediaan sekolah atau kondisi ruang kelas yang baik dan sesuai standar nasional pendidikan. Pada tahun 2016-2020, kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat) di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dari 4.059 bangunan/ruang kelas SD/ Sederajat terdapat 3.267 dalam keadaan baik, 604 dalam keadaan rusak sedang, dan 188 dalam keadaan rusak berat.

Sedangkan untuk bangunan/ruang kelas SMP/ sederajat pada tahun 2020 terdapat 188 bangunan/ruang kelas dalam kondisi rusak berat, 604 bangunan/ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dari 3.267 total bangunan/ruang kelas yang ada di kabupaten sukoharjo.

Berdasarkan data, rasio kondisi bangunan/ruang kelas untuk jenjang SD/ sederajat masih lebih rendah jika dibandingkan dengan jenjang SMP/ sederajat sehingga perlu adanya prioritas selanjutnya.

9) Angka Melanjutkan

Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs, selama kurun waktu tahun 2016-2020, berdasar data pada jenjang SD/MTs ke SMP/MTs, dan SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat mengalami fluktuasi.

Adapun pada jenjang SD/MI melanjutkan ke SMP/MI mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 103,35%, menjadi 102,54% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 s/d 2020 mengalami peningkatan dari 102,26% menjadi 106,90 %, hal tersebut dikarenakan adanya sekolah SMP/ sederajat berada di perbatasan Kabupaten.

Sedangkan jenjang melanjutkan dari SMP/MI ke SMA/SMK mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sebesar 116,85% menurun menjadi 106,35% pada tahun 2017 dan 2018, dan diikuti pada tahun 2019 sebesar 104,57% menjadi 103,15% pada tahun 2020.

10) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4

Kualifikasi S1/D4 merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Di Kabupaten Sukoharjo kondisi pada tahun 2016-2020, capaian kinerjanya menunjukkan peningkatan untuk jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, di Kabupaten Sukoharjo dari 8.011 di tahun tahun 2016 menjadi 8.527 di tahun 2020.

c. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan non formal berupa pendidikan kesejahteraan, pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang Pendidikan Masing Masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok

Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah.

Dalam mendukung pencapaian SDGs pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kabupaten Sukoharjo sudah mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan juga Pendidikan Kesetaraan. Pada tahun 2019 Kabupaten Sukoharjo baru memiliki 1 lembaga PKBM yang terakreditasi dari 15 lembaga PKBM yang dimiliki.

Adapun kinerja pembangunan aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat Tabel berikut :

Tabel 2.27.
Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	92,7	93,08	93,46	93,84	94,22
Pendidikan dasar:					
Angka Partisipasi Sekolah					
APS Kelompok Usia 7-12 Tahun	100	99,20	100	99,84	99,60
APS Kelompok Usia 13-15 Tahun	99,35	98,63	100	99,64	98,86
APS Kelompok Usia 16-18 Tahun	81,03	82,48	82,73	81,92	82,40
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
APK SD/MI	106,99	101,63	101,07	103,99	102,33
APK SMP/MTs	94,34	99,88	100,02	103,69	101,77
APK SMA/MA	101,42	96,11	92,74	81,17	83,41
Angka Partisipasi Murni (APM)					
APM SD/MI	97,91	95,60	95,22	95,52	95,95
APM SMP/MTs	86,74	82,94	79,02	81,44	82,38
APM SMA/MA	68,56	68,08	64,23	63,50	64,43
Angka Putus Sekolah					
SD/ sederajat	0,03	0,02	0,03	0,01	0,02
SMP/ sederajat	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
Angka Kelulusan					
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	100	100	100	100	100
Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah					
SD / MI					
Jumlah gedung sekolah	557	545	540	541	541
Jumlah penduduk usia 7 -12	67.720	68.221	68.788	69.465	
Rasio	82,25	79,88	78,50	77,88	
SMP/MTs					
Jumlah Gedung sekolah	89	89	92	92	92
Jumlah penduduk usia 13 -15	35.018	35.276	35.067	27.511	
Rasio	25,42	25,23	26,24	34,54	
Rasio Guru dan Siswa					
SD					
Jumlah guru	5.145	4.538	4.413	4.427	
Jumlah murid	59,883	59.315	58.621	57.312	
Rasio	1:11	1:13	1:13	1:12	1:13
SMP					
Jumlah guru	2.075	2.000	2.002	2.053	
Jumlah murid	29.782	29.967	30.366	31.299	
Rasio	1:14	1:15	1:15	1:15	1:15

Indikator	Bangunan/ruang kelas	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kondisi SD/ sederajat						
Baik		2.613	2.710	2.804	3.117	3.267
Rusak sedang		918	889	858	765	604
Rusak berat		314	258	202	177	188
Jumlah		3.845	3.857	3.864	4.059	4.059
Kondisi SMP/ sederajat						
Baik		1.101	1.098	1.106	1.158	1.177
Rusak sedang		168	172	160	107	92
Rusak berat		17	14	11	17	13
Jumlah		1.286	1.284	1.277	1.282	1.282
Angka Melanjutkan						
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs		103,35	102,54	102,26	106,34	106,90
Angka Melanjutkan dari SMP/MI ke SMA/SMK		116,85	106,35	106,35	104,57	103,15
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4						
Guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4		8.011	8.248	8.441	8.446	8.527
Data Lembaga Pendidikan non Formal						
PKBM		24	23	19	19	19
SKB		1	1	1	1	1
LPK		121	114	104	84	84
Jumlah		146	138	124	104	104

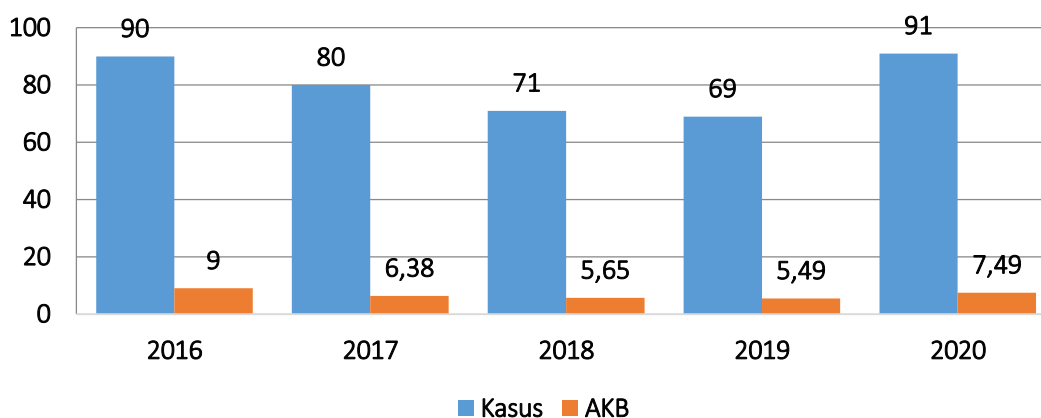
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo, 2016-2020

2.3.1.2 Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 menunjukkan tren fluktuatif dari 9,94 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2016 menjadi 5,49 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 7,49. Adapun penyebab kematian bayi di Kabupaten Sukoharjo yaitu berat badan lahir rendah, kelainan congenital, asfiksia, sepsis kejang, muntaber dan dehidrasi serta faktor lainnya.

Gambar 2. 35
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 kasus Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

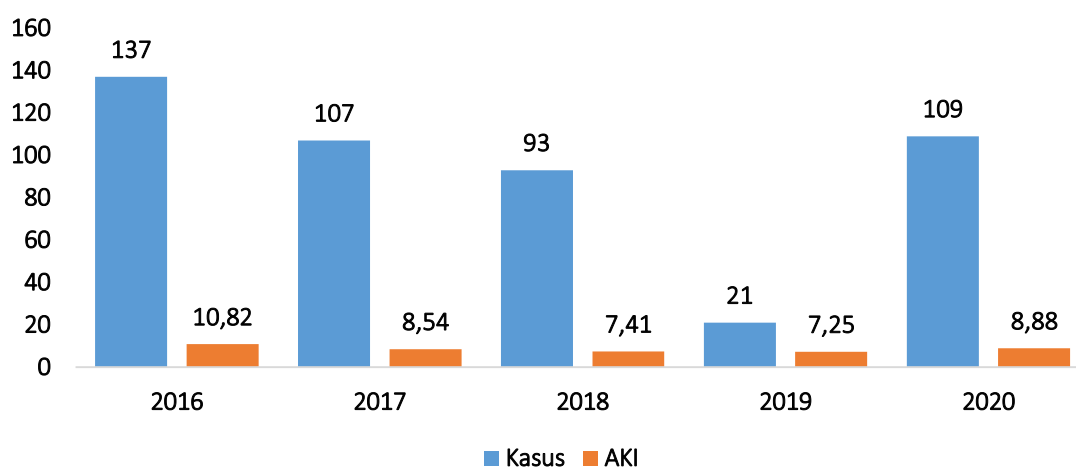


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, 2016-2020

b. Angka kematian Balita (AKBa)

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan tren penurunan dari 10,82 pada tahun 2016 menjadi 7,25 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 8,88. Adapun penyebab kematian balita Kabupaten Sukoharjo terbanyak pada kasus komplikasi/penyakit yang diderita balita dan kasus kecelakaan pada balita. Oleh karena itu, perlu edukasi dan pendampingan.

Gambar 2. 36
Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

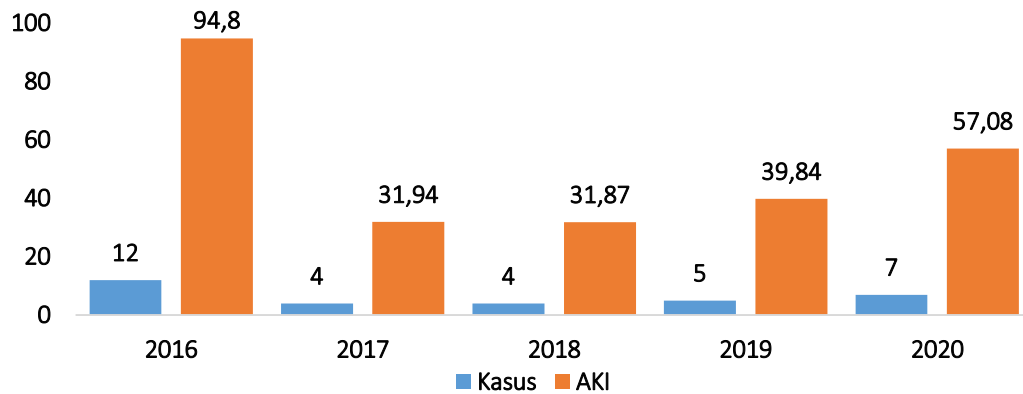


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, 2016-2020

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu Maternal menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan dan tingkat ketersediaan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, melahirkan nifas. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan fluktuasi, dari tahun 2016-2018 terjadi penurunan dari 94,80 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 31,87 kasus per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018, tapi di tahun 2019 ada kenaikan dibanding tahun 2018 menjadi 39,84 kasus per 1000 Kelahiran Hidup. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 57,08. Adapun penyebab kematian ibu Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh komplikasi/penyakit yang diderita ibu seperti Heparomegali, trail dan Emboli air ketuban.

Gambar 2. 37
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, 2016-2020

d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik di beberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan posyandu.

Pembentukan posyandu dilakukan di tingkat RW agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Berikut adalah rasio Posyandu per satuan balita kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.28.
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	1.161	1.219	1.188	1.190	1.190
2.	Jumlah Balita	12.656	12.522	12.550	12.548	12.262
2.	Rasio Posyandu per satuan Balita	1:11	1:10	1:11	1:11	1:10
	Rasio Ideal					1:50

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, 2016-2020

e. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Persatuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik, Pustu merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayahnya. Sampai dengan tahun 2020, rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu terhadap jumlah penduduk sebesar 1 : 5.482, semakin kecil dibanding tahun 2015 sebesar 1 : 6.7425. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan tingkat pertama semakin

optimal yang artinya 1 unit Puskesmas, Poliklinik, Pustu melayani 5.482 penduduk di tahun 2020. Kondisi ini sudah memenuhi standar ideal, namun dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem rujukan dari BPJS, pelayanan Puskesmas, Poliklinik, Pustu masih perlu ditingkatkan utamanya dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Tabel 2.29.
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	893.914	899.550	898.774	906.403	910.024
2.	Jumlah Puskesmas	12	12	12	12	12
3.	Jumlah puskesmas Pembantu	57	57	57	57	57
4.	Jumlah Poli klinik	68	82	88	98	97
	Rasio	1:6.524	1:5.957	1:5.724	1:5.427	1:5.482

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, 2016-2020

f. Rasio Dokter per satuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam Pendidikan dibidang Kesehatan. Dalam kurun waktu 2016-2020 rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuatif, tetapi di tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, dari 571 dokter menjadi 755 dokter di tahun 2020. Dilihat dari data dokter gigi rasio masih sangat kecil.

Tabel 2.30.
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020 Kabupaten Sukoharjo

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pednduduk	893.914	899.550	898.774	906.403	910.024
2.	Dokter Umum	319	310	303	335	380
	Rasio	35,69	34,46	33,97	37	41,8
3.	Dokter Spesialis	192	174	203	278	294
	Rasio	21	19,34	23	30,7	32,3
4.	Dokter Gigi	60	62	88	78	81
	Rasio Dokter	6,74	6,89	9,87	8,6	8,9

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo. 2016-2020

g. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter tidak terlepas juga dibantu oleh tenaga paramedis seperti perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi, dalam mendukung pelayanan. Dalam kurun waktu 2016-2019 rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan, dari ke empat tenaga paramedis tersebut sampai tahun 2020, rasio perawat meningkat menjadi 225,3 sedang petugas gizi rasio masih relatif kecil sebesar 10,3.

Tabel 2.31.
Data Tenaga paramedis per satuan penduduk tahun 2016-2020
Kabupaten Sukoharjo

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	893.914	899.550	898.774	906.403	910.024
2.	Bidan	740	499	692	691	728
	Rasio	82,78	55,47	77,59	76,2	80
3.	Perawat	1.398	1.353	1.518	1.915	2050
	Rasio	156	150	170	211,3	225,3
4.	Tenaga Farmasi	468	482	552	496	567
	Rasio	52,35	53,58	61,89	54,7	62,3
5.	Tenaga Gizi	76	79	64	70	94
	Rasio	8,50	8,78	7,18	7,7	10,3
	Rasio Petugas Kesehatan	143,64	117,84	145,53	138,68	185,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten. Sukoharjo, 2016-2020

h. Jumlah Penduduk Pemanfaat Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Pemenuhan pembiayaan masyarakat miskin sebagai salah satu upaya penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar, maka pemerintah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN PBI).

Tabel 2.32.
Persentase Penduduk Pemanfaat Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
(PBI) tahun 2016-2020 Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Penerima JKN PBI (%)	Penerima PBI APBD Prov (%)	Penerima PBI APBD Kab. (%)
2016	55,14	0,65	1,21
2017	51,33	0,82	2,28
2018	43,72	0,82	10,51
2019	39,41	1,65	10,21
2020	43,76	0,80	5,68

Sumber : BDT, Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten, BPJS. 2016-2020

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan dan Jembatan

Secara umum, jalan di Kabupaten Sukoharjo memiliki tiga kewenangan yaitu nasional, provinsi dan kabupaten. Dari masing-masing kewenangan tersebut diketahui memiliki panjang jalan yang ada di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.33.
Panjang Jalan Menurut Kewenangan

Kewenangan	Panjang jalan(km)
Nasional	14,56
Provinsi	55,59
Kabupaten	605,12
Jumlah	675,27

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2020

Menurut data di atas, panjang jalan di Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan sepanjang 675,27 km. Jalan terpanjang dimiliki oleh kewenangan kabupaten. Dalam hal ini pemeliharaan jalan kabupaten perlu difokuskan agar aksesibilitas kegiatan di Kabupaten Sukoharjo berjalan dengan baik.

Tabel 2.34.

Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jalan	Panjang jalan (km)									
		2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
1	Baik	226,31	37,39	220,92	36,51	121,28	20,04	220,92	36,50	400,01	66,10
2	Sedang	157,31	25,99	170,81	28,21	407,22	67,29	170,81	28,22	134,73	22,26
3	Rusak Ringan	158,65	26,21	154,57	25,52	56,62	9,35	154,47	25,52	67,46	11,15
4	Rusak Berat	58,81	9,71	58,92	9,74	20,00	3,30	58,92	9,73	2,92	0,48
	Jumlah	605,12	100	605,12	100	605,12	100	605,12	100	605,12	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 menunjukkan bahwa mayoritas kondisi jalan di Kabupaten Sukoharjo dalam kondisi mantap. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kualitas jalan ditandai dengan dominasi jalan memiliki kondisi baik sebesar 66,10%, dari Tahun 2019 sebesar 36,50%. Ini artinya perhatian dari dinas terkait kondisi jalan sudah meningkat namun tetap perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar aksesibilitas di Kabupaten Sukoharjo semakin baik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas jalan antara lain dengan melakukan pelebaran jalan. Kegiatan pelebaran jalan dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan panjang jalan yang lebarnya sesuai dengan standar dari 30,43 km menjadi 44,42 km. Walaupun pada tahun 2020 tidak ada kegiatan pelebaran jalan pemerintah tetap mempertimbangkan kualitas jalan dengan cara memperbaiki jalan di ruas-ruas tertentu.

Tabel 2.35.

Persebaran Kualitas Jalan di Kabupaten Sukoharjo (Lebar Jalan yang Sesuai standar >6m)

No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Lebar Jalan (m)					Panjang Jalan yang lebarnya sesuai standar > 6m (km)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
33	Gentan - Bekonang	Bendosari/ Mojolaban	4,50	4,50	4,50	7,00	7,00				5,72	5,72
40	Bekonang - Mojo	Mojolaban	5,00	5,00	5,00	6,50	6,70				4,28	4,28
48	Bahu - Dlopo	Grogol	5,50	5,50	5,50	7,00	7,00				2,59	2,59
49	Bacem - Tanjunganom	Grogol	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89
50	Tanjunganom - Daleman	Grogol/ Baki	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94
63	Tegalan - Mangkuyudan	Kartasura	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
64	Pajang - Parangtejo	Kartasura	7,00	7,00	7,00	10,50	11,00	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Jalan Dalam Kota Sukoharjo											
175	Jl. Pemuda	Sukoharjo	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
186	Jl. Veteran	Sukoharjo	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Lebar Jalan (m)					Panjang Jalan yang lebarnya sesuai standar > 6m (km)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
212	Jl. Brigjen Katamso	Sukoharjo	4,00	4,00	4,00	6,50	8,00				1,40	1,40
253	Jl. Pahlawan	Sukoharjo	7,10	7,10	7,10	6,00	7,50	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
254	Jl. Dr. Muwardi	Sukoharjo	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	Jl. Tawes	Sukoharjo	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
280	Jl. Wandyo Pranoto	Sukoharjo	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Jalan Dalam Kota Kartasura												
352	Jl. Adi Sumarmo	Kartasura	13,40	13,40	13,40	13,00	12,50	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
363	Brontowiryan	Kartasura	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Jalan Dalam Kota Grogol												
388	Jl. Kasuari	Grogol	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
389	Jl. Cendrawasih	Grogol	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
390	Jl. Merak	Grogol	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
400	Jl. Sakura	Grogol	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
405	Jl. Kanguru I	Grogol	8,00	8,00	8,00	8,00	6,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
406	Jl. Kanguru II	Grogol	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
JUMLAH								30,43	30,43	30,43	44,42	44,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.36.
Kondisi Jembatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2020

NO	KONDISI JEMBATAN	TAHUN			
		2019	%	2020	%
1	BAIK	146	89%	160	97,56%
2	SEDANG	-	-	4	2,44%
3	RUSAK RINGAN	13	8%	0	0%
4	RUSAK	2	1%	-	-
5	RUSAK BERAT	3	2%	0	0%
JUMLAH		164	100%	164	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas kondisi jembatan di Kabupaten Sukoharjo juga sejalan dengan kualitas jalan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan kondisi jembatan dalam kondisi baik yaitu dari 89% di tahun 2019 menajai 97,56% di tahun 2020. Kondisi ini perlu dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan dengan beberapa upaya agar aksesibilitas antarwilayah semakin baik.

b. Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan hal vital dalam kehidupan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk kebutuhan teknis kewilayahan mengingat dominasi penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo adalah pertanian. Dalam hal ini sarana dan prasarana irigasi sangat dibutuhkan. Kondisi sumber daya air berupa air permukaan berupa wilayah sungai kabupaten yang terdiri atas :

- a. Jaringan sumber daya air lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota, berupa pendayagunaan Wilayah Sungai Bengawan Solo.
- b. Waduk
Waduk berupa pengembangan dan pemeliharaan Waduk Mulur yang berada di Kecamatan Bendosari. Waduk Mulur berfungsi untuk irigasi dengan luas 43 ha, volume 2.750.000 m³.
- c. Bendung
Bendung Colo yang berfungsi untuk melayani kawasan pertanian di Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen dan Ngawi.
- d. Embung
Kondisi kawasan pertanian terutama dengan lahan tadah hujan perlu pengembangan embung untuk menjamin ketersediaan air sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Berikut adalah persebaran embung yang terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.37.
Persebaran Embung di Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama Embung	Lokasi Kecamatan	Luas (ha)	Volume (m ³)
1	Paluhombo	Bendosari	0,25	5.000
2	Bulu	Polokarto	0,25	5.000
3	Tanjung	Nguter	0,18	3.600
4	Ponowaren	Tawang Sari	0,25	5.000
5	Grogol	Weru	0,40	10.000
6	Jagan	Bendosari	0,12	2.250
7	Puhgogor	Bendosari	0,06	1.875
8	Celep	Nguter	0,46	-
9	Kriwen	Sukoharjo	0,2	6.000
10	Sanggung	Bulu	0,25	7.500
11	Penggik	Tawang Sari	0,08	3.200
12	Gentan	Bulu	0,8	-
13	Manisharjo	Bendosari	-	-
14	Pengkol	Nguter	-	-
15	Kenep	Sukoharjo	0,16	4.800
16	Serut	Nguter	0,45	-
17	Juron	Nguter	-	21.000
18	Kemasan	Polokarto	-	5.700

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Persebaran embung di Kabupaten Sukoharjo hanya terletak pada lokasi Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Weru, Sukoharjo dan Bulu. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut yang memiliki potensi pertanian tinggi. Oleh karena itu, penyediaan sumber air baku sudah memperhatikan kebutuhan air untuk kepentingan pertanian.

Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan sumberdaya air baku ada beberapa kewenangan. Kewenangan tersebut antara lain:

- a. Status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, meliputi DI Colo Barat dan DI Colo Timur
- b. DI Trani merupakan Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

- c. Status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi 70 DI. Sistem jaringan irigasi yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo berupa pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, terdiri atas : Jaringan irigasi primer; Jaringan irigasi sekunder; dan Jaringan irigasi tersier.

Berikut adalah persebaran daerah irigasi yang melayani Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.38.

Daerah Irigasi Di Kabupaten Sukoharjo

No	Nama DI	Luas (Ha)	Lokasi
I KEWENANGAN PUSAT			
1	DI Colo Barat	3.021	Lintas Kab. Sukoharjo, Klaten & Wonogiri
2	DI Colo Timur	7.484	Lintas Kab. Sukoharjo, Karanganyar, Sragen & Ngawi
3	DI Pepen	51	Bendosari
II KEWENANGAN PROVINSI			
1	DI Bakdalem	40	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
2	DI Baran	102	Lintas Kab. Sukoharjo & Boyolali
3	DI Cangkring	90	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
4	DI Dayu	52	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
5	DI Glodog	13	Lintas Kab. Sukoharjo & Boyolali
6	DI Gunungmaling	41	Lintas Kab. Sukoharjo & Boyolali
7	DI Jetu	20	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
8	DI Jumeneng	690	Lintas Kab. Sukoharjo & Klaten
9	DI Kwangsan	284	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
10	DI Lemahbang	686	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
11	DI Majegan	25	Lintas Kab. Sukoharjo & Boyolali
12	DI Mindi I	28	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
13	DI Ngasem	63	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
14	DI Nyaen/Tirip	206	Lintas Kab. Sukoharjo & Klaten
15	DI Pakelan	23	Lintas Kab. Sukoharjo & Boyolali
16	DI Pundung	272	Lintas Kab. Sukoharjo, Klaten & Boyolali
17	DI Semanding	145	Lintas Kab. Sukoharjo & Wonogiri
18	DI Sidomakmur	128	Lintas Kab. Sukoharjo & Wonogiri
19	DI Trani	1.228	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
20	DI Tritis	14	Lintas Kab. Sukoharjo & Karanganyar
21	DI Walikan	60	Lintas Kab. Sukoharjo, Wonogiri & Karanganyar
	Jumlah	4.210	
III KEWENANGAN KABUPATEN			
1	DI Baki Tinggen	245	Baki
2	DI Banteng	24	Kartasura
3	DI Bareng	193	Baki
4	DI Baseng	37	Bulu
5	DI Bedodo	109	Gatak
6	DI Bende	79	Weru
7	DI Bendung	31	Polokarto
8	DI Brau	162	Nguter
9	DI Brumbung	60	Weru
10	DI Bugel	26	Grogol
11	DI Buret	16	Nguter
12	DI Bulu	25	Polokarto
13	DI Cendono	41	Polokarto
14	DI Dadap	12	Nguter
15	DI Dari	187	Polokarto
16	DI Gangin	41	Weru
17	DI Garotan	260	Bulu
18	DI Gentan	84	Bulu

No	Nama DI	Luas (Ha)	Lokasi
19	DI Godong	185	Gatak
20	DI Gondang	40	Polokarto
21	DI Gowanan	34	Kartasura
22	DI Grogol	550	Bendosari/Polokarto
23	DI Jatimalang	156	Tawang Sari
24	DI Jantran	29	Kartasura
25	DI Jetis	14	Grogol
26	DI Kajoran	139	Weru
27	DI Kalangan	190	Weru
28	DI Kaliduren	124	Polokarto
29	DI Kamal	20	Bulu
30	DI Karangasem	63	Gatak
31	DI Kedungbulus	70	Bendosari
32	DI Kedungdowo	120	Weru
33	DI Kepu	34	Kartasura
34	DI Krecekan	68	Kartasura
35	DI Kubukan	37	Weru
36	DI Kucing	15	Weru
37	DI Kudus	42	Baki
38	DI Langkap/Sirahan	41	Tawang Sari
39	DI Luang	263	Gatak
40	DI Madoh	14	Grogol
41	DI Malangan	78	Bulu
42	DI Mandungan	240	Gatak
43	DI Mantung	42	Grogol
44	DI Mindi 2	32	Polokarto
45	DI Mojorejo	50	Bendosari
46	DI Ngabeyan	47	Kartasura
47	DI Ngadiwarno	38	Weru
48	DI Nglondo	140	Baki
49	DI Pacinan	12	Bulu
50	DI Palur	30	Mojolaban
51	DI Papungan	78	Kartasura
52	DI Pilang	134	Weru
53	DI Plumbon	40	Mojolaban
54	DI Premban	128	Mojolaban
55	DI Prenggan	56	Grogol
56	DI Pucungan	60	Nguter
57	DI Sambeng II	55	Polokarto
58	DI Sambiloro	30	Bendosari
59	DI Sanan	39	Bulu
60	DI Sanggang	10	Bulu
61	DI Sangkalan	30	Bendosari
62	DI Bd. Dayu	174	Polokarto
63	DI Senden	174	Gatak
64	DI Sidodadi	65	Nguter
65	DI Sidowayah	10	Weru
66	DI Siluwur	400	Weru
67	DI Sumber	34	Polokarto
68	DI Tanjung	60	Nguter
69	DI Tegalgede	115	Gatak
70	DI Wirogunan	73	Kartasura
	Jumlah	6.364	

Sumber: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293/KPTS/M/2014

Luas daerah irigasi kewenangan pusat provinsi dan kabupaten secara berturut-turut yaitu 10.556 hektar, 4210 hektar dan 6.364 hektar. Menurut data daerah irigasi

sudah tersedia di seluruh kecamatan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.39.
Kondisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo

No.	Kondisi Irigasi	Tahun		Jumlah DI
		2019	2020	
			Luas (ha)	
1	Baik	59%		70 DI
2	Rusak Ringan	16%		
3	Rusak Sedang	15%	6,364	4,353
4	Rusak Berat	10%		
	Jumlah	100%		100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2019-2020

Dari 70 DI di atas, terdapat penurunan kualitas kondisi daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo. Daerah irigasi dengan kondisi baik turun dari 59% menjadi 29% pada dua tahun terakhir. Dinas perlu meningkatkan perhatian terhadap hal ini mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan kerawanan bencana kekeringan sehingga kerugian di masa mendatang bisa dicegah.

Untuk daya dukung air (ketersediaan dan kebutuhan air) di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan perhitungan kebutuhan air tahun 2019 (DA) untuk keperluan penduduk, sawah, kebun dan peternakan sebesar 255.779.738,49 m³/ tahun dengan ketersediaan air (SA) sebesar 573.362.827,83 m³/ tahun. Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa (SA) kebutuhan air tahun 2019 (573.362.827,83 m³/ tahun) > (DA) ketersediaan air, (255.779.738,49 m³/ tahun), sehingga kondisi daya dukung air dinyatakan surplus.

c. Drainase

Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Drainase di Kabupaten Sukoharjo terbagi atas tiga jenis yaitu primer, sekunder dan tersier. Drainase primer berupa saluran mengarah langsung ke sungai seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Premulung, Sungai Samin dan lain-lain. Saluran sekunder berupa selokan besar yang mengarah ke saluran primer. Sementara itu, saluran yang berasal dari perumahan disebut dengan saluran tersier. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Sukoharjo masih merupakan drainase gabungan dengan sistem drainase terbuka, dimana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sehingga, kondisi drainase yang baik atau tidak tersumbat dapat diwakili oleh ada/tidaknya banjir genangan akibat curah hujan yang tinggi. Semakin luas banjir genangan menunjukkan drainase tidak berfungsi dengan baik.

Berdasarkan tabel di bawah pembangunan drainase di Kabupaten Sukoharjo tiap tahunnya menurun. Hal ini perlu diperhatikan mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki kerawanan bencana akan banjir di seluruh wilayah.

Tabel 2.40.
Panjang Pembangunan Drainase Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2018-2020

Tahun	Panjang Pembangunan Drainase
2018	7.846,50 m
2019	6.564,00 m
2020	4.071,00 m
Total	18.481,50 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

d. Air Minum

Sumber air bersih yang digunakan keluarga/rumah tangga dapat dibedakan menurut bentuknya yaitu perpipaan dan non perpipaan. Sumber air bersih perpipaan menurut asal penyediaan dananya terbagi menjadi 4 yaitu PDAM, PAMSIMAS, DAK dan APBD. Pelayanan air bersih melalui PDAM di Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh PDAM Tirta Makmur. Untuk melayani penyediaan air bersih tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air, dan sumur dalam. Sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi. Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Dalam hal ini PDAM menyediakan air bersih yang aman. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan dilakukan melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Tabel 2.41.
Persentase Penggunaan Air Minum Layak di Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Total Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Perpipaan			Non Perpipaan		Total perpipaan dan non perpipaan	
		Jiwa	SR	%	Jiwa	%	Jiwa	%
2016	893.914	243.791	49.274	27,82	449.069	51,24	692.860	77,51
2017	899.550	244.793	52.888	27,86	479.050	54,53	723.843	80,47
2018	878.374	265.162	56.620	30,11	510.669	57,99	775.831	88,33
2019	891.912	292.341	61.388	33,12	503.773	57,07	796.114	89,26
2020	907.587	333.341	63.722	36,73	503.773	55,51	837.114	92,24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan DPKP Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Penggunaan air minum layak di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada Tahun 2018 sebesar 89,26 % dan mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 92,24 %. Hal ini juga diiringi dengan peningkatan penggunaan air minum aman. Walaupun demikian penggunaan air minum masih belum menjangkau seluruh rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah tetap perlu mengupayakan akses air bersih agar dapat mencapai seratus persen jangkauan. Selain itu, menyediakan secara kuantitas, kualitas air harus dijaga terutama dalam penyediaan air bersih yang layak dan aman.

Tabel 2.42
Persentase Penggunaan Air Minum Aman di Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Total Penduduk Kabupaten Sukoharjo	PDAM		
		Jiwa	SR	%
2016	893.914	23.279	187.404	21,06
2017	899.550	24.864	147.206	16,47
2018	878.374	27.446	162.520	18,07
2019	891.912	30.694	179.402	20,42
2020	907.587	33.030	193.178	21,82

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan DPKP Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

d. Sanitasi

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Menurut WHO definisi sanitasi merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Di Kabupaten Sukoharjo untuk sanitasi layak diterapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

Tabel 2.43.
Capaian Sanitasi Layak Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo (Jiwa)	Pengguna jamban (SR/KK)	Pengguna jamban (Jiwa)	%
2016	893.914	215.882	647.646	72,45
2017	899.550	234.885	704.655	78,33
2018	878.374	250.107	750.321	85,42
2019	891.912	258.112	774.336	86,82
2020	907.587	255.036	888.591	97,91

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan data tabel capaian sanitasi layak diketahui bahwa pengguna jamban yang layak meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini juga diiringi dengan capaian sanitasi aman di Kabupaten Sukoharjo walaupun pada tahun 2020 menurun sedikit yaitu sebesar 0,01%. Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 0% serius dilakukan dan diiringi dengan penyediaan prasarana sanitasi.

Tabel 2.44.
Capaian Sanitasi Aman Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

TAHUN	TOTAL PENDUDUK	SPALD - S			SPALD - T			SPALD - S & T		
		SR	JIWA	%	SR	JIWA	%	SR	JIWA	%
2016	893.914	3.169	15.845	1,77	500	2.500	0,28	3.669	18.345	2,05

TAHUN	TOTAL PENDUDUK	SPALD - S			SPALD - T			SPALD - S & T		
		SR	JIWA	%	SR	JIWA	%	SR	JIWA	%
2017	899.550	3.249	16.045	1,78	500	2.500	0,28	3.749	18.545	2,06
2018	878.374	3.262	16.370	1,86	500	2.500	0,28	3.762	18.870	2,15
2019	891.912	3.367	17.320	1,94	459	2.295	0,26	3.826	19.615	2,20
2020	907.587	3.417	17.570	1,94	459	2.295	0,25	3.876	19.865	2,19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Penanganan pengelolaan air limbah diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh pemerintah salah satu contohnya yaitu IPAL Gumpang dan Jombor. Selain itu, ada juga Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Mojorejo, Bendosari. Berikut adalah data perkembangan IPAL Komunal Perumahan:

Tabel 2.45.

Jumlah IPAL Komunal Perumahan Kabupaten Sukoharjo

No.	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Layanan (KK)
1	2016	31	1.854
2	2017	33	1.994
3	2018	46	2.254
4	2019	77	2.584
5	2020	87	2.662

Sumber : IKPLHD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Sebaran wilayah yang terdapat pengelolaan limbah (IPAL) baik domestik maupun IPAL biogas, tersebar di seluruh wilayah kecamatan sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pembangunan IPAL sehingga diharapkan dapat merata diseluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

e. Penataan Ruang

Pelayanan umum urusan penataan ruang Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan, bahwa terhadap kawasan-kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran RTRW.

Capaian kinerja penataan ruang terkait ketaatan terhadap rencana tata ruang. Dalam kurun waktu RPJMD tahun 2016 – 2020, ketaatan terhadap rencana tata ruang mengalami peningkatan yaitu di tahun 2016 sebesar 25%, tahun 2017 sebesar 30%, tahun 2018 sebesar 35%, tahun 2019 sebesar 40%, dan tahun 2020 sebesar 45%.

Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, dan telah dilakukan revisi terkait dengan kesesuaian dengan kebutuhan ruang untuk pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan terjadinya dinamika pembangunan, perubahan regulasi sektoral, revisi RTRW Nasional, serta banyaknya kegiatan strategis di tingkat nasional dan regional.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46.
Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo

No.	Produk Hukum	Isi
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031
2.	Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukoharjo Tahun 2020-2039
3.	Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Grogol Tahun 2020-2039
4.	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kartasura Tahun 2020-2039

Sumber : JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasarkan data tersebut Kabupaten Sukoharjo diketahui telah memiliki beberapa regulasi tentang rencana tata ruang. Rencana-rencana tersebut masih bersifat makro sehingga diharapkan di masa mendatang dapat disusun rencana lebih rinci lagi seperti Peraturan Zonasi dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) agar penataan ruang lebih terarah.

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya. Potensi wilayah tersebut terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031.

2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah/tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.

Kebutuhan rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,87% dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan *backlog* rumah.

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah *backlog* rumah tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan kecenderungan peningkatan baik sisi *backlog* kepemilikan maupun *backlog* kepemilikan. Berdasarkan perhitungan data perumahan dari BPS tahun 2017, *Backlog Milik* sebesar 45.826 dan *Backlog Huni* sebesar 28.524.

Untuk penyediaan rumah yang layak huni bagi seluruh kepala keluarga sampai akhir tahun 2020, diperkirakan membutuhkan 289.428 unit rumah. Pada tahun 2021 dilakukan validasi data yang meliputi jumlah rumah baik yang layak huni maupun yang tidak layak huni serta jumlah kepala keluarga untuk mengetahui angka *backlog* sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil validasi data perumahan tahun 2021 didapatkan informasi jumlah *backlog* sebanyak 25.518 KK.

Pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat lain agar dapat berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Penanganan RTLH sampai dengan Tahun 2020 sejumlah 7.026 sehingga jumlah RTLH pada tahun 2020 tinggal sejumlah 10.866 dari jumlah semula 17.982 di tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.47.
Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Data Awal dari Basis Data Terpadu RTLH	RTLH yang Ditangani	Jumlah RTLH
1	2016		1.164	16.728
2	2017		1.222	15.506
3	2018	17.892	1.356	14.150
4	2019		1.469	12.681
5	2020		1.815	10.866
Jumlah RTLH yang tertangani			7.026	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Makin berkurangnya persentase RTLH juga berdampak signifikan terhadap penurunan persentase lingkungan kumuh di Kabupaten Sukoharjo. Dari tahun ke tahun, persentase luasan lingkungan kumuh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48.
Persentase Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha)	Luas Kabupaten (Ha)	%
1	2016	202,567	46.667	0,434
2	2017	197,023	46.667	0,414
3	2018	176,009	46.667	0,377
4	2019	78,863	46.667	0,169
5	2020	45,884	46.667	0,098

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Pembangunan Kawasan Permukiman meliputi pembangunan permukiman yang sehat dan layak huni. Membangun permukiman merupakan landasan utama dalam membangun bangsa, karena dengan mewujudkan permukiman yang layak bagi masyarakat akan berkontribusi besar terhadap pemenuhan hak dasar rakyat dan pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa yang berjiwa diri serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Pembangunan kawasan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. Beberapa langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut di antaranya melalui pencapaian amanah pembangunan nasional dengan mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan hingga 0%. Luasan permukiman kumuh yang tertangani sampai dengan tahun 2020 seluas 156,683Ha.

Tabel 2.49.
Data Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

No	Tahun Penanganan	Capaian Penanganan Kumuh
1	2017	9,544
2	2018	17,014
3	2019	97,146
4	2020	32,979
Total		156,683

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, 2020

Salah satu indikator dalam SPM bidang perumahan adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) yang memadai, di mana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menangani permasalahan penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah. Berikut adalah data PSU yang sudah diserahkan tahun 2020.

Tabel 2.50.
Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Jumlah PSU yang diserahkan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Weru	-	-	-	-	-
2	Bulu	-	-	-	-	-
3	Tawang Sari	-	-	-	-	-
4	Sukoharjo	2	3	-	2	5

No	Kecamatan	Jumlah PSU yang diserahkan				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Nguter	-	-	-	-	-
6	Bendosari	-	-	-	-	-
7	Polokarto	-	-	-	-	-
8	Mojolaban	1	1	-	1	5
9	Grogol	-	2	-	2	1
10	Baki	-	3	-	1	3
11	Gatak	-	3	-	3	1
12	Kartasura	1	1	-	-	1
Jumlah		4	17	-	9	16

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya pengembang yang belum menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2020 baru sebanyak 16 atau 46 pengembang.

Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai tahun anggaran 2021 sudah memenuhi ketentuan didalam Permendagri Nomor 100 tahun 2018 yaitu mengalokasikan anggaran bagi korban bencana alam untuk perbaikan rumah.

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat. Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Makin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan makin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data jumlah personel Satpol PP hingga akhir tahun 2020 tercatat sebesar 196 orang, terdiri atas 85 personel PNS dan 99 personel non-PNS, dan 2 personel berstatus K2. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sejumlah 907.587, maka rasio jumlah Satpol PP di Kabupaten Sukoharjo per 10.000 penduduk adalah 2,16. Artinya, tiap 10.000 penduduk terdapat 2 personel Satpol PP. Angka rasio yang sangat kecil.

Tabel 2.51.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja ASN Per 10.000 Penduduk (PNS)
Kabupaten Sukoharjo 2016-2020

Tahun	Jumlah Pol PP	Jumlah Penduduk	Persentase
2016	89	890.675	0.797
2017	134	893.169	1.008

Tahun	Jumlah Pol PP	Jumlah Penduduk	Persentase
2018	155	891.923	0.975
2019	185	906.403	0.982
2020	196	907.587	0.936

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, 2015-2020

Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat dari 1,011 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 2,041 per 10.000 penduduk pada tahun 2020, karena adanya tambahan Banpol di tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Tabel 2.52.
Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol Non PNS)
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pol PP	Jumlah Penduduk	Persentase
2016	89	890.675	0,999
2017	134	893.169	1,500
2018	155	891.923	1,738
2019	185	906.403	2,041
2020	196	907.587	2,16

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

b. Rasio Jumlah Linmas

Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Jumlah personel anggota Linmas di Kabupaten Sukoharjo akhir tahun 2019 tercatat sejumlah 6.293 personel. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sejumlah 907.587, maka rasio jumlah Linmas di Kabupaten Sukoharjo per 10.000 penduduk adalah 70,82. Artinya, tiap 10.000 penduduk terdapat 70 personel Linmas.

Tabel 2.53.
Rasio Jumlah Anggota Linmas Per 10.000 Penduduk
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Anggota Linmas	Jumlah Penduduk	Persentase
2016	6.296	890.675	70,69
2017	6.305	893.169	70,59
2018	6.293	891.923	70,56
2019	6.293	906.403	69,43
2020	6.426	907.587	70,82

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.54.
Angka Kriminalitas, Penegakkan Perda serta Penyelesaian Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Kasus	Selesai	Kasus	Selesai	Kasus	Selesai	Kasus	Selesai	Kasus	Selesai
1.	Angka Kriminalitas	380	279	270	149	198	122	305	160	206	128
2.	Penegakan Perda	276	263	460	444	479	463	294	286	168	163
3.	Gangguan Trantibum	3154	2.839	5.093	4.787	3.895	3.700	5.191	5.087	4.152	4069

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa penyelesaian penegakkan peraturan daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum sudah baik karena persentase penyelesaiannya rata-rata sudah di atas 90%. Hal yang masih perlu membutuhkan perhatian adalah masalah penyelesaian angka kriminalitas karena persentasenya belum mencapai 80%.

Adapun kinerja pembangunan aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.55.
Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016–2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90	94	95	97	98
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	75	80	81	85	90
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	79	85	89	95
4	Persentase Penegakan PERDA	96,4	96,7	97	98,3	99
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)	56 orang	44 orang	31 orang	27 orang	91 orang
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	687 orang	601 orang	582 orang	473 orang	567 orang
7	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)	43	72	144	267	99

Sumber : Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan BPBD, 2016-2020

2.3.1.6 Sosial

Masih banyaknya kalangan masyarakat yang hidupnya kurang beruntung, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar/anak jalanan, orang jompo dan lanjut usia, orang cacat dan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya maka pembangunan daerah harus memperhatikan sistem yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang beruntung tersebut. Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka semakin berpengaruh terhadap kondisi jumlah penyandang masalah kemiskinan di masyarakat. Penanganan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo berjalan cukup baik ditandai dengan

semakin menurunnya jumlah penduduk miskin. Namun demikian dengan adanya kecenderungan tersebut, beberapa tantangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sukoharjo relatif masih sangat besar. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo makin turun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 tercatat persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo adalah 7,68%. Artinya tiap 100 penduduk terdapat 8 penduduk miskin. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 2.56.
Jumlah Penduduk Miskin dan Standar Garis Kemiskinan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	% Penduduk Miskin
2016	327.217	78,9	9,07
2017	337.037	76,7	8,75
2018	345.363	65,4	7,41
2019	377.319	63,6	7,14
2020	393.776	68,9	7,68

Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2016-2020

Masalah sosial sangat kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Urusan sosial menanggapi peningkatan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kabupaten Sukoharjo memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung, seperti gelandangan, pengemis, tunasusila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembangunan di bidang sosial juga termasuk upaya untuk menanggulangi kemiskinan atau menurunkan penduduk miskin. Perincian capaian indikator sosial tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.57.
Jumlah PMKS Kabupaten Sukoharjo

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3.205	3.311	2.706	3.396	3.306
2	PMKS yang tertangani	3.314	3.456	2.863	3.503	252.603
3	PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	16.610	28.387	26.606	27.356	249.197

Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2016-2020

Penanganan pemberian pelayanan PMKS tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan yang terkait lainnya. Ada banyak PMKS yang belum atau bahkan tidak memiliki administrasi kependudukan padahal dalam pengurusan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus memiliki data administrasi kependudukan yang benar. Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antar perangkat agar pemberian pelayanan dapat menjadi lebih baik.

Kabupaten Sukoharjo sudah mempunyai regulasi terkait aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yaitu Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo. Permasalahan yang muncul terkait infrastruktur fasilitas umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo yaitu belum semua ramah disabilitas. Fasilitas aksesibilitas *ramp* dan *handriil* baru dimiliki oleh beberapa gedung milik pemerintah.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

a. Pencari Kerja

Jumlah pencari kerja terdaftar dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Sampai dengan tahun 2020, pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2.977 orang. Di tahun 2020 pencari kerja terbanyak di lulusan SLTA/SMK sebanyak 2006 orang.

Tabel 2.58.
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

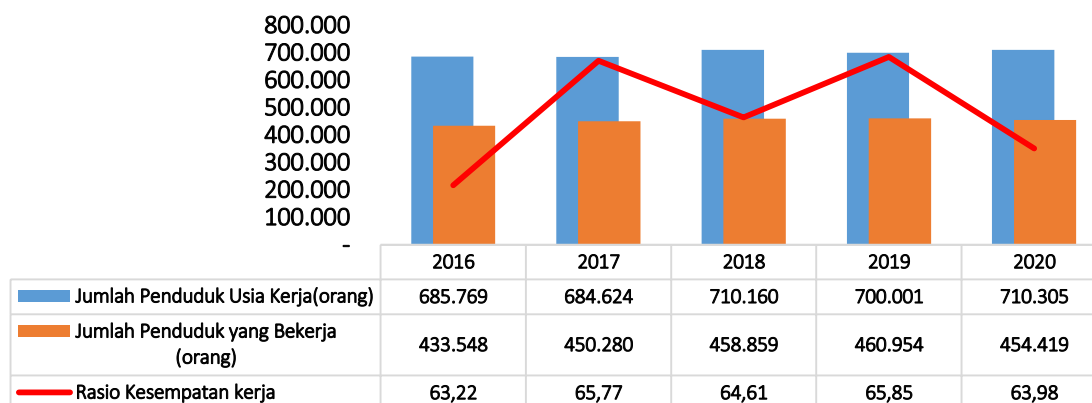
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD	32	29	27	23	29
SMP	276	176	136	141	179
SLTA/ SMK	2.156	2.235	1.581	2.339	2.006
Diploma	368	379	357	468	307
Sarjana	418	347	774	520	456
Jumlah	3.250	3.166	2.875	3.491	2.977

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo, 2016-2020

b. Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode tahun 2016-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 63,98 %, rasionya menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 65,85%.

Gambar 2. 38
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

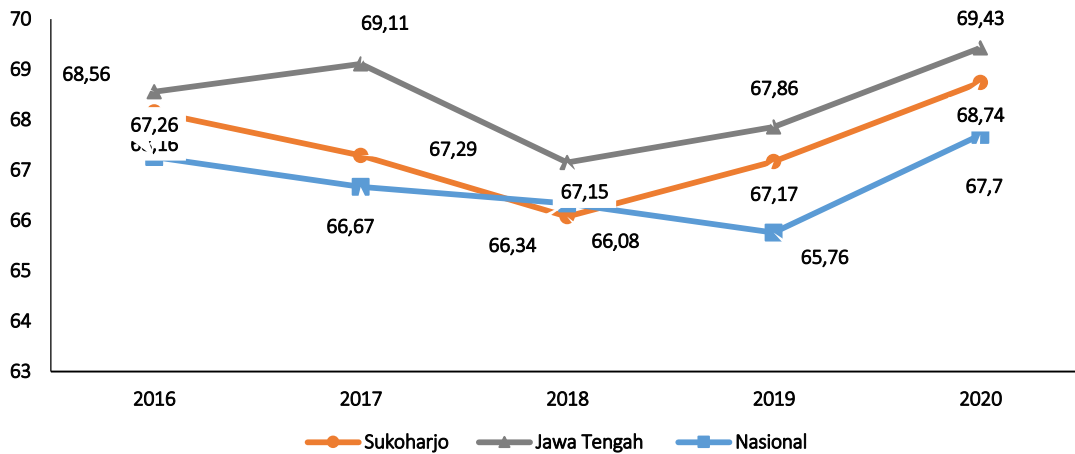


Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo, 2016-2020

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2016-2020 cenderung menurun, dan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 66,08 % menjadi 68,74% pada tahun 2020. Penurunan Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2016-2018 dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan berubahnya status penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Gambar 2. 39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020

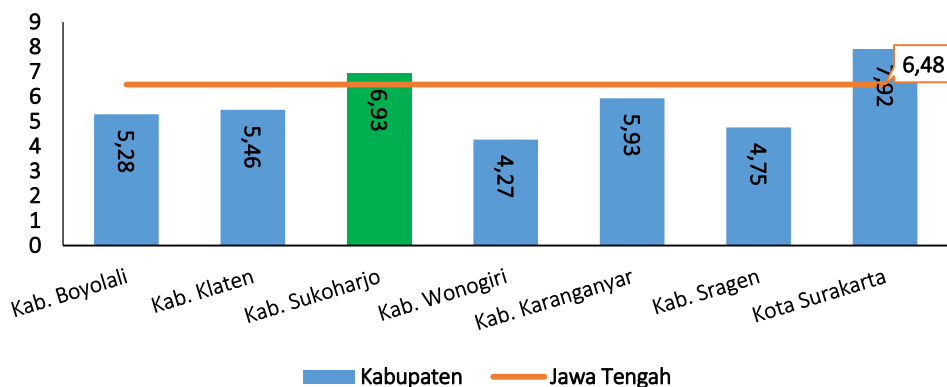


Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo, 2016-2020

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

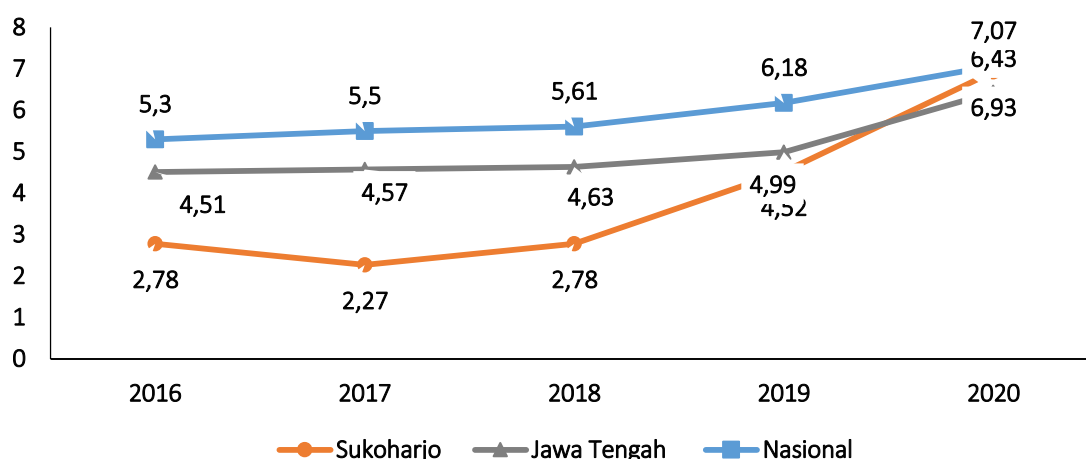
Gambar 2. 40
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Se-SUBOSUKOWONOSRATEN



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo, 2020

Tingkat Pengangguran terbuka kabupaten sukoharjo relatif tinggi meskipun bukan yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-SUBOSUKOWONOSRATEN.

Gambar 2. 41
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Sukoharjo



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo, 2016-2020

Perkembangan TPT Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 2,78 pada tahun 2016 sampai dengan 2,27 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan pada angka 6,93. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena corona virus disease di akhir 2020 sehingga banyak terjadi PHK di sektor industri mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Meskipun terjadi kenaikan, TPT Kabupaten Sukoharjo Relatif berada di bawah TPT Nasional.

e. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian di Kabupaten Sukoharjo selama periode tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dan rasio UMK dibandingkan KHL sudah mencapai 100% mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah memenuhi kebutuhan hidup layak.

Tabel 2.59.
Rasio Rata - Rata Upah Minimum Dibanding KHL
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020

Tahun	UMK (Rp/Bln/orang)	KHL (Rp/bln/Orang)	Ratio (%)
2016	1.396.000,00	1.396.000,00	100,00
2017	1.513.000,00	1.513.000,00	100,00
2018	1.648.000,00	1.648.000,00	100,00
2019	1.783.500,00	1.783.500,00	100,00
2020	1.938.000,00	1.938.000,00	100,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.60.
Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016–2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	14	20	15	15	20
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	14	20	15	15	20
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	2657	3696	2243	2894	2021
4	Keselamatan dan perlindungan	40%	37,50%	43,85%	38,07%	39,45%
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	80%	75%	87,69%	76,13%	79%
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	0	0	160	160
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	96	160	160	160	160
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	450	770	0	0	0
9	Rasio lulusan S1/S2/S3	7,91	8,55	9,13	10,66	7,40

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo, 2016-2020

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, pemerintah berupaya untuk memberikan hak yang sama dalam pembangunan melalui upaya kesetaraan gender. Di bidang ketenagakerjaan, peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Perhatikan tabel berikut.

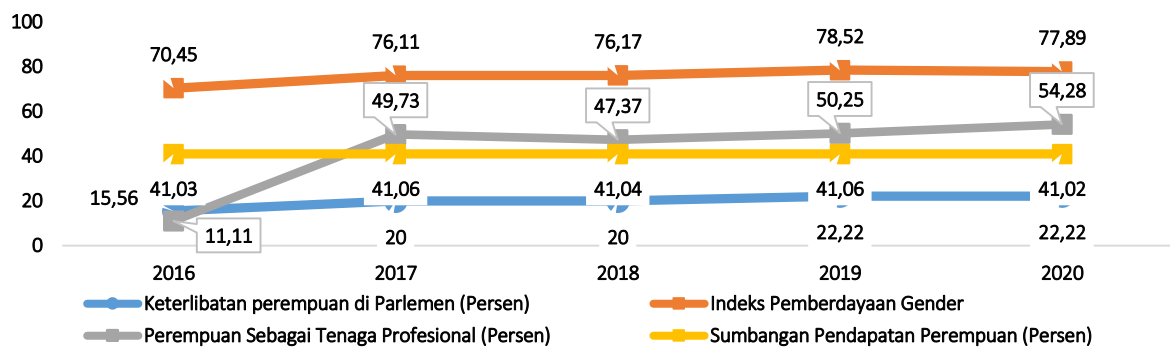
Tabel 2.61.
Persentase Tenaga Kerja Perempuan di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2020

Jenis Kelamin	Tahun					
	2018	%	2019	%	2020	%
Laki-laki	3.502	44,69	3.344	43,33	3.281	42,51
Perempuan	4.335	55,31	4.393	56,78	4.448	57,49
TOTAL	7.837	100,00	7.737	100,00	7.729	100,00

Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka dan Hasil Analisis 2018-2020

Apabila dilihat dari indikator pembentukan IDG selama tahun 2016-2019 trennya terus meningkat menandakan bahwa peran perempuan dalam bidang pendukung IDG semakin membaik. Komponen pembentuk IDG dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.42
Komponen Pembentuk Indeks Disparitas Gender Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan keadaan eksisting, belum semua OPD memahami penganggaran yang responsif gender sehingga perlu ada pelatihan Perencanaan Anggaran yang Responsif Gender (PPRG). Pelatihan hanya sebatas pengiriman delegasi pelatihan ke Provinsi dan belum ditindaklanjuti di daerah masing-masing. Adapun kendala yaitu anggaran yang tidak mencukupi sehingga nantinya pada perencanaan periode selanjutnya akan mulai dianggarkan.

Di bidang perlindungan perempuan dan anak, kita semua menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan terbitnya Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perda Kabupaten Sukoharjo No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Sukoharjo. Seiring dengan telah terbitnya Perda tersebut tercatat beberapa bentuk pengaduan kekerasan. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2018 tercatat sejumlah 39 pengaduan kekerasan pada anak dan 44 pengaduan kekerasan pada perempuan, sedangkan pada tahun 2019 tercatat sejumlah 30 pengaduan kekerasan pada anak dan 43 pengaduan kekerasan pada perempuan. Dari angka tersebut terlihat bahwa angka pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami penurunan.

Tabel 2.62.

Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kasus	2016	2017	2018	2019	2020
Perempuan	23	18	28	39	31
Anak	15	15	22	20	14

Sumber : Dinas PPKBP3A, 2016-2020

Saat ini kasus perempuan dan anak masih ditangani Dinas PPKBP3A khususnya bidang PPPA dan OPD yang menjadi Tim Penanganan Kasus sehingga penanganan kasus kekerasan belum optimal dengan kasus pengaduan yang ada. Tahun 2021 direncanakan pembentukan UPT kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sukoharjo.

Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo juga belum optimal pemenuhannya. Hal ini diketahui dari evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) dimana pada tahun 2018 Kabupaten Sukoharjo baru bias mendapatkan penghargaan dengan kriteria Madya.

Tabel 2.63.
Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No (1)	Indikator (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,49	54,58	55,31	56,78	57,49
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	6	6	6	10	10
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	-	49,73	47,37	-	-
4	Rasio KDRT	0,012	0,010	0,016	0,019	0,015
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	-	-
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	186.040	200.719	200.701	214.120	193.897
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0	0	5	10	10
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	97,71	95,60	95,22	95,52	95,95
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	86,74	82,94	79,02	81,44	82,38
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	68,56	68,08	64,23	63,50	64,43-
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	99,67	99,66	99,71	99,76	99,76
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertani	53,25	15,92	52,37	-	-

Sumber : Dinas PPKBP3A, 2016-2020

2.3.2.3 Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/ keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/ keamanan pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya, dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. PPH juga dapat menjadi acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Skor PPH berguna untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal dan untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik pada jumlah dan komposisi pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan. Fungsi dari Skor PPH adalah:

- a. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan
- b. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah
- c. Baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Tabel 2.63.
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Energi	3,991	3,363	3.579	3,293	3,765
Protein	206.20	154.65	140.06	106.86	107.88
Skor PPH	98.27	98.29	98.25	98.95	99.06

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Pada periode 2016-2017 berdasarkan pada table diatas, skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (PPH) Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Tahun 2016 peningkatan PPH cukup signifikan yaitu 20,46 dan pada tahun 2018 meningkat sejumlah 0,02. Skor PPH mengalami penurunan pada tahun 2018 sejumlah 0,04, kemudian Kembali meningkat 0,7 pada tahun 2019 dan meningkat 0,11 pada 2020. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Sukoharjo cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.65.
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Energi	2,665.5	2,001.2	2,003.1	2,004.5	2,100.1
Protein	53.9	62.6	54.0	56.9	62.2
Skor PPH	91.8	91.9	91.9	92.4	93.3

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Pada periode 2016-2017 berdasarkan pada tabel diatas, skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Tahun 2016 peningkatan skor PPH sebesar 0,1 sedangkan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020 peningkatan skor PPH cukup tinggi, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,5 dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan 0,9. Berdasarkan data skor PPH tersebut menunjukkan bahwa situasi pangan di Kabupaten Sukoharjo semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Namun demikian masih perlu terus ditingkatkan menuju skor ideal (100).

Di Kabupaten Sukoharjo masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan, tersebar di 12 kecamatan. Data tersebut dilihat dari Peta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Secara garis besar kerawanan pangan terjadi pada daerah yang ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.66.
Lokus Kerawanan Pangan di Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Rawan Pangan	Keterangan
1	Weru	2	Karangmojo, Ngreco
2	Bulu	1	Malangan
3	Tawang Sari	1	Watubonang
4	Sukoharjo	2	Bulakan, Sukoharjo
5	Nguter	2	Serut, Plesan
6	Bendosari	1	Mertan
7	Polokarto	2	Polokarto, Mranggen
8	Mojolaban	1	Palur
9	Grogol	1	Cemani
10	Baki	1	Mancasan
11	Gatak	1	Trangan
12	Kartasura	1	Pucangan
	Jumlah	16	

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan keadaan yang ada, konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Hal ini ditunjukkan dengan skor PPH yang belum mencapai 100. Persentase keamanan pangan juga belum mencapai 100%. Perlu ada upaya peningkatan skor PPH dan persentase keamanan pangan.

Tabel 2.67.
Skor PPH konsumsi dan Persentase Keamanan Pangan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Skor PPH Konsumsi	91,8	91,9	91,9	92,4	93,3
2	% Keamanan Pangan	85,42	88,89	90,24	90,48	94,19

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Kapasitas Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar 100 Ton Ekuivalen Beras. Berikut adalah data penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2016 – 2021.

Tabel 2.68.
Jumlah Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengisian Gudang CPP (Ton)	-	7,5	-	-	23,3

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

2.3.2.4 Pertanian

Lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh hak pakai dan merupakan hibah (kecuali bangunan kantor pemerintah daerah). Ada 801 bidang lahan bersertifikat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berikut adalah rincian lahan bersertifikat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo:

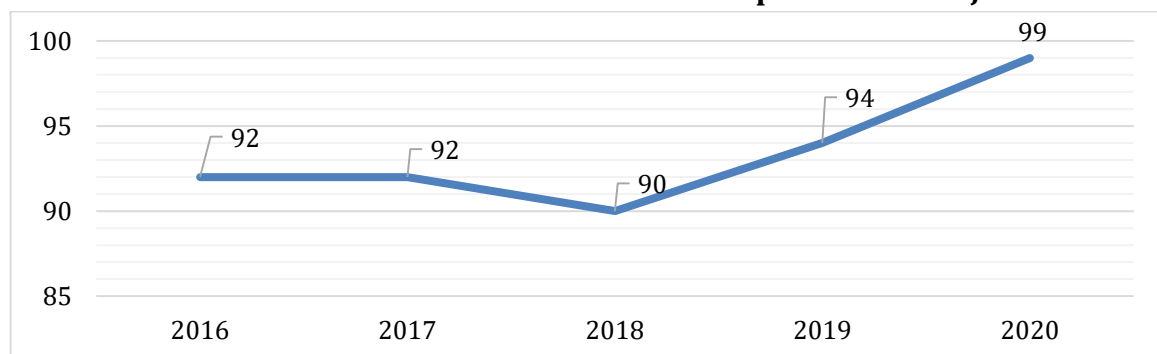
Tabel 2.69.
Jumlah Lahan Bersertifikat yang Dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

No.	Uraian	Jumlah Bidang	Hak	Asal-Usul
1.	Tanah Bangunan Kantor	1	Hak Pakai	Pembelian
2.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	1	Hak Pakai	Hibah
3.	Tanah Untuk Jalan Nasional	412	Hak Pakai	Hibah
4.	Tanah Untuk Jalan Desa	387	Hak Pakai	Hibah
Total		801		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2020

Jumlah lahan bersertifikat adalah jumlah lahan yang sudah bersertifikat (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik, dan Hak Pakai). Persentase bidang lahan bersertifikat dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2. 43
Persentase Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sukoharjo



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasarkan data, lahan yang bersertifikat di Kabupaten Sukoharjo tiap tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2018 jumlah lahan yang bersertifikat menurun menjadi 90% dikarenakan perubahan Perda tentang RTRW. Pada tahun selanjutnya lahan yang bersertifikat mengalami kenaikan. Keseriusan pemerintah khusus untuk lahan yang belum bersertifikat diperhatikan dan ditangani lebih lanjut sehingga legalitasnya jelas sehingga pada tahun 2020 tercapai 100% lahan bersertifikat. Hal ini perlu dipertahankan sehingga dapat meminimalisir konflik di kemudian hari.

Penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan tuntas atau 100%. Hal ini dikarenakan setiap ada konflik pertanahan selalu diselesaikan oleh instansi terkait. Begitu juga dengan penyelesaian izin lokasi. Penyelesaian izin lokasi tiap tahun mencapai angka 100%. Izin lokasi selalu diselesaikan tiap tahun dengan mengeluarkan rekomendasi teknis (Rekomtek) dari instansi terkait. Ketuntasan penyelesaian konflik tanah dan izin menandakan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum terutama tata ruang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan tata ruang untuk semua kalangan.

Adapun jumlah aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019-2020 yaitu 3.811 bidang dengan rincian 968 bidang yang bersertifikat pada tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 1.171 bidang di tahun 2020 dan 2.843 bidang yang belum bersertifikat turun menjadi 2.640 di tahun 2020.

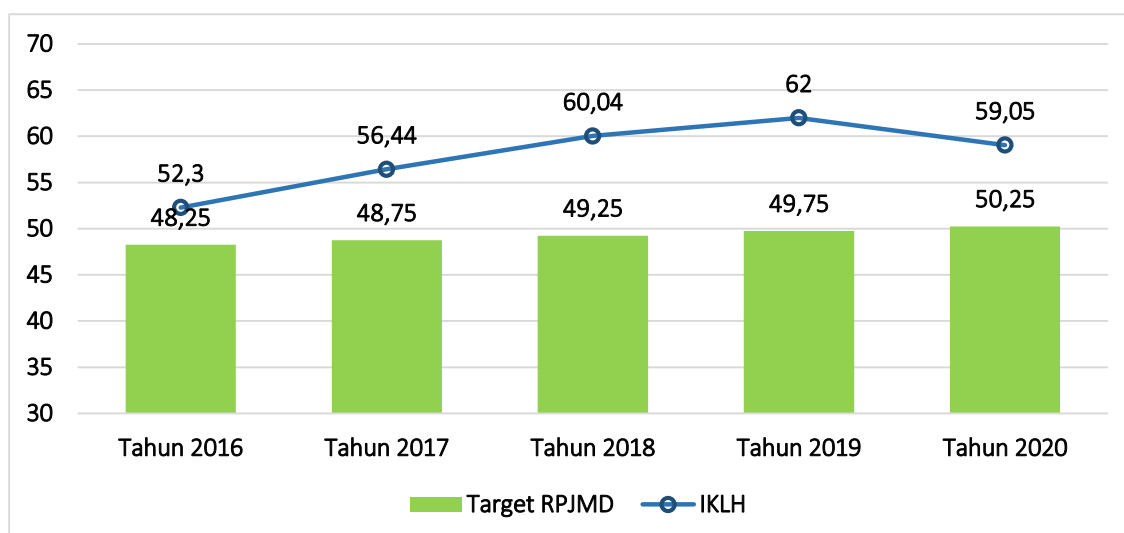
2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo perlu dibahas mengenai polusi dan pencemaran lingkungan. Menurut Undang-undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Menurut tempat terjadinya pencemaran dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk mengetahui gambaran atau kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dalam periode tertentu digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan tiga komponen perhitungan yaitu kualitas air, kualitas udara ambien, dan kualitas tutupan lahan. IKLH memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. IKLH juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020 disajikan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2. 44
Perkembangan IKLH Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo, 2020

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2019 mengalami perbaikan. Apabila dibandingkan dengan Rentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, tahun 2016-2018 IKLH Kabupaten Sukoharjo masuk dalam kategori Kurang Baik (rentang $50 < \text{IKLH} \leq 60$), sedangkan pada tahun 2019 IKLH Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori Cukup Baik (rentang $60 < \text{IKLH} \leq 70$), namun pada tahun 2020 IKLH kembali turun ke kategori Kurang Baik.

Meskipun IKLH Kabupaten Sukoharjo telah mencapai target RPJMD pada tahun 2020, nilai tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan target IKLH Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,69, target IKLH Pulau Jawa sebesar 68,60 dan belum sesuai target capaian IKLH Nasional sebesar 66,5 – 68,5.

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Parameter Indeks Kualitas Air yang diperhitungkan adalah : *Total Suspended Solid (TSS)*, *Dissolved Oxygen (DO)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)*, dan *Chemical Oxygen Demand (COD)*. Pada Tahun 2020 dilakukan pengujian terhadap kualitas 6 sungai (setiap sungai diambil titik hulu dan hilir) yang setiap titik dilakukan dua kali dalam satu tahun, sehingga total data yang didapatkan sebanyak 24 data. Dari hasil olah dan uji lab data tersebut dapat diketahui bahwa kualitas air sungai yang dipantau pada tahun 2020 dalam kondisi **memenuhi atau tidak tercemar, tercemar ringan, tercemar sedang, dan tercemar berat**. Selanjutnya dari hasil status mutu air tersebut, dihasilkan Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai berikut :

Tabel 2.70.
Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020

Status	Jumlah	Persentase	Koefisien	Nilai
Memenuhi	1	4,17 %	70	2,92
Tercemar ringan	17	70,83 %	50	35,42

Tercemar sedang	5	20,83 %	30	6,25
Tercemar berat	1	4,17 %	10	0,42
Tercemar sangat berat	0	0 %	0	0
Jumlah contoh uji	24	100 %	-	-
Indeks Kualitas Air			45,00	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo, 2020

Nilai IKA Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sebesar 45,00. Terdapat 1 (satu) titik lokasi yang termasuk dalam status tercemar berat, yaitu Sungai Samin Hilir (musim kemarau). Dengan catatan bahwa angka pengukuran menunjukkan kualitas sesaat pada saat itu. Di sepanjang Sungai Samin terdapat beberapa industri yang kemungkinan membuang air limbah pada saat pengambilan sampel. Buangan air limbah domestik dan industri di sepanjang aliran sungai tersebut dapat menyebabkan tingginya hasil pengukuran BOD dan COD yang merupakan parameter IKA. Pada tahun 2019 tidak terdapat sungai dengan status tercemar berat, adanya sungai yang berstatus tercemar berat di tahun 2020 turut menyebabkan penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Sukoharjo.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kualitas udara ambien di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber tak bergerak dari aktivitas industri dan sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar serta pembakaran mesin bermotor. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan aktivitas industri berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂, dan partikulat.

Parameter yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara adalah SO₂ dan NO₂. Parameter SO₂ dianggap mewakili sumber pencemar dari sektor industri, sementara sektor transportasi diwakili oleh parameter NO₂. Penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata dari hasil pengukuran parameter SO₂ dan NO₂ pada seluruh titik pemantauan kemudian dikonversikan menjadi indeks kualitas udara dengan didasarkan pada Standar Uni Eropa (IEU) dan dihitung dengan persamaan yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan IKU disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.71.
Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020

Parameter	Rata-rata	EU	IEU
NO ₂	15,28	40,00	0,38
SO ₂	5,50	20,00	0,27
Rata-rata			0,33
Indeks Kualitas Udara			87,23

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo, 2020

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 yaitu 87,23. Jika dibandingkan dengan IKU Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 sebesar 88,02, pada tahun 2020 terjadi penurunan angka indeks sebesar 0,79. Hal ini dapat diakibatkan karena semakin banyaknya kendaraan bermotor dan industri yang

merupakan sumber dari gas SO₂ dan NO₂. Penurunan nilai IKU turut mempengaruhi penurunan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sukoharjo.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Luas tutupan lahan yang digunakan dalam penentuan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dihitung menggunakan metode interpretasi citra melalui *Calculate Geometry*. *Calculate Geometry* merupakan suatu prosedur penghitungan otomatis pada ArcGIS berdasarkan bentuk geometri dari data GIS yang tergambar dan sistem koordinat yang digunakan. Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dilakukan dengan memperhitungkan luas total tutupan hutan dan tutupan RTH yang kemudian dimasukkan dalam formula penghitungan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan sehingga diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada berikut.

Tabel 2.72.
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Luas Wilayah (km ²)	Luas Tutupan Hutan (km ²)	Luas Tutupan RTH (km ²)	Perbandingan Hutan terhadap Luas Wilayah	Perbandingan RTH terhadap Luas Wilayah	IKTL
466,66	35,59	14,20	7,63	1,83	31,08

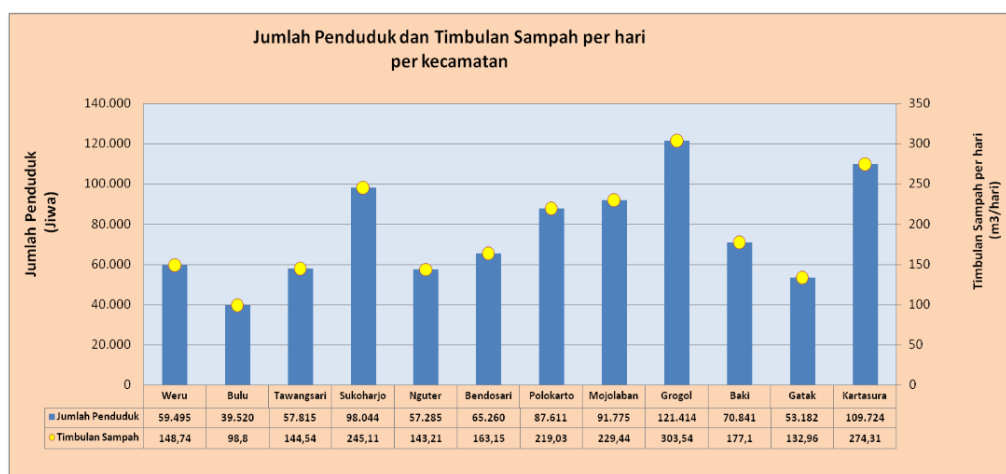
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo, 2020

Nilai IKTL yang cenderung mengalami fluktuasi lebih dikarenakan adanya penyempurnaan metode penghitungan yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semula hanya mengakomodasi luas tutupan hutan, saat ini dikembangkan dengan mengakomodasi luas ruang terbuka hijau berupa sempadan sungai, turus jalan dan hutan/taman kota.

2. Penanganan Sampah

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo turut berimplikasi pada jumlah timbulan sampah yang dihasilkan baik dari sektor domestik maupun non domestik. Perbandingan jumlah penduduk tiap kecamatan dengan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan disajikan dalam grafik berikut :

Gambar 2. 45
Grafik Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah per Hari



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo, 2020

Kecamatan yang menghasilkan timbulan sampah paling banyak pada tahun 2020 adalah yang mempunyai penduduk paling banyak, berturut – turut yaitu Kecamatan Grogol (303,54 m³/hari), Kecamatan Kartasura (274,31 m³/hari) dan Kecamatan Sukoharjo (245,11m³/hari). Sedangkan kecamatan dengan timbulan sampah terkecil adalah Kecamatan Bulu (98,8 m³/hari). Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan metode pengurangan langsung pada sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Bank sampah menjadi solusi penanganan sampah di sumbernya, sampah dikelola oleh setiap desa dengan melibatkan masyarakat setempat. Pada tahun 2020 terdapat 116 bank sampah yang terbentuk di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 15.558 kg/bulan.

Kabupaten Sukoharjo memiliki satu lokasi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari dengan jenis TPA *Control Landfill* seluas areal 4,2 Ha. Kapasitas TPA Mojorejo 836.600 m³ dan saat ini telah terisi timbulan sampah sebanyak 766.148 m³ atau sekitar 91,58 % dari kapasitas maksimal. Kabupaten Sukoharjo memiliki 112 TPS dan 45 unit kontainer sampah yang tersebar pada 12 kecamatan. Perbandingan jumlah TPS dan timbulan sampah tidak menunjukkan perbandingan yang lurus. Idealnya semakin banyak jumlah timbulan sampah maka semakin banyak TPS nya. Kecamatan yang memiliki jumlah TPS dan kontainer sampah terbanyak adalah Kecamatan Sukoharjo 57 lokasi dan Kecamatan Kartasura 25 lokasi. Jumlah sebaran fasilitas persampahan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.73.
Jumlah TPS dan Timbulan Sampah Per Hari dan Fasilitas Persampahan yang Tersedia

No	Kecamatan	Timbulan sampah	Jumlah TPS dan Kontainer Sampah
1	Weru	148,74	1
2	Bulu	98,80	3
3	Tawang Sari	144,54	1
4	Sukoharjo	245,11	57
5	Nguter	143,21	3
6	Bendosari	163,15	12
7	Polokarto	219,03	7
8	Mojolaban	229,44	19

No	Kecamatan	Timbulan sampah	Jumlah TPS dan Kontainer Sampah
9	Grogol	303,54	25
10	Baki	177,10	9
11	Gatak	132,96	3
12	Kartasura	274,31	17

Sumber : IKPLHD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Tabel 2.74.
Jumlah TPS 3R Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama TPS 3R	Lokasi	Tahun Pendirian	Instansi yang Membangun
1	Kanthil	Desa Makam haji, Kec.Kartasura	2014	DPUPR Provinsi
2	Bina Sakinah	Desa Kwarasan, Kec.Grogol	2016	DPU
3	Gonilan Bersih	Desa Gonilan, Kec.Kartasura	2016	DPU
4	Gumpang	Desa Gumpang, Kec.Kartasura	2016	DPU
5	Ngabeyan	Desa Ngabeyan, Kec.Kartasura	2017	DPU
6	Gedang Selirang	Desa Gedangan, Grogol	2019	ADD/ Swadaya
7	Ngudi Mulyo	Kel. Sukoharjo, Kec.Sukoharjo	2019	Kotaku
8	Sejahtera Makmur	Kel. Dukuh, Kec.Sukoharjo	2019	Kotaku
9	Sido Makmur	Kel. Sonorejo, Kec.Sukoharjo	2019	Kotaku
10	Manunggal Jaya	Kel. Bulakan, Kec.Sukoharjo	2019	Kotaku

Sumber : IKPLHD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Penyumbang timbulan sampah terbesar sektor industri adalah industri kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan klinik) apalagi pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyumbang besar terhadap sampah, industri mebel/furniture, industri hotel dan jasa properti. Pengelolaan sampah pada sektor usaha dan industri berdasarkan laporan data beberapa industri yang ada, dikelola secara dipilah, dikumpulkan, diangkut, ditampung, dipilah dan dibuang, dibakar, dipilah dan dibakar, dijual dan ada yang diambil pihak lain. Untuk sampah yang dibakar biasanya limbah industri kayu, dan digunakan sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan untuk pengelola sampah sektor industri ada yang dikelola sendiri, kerjasama dengan DLH Kabupaten Sukoharjo, atau dengan vendor dan pihak ketiga.

Penanganan limbah B3 dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap perusahaan penghasil limbah secara rutin, hingga tahun 2019 tercatat ada 18 perusahaan yang telah memiliki izin mengelola limbah B3. Telah diterbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo No. 660.1/570/II/2019 untuk menindaklanjuti aplikasi SI RAJA LIMBAH dan *Manifest Elektronik* (Festronik) Limbah B3 yang diluncurkan KLHK.

Penghargaan terkait lingkungan hidup yang telah diperoleh Kabupaten Sukoharjo antara lain :

- a. Penghargaan Green Leadership “Nirwasita Tantra” Tahun 2020 Kategori Kabupaten Kecil kepada Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo dari Kementerian LHK.
- b. Penghargaan Program Kampung Iklim Lestari diraih oleh Kelurahan Ngadirejo
- c. Penghargaan Program Kampung Iklim Utama diraih oleh Kelurahan Kartasura; Dukuh Bodeyan (Desa Pondok, Kecamatan Nguter); dan Dukuh Pundungsari (Desa Malangan, Kecamatan Bulu)

- d. Pelaksana Terbaik-II Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tingkat SD diraih oleh SDN Mranggen 01 Polokarto
- e. Pelaksana Terbaik-I Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tingkat SMA diraih oleh SMA Nur Hidayah Kartasura.

Tabel 2.75.
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016–2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	Ada (RPJMD)	(RTRW)	Tidak Ada	Ada (RDTR)	Tidak Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	50	50,00	74,44	77,50	45,00
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	76,99	83,32	89,45	88,02	87,23
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	35,51	41,11	27,18	30,85	31,08
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	4,00	6,00	6,00	6,00	4,00
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	12	12	12	12	12
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	6	6	8	11	4
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	100	100	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani	21,51	21,53	27,51	37,42	47,01
19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	2,30	5,76	19,82	21,17	19,76
20	Persentase cakupan area pelayanan	58,00	58,00	60,00	63,33	66,67
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	21,51	21,53	27,51	37,42	47,01
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	75,99	74,95	75,11		
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	97,30	78,26	78,26	-	-
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Berikut capaian masing-masing indikator bidang pemerintahan dalam negeri jenis pelayanan dokumen kependudukan.

Tabel 2.76.
Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	90,87	92,84	98,86	90,11	96,82
2	Rasio bayi berakte kelahiran	96,89	96,91	99,39	99,76	99,77
3	Rasio pasangan berakte nikah	17,44	20,71	23,44	29,90	38,35
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90,87	92,84	98,86	90,11	96,82
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100	100	100	100	100

Sumber : *Dispendukcapil Kab. Sukoharjo, 2016-2020*

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

Tabel 2.77.
Perkembangan Jumlah BUMDes di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Weru	7	11
2	Bulu	6	9
3	Tawang Sari	3	9

No	Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020
4	Sukoharjo	-	-
5	Nguter	9	15
6	Bendosari	5	10
7	Polokarto	7	17
8	Mojolaban	6	10
9	Grogol	9	13
10	Baki	7	13
11	Gatak	8	9
12	Kartasura	4	8
Total		70	125

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo, 2019-2020

Tabel 2.78.
Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Klasifikasi BUMDes	Jumlah
Dasar	46
Tumbuh	76
Berkembang	3
Maju	-
Total	125 BUMDes

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo, 2021

Berdasarkan data yang ada keberadaan BUMdes di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah. Walaupun demikian klasifikasi BUMDes yang ada masih didominasi dengan klasifikasi tumbuh. Upaya pendampingan masih perlu dilakukan guna meningkatkan kondisi BUMDes menjadi lebih mandiri dan maju.

Tabel 2.79.
Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader yang Mendapat Insentif	Jumlah Kader
2016	1.175	7.131	7.225
2017	1.184	7.175	7.507
2018	1.184	7.200	7.507
2019	1.184	7.432	7.507
2020	1.193	7.498	7.677

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Keberadaan Posyandu di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Begitu pula dengan jumlah kader di setiap wilayah juga mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan di tingkat desa serius dilakukan oleh pemerintah.

Tabel 2.80.
Jumlah Pasar Desa Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Jumlah Pasar Desa
1	Weru	4
2	Bulu	1
3	Tawang Sari	2
4	Sukoharjo	-
5	Nguter	5
6	Bendosari	4
7	Polokarto	5
8	Mojolaban	3
9	Grogol	3
10	Baki	3
11	Gatak	1
12	Kartasura	2
<i>Total</i>		33

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo, 2020

Keberadaan pasar desa merupakan hal penting untuk diadakan. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa juga diharapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berkualitas tidaknya penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari kapasitas SDM aparat kelurahan. Secara umum kapasitas aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal, pemahaman dan kemampuan aparat dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi atas hasil pembangunan belum menunjukkan hasil yang cukup baik.

Tabel 2.81.

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	14,37%	28,72%	43,11%	57,49%	71,85%
4.	Persentase LPM Desa aktif	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo salah satunya disebabkan oleh keberhasilan program Keluarga Berencana. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya di bawah 2, artinya masih dalam kondisi belum mengkhawatirkan di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Walaupun terjadi peningkatan rata-rata jumlah anak per keluarga.

Tabel 2.82.

Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020

Jenis KB	Jumlah Peserta (Orang)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Implant	9.492	9.948	55.514	9.324	9.761
Obat/Pil KB	14.082	14.297	14.297	11.496	11.335
IUD/Spiral	18.705	19.175	1.403	13.802	14.216
Suntik	55.160	55.550	1.997	53.254	52.518
Kondom	1.842	2.022	2.022	1.815	2.432
Vasektomi	363	389	389	6.569	307
Tubektomi	8.888	8.959	307	6.569	6.691

Sumber : DPPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.83.
Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,83	0,80	0,76	0,85	0,88
2	Total Fertility Rate (TFR)	1,95	1,67	1,97	1,95	1,89
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	17,00	54,00	69,00	69,00	69,00
4	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk			1	1	1
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,42 1-2 anak	1,67 1-2 Anak	1,97 1-2 Anak	1,94 1-2 Anak	1,97 1-2 Anak
6	Ratio Akseptor KB	1:4 40008:148463	1:4 41510:149295	1:4 35026:139987	1:4 36476:140865	1:3 97260:142918
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	71,62	72,29	67,62	67,05	67,84
8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000	7,85	6,48	5,23	4,72	5,02

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,86	12,10	13,73	14,73	15,65
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,22	25,77	20,40	21,29	85,23
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		74,33	67,67	68,55	68,05
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	81,00	73,00	78,00	76,19	74,09
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	62,00	65,00	59,00	55,74	73,08
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	48,00	41,00	44,00	41,20	79,69
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1	1	-	-	-
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	0,39	0,55	0,56	0,59	0,60
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	63,00	56,00	54,00	42,00	41,00
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	78,00	83,00	83,00	80,37	81,93
19	Rasio petugas Pembantu Pembina	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	100	100	100
21	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	25,58	25,58	27,96	31,57	29,26
22	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa				3,5	15
23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100
24	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	44,15	55,55	48,34	65,10	98,91
25	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,83	0,80	0,76	0,82	0,88

Sumber : DPPKB dan P3A Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

2.3.2.9 Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan

wilayah. Transportasi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi dalam wujud sarana dan prasarana. Wujud transportasi berupa sarana inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah.

a. Terminal

Unsur penting dalam urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan pengujian kendaraan bermotor dan layanan kelancaran lalu lintas serta penyediaan prasarana perhubungan berupa terminal. Berdasarkan SK Gubernur Jateng No. 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat dua terminal tipe B, yaitu Terminal Sukoharjo di Kecamatan Sukoharjo dan Terminal Kartasura di Kecamatan Kartasurta yang dikelola pemerintah provinsi. Selain itu juga terdapat empat terminal tipe C yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Keempat terminal tipe C tersebut berada di Kecamatan Sukoharjo (Terminal Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo), Kecamatan Mojolaban (Terminal Bekonang), Kecamatan Tawang Sari (Terminal Tawang Sari), dan Kecamatan Weru (Terminal Watukelir). Adapun kondisi pelayanan terminal tipe C di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan sesuai Permenhub 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.83
Standar Pelayanan Penyelenggaraan
Terminal Tipe C di Kabupaten Sukoharjo

No	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur Indikator				Keterangan	
				Terminal Tipe C					
				Ir. Soekarno	Tawang Sari	Bekonang	Watukelir		
3	Kehandalan/Keteraturan								
	a	jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum secara beserta realisasi jadwal secara tertulis	jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Pelayanan masih dilakukan di terminal
	b	jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	c	Loket penjualan tiket	Loket tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan Keteraturan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	d	Kantor penyelenggaraan terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat di dalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional serta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan Luas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	e	Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan Keteraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
4	Kenyamanan								
	a	Ruang tunggu	Ruang/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan /atau ruang terbuka)	Ketersediaan Kondisi Keteraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	b	Toilet	tersedianya toilet	Jumlah Kondisi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	c	Fasilitas peribadatan/Mushola	fasilitas untuk melakukan ibadah	Luas Kondisi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
	d	Ruang terbuka hijau	ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Ketersediaan Luas Kondisi	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	e	Rumah makan	Ruang Makan	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
	f	Fasilitas dan petugas kebersihan	Fasilitas dan petugas kebersihan	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	g	Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	h	Area merokok	Tempat khusus area merokok	Ketersediaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	i	Drainase	drainase yang memadai	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	j	Area dengan jaringan internet (<i>hot spot area</i>)	Area dengan jaringan internet (<i>hot spot area</i>)	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	k	Ruang baca	Ruang baca (Reading Corner)	Ketersediaan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	l	Lampu penerangan ruangan	Lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
5	Kemudahan/Keterjangkauan								

No	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolak Ukur Indikator				Keterangan	
				Terminal Tipe C					
				Ir. Soekarno	Tawang Sari	Bekonang	Watukelir		
	a	Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan Keteraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Pelayanan masih dilakukan di terminal	
	b	Letak jalur kedatangan	Kapasitas letak kedatangan kendaraan Keteraturan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		
	c	Informasi pelayanan	Visual: -Denah/layout terminal -Nomor Trayek (Nama PO dan Kelas Pelayanan) -Nama terminal keberangkatan -Jadwal -Tarif -Peta Jaringan	Tempat/Ruang	Tidak	Tersedia	Tidak	Tidak	
			Audio: -Informasi Pelayanan (disebutkan apa saja) -Kejadian khusus dan gangguan	-Tempat -Intensitas Cahaya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	d	Informasi angkutan lanjutan	Informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: -Jenis angkutan -Lokasi angkutan lanjutan -Jam pelayanan angkutan lanjutan -Jurusan/rute -Tarif	-Tempat -Kondisi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	e	informasi gangguan perjalanan mobil bus	fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional dan keselamatan	Intensitas Suara	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	f	Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Ketersediaan					
	g	Fasilitas Pengisian baterai (charging corner)	Fasilitas Pengisian baterai (charging corner)	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
	h	Tempat naik/turun penumpang	memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak	
	i	Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
6	Kesetaraan								
	a	Fasilitas Penyandang cacat (difabel)	fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
	b	Ruang ibu menyusui	ruangan/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	Tidak	Tersedia	Tidak	Tidak	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2021

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari empat terminal tipe C yang ada di Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga terminal tipe C yang memenuhi Standar Pelayanan Penyelenggaraan yang baik yaitu Terminal Ir. Soerkarno, Terminal Tawang Sari dan Terminal Bekonang dan satu yang masih dibawah standar yang ada yaitu Terminal Watukelir. Oleh sebab itu, hal ini menjadi catatan untuk semakin meningkatkan fasilitas terminal tipe C yang ada setiap tahunnya.

b. Fasilitas Keselamatan di Jalan Raya

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi risiko yang diakibatkan dalam berlalu lintas. Berdasarkan data yang ada kebutuhan fasilitas keselamatan di Kabupaten Sukoharjo masih belum diimbangi dengan ketersediaannya. Hal ini berpotensi menjadi salah satu faktor rendahnya keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Sukoharjo. Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.84.
Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan di Jalan
Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 - 2020

NO	FASILITAS KESELAMATAN	KEBUTUHAN					KETERSEDIAAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	PJU	4920	4975	5004	5183	5236	3766	3855	3906	3967	3998
2	APILL WARNING LIGHT	10	10	10	10	10	6	6	6	7	7
3	GUARDRAIL	98	98	99	104	107	38	38	39	44	47
4	RAMBU	350	350	350	350	350	48,5	128,5	160,5	192,5	225,5
5	MARKA	3041	3058	3058	3006	3021	2137	2307	2477	2595	2728
6	PAKU JALAN	60432	67650	76355	83360	88253	10432	17650	26355	33360	38253
7		1850	1940	2040	2200	2200	450	540	640	800	800

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Ketersediaan fasilitas keselamatan sebagai mana data diatas tentu saja sangat berpengaruh dengan angka kecelakaan yang terjadi dan titik kemacetan yang muncul. Semakin tinggi ketersediaan fasilitas keselamatan tentu saja angka kecelakaan akan semakin menurun dan titik kemacetan dapat terurai dengan baik. Adapun angka kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.85
Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lakalantas)
Kabupaten Sukoharjo

No	Kecelakaan	Jumlah Kejadian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lakalantas	887	449	565	1279	994

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Adapun lokasi-lokasi tertentu yang memiliki kerawanan akan kecelakaan (blackspot). Titik-titik yang sering menjadi lokasi rawan kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo yaitu :

1. Jl Kartasura - Batas Kotas Surakarta

2. Jl Sukoharjo - Wonogiri
3. Jl Pajang - Parangtejo

Adapun ruas jalan/ titik kemacetan yang ada di Wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Jl Boyolali - Kartasura (Simpang Tugu Kartasura)
2. Jl Kartasura - Batas Kota Klaten (Simpang Sanggung)
3. Jl Kartasura - Batas Kotas Surakarta (Pasar Kartasura dan Kawasan UMS)
4. Jl Surakarta - Sukoharjo (Pasar Telukan)
5. Jl Sukoharjo - Wonogiri (Pasa Nguter)
6. Jl Jenderal Sudirman (Pasar Ir Soekarno)
7. Jl Bahu - Dlopo (Sekolah Al Azhar)
8. Jl Samanhudi (Kawasan Agen Bus)
9. Jl Veteran (Kawasan PKL Alun-Alun)
10. Jl Blimbing - Makamhaji (Pasar Gawok)
11. Jl Manang - Mayang (Perlintasang Sebidang Mayang)
12. Jl Pajang - Parangtejo (Underpass Makamhaji)
13. Jl Baki - Pajang (Kawasan CBD Kec. Baki)

c. Kelayakan Kendaraan angkutan umum

Salah satu upaya untuk menekan angka kecelakaan adalah dengan melaksanakan uji kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan operasional kendaraan angkutan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.90
Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Di Kabupaten Sukoharjo

No	Tahun	KBWU yang Melakukan Uji Berkala	KBWU Aktif berdasarkan JB dan Klasifikasi Kendaraan	Rasio
1	2016	6.030	7.715	0,78
2	2017	5.835	7.715	0,76
3	2018	6.327	7.715	0,82
4	2019	6.433	7.715	0,83
5	2020	5.402	7.715	0,70

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

d. Perparkiran

Parkir menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk ditinjau. Keberadaan parkir pada badan jalan yang ada menjadi permasalahan tersendiri berkenaan dengan salah satu komponen yang memengaruhi kemacetan akibat manuver parkir maupun pengurangan lebar efektif jalan. Saat ini perparkiran yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdapat parkir di badan jalan dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Parkir memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.85.**Data Potensi Parkir Kabupaten Sukoharjo**

Lokasi	Jumlah Potensi Pendapatan
Kecamatan Sukoharjo	1.957.000.000
Kecamatan Mojolaban	348.750.000
Kecamatan Tawang Sari	85.248.000
Kecamatan Grogol	2.364.300.000
Kecamatan Kartasura	2.158.200.000

Sumber : Kajian Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2019

Tabel 2.86.**Data Lokasi Parkir yang Sudah Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo**

Lokasi	Jumlah Pendapatan
Kec. Kartasura	Rp 171,900,000
Kec. Grogol	Rp 181,800,000
Kec. Sukoharjo	Rp 191,437,500
Kec. Mojolaban, Kec. Polokarto	Rp 36,150,000
Kec. Bulu, Kec. Tawang Sari, Kec. Weru	Rp 17,400,000
Kec. Gatak	Rp 9,825,000
Kec. Baki	Rp 17,325,000
Kec. Bendosari	Rp 28,575,000
Kec. Nguter	Rp 16,575,000
Grogol Jl. Ir. Soekarno (Sistem Gate)	Rp 15,037,500
Tk. Alfamart	Rp 47,250,000
Tk. Indomart	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa potensi parkir masih terbuka sangat luas, karena capaian pendapatan dari pengelolaan parkir masih di bawah potensi parkir yang diperkirakan. Untuk itu, perlu adanya pemberdayaan kawasan parkir dengan mengajak investor atau organisasi pemuda/ kemasyarakatan dalam memanfaatkan potensi parkir yang ada.

e. Trayek Angkutan Lalu Lintas

Sebelum adanya rencana pengembangan transportasi Aglomerasi Solo—Wonogiri, di Wilayah Sukoharjo sudah ada transportasi yang menghubungkan antara wilayah kabupaten/kota lain dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo, yaitu trayek Angkutan Perdesaan melampaui wilayah kabupaten. Trayek Angkutan tersebut menghubungkan Wilayah Sukoharjo dengan wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar, antara lain:

- Kota Surakarta: Gemblegan, Gading, Tipes, Pajang
- Kabupaten Karanganyar: Klerong, Jatipuro, Jatiyoso
- Kabupaten Wonogiri: Terminal Tipe A (Krisak)

Angkutan penumpang dengan kendaraan umum di Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

Tabel 2.87.**Rasio Izin Trayek di Kabupaten Sukoharjo**

No	Tahun	Izin Trayek yang dikeluarkan	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2016	27	89.0675	0.000030
2	2017	10	89.3169	0.000011
3	2018	19	898.774	0.000021
4	2019	19	906.403	0.000021
5	2020	21	910.024	0.000023

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Pada tahun 2019 jumlah pemasangan rambu-rambu sejumlah 1620 unit. Jumlah trayek angkutan sejumlah 14 trayek. Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR sejumlah 177 angkutan. Jumlah orang atau barang yang terangkut angkutan umum sejumlah 65.976.

Tabel 2.88.**Moda Angkutan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 - 2020**

Nama	Jumlah (Unit) 2018	Jumlah (Unit) 2019	Jumlah (Unit) 2020
Moda Angkutan Barang			
Truk Barang Umum	1.656	1.749	1.229
Mobil Box	507	563	1.112
Mobil Peti Kemas	0	0	0
Mobil Tangki	15	15	15
Moda Angkutan Umum			
Bus	247	250	256
Angkutan Kota	83	74	74
Taksi	50	50	24

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2018-2020

Rencana jalur Aglomerasi jurusan Solo-Wonogiri diharapkan tetap memperhatikan keberadaan Angkutan Perdesaan melampaui wilayah kabupaten yang sudah ada, dengan memberikan kesempatan pada pengusaha dan pengemudi eksisting untuk terlibat di dalam pengelolaannya.

f. Perkeretaapian

Pengelolaan perkeretaapian di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari dua hal yaitu kondisi stasiun kereta dan perlintasan kereta yang ada baik sebidang ataupun tidak sebidang. Seperti yang diketahui wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat tiga stasiun kereta yang aktif melayani seperti yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.89.**Data Stasiun KA di Kabupaten Sukoharjo**

No	Nama Stasiun	Lokasi	Kewenangan
1	Gawok	Kecamatan Gatak	Kementerian Perhubungan
2	Sukoharjo	Kecamatan Sukoharjo	Kementerian Perhubungan
3	Nguter	Kecamatan Nguter	Kementerian Perhubungan

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2020

Adapun panjang lintasan kereta api yang melewati Wilayah Kabupaten

Sukoharjo dibagi menjadi dua jalur perlintasan yaitu jalur lintasan kereta nasional sepanjang 8,5 (delapan koma lima) kilometer dan jalur lintasan Surakarta - wonogiri sepanjang 21 (dua puluh satu) kilometer. Jalur lintasan Surakarta - wonogiri terhitung mulai dari KM. 1+700 s.d KM. 22+700. Lintasan kereta tersebut melewati 34 (tiga puluh empat) titik perlintasan kereta sebidang dengan 9 (sembilan) perlintasan dijaga dan 25 (dua puluh lima) perlintasan tak terjaga. Titik perlintasan kereta tersebut terletak di 2 (dua) jalan Provinsi dan 32 (tiga puluh dua) jalan Kabupaten. Sedangkan di jalur lintasan nasional terdapat 59 (lima puluh sembilan) perlintasan sebidang yang mana semuanya terletak di jalan kabupaten dan penjagaannya merupakan kewenangan PT. KAI. Selain perlintasan sebidang terdapat pula 2 (dua) perlintasan tidak sebidang yang terletak di Wilayah Desa Palur dan Desa Makamhaji. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81.

Data Perlintasan Tidak Sebidang di Kabupaten Sukoharjo

No	Lokasi	Kecamatan	Jumlah	Kewenangan	Jenis
1	Palur	Mojolaban	1	Kemen PUPR	Flyover
2	Makamhaji	Kartasura	1	Kementrian Perhubungan	Underpass

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2021

Adapun rincian perlintasan sebidang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel
Data Perlintasan di Kabupaten Sukoharjo

NO JPL	RESOR	LINTAS	KORIDOR	ANTARA	KM/HM	NAMA JALAN	KODYA/KAB	STATUS JPL	PENJAGA PERLINTASAN
1	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	1+706	Plumbon	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
2	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	3+505	Kyai Mojo	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PEMDA
3	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	3+888	Pabrik	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
4	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	5+236	Tegalmade	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
5	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	5+574	Nusa Indah	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
6	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	6+582	Kampung	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
7	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	7+207	Kalisamin	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PEMDA
8	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	7+885	Kalisamin	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
9	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	9+585	Ring Road I	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PEMDA
10	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	10+185	Norawi	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
11	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	10+741	Sidorejo	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
12	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	11+277	Nandan	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
13	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	11+575	Let Jend Sujono	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PEMDA
14	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	11+732	Duabelasan	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
15	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	12+075	Duabelasan	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
16	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	12+370	Tentara Pelajar	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PEMDA
17	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-SKH	13+082	Nglarangan	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
18	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	13+632	Dr. Muwardi	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PT KAI (JJ)
19	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	13+949	Honggopati	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
20	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	14+250	Sidoluhur	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
21	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	14+505	Dukuh	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
22	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	14+980	Ring Road II	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PEMDA
23	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	15+335	Cenderawasih	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA

NO JPL	RESOR	LINTAS	KORIDOR	ANTARA	KM/HM	NAMA JALAN	KODYA/KAB	STATUS JPL	PENJAGA PERLINTASAN
24	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	15+950	Begajah	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
25	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	16+430	Bogor	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
26	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	16+997	Bogor	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
27	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	17+297	Bogor	SUKOHARJO	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
28	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	18+537	Songgorunggi	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
29	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	18+680	Mento	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PEMDA
30	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	19+724	Kasuari	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
31	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-PNT	20+340	Ngrombot	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
32	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-WNG	21+415	Pasarnguter	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PEMDA
33	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-WNG	22+385	Telesan	SUKOHARJO	REGISTER - DIJAGA	PEMDA
34	6.9 WONOGIRI	STA-PWS	STA-PWS	STA-WNG	22+575	Telesan	SUKOHARJO	REGISTER - TIDAK DIJAGA	TAK TERJAGA
	REGISTER - DIJAGA						10		
	REGISTER - TIDAK DIJAGA						17		
	TIDAK REGISTER - DIJAGA						0		
	TIDAK REGISTER - TIDAK DIJAGA						7		

Tabel 2.82.**Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020**

No (1)	Indikator (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	39.824	37.927	36.121	34.401	23.725
2	Rasio ijin trayek	0,00003	0,00001	0,00002	0,00002	0,00002
3	Jumlah uji kir angkutan umum	421	329	257	244	195
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4	4	4	4	4
5	Persentase layanan angkutan darat	0,02968	0,02466	0,02418	0,02427	0,03043
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	37,164	39,074	50,000	50,204	42,308
7	Pemasangan Rambu-rambu	91,071	73,276	76,724	86,131	87,500
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,5100	0,5500	0,5800	0,6000	0,5700
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	1.128.784	1.094.934	1.062.776	1.009.637	555.300
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	16.060	93.951	92.345	88.330	80.300

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik. Pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen-elemen masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo sebagai perangkat daerah (PD) yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan

teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua Perangkat Daerah.

Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Sukoharjo terus dilakukan dan diupayakan pengembangannya sehingga memungkinkan terkoneksinya perangkat daerah se-Kabupaten Sukoharjo dalam jaringan internet/intranet sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan lancar. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan pada tahun 2019 sejumlah 24 KIM, luas wilayah yang ter-coverage (terlayani telekomunikasi) pada tahun 2019 adalah 100% dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Ketersediaan berbagai layanan dan sarana/prasarana informasi dan komunikasi di Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 tercatat, sebagai berikut.

Tabel 2.83.

Berbagai Layanan dan Sarana/Prasarana Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019

Kecamatan	Layanan Telepon Seluler	Jumlah BTS	Jumlah Provider	Jaringan Telepon	Jumlah Kantor Pos	Kantor Pos Pembantu	Kantor Pos Keliling	Jumlah Stasiun Radio
Weru	13 desa	12 desa	7 desa	4 desa	1 desa	2 desa	13 desa	
Bulu	12 desa	11 desa	7 desa	3 desa	1 desa	1 desa	12 desa	
Tawang Sari	12 desa	7 desa	7 desa	6 desa	1 desa	-	12 desa	
Sukoharjo	14 desa	28 desa	12 desa	14 desa	1 desa	12 desa	14 desa	3
Nguter	16 desa	23 desa	10 desa	10 desa	1 desa	3 desa	16 desa	
Bendosari	14 desa	14 desa	12 desa	7 desa	1 desa	4 desa	14 desa	1
Polokarto	17 desa	19 desa	8 desa	11 desa	1 desa	2 desa	17 desa	
Mojolaban	15 desa	25 desa	11 desa	11 desa	1 desa	1 desa	15 desa	
Grogol	14 desa	30 desa	13 desa	12 desa	2 desa	10 desa	14 desa	3
Baki	14 desa	24 desa	9 desa	12 desa	1 desa	8 desa	14 desa	
Gatak	14 desa	10 desa	12 desa	6 desa	1 desa	3 desa	14 desa	
Kartasura	12 desa	48 desa	14 desa	12 desa	3 desa	13 desa	12 desa	3

Sumber : Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Sukoharjo, 2019

Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi dimaksudkan sebagai upaya mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Untuk mendukung sistem informasi dan komunikasi pembangunan, masing-masing PD didorong untuk membangun jaringan komunikasi online melalui website. Pengguna website di Sukoharjo sudah 100% atau seluruh PD telah terkoneksi. Tujuan pembangunan web bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah mempermudah komunikasi dengan antar lembaga, dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Komunikasi melalui website akan jauh lebih mudah karena tidak mengenal perbedaan lokasi baik jauh maupun dekat dan juga lebih efisien dalam hal biaya dan

waktu. Adapun perkembangan di bidang teknologi informasi di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84.
Perkembangan Teknologi Informasi
di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2020

No	Jenis Perkembangan Teknologi Informasi	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah OPD yang terkoneksi internet	40	40	40	40
2	Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet	167	167	167	167
3	Jumlah hotspot yang dikelola Pemkab	207	207	207	207
4	Jumlah hotspot di tempat publik yang dikelola Pemkab	10	10	12	12
5	Voip ke Kecamatan	12	12	12	12
6	Persentase OPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi	80%	30%	30%	30%
7	Jumlah sub-domain OPD	40	40	40	40
8	Jumlah domain desa	150	150	150	150
9	Perkada terkait tentang implementasi e-goverment	-	1	5	5

Sumber : Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Sukoharjo, 2017-2020

Rencana Induk Smart City Kabupaten Sukoharjo sudah tertuang dalam Perbup Sukoharjo Nomor 3 tahun 2018. Rencana Induk Smart City ini akan difokuskan pada enam strategy Smart City, yaitu *Smart Government*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Environment*. Rencana Aksi Smart City ini akan terdiri atas pengembangan kebijakan dan kelembagaan, rencana pembangunan infrastruktur, pembangunan aplikasi, dan penguatan literasi Smart City. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Penghargaan Implementasi Smart City Nusantara dari Telkom atas Implementasi dalam hal Infrastuktur Teknologi Informatika, aplikasi dan pemanfaatannya dalam pemerintahan, Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan aplikasi teknologi informatika dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi anggaran. Setiap desa di Kabupaten Sukoharjo juga telah terakses internet dan memiliki website dan juga sistem pengelolaan anggaran yang sudah online.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penopang utama sistem perekonomian daerah adalah UMKM dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Jumlah koperasi di Kabupaten Sukoharjo yang sudah berbadan hukum tercatat sebanyak 431 unit, yang terdiri atas KUD 12 unit, KPRI 68 unit, Kopkar 15 unit, Koppas 1 unit dan jenis koperasi lainnya mencapai 330 unit. Adapun koperasi yang aktif sebanyak 352. Kondisi ini amat disayangkan karena setiap tahunnya jumlah koperasi menurun, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85.
Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	805	434	429	426	431
2	Jumlah Koperasi aktif (unit)	382	384	374	351	352
3	Presentase koperasi aktif (%)	57,3	88,43	88,48	85,88	81,67

Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2020

Tingkat keaktifan koperasi di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 2016 -2019 cenderung meningkat, dari sebesar 57,3 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 85,88 persen pada tahun 2019, namun terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 81,67 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 (85,88 persen). Hal ini disebabkan karena banyak koperasi aktif yang naik badan hukum ke Provinsi. Secara umum tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Terdapat pula koperasi yang dibentuk karena adanya bantuan yang mengharuskan kelompok membentuk koperasi, sehingga pasca penerimaan bantuan, koperasi tidak lagi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi. Selain itu, jumlah koperasi di Kabupaten Sukoharjo belum optimal karena masih adanya koperasi yang tidak aktif dan perlu adanya pendampingan khusus.

Sedangkan mengenai usaha mikro, makro dan menengah di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada data berikut.

Tabel 2.86.
Jumlah Usaha Mikro, Makro dan Menengah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2018-2020

Bidang Usaha	Jumlah Usaha								
	Usaha Mikro			Usaha Makro Kecil			Usaha Menengah		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kuliner	4.583	5.450	175.865	431	482	1.732	40	45	530
Fashion	1.176	2.320	13.570	245	261	1.111	0	2	289
Pendidikan	0	0	12	0	0	2	0	0	0
Otomotif	458	467	592	430	435	913	44	48	206
Agrobisnis	1.510	1.580	1580	477	488	940	44	56	312
Teknologi Internet	70	98	348	15	17	468	0	20	165
Lainnya	8.499	8.561	25.098	1.725	145	692	97	105	480

Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2018-2020

Peran Usaha Mikro, UMKM dan Koperasi di Kabupaten Sukoharjo memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian, sehingga harus mampu memberikan

kontribusi terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut antara lain memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melaluicapaian indikator penanaman modal di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2016-2020. Jumlah investor berskala.nasional (PMDN/PMA) tahun 2016 – 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 452 investor, dan meningkat menjadi sebanyak 4082 investor di tahun 2020.

Tabel 2.87.

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Pertumbuhan jumlah investor (PMDN/PMA)
2016	452 investor	13,85 %
2017	468 investor	3,54 %
2018	579 investor	23,72 %
2019	1.650 investor	184,97 %
2020	4.082 investor	147,39 %

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2016-2020

Realisasi investasi PMDN dan PMA di Jawa Tengah pada periode tahun 2016 – 2018 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, dimana tahun 2016 realisasi investasi yaitu sebesar Rp. 5,811 trilyun meningkat tajam menjadi Rp. 23,061 trilyun di tahun 2018. Namun terjadi penurunan di tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.88.

Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA (rupiah)	Kenaikan / Penurunan Nilai Invesatsi PMDN dan PMA (%)
2016	5.811.531.070.759	393
2017	6.397.807.536.581	10
2018	23.061.680.348.614	260
2019	18.302.500.225.252	-21
2020	9.045.557.863.830	- 51

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2016-2020

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada PMA dan PMDN pada tahun 2016 sebanyak 5.820 orang, meningkat pada tahun 2020 menjadi sebanyak 52.450 orang.

Tabel 2.89.

**Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMDN dan PMA	5.820	3.200	116.175	38.625	52.450
Jumlah Investor PMDN dan PMA	452	468	579	1.650	4.082

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2016-2020

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Kegiatan dalam rangka pembinaan kepada pemuda dan kegiatan kepemudaan secara langsung dapat meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dan membiasakan kepada pemuda untuk selalu peka terhadap perkembangan jaman dan perkembangan lingkungannya. Berikut gambaran bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2020.

Tabel 2.90.
Jumlah Pemuda dan Organisasi Pemuda di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2018 – 2020

No	Kecamatan	Jumlah Pemuda Tahun 2018		Jumlah Pemuda Tahun 2019		Jumlah Pemuda Tahun 2020		Jumlah Organisasi Pemuda		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	2018	2019	2020
1	Weru	6.708	6.356	6.122	5.820	6.320	6.022	1	1	0
2	Bulu	5.016	4.638	4.210	3.818	4.296	3.945	0	1	0
3	Tawang Sari	6.675	6.319	6.193	5.925	6.302	5.993	0	1	0
4	Sukoharjo	10.742	10.571	10.543	10.464	10.592	10.451	10	14	7
5	Nguter	6.576	6.188	5.725	5.568	5.892	5.681	0	3	0
6	Bendosari	7.267	7.059	6.712	6.596	6.858	6.686	6	8	10
7	Polokarto	9.718	9.411	9.365	9.222	9.413	9.212	0	3	0
8	Mojolaban	10.221	10.002	10.065	9.856	10.023	9.863	1	2	1
9	Grogol	14.557	13.837	13.615	13.085	13.891	13.230	1	3	2
10	Baki	8.206	7.852	7.780	7.538	7.900	7.593	0	2	0
11	Gatak	5.880	5.637	5.775	5.450	5.837	5.472	0	1	0
12	Kartasura	12.517	11.955	12.134	11.857	12.165	11.792	3	6	4
JUMLAH		104.083	99.825	98.239	95.199	99.489	95.940	22	45	24

Sumber: *Dispora Kabupaten Sukoharjo & Hasil Analisis, 2018-2020*

Dari data tersebut, terlihat bahwa secara kuantitatif, jumlah pemuda berkurang, namun secara kualitas mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah organisasi pemuda yang tersebar di setiap kecamatan. Artinya, pemuda mulai banyak yang sadar dan terlibat dalam suatu organisasi.

Tabel 2.91.
Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40	40	42	46	46
2	Persentase wirausaha muda					
3	Cakupan pembinaan olahraga	50	52	55	47	55
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	51	51	55	57	57
5	Cakupan pembinaan atlet muda	50	50	50	50	50
6	Jumlah atlet berprestasi	200	259	184	171	820
7	Jumlah prestasi olahraga	253	287	329	246	1.125

Sumber : *Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo, 2020*

2.3.2.14 Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Guna meningkatkan ketersediaan dan keterpaduan data serta informasi antar sektor, pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah terintegrasi dengan program Satu Data Indonesia (SDI) melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik antar OPD dalam aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Data dan informasi pembangunan daerah disusun melalui pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, lembaga dan instansi terkait. Selain data yang numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang spasial, antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah. Buku Sukoharjo Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Sukoharjo juga setiap tahun dipublikasikan melalui web <https://sukoharjokab.bps.go.id/> guna menyediakan data publik yang dapat diakses dengan mudah.

Tabel 2.92.

Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.3.2.15 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi untuk mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian. Penyelenggaraan pengamanan persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara.

Masalah persandian pada pemerintah daerah sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, persandian masuk menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Adapun layanan yang dilaksanakan persandian :

- a) Layanan penyampaian informasi melalui radio komunikasi
- b) Layanan pendistribusian informasi melalui faximile
- c) Layanan pengamanan ruangan kerja pimpinan
- d) Layanan pengamanan rumah dinas pimpinan
- e) Layanan pengamanan pada kegiatan strategis pimpinan
- f) Layanan IT Security assesment

- g) Layanan pengamanan data dan aplikasi e-government
- h) Layanan sertifikat elektronik dan digital signature.

Jumlah Perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah tahun 2019 sejumlah 15 perangkat daerah.

2.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan dan melestarikan kebudayaan diusahakan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keragaman suku bangsa dan bahasa. Termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Sukoharjo, terdapat beberapa suku-bangsa, tetapi mayoritas adalah suku Jawa. Cagar Budaya yang dimiliki daerah meliputi :

- a. Benda Cagar Budaya jumlah 192 buah
- b. Bangunan Cagar Budaya jumlah 24 buah
- c. Situs Cagar Budaya jumlah 6 lokasi
- d. Kawasan Cagar Budaya jumlah 2 kawasan

Sedangkan untuk bahasa, menggunakan bahasa lokal (bahasa Jawa). Untuk kawasan wisata budaya meliputi:

- a. Wisata situs bersejarah meliputi:
 - Patilasan Keraton Kartasura dan Keraton Pajang di Kecamatan Kartasura;
 - Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol;
 - Peninggalan Pabrik Gula Gembongan, Peninggalan Benteng Singopuran, dan Pesanggrahan Kandang Menjangan di kecamatan Kartasura;
- b. Wisata religi/ziarah meliputi:
 - Makam Ki Ageng Purwoto Sidik dan makam Kyai Banyubiru di Kecamatan Weru;
 - Makam Balakan dan makam Mbah Marbot/Sayyidiman di Kecamatan Bendosari;
 - Makam Majasto di Kecamatan Tawang Sari;
 - Makam Kyai Shirot dan makam Patih Pringgoloyo di Kecamatan Kartasura;
- c. Wisata Benda Cagar Budaya di Univet, Kecamatan Bendosari.

Tabel 2.93.

Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	25	45	44	46	13
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	183	183	184	192	193
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	0	0
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	104	104	104	109	109

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.3.2.17 Perpustakaan

Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2015-2019, sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Namun meski jumlah koleksi buku meningkat, terjadi penurunan pengunjung perpustakaan dari 34.239 orang Tahun 2016 menjadi 13.802 orang Tahun 2018. Namun pada tahun 2019 terjadi kenaikan kembali kunjungan ke perpustakaan menjadi 20.396 orang per tahun. Hal ini tidak lepas dari kemudahan akses informasi dari berbagai media, termasuk media online yang berpengaruh signifikan terhadap kunjungan ke perpustakaan. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.94.
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kunjungan selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang harus dilayani	Rasio
2016	34.239	871.387	3,92
2017	22.067	878.372	2,51
2018	13.802	885.307	1,55
2019	20.396	891.900	2,28
2020	5.167	898.448	0,58

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.95.
Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	34.239	22.067	13.802	20.398	5.167
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	29.181	30.546	33.771	62.752	62.772
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	3,92	2,51	1,55	2,28	0,58
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	2.853	1.839	1.150	1.801	431
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	19.139	19.850	22.424	24.156	24.169
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	5	4	4	4	6

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2020

2.3.2.18 Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu Tahun 2015 - 2020 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan pengelolaan arsip di Kabupaten Sukoharjo. Pengelolaan arsip pada perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan tabel dibawah :

Tabel 2.96.**Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	70	80	90	100	100

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Sukoharjo, 2015-2019

Penyelamatan arsip merupakan tindakan menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Di Tabel bawah menunjukkan bahwa cakupan arsip yang berhasil dikelola selama kurun waktu lima tahun yakni 2015-2020 mengalami peningkatan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2015-2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Tabel 2.97.**Cakupan Arsip Yang Berhasil Dikelola di Kabupaten Sukoharjo**

Tahun	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Cakupan Arsip Yang Berhasil Dikelola	41,98	45,48	49,45	53,58	0

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Sukoharjo, 2016-2020

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan**

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sub-sektor perikanan menyumbang PDRB sebesar 0,17%. Dengan nilai produksi yang diperoleh sebesar Rp. 18.612,14 juta. Adapun produk perikanan yang ada di Kabupaten Sukoharjo merupakan produk perikanan umum yang berasal dari rawa, waduk, sungai, karamba dan sawah. Sehingga produksi komersial untuk perairan umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo hanya mampu memenuhi pasar lokal untuk dikonsumsi masyarakat sekitar/lokal saja.

Tabel 2.98.**Produksi Perikanan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2020**

Jenis Ikan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Produksi (Ton)	Nilai (Rp. 000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp. 000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp. 000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp. 000)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp. 000)
Tawes	57,06	392.624	57,06	392.624	57	342.360	58	346.392	70,64	423.858
Lele	9.707	155.007.051	9.916	158.982.505	9.707	155.007.051	10.891	282.617.007	11.040,07	284.109.665
Wader	43,90	263.394	38,31	263.349	44	263.394	45	268.962	53,55	321.324
Belut	38,11	459.672	38,31	459.672	38	459.672	39	469.068	54,34	652.032

Katak Hijau	37,23	335.025	37,22	335.025	37	335.025	38	343.971		
Gabus	18,68	186.810	18,61	186.810	18	186.810	20	197.700	37,63	376.310
Udang	42,58	596.148	42,58	596.148	43	596.148	44	613.312	54,62	764.666
Nila Merah Gurami	920,67	19.711.132	2.629,1	57.669.221	921	19.711.132	2.720	85.833.819	2.301,66	81.647.998
Patin	103,89	3.278.559	79,3	2.546.829	104	3.278.559	52	1.517.176	48,06	1.517.176
Lain-lain	91,3	1.526.259	91	1.671.126	91	1.526.259	84	1.391.797	214,28	1.391.797
	53,39	373.758	53,39	373.758	53	373.758	53	374.101		

Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Sukoharjo, 2016-2020

2.3.3.2 Pariwisata

Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri dari Objek wisata alam, Objek wisata buatan, Objek wisata ziarah, dan Objek wisata. Capaian kinerja urusan pariwisata kabupaten Sukoharjo sebagai berikut.

Beberapa objek wisata di wilayah Kabupaten Sukoharjo meliputi :

- 1) Objek wisata alam, di antaranya
 - a) Objek Wisata Batu Seribu di Kecamatan Bulu.
 - b) Gunung Sepikul di Kecamatan Bulu.
 - c) Curug Krajan di Kecamatan Weru
 - d) Telaga Claket di Kecamatan Nguter.
 - e) Gunung Taruwongso di Kecamatan Sukoharjo.
- 2) Objek wisata buatan, di antaranya:
 - a) Pandawa Water World di Kecamatan Grogol
 - b) Royal Water Adventure di Kecamatan Grogol
 - c) Dam Colo di Kecamatan Nguter
 - d) Pemandian Sendang Pinilih di Kecamatan nguter
 - e) Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari
 - f) Alas Karet di Kecamatan Polokarto
 - g) The Heritage Palace di Kecamatan Kartasura
 - h) Desa Wisata Wirun di Kecamatan Mojolaban, dengan produk khasnya adalah gamelan
 - i) Desa Wisata Kenep di Kecamatan Sukoharjo, dengan produk khasnya Karak dan jenang.
 - j) Desa Wisata Sonorejo di Kecamatan Sukoharjo, dengan produk khasnya tatah sungging (wayang kulit).
 - k) Kawasan perbelanjaan di Solobaru, Kecamatan Grogol.
- 3) Objek wisata ziarah, di antaranya:
 - a) Makam Ki Ageng Balak di Kecamatan Polokarto.
 - b) Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol
 - c) Makam Ki Ageng Sutowijoyo di Kecamatan Tawang Sari
 - d) Makam Ki Ageng Purwotosidik di Kecamatan Weru
 - e) Makam Mbah Sayidiman dan Goa Mertan di Kecamatan Bendosari
 - f) Candi Sonosewu di Kecamatan Mojolaban.

- 4) Objek wisata sejarah, di antaranya:
- Petilasan Keraton Pajang di Kecamatan Baki
 - Petilasan Keraton Kartasura di Kecamatan Kartasura.
 - Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai wisata Seni Budaya, di antaranya ritual Pulung Langse, Kebo Kinul dan Jurit Suropaten

Salah satu bagian integral dari perkembangan pariwisata suatu daerah adalah kulinernya. Warung makan dan restoran merupakan hal yang tidak lepas dari kegiatan pariwisata. Usaha penyediaan makanan selain dapat mendukung kegiatan pariwisata namun juga bisa menjadi daya tarik wisata utama. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui wisata kuliner khas sehingga dapat menarik kepuasan wisata yang berkunjung di Sukoharjo. Beberapa kuliner khas di Kabupaten Sukoharjo antara lain yaitu jenang dodol, krasikan, alakatak, ayam goreng kampung dan masih ada banyak lagi. Berikut adalah persebaran warung makan dan restoran yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Rumah Makan/ Restoran di Sukoharjo yang telah memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.99.
Perkembangan Rumah Makan yang Memiliki Izin TDUP
Kabupaten Sukoharjo

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Weru					1
2	Bulu					
3	Tawang Sari					1
4	Sukoharjo	3	3	1	1	2
5	Nguter				1	
6	Bendosari		2		1	1
7	Polokarto				1	
8	Mojolaban	2				1
9	Grogol	11	8	7	6	9
10	Baki					
11	Gatak	2	1		1	
12	Kartasura	11	8	3	2	2
TOTAL		29	22	11	13	17

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2016-2020

Data rumah makan/ restaurant yang sudah memiliki izin TDUP mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017 sejumlah 7 rumah makan dan pada 2017 ke 2018 sejumlah 11 rumah makan, serta mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke 2019 sejumlah 2 rumah makan dan 2019 ke 2020 sejumlah 4 rumah makan. Rumah makan/ restaurant yang ada di Sukoharjo secara umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Jumlah Warung Makan Dan Restoran di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Weru	40	64	112	-	-
Bulu	32	77	120	2	2
Tawang Sari	52	82	140	2	2
Sukoharjo	62	114	162	13	16
Nguter	-	72	132	2	2
Bendosari	70	120	145	2	5

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Polokarto	35	93	110	-	-
Mojolaban	120	155	200	8	8
Grogol	52	97	170	86	101
Baki	74	110	200	7	7
Gatak	110	175	250	5	7
Kartasura	67	155	197	20	20
Kabupaten Sukoharjo	714	1.314	1.938	147	170

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2018 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2019-2020

Perkembangan jumlah warung makan dan restoran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa antusias pengembang usaha kuliner dalam masih tinggi. Potensi ini dapat digunakan untuk menunjang atraksi dan amenitas wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Akomodasi merupakan hal penunjang dalam wisata dengan menggunakan bangunan atau Sebagian bangunan yang disediakan secara khusus dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Akomodasi yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo berupa hotel berbintang dan hotel non bintang, serta akomodasi lainnya. Data jumlah hotel di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.101.

Jumlah hotel dan penginapan di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	2016		2017		Tahun 2018		2019		2020	
	Hotel Berbintang	Hotel non bintang dan akomodasi lainnya	Hotel berbintang	Hotel non bintang dan akomodasi lainnya	Hotel berbintang	Hotel non bintang dan akomodasi lainnya	Hotel berbintang	Hotel non bintang dan akomodasi lainnya	Hotel berbintang	Hotel non bintang dan akomodasi lainnya
Weru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tawang Sari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukoharjo	-	3	1	3	1	3	1	1	1	1
Nguter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bendosari	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Polokarto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mojolaban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grogol	4	3	7	1	7	1	7	1	7	1
Baki	-	3	1	2	1	2	1	1	1	1
Gatak	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Kartasura	2	5	5	2	5	2	-	-	-	-
Kab. Sukoharjo	6	16	14	9	14	9	9	3	9	3

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2018 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2019-2020

Selama tahun 2016-2017, jumlah hotel yang ada di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dengan bertambahnya 1 hotel. Sedangkan pada tahun 2017-2020 jumlah hotel di Kabupaten Sukoharjo tidak mengalami baik peningkatan maupun penurunan. Mulai pada tahun 2019 jumlah penginapan di Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan drastis. Apalagi ditambah pada tahun 2020 terjadi pandemi memaksa penginapan harus tutup dan menyisakan hotel sebagai sarana akomodasi di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.114.**Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan wisata	78.500	79.000	80.000	81.000	81.775
PAD sektor pariwisata (Rupiah)	-	-	117.276.000	650.889.000	94.615.000

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

2.3.3.3 Pertanian

Urusan pertanian berperan strategis karena menjadi tulang punggung kecukupan pangan berkelanjutan. Disisi lain, menghadapi krisis keberlanjutan, karena SDM pertanian banya usia tua, dan susah mendapatkan generasi muda petani. Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi, dan bahan baku untuk diolah dan dapat dipergunakan bagi kehidupan. Berdasarkan data eksisting penggunaan lahan pertanian (Ladang dan Sawah) di Kabupaten Sukoharjo sebesar 21.664,643 ha untuk sawah irigasi dan 3.121,691 ha untuk ladang. Data tersebut diambil berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Urusan pertanian di Kabupaten Sukoharjo meliputi sector tanaman pangan, data capaian kinerja pada sektor pertanian sebagai berikut.

a. Produktivitas Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Data produktivitas tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115.
Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	391.675	392.587	363.282	339.445	310.778
2	Jagung	17.088	12.379	9.313	16.030	30.277
3	Ubi Kayu	20.466	20.201	37.328	41.269	19.331
4	Ubi Jalar	0	0	0	0	0
5	Kacang Tanah	9.225	6.383	6.051	4.753	4.654
6	Kacang Kedelai	4.644	3.674	4.217	1.690	4.805
7	Kacang Hijau	21	86	88	0	28
TOTAL		443.119	435.310	420.279	403.187	369.873

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Produksi tanaman pangan Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah produksi tanaman pangan sebanyak 443.119 ton pada tahun 2016 kemudian menurun berturut-turut

hingga tahun 2020 puncaknya karena adanya pandemi COVID-19 yaitu sebesar 369.873.

b. Produktivitas Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, kentang, dan tomat. Data produktivitas tanaman hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.116.
Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah	58,8	143,6	115,6	69,1	486
2	Bawang Putih	-	-	-	-	-
3	Cabai Besar	302,2	32,2	43,7	76,5	236,7
4	Cabai Rawit	16,7	23,5	5,7	6	53,1
5	Kentang	-	-	-	-	-
6	Bawang Merah	0	17	11	60	85
TOTAL		377,7	216,3	176	211,6	860,8

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Selama periode 2016-2020, produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 produksi tanaman hortikultura mengalami penurunan dari 277,7 ton menjadi 176 ton. Mulai tahun 2019 produksi mulai naik yaitu menjadi 211,6 dan puncaknya pada tahun 2020 produksi meningkat drastis yaitu sebesar 860,8 ton.

c. Produktivitas Tanaman Buah-Buahan

Tanaman buah-buahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari manga, durian, jeruk siam, pisang, pepaya, salak, rambutan, dan Nangka/ cempedak. Data produktivitas tanaman buah-buahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.117.
Produksi Tanaman Buah-Buahan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mangga	4.440,3	16.528,8	22.955,6	44.236,4	28.534,5
2	Durian	3,2	415,9	201,3	334,6	125,6
3	Jeruk Siam	8,3	27,7	40,2	79,4	72,3
4	Pisang	6.454,5	8.908,8	10.299	5.962,5	5.937,3
5	Pepaya	1.462,7	1.728,3	1.634,1	2.016,1	2.457,2
6	Salak	0	0,4	0,2	-	-
7	Rambutan	1.022,1	2.777,6	2.198,7	1.484,5	1.096,7
8	Nangka/ Cempedak	842,0	1.066,6	846,1	1.937,7	2.201,8

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH		14.233,1	31.454,1	27.886,499	56.051,3	40.425,4

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Produktivitas tanaman buah-buahan di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2017 produksi mengalami kenaikan yaitu sebesar 17.221 ton. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kemudian naik lagi produksinya pada tahun 2019. Puncaknya pada tahun 2020 produksi buah-buahan menurun lagi pada jumlah 40.425,4 ton.

d. Produktivitas Tanaman Biofarmaka

Tanaman biofarmaka yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, dan temulawak. Data produktivitas tanaman biofarmaka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118.
Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jahe	301,821	327,866	288,360	220,598	305,446
2	Lengkuas	157,241	158,259	135,740	138,531	100,424
3	Kencur	57,359	106,428	100,240	116,542	130,541
4	Kunyit	839,209	865,927	662,394	604,119	787,472
5	Lempuyang	157,241	162,377	170,134	162,223	144,336
6	Temulawak	217,060	204,474	181,430	131,475	159,215
JUMLAH		1.729,931	1.825,331	1.538,298	1.373,488	1.627,434

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Selama periode 2016-2020, produktivitas tanaman biofarmaka di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah produksi 1.729,931 ton yang selama 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan hingga puncaknya pada tahun 2020 total produksi yaitu 1.627,434 tanaman biofarmaka yang mengalami peningkatan produksi seperti jahe dan kunyit.

e. Produktivitas Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari tebu, tembakau, kelapa, cengkeh, kapuk, mete, kemiri, dan wijen. Data produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119.
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020 (Ton)

NO	PRODUKSI (ton)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tebu	3.437,27	2284,58	2.812,28	3.287,83	2.690,98
2.	Tembakau	196,27	307,94	150,03	236,60	105,20
3.	Kelapa	589,53	589,58	590,74	602,53	602,56
4.	Cengkeh	1,03	1,01	1,01	-	-
5.	Kapuk	71,33	70,98	71,01	-	-
6.	Mete	68,29	68,29	69,14	-	-

NO	PRODUKSI (ton)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7.	Kemiri	0,1	0,090	0,92	-	-
8.	Wijen	0	0	0	0	0
JUMLAH		4.363,82	3.322,47	3.695,13	4.126,96	3.398,74

Sumber : Analisis Berdasarkan Kabupaten Sukoharjo dalam Angka dan Dinas Pertanian, 2016-2020

Selama periode 2016-2020, produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan pada tahun pada tahun 2016 ke 2017 sejumlah masing-masing 483,24 ton pada tahun 2016 dan 1.041,35 ton. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019, produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan jumlah produksi, dengan jumlah masing-masing 372,66 ton pada tahun 2018 dan 431,83 ton. Produksi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari total jumlah produksi tahun sebelumnya sejumlah 728,22 ton.

Sektor pertanian juga merupakan andalan setelah sektor perindustrian dan perdagangan. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 20.460 Ha. Dari juluh tersebut, terdiri atas sawah irigasi teknis 14.489 Ha, sawah irigasi ½ teknis 2.241 Ha, irigasi sederhana 1.874 Ha, dan sawah tadah hujan 1.876 Ha.

Dari 14.489 irigasi teknis tersebut, 73% di antaranya tergantung pada aliran Dam Colo, sedangkan sisanya tergantung pada aliran irigasi provinsi atau kabupaten. untuk itu, petani yang tidak memiliki sumber pengairan lainnya otomatis tidak dapat menanam lahaninya saat Dam Colo ditutup atau dikuras.

Data hingga September 2019 melaporkan bahwa kondisi pertanian di Kabupaten Sukoharjo tercatat seluas 11.934 Ha. Terdiri atas tanaman padi seluas 10.914 Ha, tanaman perkebunan 167 Ha, hortikultura 148 Ha, dan palawija 71 Ha. Kondisi ini ditambah masih adanya potensi lahan yang dapat ditanami sebesar 1.535 Ha.

Tabel 2.120.
Peternakan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 (ekor)

NO	JENIS PETERNAKAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
TERNAK BESAR						
1.	Kuda Muda	34	41	42	43	47
2.	Kuda Dewasa	200	200	199	200	198
3.	Kerbau Muda	221	193	221	212	216
4.	Kerbau Dewasa	363	337	384	385	389
5.	Sapi Muda	11.116	11.153	10.828	11.434	11.706
6.	Sapi Dewasa	17.414	17.441	18.472	18.311	18.755
TERNAK KECIL						
1.	Ayam Ras	2.937.490	2.942.829	3,259,318.00	4,340,450.00	4,990,990.00
2.	Ayam Bukan Ras	843,754.00	843,754.00	877,245.00	883,975.00	892,810.00
3.	Itik Muda	46,367.00	46,467.00	50,497.00	55,609.00	55,776.00
4.	Itik Dewasa	181,612.00	181,516.00	176,393.00	178,723.00	178,723.00

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ternak besar didominasi oleh ternak sapi dewasa. Sedangkan untuk ternak kecil didominasi oleh ternak ayam ras. Keduanya dikatakan mengalami peningkatan produksi tiap tahun. Hal ini perlu didukung guna memenuhi ketersediaan pangan khususnya pemenuhan protein hewani.

Menurut ketersediaan lahannya, penentuan status daya dukung lahan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Hasil perhitungan tahun 2018 dapat diketahui $SL (208.340,31 \text{ Ha}) > DL (206.724,13 \text{ Ha})$. Hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan pada tahun 2019 dinyatakan surplus. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan masih dapat memenuhi kebutuhan.

2.3.3.4 Kehutanan

Secara umum kewenangan hutan di Kabupaten Sukoharjo adalah kewenangan Pemerintah Pusat melalui Provinsi. Pemerintah Daerah hanya bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinergitas guna mengatasi masalah tematik yang muncul akibat masalah kehutanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor PK 359/Menhut-II/2004, luas kawasan hutan menurut fungsi dan status di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

- a. Luas kawasan hutan menurut fungsi terdiri dari hutan lindung seluas 279,8 ha dan hutan produksi seluas 94,9 ha. Hutan lindung tersebar di Desa Gentan, Kamal, Kedungsono, Karangasem dan Bulu di Kecamatan Bulu. Sedangkan untuk hutan produksi terdapat di Desa Pundungrejo, Kecamatan Tawang Sari dan Desa Sanggang Kecamatan Bulu.
- b. Luas kawasan hutan menurut statusnya terdiri dari hutan negara seluas 374,49 ha, hutan hak/ hutan rakyat seluas 1.354 ha, hutan kota 13,42 ha terdiri dari hutan kota (4,82 ha), taman kota (8,6 ha) dan taman keanekaragaman hayati (0,3 ha).

2.3.3.5 Energi dan Sumberdaya Mineral

Kewenangan urusan energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Sukoharjo saat ini terbatas. Dalam upaya penyediaan energi hanya terbatas pada penggunaan listrik sedangkan dalam pengelolaan sumberdaya mineral kewenangannya berada dalam pemerintah pusat melalui provinsi. Penyediaan listrik di Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh PLN Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data penyediaan listrik dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah rumah tangga pengguna listrik dan daya listrik terpasang yang terjadi selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020. Informasi lebih detail dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 2.121.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015-2020

No.	Jenis	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	201.369	230.782	241.862	239.206	n/a	204.257
2.	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	308.351	294.604	289.484	291.472	222.978	226.597
3.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	65,31	78,34	83,55	82,07	-	90,14

Sumber : Analisis berdasarkan Data Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah data pelanggan listrik di Kabupaten Sukoharjo berubah-ubah tiap tahun. Jumlah pelanggan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sedangkan terendah yaitu pada tahun 2015. Penurunan signifikan terjadi dari rentang waktu tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 rumah tangga pengguna listrik mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini diperkirakan terjadi karena efek dari pandemi CoViD-19. Walaupun demikian persentase rumah tangga pengguna listrik paling tinggi terjadi pada tahun tersebut.

Tabel 2.122.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik Tahun 2015-2020

No.	Jenis	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Daya Listrik Terpasang (KWh)	218.908.395	243.850.230	188.474.715	n/a	n/a	191.989.950
2.	Jumlah Kebutuhan (KWh)	277.515.900	265.143.600	260.535.600	262.324.800	200.680.200	203.937.300
3.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%)	78,88	91,97	72,34	-	-	94,14

Sumber : Analisis berdasarkan Data Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2016-2021

Rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 merupakan puncak rasio ketersediaan daya listrik. Hal ini diperkirakan karena efek pandemik sehingga berlaku pembatasan kegiatan umum dan banyak kegiatan dilakukan di rumah. Penyediaan listrik perlu diperhatikan ketersediaannya mengingat pola kebiasaan baru yang akan lebih membutuhkan banyak penggunaan energi listrik di masa mendatang.

Berdasarkan data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, jenis pertambangan rakyat yang terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat 2 (dua) bahan galian golongan C, yaitu Tanah Urug serta Batu Andesit, Pasir, Batu Gamping, Tanah Liat dan Trass.

Gambar 2. 46

Grafik Perubahan Total Produksi Tambang dan Luas Areal Galian Bahan Tambang Jenis Tanah Urug Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014-2019

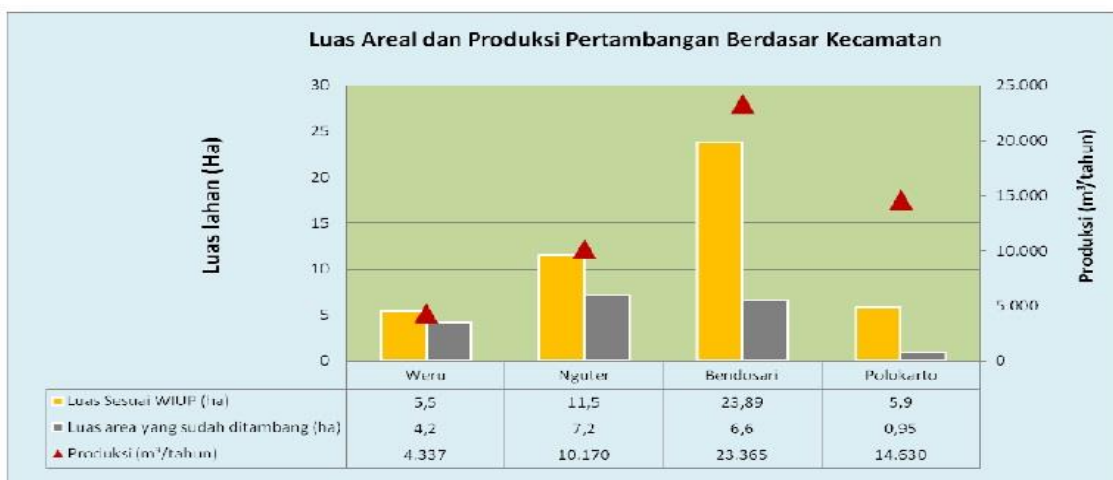


Sumber: Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah, 2014-2019

Pada tahun 2019, menunjukkan data produksi tambang dan luas areal galian bahan tambang yang paling kecil diantara tahun sebelumnya, yaitu dengan total produksi sebesar 52.502 ton/tahun dengan luas areal tambang 18.95 ha. Trend penurunan luas lahan tambang dikarenakan : 1) izin dan regulasi undang - undang pertambangan yang semakin ketat agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam terkait tambang tanah urug dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan, 2) moratorium sementara perizinan tambang baru di kabupaten sukoharjo, 3) biaya produksi dan operasional, dan 4) izin usaha berakhir. Lokasi pertambangan di Kabupaten Sukoharjo hanya terletak di 4 wilayah yaitu Kecamatan Weru, Nguter, Bendosari dan Polokarto. Lokasi ini berada di lokasi timur dan selatan wilayah Kabupaten Sukoharjo dimana merupakan daerah dengan kontur topografi yang terjal dan wilayah dengan SKL ketersediaan air yang rendah dan juga banyak di temukan lahan tidak produktif.

Gambar 2. 47

Grafik Luas Areal dan Produksi Pertambangan Berdasarkan Kecamatan



Sumber: Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah, 2019

Luasan lahan areal tambang dan luasan izin sesuai WUIP yang paling besar ada di kecamatan Bendosari. Secara umum, luas area yang di tambang tidak ada yang melebihi izin (WIUP) nya dan total dari ketentuan RTRW. Walaupun demikian pemberian izin lahan tambang galian tanah urug di Kabupaten Sukoharjo diharapkan wajib mementingkan dan memperhatikan lingkungan yang ada.

2.3.3.6 Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2020 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan dua besar sub sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan. Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan tahun 2020 sebesar Rp. 4.755.069,46 juta, nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Rp 6.274.280,95 juta yang memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 17,00 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2016 – 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.123.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Nilai total PDRB	22.847.982,81	24.163.939,48	25.564.065,09	27.076.442,63	26.616.937,31
2	Nilai Sektor Perdagangan	4.247.120,35	4.462.750,34	4.668.998,70	4.927.396,82	4.755.069,46
3	Kontribusi (%)	18,59	18,47	18,26	18,20	17,86

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.124.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Nilai total PDRB	29.130.306,98	31.621.414,17	34.211.246,04	36.970.814,29	36.911.517,77
2	Nilai Sektor Perdagangan	5.171.028,67	5.573.874,22	5.943.000,51	6.415.800,96	6.274.280,95
3	Kontribusi (%)	17,75	17,63	17,37	17,35	17,00

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Sarana perdagangan di Kabupaten di Sukoharjo didominasi oleh pasar tradisional, akan tetapi kondisi yang ada sekarang insfrastuktur perdagangan ini direvitalisasi karena kapasitas yang ada sudah tidak mampu memenuhi daya tampung yang ada. Jumlah pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 26 unit.

Mengenai kegiatan perdagangan ekspor dan impor, di Kabupaten Sukoharjo meliputi:

- 1) Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.
- 2) Net Ekspor antardaerah.
- 3) Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari daerah tersebut

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Tabel 2.125.
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018*	2019**	2020
Net Ekspor (X-M) ADHB (Juta Rp)	(620.273,08)	119.649,27	221.811,13	8.174,04	3,65
PDRB ADHB (Juta Rp)	29.119.606,98	31.715.414,17	34.204.234,73	36.927.459,69	36.911,52
Proporsi (%)	(2,13)	0,38	0,65	0,02	0,01

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukoharjo, 2016 - 2020

Selama periode 2016 - 2020, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo dengan luar negeri dan antar kabupaten/provinsi, cenderung menunjukkan nilai negatif dengan nilai yang semakin mengecil, dan mulai tahun 2017 net ekspor menjadi positif. Hal ini menunjukkan pada tahun 2017 neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo telah menjadi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran uang masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “surplus luar wilayah”. Pada tahun 2019 net ekspor Kabupaten Sukoharjo sebesar 8,14 milyar rupiah.

Berikut adalah capaian realisasi ekspor Kabupaten Sukoharjo tahun 2015-2019.

Tabel 2.126.
Data Realisasi Ekspor Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 - 2020

NO	TAHUN	NILAI FOB (USD)	IDR (Rp)	Kenaikan dari tahun sebelumnya
1	2016	245.156.011,88	3.310.341.628.415,64	4,18 %
2	2017	236.452.328,40	3.192.106.433.400,00	3,57 %
3	2018	278.537.939,34	3.899.531.150.760,00	22,16 %
4	2019	393.946.759,04	4.333.571.941.560,60	11,13 %
5	2020	8.568.578.025,62	125.743.882.525.973,00	2801,62 %

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.127.
Data Realisasi Ekspor Kabupaten Sukoharjo Menurut Negara Tujuan
Tahun 2018 – 2020

Negara Tujuan	2018		2019		2020	
	Berat Kotor	FOB (USD)	Berat Kotor	FOB (USD)	Berat Kotor	FOB (USD)
Negara Amerika	25.459.875,19	49.499.782,24	17.169.031,19	55.202.427,66	211.317.749,88	3.073.344.936,39
Negara-Negara Amerika Latin	1.741.082,48	7.488.272,11	21.284.866,00	226.080.166,41	132.133.630,18	177.061.303,89
Negara-Negara Eropa	11.221.299,28	66.655.820,46	2.005.835,69	6.900.064,76	113.653.440,74	628.516.152,82
Negara-Negara Afrika	3.710.972,93	12.764.492,60	2.790.764,43	21.134.965,97	304.356.060,08	1.886.974.772,07
Negara-Negara Asia Barat	1.686.007,01	15.841.762,31	6.903.131,27	15.513.825,96	65.579.839,02	356.738.692,89
Negara-Negara Asia Timur	15.868.549,15	61.944.779,37	0,00	0,00	233.305.712,30	1.209.328.160,04
Negara-Negara Asia Tenggara	3.624.781,76	16.533.471,00	31.826.847,42	33.206.995,73	180.253.027,70	375.272.647,02
Negara-Negara Asia Selatan	4.915.873,35	17.857.825,34	211.272.928,48	106.027.582,64	158.084.284,92	258.022.217,19
Negara-Negara Asia Tengah	215.003,67	6.052.210,54	3.005.344,16	20.068.634,48	207.399,00	4.304.752,00
Negara Australia dan New Zealand	10.559.250,43	23.899.523,37	97.688.010,41	93.038.535,90	8.918.808,04	599.014.391,31
JUMLAH	78.655.620,95	278.537.939,34	393.946.759,04	93.038.535,90	1.407.809.951,86	8.568.578.025,62

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo, 2018-2020

Sedangkan mengenai kegiatan impor, Kabupaten Sukoharjo, melalui perusahaan-perusahaan besar yang ada, pada tahun 2018 hanya mengimpor dari Negara-Negara Eropa, Negara-Negara di Asia Timur, serta Negara-Negara Bagian di Australia.

Tabel 2.128.
Realisasi Import Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

NO	PERUSAHAAN	NEGARA ASAL	VOLUME	NILAI IMPOR
1	CV. BUANA PATRAYASA WARNA	Italy	23.380	67.110,60 USD
		Italy	5.110	13.217,50 EUR
2	PT. KONIMEX	Vietnam, Myanmar, Brunei, Malaysia, Thailand, China, India, Taiwan, France, New Zealand	558.909,57	7.017.619,50 USD
		Malaysia, Kamboja, Saudi Arabia	44.063,53	245.316,50 USD
		Malaysia	2.781,77	48.470,40 USD
3	PT. EFRATA RETALINDO	Hongkong, Jepang, China	490,70	13.217,50 USD
4	PT. CRAFTEX INTERNATIONAL	Spanyol	-	4.370,10 EUR
TOTAL			USD	7.392.379,48
			IDR	108.194.717.622,53

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.3.3.7 Perindustrian

Pembangunan sektor industri untuk menumbuhkembangkan home industri di pedesaan sesuai potensi desa, meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, dan memperkuat penguasaan teknologi peralatan dalam upaya pencapaian akses pasar dan penguasaan modal.

Sektor industri memiliki kinerja terhadap sumbangan PDRB Jawa Tengah yang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk sektor industri pada tahun 2020 sebesar Rp 10.144.769,83 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 38,11% terhadap total PDRB sebesar Rp 26.616.937,31 Juta. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2020 sebesar Rp 14.447.977,90 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 39,14% terhadap total PDRB sebesar Rp 36.911.517,77 Juta, Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.129.
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Nilai total PDRB	22.847.982,81	24.163.939,48	25.564.065,09	27.076.442,63	26.616.937,31
2	Nilai Sektor Industri	8.735.531,48	9.271.979,94	9.871.777,71	10.428.612,22	10.144.769,83
3	Kontribusi (%)	38,23	38,37	38,62	38,52	38,11

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Tabel 2.130.
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Nilai total PDRB	29.130.306,98	31.621.414,17	34.211.246,04	36.970.814,29	36.911.517,77
2	Nilai Sektor Industri	11.271.822,77	12.233.453,02	13.359.367,03	14.441.718,34	14.447.977,90
3	Kontribusi (%)	38,69	38,69	39,05	39,06	39,14

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Sektor industri dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian daerah, yaitu mencapai 38,96% pada tahun 2019. Sektor industri merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan di sektor industri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131.
Jumlah Industri Kecil, Sedang, Besar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Bidang Usaha	Jumlah Usaha				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kecil	142	236	269	746	846
Menengah	73	117	130	104	154
Besar	44	44	44	6	15
Jumlah	259	397	443	856	1015

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas jumlah industri di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Peningkatan ini didukung terutama oleh pertumbuhan jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Industri kecil ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Sukoharjo.

2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk setiap tahunnya.

Tabel 2.132.

Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APDB	100%	100%	100%	100%	100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	80%	85%	90%	90%	90%

Sumber : Bappelbangda Kab. Sukoharjo, 2016-2020

2.3.4.2 Keuangan

a. Administrasi Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo terus membaik.

b. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, secara periodik dilakukan evaluasi manajemen pengelolaan aset sehingga keberadaan aset Kabupaten Sukoharjo dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD secara signifikan. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain melalui pemberdayaan aset dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga termasuk pendayagunaan aset-aset yang idle; pengamanan aset, melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah; inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset; serta penyelesaian kasus/sengketa. Capaian kinerja Bidang Keuangan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.133.

Capaian Kinerja Bidang Keuangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA	19.49	15.34	22.79	14.72	20.28
Persentase SLPA terhadap APBD	19.49	15.34	22.79	14.72	20.28
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	15	10	10	10	35
Persentase belanja pendidikan (20%)	38	35.52	32.41	32.36	30.60
Persentase belanja kesehatan (10%)	14	14.39	14.21	14.37	16.12
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	37,03/62,97	39,08/60,92	42,65/57,36	41,76/58,24	37,70/62,30
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0.67	0.65	1.57	1.16	1.12
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BKD Kab. Sukoharjo, 2016-2020

2.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu area reformasi birokrasi adalah aspek penataan sistem manajemen SDM yang difokuskan pada peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur. Peningkatan profesionalisme PNS dilaksanakan berdasarkan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS antara lain melalui kegiatan pengadaan CPNS, tes

kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat, hasil promosi jabatan secara terbuka dan *talent scouting*, serta fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar PNS Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui diklat pengembangan kompetensi jabatan fungsional, diklat pengembangan kompetensi teknis, dan diklat pengembangan kompetensi manajerial.

Dalam proses pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Sukoharjo belum menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan menuju ASN yang profesional dan kompeten. Hal ini ditandai dengan belum adanya *blue print* pemetaan kompetensi ASN yang dijadikan dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi ini menyebabkan masih terdapatnya *gap* kompetensi ASN yang belum terpetakan secara baik, sistem penilaian kinerja yang belum akurat, serta analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilaksanakan secara maksimal dalam satu sistem yang terintegrasi. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, metode pendekatan sistem merit pada manajemen SDM diperlukan untuk menciptakan sinergitas pengembangan ASN yang ideal dan profesional. Dalam sistem merit ini, disyaratkan adanya kesesuaian antara kompetensi (kualifikasi pengetahuan, keahlian, dan pengalaman), kualifikasi (pendidikan dan pelatihan), kinerja (target dan pencapaian), kompensasi (tingkat kebutuhan dan kondisi eksternal), serta disiplin ASN.

Tabel 2.134.

**Capaian Kinerja Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	2	2	3	1	11
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 %	4 %	3 %	3 %	3 %
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 %	8 %	5 %	5 %	1 %
Jumlah jabatan pimpinan dibagi pada instansi Pemerintah	31	31	24	24	19
Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	3,117	2,818	2,609	2,864	2,708
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	6,366	5,514	5,204	4,849	4,436

Sumber : BKPP Kab. Sukoharjo, 2016-2020

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mendorong untuk menerapkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Tabel 2.135.
Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100
Persentase pemanfaat hasil kelitbangan	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan SIDa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase kebijakan infilasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Bappelbangda Kab. Sukoharjo, 2016-2020

2.3.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan terwujudnya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerinthan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsiof (*quick response*).

Capaian kinerja kurun waktu 2016 -2020, ditandai dengan tercapainya target Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Opini WTP menggambarkan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparan dan akuntabel.

Dari aspek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ditandai dengan dicapainya target maturitas/kematangan SPIP level 3 pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa pengendalian telah dirancang secara memadai mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan kegiatan pemantauan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan untuk Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), ditandai dengan dicapainya level 3 (*Integreted*)

Kapabilitas APIP pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infra struktur organisasi.

Tabel 2.136.
Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3

Sumber : Inspektorat Kab. Sukoharjo, 2016-2020

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

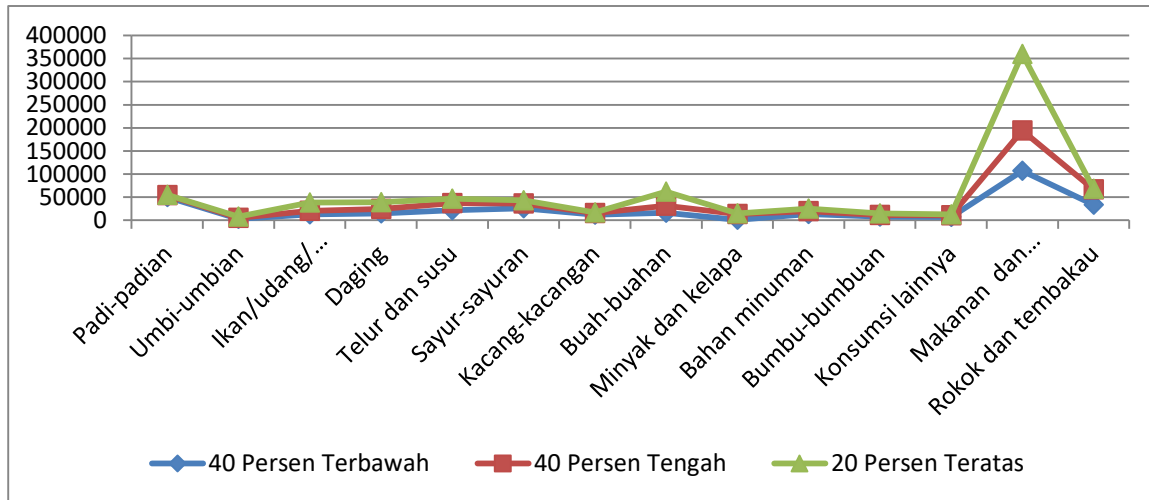
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dan nilai tukar petani.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per-Kapita

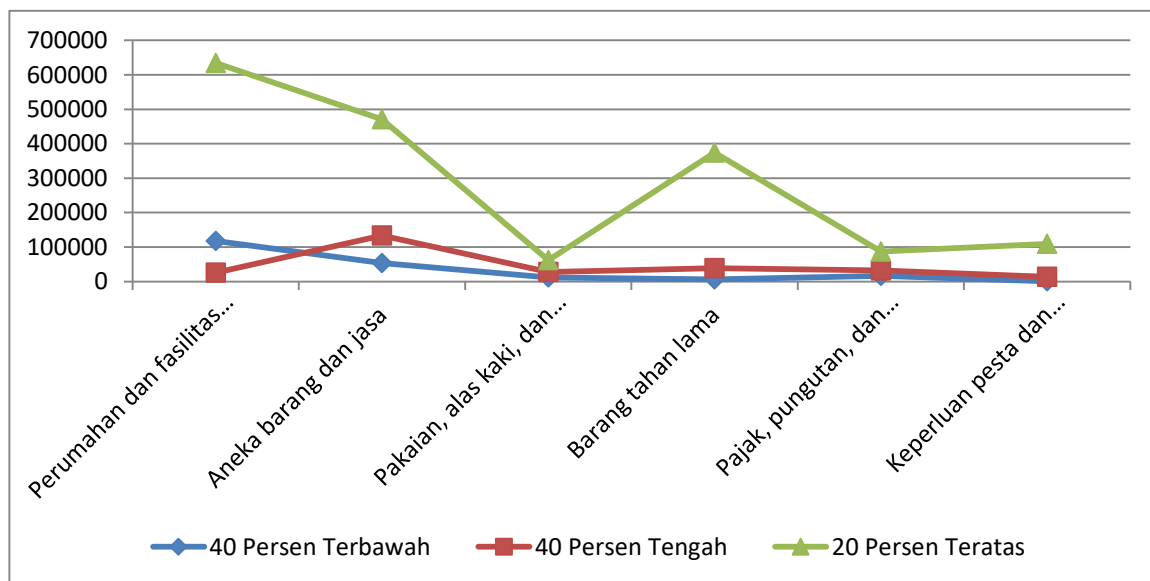
Pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 40% Penduduk Terbawah, 40% Penduduk Tengah, dan 20% Penduduk Teratas. Pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulan penduduk untuk makanan pada tahun 2019 : 40% Terbawah sebesar Rp 334.123, 40% Tengah sebesar Rp 537.363, dan 20% teratas sebesar Rp 802.520. Sedangkan diperuntukkan untuk bahan bukan makanan 40% Terbawah sebesar Rp 206.624, 40% Tengah sebesar Rp 503.918, dan 20% teratas sebesar Rp 1.738.266. Capaian Pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 dapat dilihat Tabel sebagai berikut.

Gambar 2. 48
Rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan penduduk Makanan
Kabupaten Sukoharjo tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2019

Gambar 2. 49
Rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan penduduk Bukan
Makanan Kabupaten Sukoharjo tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2019

b. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Secara umum, arti angka NTP dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/ penurunan harga produksi yang dikeluarkan sama dengan presentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami deficit. Kenaikan harga produksi relative lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani menurun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat dari NTP adalah:

- a. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- b. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- c. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- d. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada data tabel berikut:

Tabel 2.137.
Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No.	Bulan/ Tanggal	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Januari	102.55	100.91	102.92	103.33	-
2.	Februari	102.23	100.33	102.33	102.94	-
3.	Maret	101.32	99.95	101.94	102.73	-
4.	April	101.22	100.01	101.61	102.23	-
5.	Mei	101.55	100.15	101.99	102.61	-
6.	Juni	101.47	100.53	102.04	102.33	-
7.	Juli	101.39	100.65	101.66	102.63	-
8.	Agustus	101.56	101.6	102.56	103.22	-
9.	September	102.02	102.22	103.17	103.88	-
10.	Oktober	101.71	102.78	103.02	104.04	-
11.	November	101.31	103.07	103.12	104.1	-
12.	Desember	101.49	103.06	103.16	104.46	-
Rata-Rata		101.65	101.27	102.46	103.21	NA

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Berdasarkan pemantauan harga perdesaan di Kabupaten Sukoharjo secara umum dari tahun 2016-2019 terlihat cukup fluktuatif dengan rata-rata NTP mencapai 102.15 yang berarti bahwa NTP di Kabupaten Sukoharjo > 100, dengan kata lain rata-rata petani di Kabupaten Sukoharjo mengalami surplus atau memiliki daya beli untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani serta penambahan barang modal. NTP Kabupaten Sukoharjo mengalami pencapaian tertinggi pada Bulan Desember 2016, yakni sebesar 104.46 dan NTP terendah pada Bulan Maret 2017 sebesar 99.95

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut.

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Aksesibilitas merupakan hal penting dalam terjadinya kegiatan di suatu daerah. Jalan dan moda transportasi diperlukan untuk menunjang hal tersebut. Kemampuan jalan harus mampu menerima beban kendaraan yang ada agar aksesibilitas dapat terjadi dengan lancar. Berikut adalah perkembangan rasio jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.138.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah kendaraan bermotor	Rasio	Keterangan
2016	683,72 km	328.744	0,002	Setiap 1 km jalan dibebankan menampung sekitar 500 kendaraan
2017	675,27 km	742.990	0,001	Setiap 1 km jalan dibebankan
2018	675,27 km	772.566	0,001	menampung sekitar 1000
2019	675,27 km	801.581	0,001	kendaraan
2020	675,27 km	NA	NA	

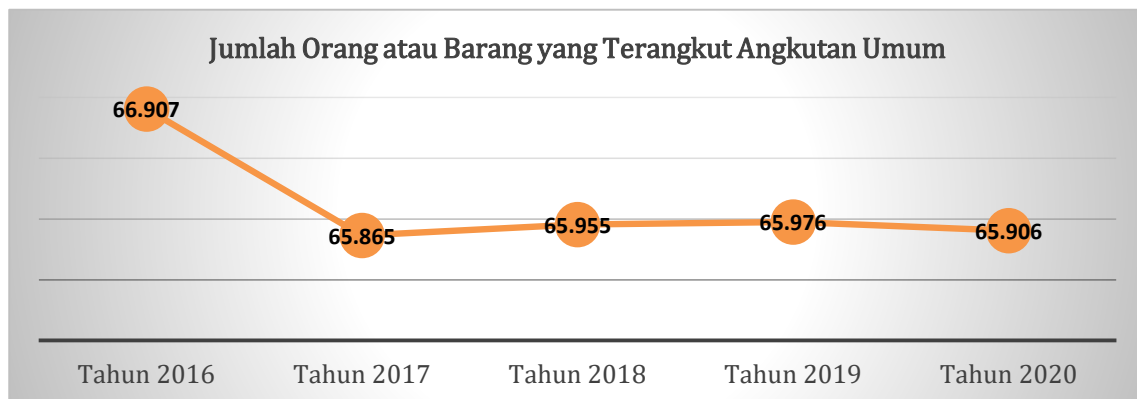
Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka dan Data Dinas Perhubungan diolah, 2016-2020

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa rasio panjang jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Sukoharjo tidakimbang. Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Sukoharjo justru diiringi dengan penurunan panjang jalan. Pada tahun 2015 dan 2016 rasio menunjukkan bahwa setiap 1 km jalan dibebankan pada sekitar 500 kendaraan. Mulai tahun 2017 jalan di Kabupaten Sukoharjo mendapat peningkatan beban dimana setiap 1 km harus menerima beban kurang lebih 1000 kendaraan. Beberapa peran rekayasa lalu lintas sebagai tindak lanjut aksi jangka pendek perlu dioptimalkan guna mengurangi terjadinya kerusakan jalan. Selain itu, untuk jangka panjang rencana penguatan infrastruktur dan penekanan laju pertumbuhan kendaraan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas di Kabupaten Sukoharjo.

b. Jumlah Orang/Barang Terangkut Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo diketahui berupa armada bus angkutan umum. Angkutan tersebut diketahui masih sering beroperasi sedangkan armada lain seperti kereta api masih belum efektif digunakan sebagai moda transportasi umum.

Gambar 2. 50
Jumlah Orang atau Barang Yang Terangkut Angkutan Umum



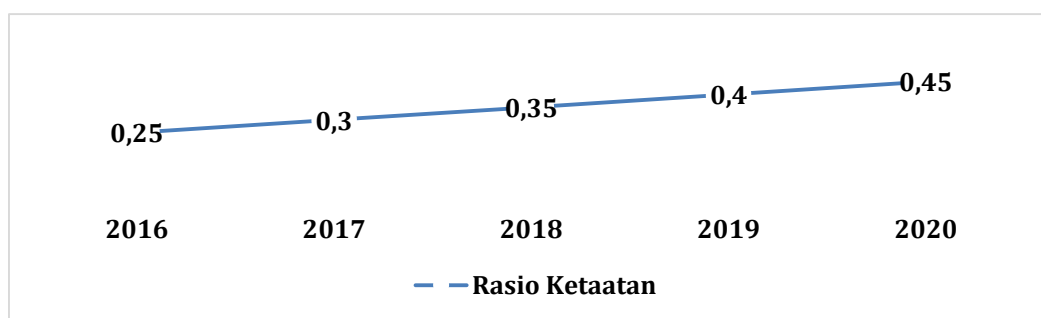
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami penurunan. Penurunan penggunaan angkutan umum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah serta kondisi sarana dan prasarana angkutan umum buruk. Khusus untuk tahun 2020 penurunan penumpang angkutan umum diakibatkan oleh keadaan pandemik saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya guna meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, antara lain pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum, memperbaiki sistem serta sarana dan prasarana fisik angkutan umum. Selain itu, mengingat kondisi pandemic saat ini perlu juga mengutamakan protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah penumpang, sterilisasi angkutan dan jaga jarak di antara penumpang.

c. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

Ketaatan terhadap rencana tata ruang merupakan persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo. Adapun penggunaan/pemanfaatan lahan di Kabupaten Sukoharjo dalam hal ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bisa dilihat di grafik berikut:

Gambar 2. 51
Grafik Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Sukoharjo



Sumber: DPUPR Kabupaten Sukoharjo, 2020

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rasio pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukoharjo meningkat. Walaupun demikian rasio tersebut termasuk dalam angka yang rendah. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih jauh dari kata taat pada aturan yang berlaku. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang menjadi faktor utama dari rendahnya rasio tersebut.

d. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif adalah wilayah yang memiliki lahan subur sebagai peruntukkan pertanian. Secara umum, ketersediaan wilayah produktif di Kabupaten Sukoharjo masih melimpah. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo yang didominasi oleh lahan sawah. Berikut adalah rincian perkembangan luas wilayah produktif dan wilayah budidaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.139.
Tabel Perbandingan Luas Wilayah Produktif dan Budidaya
Kabupaten Sukoharjo

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Produktif (Ha)	41.575	41.566	41.544	41.566	41.544
Luas Wilayah Budidaya (Ha)	44.214	44.221	44.187	44.221	44.187
Rasio	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940

Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ketersediaan wilayah produktif di Kabupaten Sukoharjo masih melimpah. Hal ini dibuktikan dengan rasio perbandingan wilayah produktif dengan wilayah budidaya yaitu sekitar 0,94. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Sukoharjo digunakan untuk kepentingan pertanian.

Tabel 2.140.
Perbandingan Luas Wilayah Produktif dan Budidaya
Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Produktif (ha)	Luas Wilayah Budidaya (ha)	Rasio
1	Weru	3.730	3.866	0,965
2	Bulu	3.228	3.405	0,948
3	Tawang Sari	3.425	3.753	0,913
4	Sukoharjo	4.050	4.458	0,908
5	Nguter	5.090	5.367	0,948
6	Bendosari	4.812	5.207	0,924
7	Polokarto	5.329	5.510	0,967
8	Mojolaban	3.416	3.554	0,961
9	Grogol	2.812	3.000	0,937
10	Baki	2.053	2.197	0,934
11	Gatak	1.820	1.947	0,936
12	Kartasura	1.779	1.923	0,925
	Kab. Sukoharjo	41.544	44.187	0,940

Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka diolah, 2019

Sejalan dengan akumulasi luas wilayah produktif, ketersediaan wilayah produktif per kecamatan di seluruh Kabupaten Sukoharjo tergolong tinggi yaitu di atas rasio 0,9. Hal ini menunjukkan tiap kecamatan masih mengandalkan wilayahnya untuk kegiatan pertanian. Potensi ini sangat menguntungkan Kabupaten Sukoharjo terutama dalam upaya ketahanan pangan. Selain untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan wilayah sendiri diharapkan produksi pertanian pangan dapat diarahkan menjadi kegiatan swasembada.

e. Kawasan Perindustrian

Menurut RTRW Kabupaten Sukoharjo penggunaan lahan kawasan industri yang ada di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 591 hektar. Arah rencana pola ruang mengamanatkan industri di Kabupaten Sukoharjo dikembangkan seluas 2.351 hektar. Berdasarkan hal tersebut, potensi pengembangan kegiatan industri masih mendapat kesempatan namun tetap perlu adanya pengendalian agar tidak mengakibatkan kerugian di masa depan. Berikut adalah persebaran luas industri di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.141.
Persebaran Kawasan Industri di Kabupaten Sukoharjo

Kecamatan	Luas Kawasan Industri (Ha)
Weru	0
Bulu	0
Tawang Sari	0

Kecamatan	Luas Kawasan Industri (Ha)
Sukoharjo	64,195
Nguter	0,001
Bendosari	1,674
Polokarto	12,566
Mojolaban	13,418
Grogol	403,018
Baki	6,525
Gatak	19,596
Kartasura	70,146
Kabupaten Sukoharjo	591,139

Sumber: Penggunaan lahan RTRW Kab. Sukoharjo diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tidak semua daerah memiliki potensi kawasan industri. Daerah yang memiliki potensi industri yang luas adalah Kecamatan Grogol yaitu seluas 403,018 hektar. Hal ini diketahui dengan persebaran beberapa industri besar di Kecamatan Grogol seperti PT Konimex, PT Batik Keris dan PT Dan Liris. Sesuai amanat rencana pola ruang RTRW Kabupaten Sukoharjo, pengembangan industri masih dapat dilakukan di Kecamatan Nguter dan Bendosari. Industri rumah tangga juga masih bias dikembangkan di seluruh lingkungan kecamatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aktivitas industri adalah efeknya yang perlu dikendalikan. Aktivitas industri biasanya memunculkan beberapa masalah seperti alih fungsi lahan, lingkungan dan aksesibilitas. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dan pengendalian yang terjadi akibat aktivitas industri tersebut.

f. Luas Wilayah Kebanjiran

Secara umum, wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki risiko mengalami bencana banjir. Hal ini diakibatkan oleh topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo yang cenderung datar serta jenis tanah aluvial yang mendominasi sulit menyerap air. Berdasarkan data BPBD wilayah berisiko banjir digolongkan menjadi tiga yaitu kerentanan rendah, sedang dan tinggi. Berikut adalah luasan tingkat risiko banjir di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.142.
Luasan Tingkat Resiko Banjir Kabupaten Sukoharjo

Kategori	Luas (ha)	Persentase (%)
Rendah	24.543	49,76
Sedang	18.459	37,42
Tinggi	6.322	12,82
Total	49.323	100

Sumber: Olahan Berdasarkan Data BPBD Kabupaten Sukoharjo, 2015

Berdasarkan tabel di atas, risiko banjir di Kabupaten Sukoharjo dengan dominasi tingkat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah yang memiliki risiko banjir dapat teratasi. Peningkatan mitigasi bencana tetap perlu diadakan terutama pada wilayah yang memiliki tingkat risiko sedang dan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi persentase risiko bencana sehingga tidak ada lagi tingkat risiko bencana sedang maupun tinggi. Untuk persebaran tingkat risiko bencana dapat dilihat melalui tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.143.
Persebaran Tingkat Risiko Bencana Banjir
Kabupaten Sukoharjo

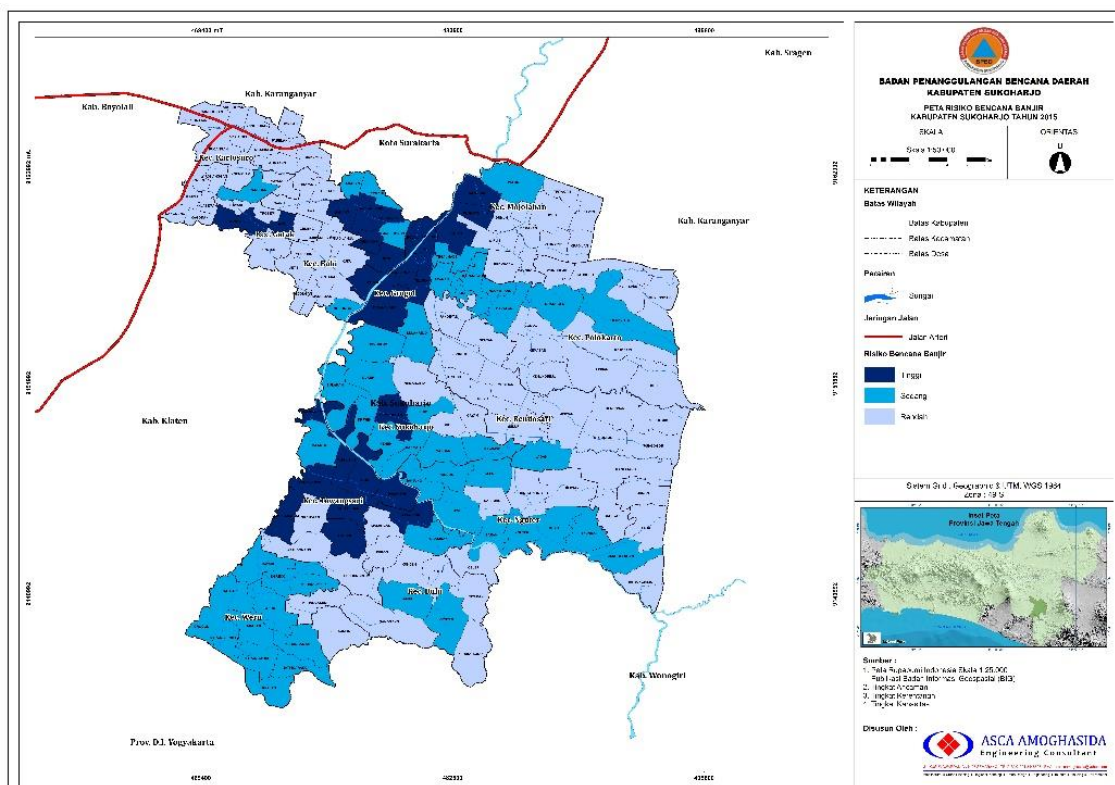
Kecamatan	Kategori	Luas (ha)	Persentase (%)
Baki	Rendah	2.011	4,08
	Sedang	141	0,29
	Tinggi	-	0
Bendosari	Rendah	5.529	11,21
	Sedang	388	0,79
	Tinggi	-	0
Bulu	Rendah	3.401	6,90
	Sedang	1.296	2,63
	Tinggi	256	0,52
Gatak	Rendah	1.535	3,11
	Sedang	250	0,51
	Tinggi	391	0,79
Grogol	Rendah	420	0,85
	Sedang	466	0,94
	Tinggi	2.260	4,58
Kartasura	Rendah	-	0
	Sedang	2.166	4,39
	Tinggi	-	0
Mojolaban	Rendah	2.369	4,80
	Sedang	730	1,48
	Tinggi	728	1,48
Nguter	Rendah	2.317	4,70
	Sedang	3.126	6,34
	Tinggi	-	0
Polokarto	Rendah	4.294	8,71
	Sedang	2.398	4,86
	Tinggi	-	0
Sukoharjo	Rendah	981	1,99
	Sedang	3.407	6,91
	Tinggi	288	0,58
Tawang Sari	Rendah	1.187	2,41
	Sedang	387	0,79
	Tinggi	2.399	4,86
Weru	Rendah	498	1,01
	Sedang	3.704	7,51
	Tinggi	-	0
Total		49.323	100

Sumber: Olahan Berdasarkan Data BPBD Kabupaten Sukoharjo, 2015

Tingkat risiko banjir dalam kategori rendah sebagian besar berada di desa yang berada di Kecamatan Bendosari Kartosuro, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Mojolaban. Sedangkan tingkat risiko banjir dalam kategori sedang sebagian besar

berada di desa yang berada di Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bulu. Wilayah yang memiliki risiko dalam kategori tinggi sebagian besar terdapat di daerah bagian utara dan bagian tengah, dimana kedua wilayah tersebut dilalui oleh Sungai Bengawan Solo seperti sebagian desa yang terdapat di Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Grogol. Tingginya risiko di ketiga wilayah kecamatan tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor fisik dan non fisik. Dilihat dari faktor fisik sebagian besar desa di ketiga kecamatan tersebut memiliki wilayah yang datar, tingkat curah hujan yang sedang sampai dengan tinggi dan tutupan vegetasi yang rendah sehingga ketiga faktor tersebut menyebabkan ketiga wilayah di kecamatan tersebut memiliki tingkat ancaman banjir yang tinggi, ditambah lagi ketiga wilayah kecamatan tersebut dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang memiliki debit sangat besar yang berpotensi meluap pada saat musim penghujan. Sedangkan apabila dilihat dari faktor non fisik sebagian besar wilayah tersebut didominasi dengan penggunaan lahan jenis permukiman dan lahan produktif sehingga menyebabkan wilayah tersebut memiliki nilai indeks ketentanan yang tinggi terhadap bencana banjir.

Gambar 2. 52
Peta Persebaran Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Sukoharjo



Sumber: BPBD Kabupaten Sukoharjo, 2015

g. Luas Wilayah Kekeringan

Kabupaten Sukoharjo diketahui memiliki ancaman bencana kekeringan. Bencana ini perlu diantisipasi ketika musim kemarau tiba. Hal ini mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi lahan pertanian yang luas. Berikut detail rincian luas wilayah yang mengalami risiko kekeringan :

Tabel 2.144.
Tingkat Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sukoharjo

Kategori	Luas (ha)	Persentase (%)
Rendah	27.139	55
Sedang	16.202	33
Tinggi	5.982	12
Total	49.323	100

Sumber: Olahan Berdasarkan Data BPBD Kabupaten Sukoharjo, 2015

Berdasarkan data dari BPBD yang diolah, tingkat risiko bencana kekeringan di Kabupaten Sukoharjo memiliki tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tingkat risiko bencana kekeringan di Kabupaten Sukoharjo mayoritas adalah risiko rendah. Walaupun demikian tetap perlu memfokuskan perhatian pada tingkat risiko bencana kekeringan di wilayah potensi sedang dan tinggi. Peningkatan mitigasi bencana terutama dalam penyediaan air baku untuk pertanian dan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi.

Tabel 2.145.
Persebaran Tingkat Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Sukoharjo

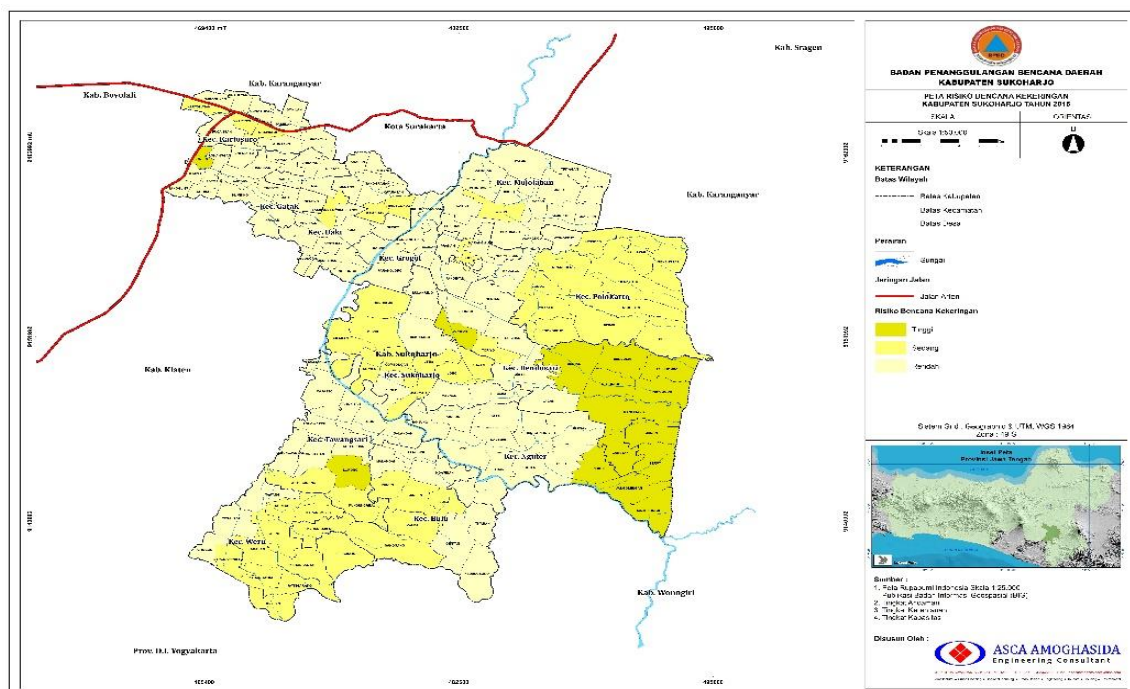
Kecamatan	Kategori	Luas (ha)	Persentase (%)
Baki	Rendah	2.168	4,39
	Sedang	172	0,35
	Tinggi	-	0
Bendosari	Rendah	2.106	4,27
	Sedang	233	0,47
	Tinggi	3.234	6,56
Bulu	Rendah	2.613	5,30
	Sedang	2.027	4,11
	Tinggi	-	0
Gatak	Rendah	1.890	3,83
	Sedang	-	0
	Tinggi	105	0,21
Grogol	Rendah	2.830	5,74
	Sedang	303	0,61
	Tinggi	-	0
Kartasura	Rendah	1.740	3,53
	Sedang	426	0,86
	Tinggi	-	0
Mojolaban	Rendah	3.557	7,21
	Sedang	272	0,55
	Tinggi	-	0
Nguter	Rendah	3.499	7,10

Kecamatan	Kategori	Luas (ha)	Persentase (%)
Polokarto	Sedang	-	0
	Tinggi	2.285	4,63
	Rendah	1.159	2,35
	Sedang	5.530	11,21
Sukoharjo	Tinggi	-	0
	Rendah	1.898	3,85
	Sedang	2.784	5,64
Tawanghari	Tinggi	-	0
	Rendah	2.732	5,54
	Sedang	841	1,71
Weru	Tinggi	358	0,73
	Rendah	947	1,92
	Sedang	3.613	7,33
	Tinggi	-	0
Total		49.323	100

Sumber: Olahan Berdasarkan Data BPBD Kabupaten Sukoharjo, 2015

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, tingkat risiko kekeringan yang tinggi terjadi di wilayah timur Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dikarenakan di wilayah timur memiliki tingkat ancaman yang tinggi dan ditambah lagi faktor kerentanan dan kapasitas di wilayah tersebut tergolong sedang sampai dengan tinggi. Tingginya faktor ancaman dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah, dimana sebagian besar wilayah tersebut memiliki curah hujan dan tutupan vegetasi yang rendah sehingga air hujan yang turun hanya sedikit yang terserap ke dalam tanah yang menyebabkan kandungan air tanahnya kecil, baik air tanah dalam (artesis) dan air tanah dangkal (freatis).

Gambar 2. 53
Peta Persebaran Tingkat Risiko Bencana Kekeringan
Kabupaten Sukoharjo



Sumber: Olahan Berdasarkan Data BPBD Kabupaten Sukoharjo, 2015

h. Luas Wilayah Perkotaan;

Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37 Tahun 2010, perkotaan adalah wilayah yang setingkat dengan desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi perkotaan. Klasifikasi tersebut berdasarkan beberapa kriteria wilayah perkotaan tertentu meliputi kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan keberadaan/akses fasilitas perkotaan yang dimiliki desa/kelurahan untuk menentukan status perkotaan suatu desa/kelurahan. Adapun jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Sukoharjo yang terklasifikasi sebagai wilayah perkotaan yaitu 91 desa dan 14 kelurahan sedangkan untuk wilayah perdesaan yaitu berjumlah 59 desa dan 3 kelurahan. Berikut adalah rincian luas wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.146.
Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	Luas Kawasan (ha)			
		Perdesaan	%	Perkotaan	%
1.	Mojolaban	428	1,83	3.402	13,10
2.	Baki	310	1,33	2.029	7,81
3.	Gatak	188	0,80	1.807	6,96
4.	Bendosari	3.800	16,27	1.772	6,82
5.	Polokarto	4.841	20,73	1.850	7,12
6.	Kartasura	185	0,79	1.981	7,63
7.	Sukoharjo	889	3,81	3.793	14,61
8.	Tawang Sari	2.893	12,39	1.039	4,00
9.	Bulu	2.850	12,20	1.790	6,89
10.	Weru	2.644	11,32	1.917	7,38
11.	Nguter	4.329	18,53	1.454	5,60
12.	Grogol	-	0	3.132	12,06
Total		23.357	47,36	25.966	52,64
Luas Kabupaten Sukoharjo		49.323 ha		100%	

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37 Tahun 2010 dan RTRW Kabupaten Sukoharjo diolah, 2020

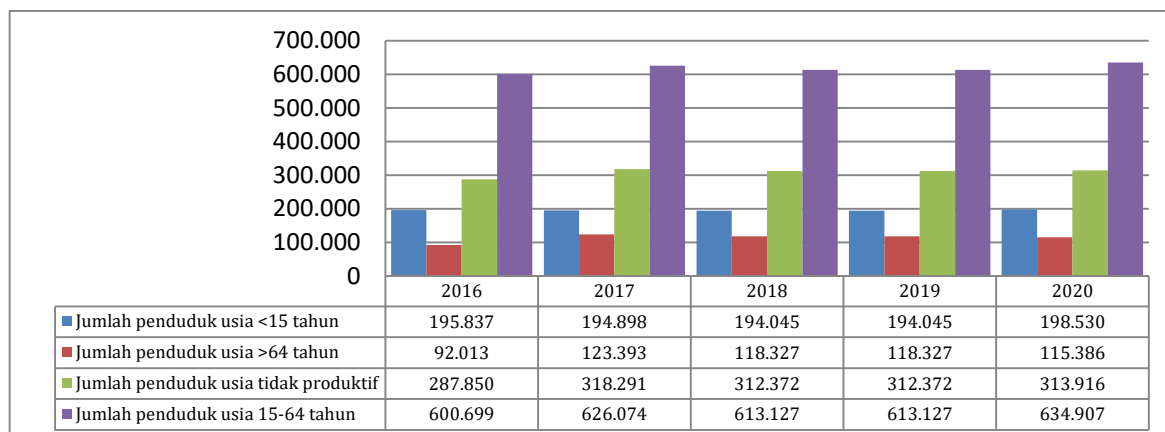
Wilayah perkotaan diketahui lebih mendominasi sebagian besar wilayah di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan angka yaitu sebesar 52,64% untuk wilayah perkotaan dan 47,36% untuk wilayah perdesaan. Karakter perkotaan yang mendominasi menandakan bahwa sebagian besar desa/kelurahan cenderung memiliki kepadatan penduduk tinggi dan akses fasilitas perkotaan lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut maka perlu upaya peningkatan kualitas dan akses fasilitas yang sudah ada sehingga wilayah perdesaan pun dapat menjangkau fasilitas yang tidak ada di wilayahnya.

2.4.3 Fokus Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

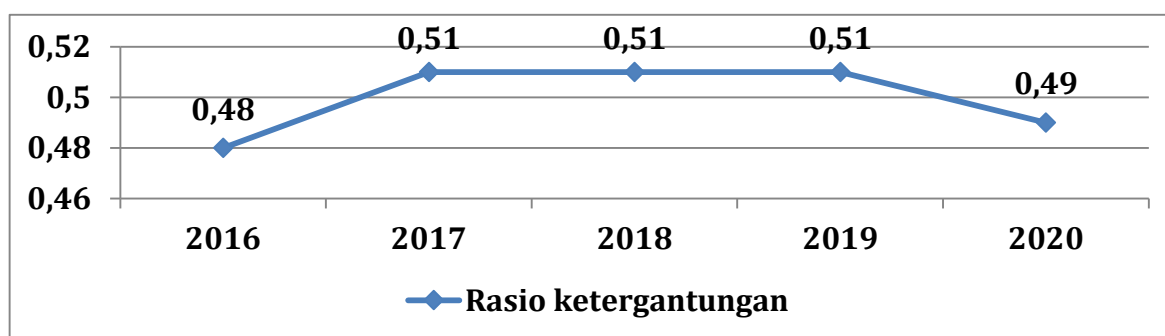
Rasio ketergantungan dalam kurun waktu 2016-2020 terus menurun, pada tahun 2019 sebesar 0,51 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,49.

Gambar 2. 54
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

Gambar 2. 55
Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

b. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama 5 tahun terakhir masih didominasi lulusan SD ke bawah, walaupun cenderung semakin menurun. Menurunnya dominasi pekerja lulusan SD ke bawah serta meningkatnya lulusan DI/II/III dan universitas berdampak kepada tingkat produktivitas pekerja yang semakin membaik.

Tabel 2.147.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)

No	Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan	2016	2017
1	0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ <i>Primary School</i>	47,55	37,00
2	Sekolah Menengah Pertama/ <i>Junior High School</i>	10,28	17,87
3	Sekolah Menengah Atas/ <i>Senior High School</i>	29,88	32,83
4	Perguruan Tinggi/ <i>Collage</i>	12,29	12,30
	Jumlah	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016-2017

c. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sektor pertanian memberikan kontribusi paling tinggi terhadap penyerapan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas menurut lapangan pekerjaan utama selama kurun waktu 2016 - 2020, kemudian diikuti sektor perdagangan dan sektor industri. Namun jika dilihat perkembangan tiap tahun, pekerja pada sektor pertanian selama 2016 - 2020 mengalami perkembangan yang menurun. Disisi lain penduduk usia kerja di sektor perdagangan dan industri pengolahan, bahkan jasa cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.148.
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama

No	Lapangan pekerjaan Utama	2017	2018	2019	2020
1	Berusaha sendiri	97.525	98.153	105.166	98.618
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	43.248	47.618	39.003	41.416
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	17.132	18.216	15.169	13.369
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	226.930	226.706	240.119	224.214
5	Pekerja bebas	46.896	38.657	36.615	45.010
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	18.549	29.509	24.882	31.792
	Jumlah	450.280	458.859	460.954	454.419

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2017-2020

2.5. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

Pelayanan Dasar yang dilakukan berdasarkan pada Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 6 bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) Sosial

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; (2) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan (3) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Standar teknis yang dimaksud di atas, ditetapkan oleh Kementerian terkait setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, misalnya bidang pendidikan mengacu terhadap standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

2.5.1. Bidang Kesehatan

Berdasarkan tabel berikut capaian SPM Kesehatan yang tergolong rendah adalah pada pelayanan dasar kesehatan hipertensi dimana tahun 2020 sebesar 41,27%, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat pada tahun 2020 sebesar 47,44% dan pelayanan kesehatan orang dengan TB dimana pada tahun 2020 hanya mencapai 24,19%.

Tabel 2.149
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan
Tahun 2017-2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	SPM Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	93,34%	100%	100%	95,3%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	78,70%	100%	32,63%	41,27%
5	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	46,55%	29%	106,86%	88,21%
6	Upaya/skrining kesehatan jiwa pada gangguan jiwa berat Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	61,82%	97%	38,16%	47,44%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan	79,67%	76,3%	89,69%	69,18%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		layanan kesehatan				
8	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	34,60%	100%	42,52%	24,19%
9	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	85,14%	96,32%	84,93%
10	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	85,19%	100%	100%	85,8%
11	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	62,09%
12	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	60,69%	49,41%	83,49%	75,38%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.5.2. Bidang Pendidikan

Adapun Capaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2020 untuk Jumlah anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD sebesar 126,3%, anak usia 7-12 tahun yang sudah atau sedang belajar sebesar 99,8%, anak usia 12-15 tahun yang sudah atau sedang belajar sebesar 78,6% dan anak usia 7-18 yang sedang atau sudah belajar pada pendidikan kesetaraan hanya sebesar 1%. Berdasarkan hal tersebut maka pendidikan kesetaraan untuk anak usia 7-18 tahun perlu ditingkatkan.

2.5.3. Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 SPM bidang sosial terdiri atas 5 pelayanan dasar. Adapun capaiannya pada tahun 2020 antara lain jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 23,257%, jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 8,590%, jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 1,429%, umlah gelandangan dan pengemis yang

terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 6,770% dan jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 29,4%. Berdasarkan hal tersebut pelayanan dasar terhadap lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti perlu ditingkatkan.

2.5.4. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

SPM Trantibumlinmas dilaksanakan apabila dalam Penegakan Perda/Perkada ada warga pelaksanaan Penegakan tersebut. Pada Tahun 2020, Penegakan Perda/Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sukoharjo tidak ada warga yang mengalami cedera fisik (korban) maupun kerugian materiil akibat dari dampak penegakan tersebut, sehingga capaian SPM Satpol PP Kabupaten Sukoharjo adalah 0 % (nol persen). Dalam pengisian data pada E - SPM Jateng Tahun 2020, kami melakukan input data sebesar 100%, dengan jumlah sasaran 1 orang, hal tersebut dikarenakan pada aplikasi tersebut tidak bisa di input dengan data/angka 0 (nol). Sedangkan untuk pelayanan dasar jumlah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat Kabupaten/Kota sebesar 100%.

Untuk Jumlah Warga Negara yang menjadi korban bencana daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2019 sebesar 5,5 % dan mengalami kenaikan menjadi 7,7%. jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tingkat Kabupaten/Kota tidak berubah pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 3,2% dan jumlah Warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 sebesar 1,8% dan mengalami kenaikan menjadi 1,9%.

2.5.5. Bidang Perumahan Rakyat

Adapun bidang perumahan rakyat melaksanakan 2 SPM yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebesar 0% pada tahun 2020 dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sebesar 0% pada tahun 2020. Keduanya diupayakan dioptimalkan pelaksanaannya pada periode pembangunan 5 tahun ke depan.

2.5.6. Bidang Pekerjaan Umum

SPM bidang pekerjaan umum terdiri atas 2 pelayanan dasar yaitu air minum dan air limbah. Adapun capaian pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2016 sebesar 77,5% sedangkan tahun 2020 yaitu 92,2%. Untuk penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2016 yaitu sebesar 72,45% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 97,9%. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengupayakan pemenuhan pelayanan dasar kedua hal tersebut sebesar 100% pada tahun 2024.

Tabel 2.149
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	77,51	80,47	88,33	89,26	92,2%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domesti (%)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	72,45	78,33	85,42	86,82	97,9%

Sumber: DPUPR Kabupaten Sukoharjo, 2020

2.6. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2020. Hasil evaluasi ditunjukkan dengan Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD pada tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sukoharjo yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Tabel 2.150
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi												
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,72	5,76	5,79	5,92	-1,7	>
2.2.1.2	Laju Inflasi	%	2,34	3,4	2,52	2,35	2,08	2,34	3,4	2,52	2,35	2,08	=
2.2.1.3	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta	34,586	36,761	38,936	41,111	32,246	33,429	35,999	38,647	41,451	40,669	>
2.2.1.4	Penduduk Miskin	%	10	9,8	9,6	9,5	9,4	9,07	8,75	7,41	7,14	7,68	>
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial												
2.2.2.1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,53	74,06	74,56	75,35	75,5	75,06	75,56	76,07	76,84	76,98	>
	a. Usia Harapan Hidup	Tahun	77,5	77,52	77,54	77,56	77,58	77,46	77,49	77,54	77,55	77,65	>
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,45	13,5	13,55	13,6	13,7	13,79	13,8	13,81	13,82	13,85	>
	c. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,5	8,69	8,7	8,9	9	8,58	8,71	8,84	9,1	9,34	>
	d. Pengeluaran Per Kapita	Juta	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.452	10.765	11.100	11.557	11.325	>
2.2.2.2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	-	92	93	94	95	N/A	96,98	96,73	96,58	96,49	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.2.3	Angka Partisipasi												
	a. Angka Partisipasi Kasar												
	APK SD/MI	Angka	106,99	101,63	101,07	103,99	102,33	106,99	101,63	101,07	103,99	102,33	=
	APK SMP/MTs	Angka	94,34	99,88	100,02	103,69	101,77	94,34	99,88	100,02	103,69	101,77	=
	APK SMA/MA	Angka	101,42	96,11	92,74	81,17	83,41	101,42	96,11	92,74	81,17	83,41	=
	b. Angka Partisipasi Murni												
	APM SD/MI	Angka	97,91	95,60	95,22	95,52	95,95	97,91	95,60	95,22	95,52	95,95	=
	APM SMP/MTs	Angka	79,37	80,12	80,87	81,62	82,37	86,74	82,94	79,02	81,44	82,38	>
	APM SMA/MA	Angka	56,46	56,46	59,26	62,06	62,85	68,56	68,08	64,23	63,50	64,43	>
2.2.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka												
	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,08	68,63	67,89	69,38	67,17	66,08	67,29	66,46	68,17	68,74	>
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48	5,98	5,98	4,6	4,52	4,33	2,27	2,78	3,4	6,93	>
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga												
2.2.3.1	Kebudayaan												
	Benda Cagar Budaya	Buah	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	>
	Bangunan Cagar Budaya	Buah	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	>
	Situs Cagar Budaya	Lokasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	>
	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	>
2.2.3.2	Olahraga												

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Jumlah Klub Olahraga	Klub	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	>
	Jumlah Gedung Olahraga	Gedung	124	148	152	152	152	124	148	152	152	152	152	>
	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	268	259	184	171	7	268	259	184	171	7	7	>
	Jumla Prestasi Olahraga	Prestasi	253	287	329	246	8	253	287	329	246	8	8	>
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	40	40	42	46	42	40	40	42	46	42	42	>
	Jumlah Organisasi/Klub Olahraga	Organisasi/Klub	30	30	33	37	37	30	30	33	37	37	37	>
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM													
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
2.3.1.1	Pendidikan													
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka	92,7	93,08	93,46	93,84	94,22	92,7	93,08	93,46	93,84	94,22	94,22	=
2	Pendidikan Dasar													
2.1	Angka Partisipasi sekolah (APS)													
	SD/MI/Paket A	Angka	79,52	80,42	81,32	82,22	83,12	100	99,2	100	99,84	99,6	99,6	>
	SMP/MTs/Paket B	Angka	110,56	109,28	108	106,72	105,44	99,35	98,63	100	99,64	98,86	98,86	<
	SMA/SMK/MA/Paket C	Angka	56,64	56,64	58,07	62,15	61,5	81,03	82,48	82,73	81,92	82,4	82,4	>
2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)													
	SD/MI/Paket A	Angka	109,13	108,1	107,08	106,05	105,03	106,99	101,63	101,07	103,99	102,33	102,33	<
	SMP/MI/Paket B	Angka	106,9	106,9	105,52	104,14	102,76	94,34	99,88	100,02	103,69	101,77	101,77	<
	SMA/MA/Paket C	Angka	83,38	83,38	85,38	87,38	88,16	101,42	96,11	92,74	81,17	83,41	83,41	>
2.3	Angka Partisipasi Murni (APM)													

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SD/MI/Paket A	Angka	99,82	99,85	99,88	99,91	99,94	97,91	95,6	95,22	95,52	95,95	<
	SMP/MTs/Paket B	Angka	79,37	80,12	80,87	81,62	82,37	86,74	82,94	79,02	81,44	82,38	>
	SMA/SMK/MA/Paket C	Angka	56,46	56,46	59,26	62,06	62,85	68,56	68,08	64,23	63,5	64,43	>
2.4	Angka Putus Sekolah												
	SD/ sederajat	Angka	0,018	0,016	0,014	0,012	0,01	0,03	0,02	0,03	0,01	0,02	<
	SMP/ sederajat	Angka	0,037	0,034	0,031	0,028	0,025	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	<
2.5	Angka Kelulusan												
	SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
	SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
	SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
2.6	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah												
	SD / MI	Jumlah gedung/penduduk usia 7-12 tahun	82,25	79,88	78,50	77,88		82,25	79,88	78,50	77,88		>
		7-12 tahun											
	SMP/MTs	Jumlah gedung/penduduk usia 13-15 tahun	25,42	25,23	26,24	34,54		25,42	25,23	26,24	34,54		>
2.7	Rasio Guru dan Siswa												
	SD	Jumlah guru/ Jumlah murid	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:11	1:13	1:13	1:12	1:13	>
	SMP	Jumlah guru/ Jumlah murid	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	1:14	1:15	1:15	1:15	1:15	>
2.8	Fasilitas Pendidikan												
	Kondisi Bangunan/ruang kelas SD/ sederajat												
	Baik	%	82,9	85,3	87,7	90,1	92,5	67,96	70,26	72,57	76,8	80,5	<

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rusak sedang	%	13,08	11,28	9,48	7,68	5,88	23,88	23,05	22,20	18,85	14,88	>
	Rusak berat	%	4,02	3,42	2,82	2,22	1,62	8,17	6,69	5,23	4,36	4,63	>
	Kondisi Bangunan/ruang kelas SMP/ sederajat												
	Baik	%	92,86	93,89	94,92	95,95	96,98	85,61	85,51	86,61	90,33	91,81	>
	Rusak sedang	%	6,13	5,1	4,07	3,04	2,01	13,06	13,40	12,53	8,35	7,18	>
	Rusak berat	%	1,01	1	1	0,99	0,99	1,32	1,09	0,86	1,33	1,01	>
2.9	Angka Melanjutkan												
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka	106,38	105,86	105,34	104,82	104,3	103,35	102,54	102,26	106,34	106,9	>
	Angka Melanjutkan dari SMP/MI ke SMA/SMK	Angka	103,26	103,37	103,26	103,15	103,04	116,85	106,35	106,35	104,57	103,15	>
2.10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4												
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	94,34	95,47	96,61	97,74	98,87	91,56	93,25	94,94	92,32	93,12	<
	Guru PAUD, SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Guru	8000	8000	8000	8000	8000	8.011	8.248	8.441	8.446	8527	>
3	Pendidikan Non Formal												
	Lembaga Pendidikan non Formal Kab. Sukoharjo												
	PKBM	Lembaga	19	20	21	22	23	24	23	19	19	19	>
	SKB	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	>
	LPK	Lembaga	80	82	83	84	85	121	114	104	84	84	>
2.3.1.2	Kesehatan												
	a. Angka Kematian Bayi	kasus/ 1000	10	9,6	9,4	9,2	9,2	9	6,38	5,65	5,49	7,42	>
	b. Angka kematian Balita	kasus/ 1000	11,5	11	10,5	10	9,5	10,82	8,52	7,41	7,25	8,88	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	c. Angka Kematian Ibu	kasus/100.000	140	140	130	110	102	94,8	31,94	31,87	39,84	57,08	>
	d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu	posyandu/balita	1 : 11	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 10	1 : 11	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 10	>
	e. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per satuan Penduduk	puskesmas, poliklinik dan pustu/penduduk	1: 6.524	1 : 5.957	1 : 5.724	1 : 5.427	1 : 5.482	1: 6.524	1 : 5.957	1 : 5.724	1 : 5.427	1 : 5.482	>
	f. Rasio Dokter per satuan Penduduk												
	Rasio Dokter Umum	dokter/100.000 penduduk	35,69	34,46	33,97	37	41,8	35,69	34,46	33,97	37	41,8	>
	Rasio Dokter Spesialis	dokter/100.000 penduduk	21	19,34	23	30,7	32,3	21	19,34	23	30,7	32,3	>
	Rasio Dokter Gigi	dokter/100.000 penduduk	6,74	6,89	9,87	8,6	8,9	6,74	6,89	9,87	8,6	8,9	>
	g. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk		143,64	117,84	145,53	138,68	185,51	143,64	117,84	145,53	138,68	185,51	>
	Rasio Bidan	bidan/100.000 penduduk	82,78	55,47	77,59	76,2	80	82,78	55,47	77,59	76,2	80	>
	Rasio Perawat	perawat/100.000 penduduk	156	150	170	211,3	225,3	156	150	170	211,3	225,3	>
	Rasio Tenaga Farmasi	tenaga farmasi/100.000 penduduk	52,35	53,58	61,89	54,7	62,3	52,35	53,58	61,89	54,7	62,3	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rasio Tenaga Gigi	tenaga gigi/100.000 penduduk	8,5	8,78	7,18	7,7	10,3	8,5	8,78	7,18	7,7	10,3	>
	h. Jumlah Penduduk Pemanfaat												
	Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran												
	Penerima JKN PBI	%	55,14	51,33	43,72	39,41	43,76	55,14	51,33	43,72	39,41	43,76	=
	Penerima PBI APBD Provinsi	%	0,65	0,82	0,82	1,65	0,8	0,65	0,82	0,82	1,65	0,8	=
	Penerima PBI APBD Kabupaten	%	1,21	2,28	10,51	10,21	5,68	1,21	2,28	10,51	10,21	5,68	=
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang												
	a. Jalan dan Jembatan												
	Kondisi jalan yang menjadi kewenangan												
	Baik	%	30,59	30,51	30,43	30,35	30,27	37,39	20,04	20,04	36,5	66,1	>
	Sedang	%	57,55	57,68	57,81	57,94	58,07	25,99	67,29	67,29	28,22	22,26	>
	Rusak ringan	%	11,41	11,39	11,37	11,35	11,33	26,21	9,35	9,35	25,52	11,15	>
	Rusak berat	%	0,45	0,42	0,39	0,36	0,33	9,71	3,3	3,3	9,73	0,48	>
	b. Sumber Daya Air												
	Kondisi irigasi yang menjadi kewenangan												
	Baik	%	25	26	30	33	41	25	26	30	59	29	>
	Rusak ringan	%	20	19	18	17	13	20	19	18	16	26	>
	Rusak sedang	%	44	44	41	39	34	44	44	41	15	37	>
	Rusak berat	%	11	11	11	11	11	11	11	11	10	9	>
	c. Sanitasi dan Air Minum												

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cakupan pelayanan air minum layak	%	90	93	95	97	100	77,51	80,47	88,33	89,26	92,24	<
	Cakupan pelayanan sanitasi	%	70	75	80	85	90	72,45	78,33	85,42	86,82	97,91	>
	d. Penataan Ruang												
	Produk hukum penataan ruang yang diterbitkan	Dokumen	0	0	1	0	3	0	0	1	0	3	=
2.3.1.4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman												
	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani di Kabupaten Sukoharjo	rumah	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.164	1.222	1.356	1.469	1.815	>
	Persentase Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo	%	1	1	0,5	0,5	0,5	0,434	0,414	0,377	0,169	0,098	<
	Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	ha	0	15	25	95	120	0	9,544	17,014	97,146	32,979	<
	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Diserahkan ke Pemerintah	unit	2	5	10	15	20	4	17	17	26	42	>
2.3.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat												
	a. Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk												
	Jumlah Polisi Pamong Praja ASN Per 10.000 Penduduk (PNS)	%	0,797	1,008	0,975	0,982	0,94	0,797	1,008	0,975	0,982	0,94	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol Non PNS)	%	0,999	1,5	1,738	2,041	2,16	0,999	1,5	1,738	2,041	2,16	>
	b. Rasio Jumlah Linmas												
	Anggota Linmas Per 10.000 Penduduk	%	70	70	70	70	70	70,69	70,59	70,56	69,43	70,82	>
	c. Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat												
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	90	94	95	97	98	90	94	95	97	98	>
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	75	80	81	85	90	75	80	81	85	90	>
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	75	79	85	89	95	75	79	85	89	95	>
	Persentase Penegakan PERDA	%	96,4	96,7	97	98,3	99	96,4	96,7	97	98,3	99	>
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM)	orang	56	44	31	27	91	56	44	31	27	91	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM)	orang	687	601	582	473	567	687	601	582	473	567	>
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran (SPM)	orang	43	72	144	267	99	43	72	144	267	99	>
2.3.1.6	Sosial												
	Jumlah Penduduk Miskin dan Standar Garis Kemiskinan	%	9,07	8,75	7,41	7,14	7,14	9,07	8,75	7,41	7,14	7,68	>
	Jumlah PMKS Kabupaten Sukoharjo												
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	3.205	3.313	2.709	3.406	3.311	3.205	3.311	2.706	3.396	3.306	<
	Persentase PMKS yang tertangani	%	3.320	3.313	3.004	3.511	252.608	3.314	3.456	2.863	3.503	252.603	<
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	16.610	28.387	26.606	27.356	249.197	16.610	28.387	26.606	27.356	249.197	=
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2.3.2.1.	Tenaga Kerja;												
	a. Pencari Kerja	orang	23.878	25.590	26.486	21.058	203.030	19.622	10.437	15.298	16.243	33.831	>
	Jenjang pendidikan SD	orang	5.665	6.666	4.872	5.572	1.903	32	29	27	23	29	<
	Jenjang pendidikan SMP	orang	4.220	4.363	5.009	1.488	2.175	276	176	136	141	179	<

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jenjang pendidikan SLTA/SMA	orang	11.152	10.584	11.483	9.109	10.319	2.156	2.235	1.581	2.339	2.006	<
	Jenjang pendidikan Diploma	orang	678	1.000	2.244	2.485	2.686	368	379	357	468	307	<
	Jenjang pendidikan Sarjana	orang	2.163	2.972	2.878	2.404	3.220	418	347	774	520	456	<
	b. Rasio Kesempatan Kerja	%	94,52	94,02	94,02	95,4	95,48	63,22	65,77	64,61	65,85	63,98	<
	c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,08	68,63	67,89	69,38	67,17	68,16	67,29	66,08	67,17	68,74	>
	d. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48	5,98	5,98	4,6	4,52	2,78	2,27	2,78	4,52	6,93	>
	e. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	14	20	15	15	20	14	20	15	15	20	>
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	14	20	15	15	20	14	20	15	15	20	>
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	2657	3696	2243	2894	2021	2657	3696	2243	2894	2021	>
	Keselamatan dan perlindungan	%	40%	37,50%	43,85%	38,07%	39,45%	40%	37,50%	43,85%	38,07%	39,45%	>
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	80%	75%	87,69%	76,13%	79%	80%	75%	87,69%	76,13%	79%	>
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0	0	0	160	160	0	0	0	160	160	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	96	160	160	160	160	96	160	160	160	160	>
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	450	770	0	0	0	450	770	0	0	0	>
	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	7,91	8,55	9,13	10,66	7,4	7,91	8,55	9,13	10,66	7,4	>
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak												
	Persentase Tenaga Kerja Perempuan di Pemerintah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55,31	56,78	57,49	>
	Komponen Pembentuk Indeks Disparitas Gender												
	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	70,45	76,11	76,17	78,52	77,89	70,45	76,11	76,17	78,52	77,89	>
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52,49	54,58	55,31	56,78	57,49	52,49	54,58	55,31	56,78	57,49	>
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	6	6	6	10	10	6	6	6	10	10	>
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	-	49,73	47,37	-	-	-	49,73	47,37	-	-	>
	Rasio KDRT	%	0,012	0,01	0,016	0,019	0,015	0,012	0,01	0,016	0,019	0,015	>
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	>
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	186.040	200.719	200.701	214.120	193.897	186.040	200.719	200.701	214.120	193.897	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	0	0	5	10	10	0	0	5	10	10	>
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	97,71	95,6	95,22	95,52	95,95	97,71	95,6	95,22	95,52	95,95	>
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	86,74	82,94	79,02	81,44	82,38	86,74	82,94	79,02	81,44	82,38	>
	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	N/A	49,73	47,37	50,25	0	68,56	68,08	64,23	63,5	64,43	>
	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	N/A	20	20	22,22	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	99,67	99,66	99,71	99,76	99,76	99,67	99,66	99,71	99,76	99,76	>
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertani	%	N/A	41,06	41,04	41,06	0	53,25	15,92	52,37	0	0	>
2.3.2.3.	Pangan												
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	%	98,27	98,29	98,25	98,95	99,06	98,27	98,29	98,25	98,95	99,06	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	%	91,8	92,1	92,4	92,8	93,3	91,8	91,9	91,9	92,4	93,3	>
	Skor PPH Konsumsi	%	91,8	91,9	91,9	92,4	93,3	91,8	91,9	91,9	92,4	93,3	>
	% Keamanan Pangan	%	85,42	88,89	90,24	90,48	94,19	85,42	88,89	90,24	90,48	94,19	>
	Jumlah pengisian Gudang CPP (Ton)	%	-	7,5	-	-	23,3	-	7,5	-	-	23,3	>
2.3.2.4	Pertanahan												
	Persentase lahan yang bersertifikat	%	92	92	90	94	99	92	92	90	94	99	>
2.3.2.5	Lingkungan Hidup												
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	48,25	48,75	49,25	49,75	50,25	52,3	56,44	60,04	62	59,05	>
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51	51	51	52	52	50	50	74,44	77,5	45	<
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	77	78	80	80	82	76,99	83,32	89,45	88,02	87,23	>
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	24	25	25	25	25	35,51	41,11	27,18	30,85	31,08	>
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	%	4	6	6	6	4	4	6	6	6	4	>
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	>
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		6	6	8	11	4	6	6	8	11	4	>
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Timbulan sampah yang ditangani	%	21,51	21,53	27,51	37,42	47,01	21,51	21,53	27,51	37,42	47,01	>
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	2,3	5,76	19,82	21,17	19,76	2,3	5,76	19,82	21,17	19,76	>
	Persentase cakupan area pelayanan	%	58	58	60	63,33	66,67	58	58	60	63,33	66,67	>
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	21,51	21,53	27,51	37,42	47,01	21,51	21,53	27,51	37,42	47,01	>
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	75,99	74,95	75,11			75,99	74,95	75,11			>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	97,3	78,26	78,26	-	-	97,3	78,26	78,26	-	-	>
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												
	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	90,87	92,84	98,86	90,11	96,82	90,87	92,84	98,86	90,11	96,82	>
	Rasio bayi berakte kelahiran	%	96,89	96,91	99,39	99,76	99,77	96,89	96,91	99,39	99,76	99,77	>
	Rasio pasangan berakte nikah	%	17,44	20,71	23,44	29,9	38,35	17,44	20,71	23,44	29,9	38,35	>
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	90,87	92,84	98,86	90,11	96,82	90,87	92,84	98,86	90,11	96,82	>
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												
	Perkembangan Jumlah BUMDes	lokasi	0	0	0	50	110	0	0	0	70	125	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Posyandu	lokasi	1.175	1.184	1.184	1.184	1.193	1.175	1.184	1.184	1.184	1.193	>
	Jumlah Kader yang Mendapat Insentif	orang	7.131	7.175	7.200	7.432	7.498	7.131	7.175	7.200	7.432	7.498	>
	Jumlah Kader	orang	7.225	7.507	7.507	7.507	7.677	7.225	7.507	7.507	7.507	7.677	>
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	>
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	>
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	14,37%	28,72%	43,11%	57,49%	71,85%	14,37%	28,72%	43,11%	57,49%	71,85%	>
	Persentase LPM Desa aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	>
	Persentase PKK aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	>
	Persentase Posyandu aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	>
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	>
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana												
	Implant	orang	9.492	9.948	55.514	9.324	9.761	9.492	9.948	55.514	9.324	9.761	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Obat/Pil KB	orang	14.082	14.297	14.297	11.496	11.335	14.082	14.297	14.297	11.496	11.335	>
	IUD/Spiral	orang	18.705	19.175	1.403	13.802	14.216	18.705	19.175	1.403	13.802	14.216	>
	Suntik	orang	55.160	55.550	1.997	53.254	52.518	55.160	55.550	1.997	53.254	52.518	>
	Kondom	orang	1.842	2.022	2.022	1.815	2.432	1.842	2.022	2.022	1.815	2.432	>
	Vasektomi	orang	363	389	389	6.569	307	363	389	389	6.569	307	>
	Tubektomi	orang	8.888	8.959	307	6.569	6.691	8.888	8.959	307	6.569	6.691	>
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,83	0,8	0,76	0,85	0,88	0,83	0,8	0,76	0,85	0,88	>
	Total Fertility Rate (TFR)	%	1,95	1,67	1,97	1,95	1,89	1,95	1,67	1,97	1,95	1,89	>
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	17	54	69	69	69	17	54	69	69	69	>
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	>
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1,42	1,67	1,97	1,94	1,97	1,42	1,67	1,97	1,94	1,97	>
	Ratio Akseptor KB	ratio	40008:14 8463	41510:14 9295	35026:13 9987	36476:14 0865	97260:14 2918	40008:14 8463	41510:14 9295	35026:13 9987	36476:14 0865	97260:14 2918	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	71,62	72,29	67,62	67,05	67,84	71,62	72,29	67,62	67,05	67,84	>
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	7,85	6,48	5,23	4,72	5,02	7,85	6,48	5,23	4,72	5,02	>
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,86	12,10	13,73	14,73	15,65	12,86	12,10	13,73	14,73	15,65	>
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	25,22	25,77	20,4	21,29	85,23	25,22	25,77	20,4	21,29	85,23	>
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%		74,33	67,67	68,55	68,05		74,33	67,67	68,55	68,05	>
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	81	73	78	76,19	74,09	81	73	78	76,19	74,09	>
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	62	65	59	55,74	73,08	62	65	59	55,74	73,08	>
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	48	41	44	41,20	79,69	48	41	44	41,20	79,69	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	unit	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	>
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	0,39	0,55	0,56	0,59	0,6	0,39	0,55	0,56	0,59	0,6	>
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	63	56	54	42,00	41	63	56	54	42,00	41	>
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	78	83	83	80,37	81,93	78	83	83	80,37	81,93	>
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	>
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	25,58	25,58	27,96	31,57	29,26	25,58	25,58	27,96	31,57	29,26	>
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%				3,5	15				3,5	15	>
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	>
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	44,15	55,55	48,34	65,10	98,91	44,15	55,55	48,34	65,10	98,91	>
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,83	0,8	0,76	0,82	0,88	0,83	0,8	0,76	0,82	0,88	>
2.3.2.9	Perhubungan												
	Terminal	Lokasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	=

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitas Keselamatan di Jalan Raya												
	APILL	Buah	10	10	10	10	10	6	6	6	7	7	>
	Warning Light	Buah	98	98	99	104	107	38	38	39	44	47	>
	Guadril	Buah	350	350	350	350	350	49	129	161	193	226	>
	Rambu	Buah	3.041	3.058	3.058	3.006	3.021	2.137	2.307	2.477	2.595	2.728	>
	Marka	m	60.432	67.650	76.355	83.360	88.253	10.432	17.650	26.355	33.360	38.253	>
	Paku Jalan	Buah	1.850	1.940	2.040	2.200	2.200	450	540	640	800	800	>
	Stasiun Kereta Api	Lokasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	>
	Rasio izin trayek angkutan lalu lintas	%	13,85	5,92	4,92	3,57	2,21	27	10	19	19	21	>
	Kelayakan kendaraan umum	Angka						0,62	0,73	0,77	0,72	0,7	>
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	39.824	37.927	36.121	34.401	23.725	39.824	37.927	36.121	34.401	23.725	>
	Rasio ijin trayek	Rasio	0,00003	0,00001	0,00002	0,00002	0,00002	0,00003	0,00001	0,00002	0,00002	0,00002	>
	Jumlah uji kir angkutan umum	Angkutan	421	329	257	244	195	421	329	257	244	195	>
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	>
	Persentase layanan angkutan darat	%	0,02968	0,02466	0,02418	0,02427	0,03043	0,02968	0,02466	0,02418	0,02427	0,03043	>
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	37,164	39,074	50	50,204	42,308	37,164	39,074	50	50,204	42,308	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemasangan Rambu-rambu	%	91,071	73,276	76,724	86,131	87,5	91,071	73,276	76,724	86,131	87,5	>
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,51	0,55	0,58	0,6	0,57	0,51	0,55	0,58	0,6	0,57	>
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.128.784	1.094.934	1.062.776	1.009.637	555.300	1.128.784	1.094.934	1.062.776	1.009.637	555.300	>
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	16.060	93.951	92.345	88.330	80.300	16.060	93.951	92.345	88.330	80.300	>
2.3.2.10	Komunikasi Dan Informatika												
	Perkembangan Teknologi Informasi												
	Jumlah OPD yang terkoneksi internet	Instasi	N/A	40	40	40	40	N/A	40	40	40	40	>
	Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet	Desa	N/A	167	167	167	167	N/A	167	167	167	167	>
	Jumlah hotspot yang dikelola Pemkab	Unit	N/A	207	207	207	207	N/A	207	207	207	207	>
	Jumlah hotspot di tempat publik yang dikelola pemkab	Unit	N/A	10	10	12	12	N/A	10	10	12	12	>
	Voip ke Kecamatan	Unit	N/A	12	12	12	12	N/A	12	12	12	12	>
	Persentase OPD yang menggunakan sandi dalam komunikasi	%	N/A	80	30	30	30	N/A	80	30	30	30	>
	Jumlah sub-domain OPD	Unit	N/A	40	40	40	40	N/A	40	40	40	40	>
	Jumlah domain desa	Unit	N/A	150	150	150	150	N/A	150	150	150	150	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perkada terkait tentang implementasi e-government	Dokumen	N/A		1	5	5	N/A	0	1	5	5	>
2.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah												
	Jumlah Koperasi	Unit	793	432	434	425	426	805	434	429	426	431	>
	Jumlah Koperasi aktif (unit)	Unit	459	382	384	365	347	382	384	374	351	352	>
	Presentase koperasi aktif (%)	%	57,63	88,43	88,48	85,88	81,46	57,3	88,43	88,48	85,88	81,67	>
	Jumlah usaha MIKRO												
	Kuliner	Unit	N/A	N/A	4.583	5.450	175.865	N/A	N/A	4.583	5.450	175.865	>
	Fashion	Unit	N/A	N/A	1.176	2.320	13.570	N/A	N/A	1.176	2.320	13.570	>
	Pendidikan	Unit	N/A	N/A	0	0	12	N/A	N/A	0	0	12	>
	Otomotif	Unit	N/A	N/A	458	467	592	N/A	N/A	458	467	592	>
	Agrobisnis	Unit	N/A	N/A	1.510	1.580	1580	N/A	N/A	1.510	1.580	1580	>
	Teknologi Internet	Unit	N/A	N/A	70	98	348	N/A	N/A	70	98	348	>
	Lainnya	Unit	N/A	N/A	8.499	8.561	25.098	N/A	N/A	8.499	8.561	25.098	>
	Jumlah usaha MAKRO												
	Kuliner	Unit	N/A	N/A	431	482	1.732	N/A	N/A	431	482	1.732	>
	Fashion	Unit	N/A	N/A	245	261	1.111	N/A	N/A	245	261	1.111	>
	Pendidikan	Unit	N/A	N/A	0	0	2	N/A	N/A	0	0	2	>
	Otomotif	Unit	N/A	N/A	430	435	913	N/A	N/A	430	435	913	>
	Agrobisnis	Unit	N/A	N/A	477	488	940	N/A	N/A	477	488	940	>
	Teknologi Internet	Unit	N/A	N/A	15	17	468	N/A	N/A	15	17	468	>
	Lainnya	Unit	N/A	N/A	1.725	145	692	N/A	N/A	1.725	145	692	>
	Jumlah usaha MENENGAH												
	Kuliner	Unit	N/A	N/A	40	45	530	N/A	N/A	40	45	530	>
	Fashion	Unit	N/A	N/A	0	2	289	N/A	N/A	0	2	289	>
	Pendidikan	Unit	N/A	N/A	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	>
	Otomotif	Unit	N/A	N/A	44	48	206	N/A	N/A	44	48	206	>
	Agrobisnis	Unit	N/A	N/A	44	56	312	N/A	N/A	44	56	312	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Teknologi Internet	Unit	N/A	N/A	0	20	165	N/A	N/A	0	20	165	>
	Lainnya	Unit	N/A	N/A	97	105	480	N/A	N/A	97	105	480	>
2.3.2.1 2	Penanaman Modal												
	a. Investor Berskala Nasional												
	Jumlah Investor	Investor	359	378	398	419	441	452	468	579	1.650	4.082	>
	Pertumbuhan Jumlah Investor	%	10	10	10	10	10	13,85	3,54	23,72	184,97	147,39	>
	b. Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA												
	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Triliun	0,27	0,345	0,368	0,393	0,419	5.811	6.397	23.061	18.302	9.045	>
	Nilai Investasi PMDN dan PMA	%	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	393	10	260	-21	-51	>
	c. Penyerapan Tenaga Kerja												
	Tenaga Kerja pada Perudahaan PMDN dan PMA	Orang	4.711	4.960	5224	5.501	5.792	5.820	3.200	116.175	38.625	52.450	>
	Investor PMDN dan PMA	Investor	408	429	451	468	501	452	468	579	1.650	4.082	>
2.3.2.1 3	Kepemudaan Dan Olah Raga												
	Jumlah Pemuda												
	Laki-laki	orang	0	0	104.083	98.239	99.489	0	0	104083	98239	99.489	=
	Perempuan	orang	0	0	99.825	95.199	95.940	0	0	99825	95199	95.940	=
	Jumlah Organisasi	Organisasi	0	0	22	45	24	0	0	22	45	24	=
2.3.2.1 4	Statistik												

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tersedia dokumen Sukoharjo Dalam Angka	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Tersedia Dokumen PDRB Kabupaten Sukoharjo	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.3.2.1	Persandian												
5	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi	PD			15	15	15			15	15	15	=
2.3.2.1	Kebudayaan;												
6	Benda cagar budaya	Buah	150	155	160	165	170	192	192	192	192	192	>
	Bangunan cagar budaya	Buah	20	20	20	20	20	24	24	24	24	24	>
	Situs cagar budaya	Situs	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	>
	Kawasan cagar budaya	Kawasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	>
2.3.2.1	Perpustakaan												
7	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan	%	3,92	2,51	1,55	2,28	0,58	3,92	2,51	1,55	2,28	0,58	=
	Kinerja Urusan Perpustakaan												
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Pengunjung	34.239	22.067	13.802	20.398	5.167	34.239	22.067	13.802	20.398	5.167	=
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	29.181	30.546	33.771	62.752	62.772	29.181	30.546	33.771	62.752	62.772	=
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	rasio	3,92	2,51	1,55	2,28	0,58	3,92	2,51	1,55	2,28	0,58	=
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pengunjung	2.853	1.839	1.150	1.801	431	2.853	1.839	1.150	1.801	431	=

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buah	19.139	19.850	22.424	24.156	24.169	19.139	19.850	22.424	24.156	24.169	=
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	5	4	4	4	6	5	4	4	4	6	=
2.3.2.18	Kearsipan.												
	Persentase PD yang Mengelola Arsip secara baku	%	70	80	90	100	100	70	80	90	100	100	=
	Cakupan Arsip yang Berhasil dikelola	dokumen	41,98	45,48	49,45	53,58	0	41,98	45,48	49,45	53,58	0	=
2.3.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan												
2.3.3.1	Kelautan Dan Perikanan;												
	a. Produksi ikan	Ton	375.593	379.370	380.250	384.410	388.350	375.716	379.370	380.501	384.510	388.440	>
	b. Nilai Produksi (angka konsumsi ikan)	Rupiah Kg/Kapita/tahun	3.314.608	3.361.218	3.380.422	3.582.737	3.615.570	3.316.233	3.361.821	3.384.687	3.583.670	3.616.408	>
			.225	.200	.500	.990	.093	.000	.000	.000	.000	.000	
2.3.3.2	Pariwisata												
	a. Rumah Makan berizin TDUP	Lokasi	10	10	10	10	10	29	22	11	13	17	>
	b. Rumah Makan dan Restoran	Lokasi	714	1.314	1.938	147	170	714	1.314	1.938	147	170	=
	c. Jumlah hotel dan penginapan	Lokasi	22	23	23			22	23	23			=
	Hotel Berbintang	Lokasi	6	14	14	9	9	6	14	14	9	9	
	Hotel Non Berbintang dan Akomodasi Lainnya	Lokasi	16	9	9	3	3	16	9	9	3	3	=

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3.3.3	Pertanian												
	a. Produktivitas Tanaman Pangan												
	Padi	Ton	391.675	392.587	363.282	339.445	310.778	391.675	392.587	363.282	339.445	310.778	=
	Jagung	Ton	17.088	12.379	9.313	16.030	30.277	17.088	12.379	9.313	16.030	30.277	=
	Ubi Kayu	Ton	20.466	20.201	37.328	41.269	19.331	20.466	20.201	37.328	41.269	19.331	=
	Ubi Jalar	Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=
	Kacang Tanah	Ton	9.225	6.383	6.051	4.753	4.654	9.225	6.383	6.051	4.753	4.654	=
	Kacang Kedelai	Ton	4.644	3.674	4.217	1.690	4.805	4.644	3.674	4.217	1.690	4.805	=
	Kacang Hijau	Ton	21	86	88	0	28	21	86	88	0	28	=
	b. Produktivitas Tanaman Hortikultura:												
	Bawang Merah	Ton	58,8	143,6	115,6	69,1	486	58,8	143,6	115,6	69,1	486	=
	Bawang Putih	Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=
	Cabai Besar	Ton	302,2	32,2	43,7	76,5	236,7	302,2	32,2	43,7	76,5	236,7	=
	Cabai Rawit	Ton	16,7	23,5	5,7	6	53,1	16,7	23,5	5,7	6	53,1	=
	Kentang	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
	Tomat	Ton	0	17	11	60	85	0	17	11	60	85	=
	c. Produksi Tanaman Buah-Buahan												
	Mangga	Ton	4.440,30	16.528,80	22.955,60	44.236,40	28.534,50	4.440,30	16.528,80	22.955,60	44.236,40	28.534,50	=
	Durian	Ton	3,2	415,9	201,3	334,6	125,6	3,2	415,9	201,3	334,6	125,6	=
	Jeruk Siam	Ton	8,3	27,7	40,2	79,4	72,3	8,3	27,7	40,2	79,4	72,3	=
	Pisang	Ton	6.454,50	8.908,80	10.299	5.962,50	5.937,30	6.454,50	8.908,80	10.299	5.962,50	5.937,30	=

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pepaya	Ton	1.462,70	1.728,30	1.634,10	2.016,10	2.457,20	1.462,70	1.728,30	1.634,10	2.016,10	2.457,20	=
	Salak	Ton	0	0,4	0,2	-	-	0	0,4	0,2	-	-	=
	Rambutan	Ton	1.022,10	2.777,60	2.198,70	1.484,50	1.096,70	1.022,10	2.777,60	2.198,70	1.484,50	1.096,70	=
	Nangka/ Cempedak	Ton	842	1.066,60	846,1	1.937,70	2.201,80	842	1.066,60	846,1	1.937,70	2.201,80	=
	d. Produksi Tanaman Biofarmaka												
	Jahe	Ton	301,821	327,866	288,36	220,598	305,446	301,821	327,866	288,36	220,598	305,446	=
	Lengkuas	Ton	157,241	158,259	135,74	138,531	100,424	157,241	158,259	135,74	138,531	100,424	=
	Kencur	Ton	57,359	106,428	100,24	116,542	130,541	57,359	106,428	100,24	116,542	130,541	=
	Kunyit	Ton	839,209	865,927	662,394	604,119	787,472	839,209	865,927	662,394	604,119	787,472	=
	Lempuyang	Ton	157,241	162,377	170,134	162,223	144,336	157,241	162,377	170,134	162,223	144,336	=
	Temulawak	Ton	217,06	204,474	181,43	131,475	159,215	217,06	204,474	181,43	131,475	159,215	=
	e. Produktivitas Tanaman Perkebunan												
	Tebu	Ton	3.437,27	2284,58	2.812,28	3.287,83	2.690,98	3.437,27	2284,58	2.812,28	3.287,83	2.690,98	=
	Tembakau	Ton	196,27	307,94	150,03	236,6	105,2	196,27	307,94	150,03	236,6	105,2	=
	Kelapa	Ton	589,53	589,58	590,74	602,53	602,56	589,53	589,58	590,74	602,53	602,56	=
	Cengkeh	Ton	1,03	1,01	1,01	-	-	1,03	1,01	1,01	-	-	=
	Kapuk	Ton	71,33	70,98	71,01	-	-	71,33	70,98	71,01	-	-	=
	Mete	Ton	68,29	68,29	69,14	-	-	68,29	68,29	69,14	-	-	=
	Kemiri	Ton	0,1	0,09	0,92	-	-	0,1	0,09	0,92	-	-	=
	Wijen	Ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=
	f. Produksi Peternakan												
	Ternak Besar												

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kuda Muda	Ekor	34	41	42	43	47	34	41	42	43	47	=
	Kuda Dewasa	Ekor	200	200	199	200	198	200	200	199	200	198	=
	Kerbau Muda	Ekor	221	193	221	212	216	221	193	221	212	216	=
	Kerbau Dewasa	Ekor	363	337	384	385	389	363	337	384	385	389	=
	Sapi Muda	Ekor	11.116	11.153	10.828	11.434	11.706	11.116	11.153	10.828	11.434	11.706	=
	Sapi Dewasa	Ekor	17.414	17.441	18.472	18.311	18.755	17.414	17.441	18.472	18.311	18.755	=
	Ternak Kecil												
	Ayam Ras	Ekor	2.937.490	2.942.829	3.259.318	4.340.450	4.990.990	2.937.490	2.942.829	3.259.318	4.340.450	4.990.990	=
	Ayam Bukan Ras	Ekor	843.754	843.754	877.245	883.975	892.810,0 0	843.754	843.754	877.245	883.975	892.810,0 0	=
	Itik Muda	Ekor	46.367	46.467	50.497	55.609	55.776	46.367	46.467	50.497	55.609	55.776	=
	Itik Dewasa	Ekor	181.612	181.516	176.393	178.723	178.723	181.612	181.516	176.393	178.723	178.723	=
2.3.3.4	Kehutanan												
2.3.3.5	Energi Dan Sumberdaya Mineral												
	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	78,34	83,55	82,07	N/A	90,14	78,34	83,55	82,07	N/A	90,14	=
	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	%	91,97	72,34	N/A	N/A	94,14	91,97	72,34	N/A	N/A	94,14	=
	Perubahan Total Produksi Tambang	Ton/Tahun	332,16	210,74	210,74	52,502		332,16	210,74	210,74	52,502		=
	Luas Areal Galian Bahan Tambang Jenis Tanah Urug	Ha	26,16	19,84	19,84	18,95		26,16	19,84	19,84	18,95		=
2.3.3.6	Perdagangan												
	a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	%	17	17,3	17,33	17,46	17,51	18,59	18,47	18,26	18,2	17,86	>

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	b. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB	%	16	16,3	16,4	16,55	16,75	17,75	17,63	17,37	17,35	17,00	>
	c. Proporsi Neraca Perdagangan Barang dan Jasa	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,13	0,38	0,65	0,02	N/A	=
2.3.3.7	Perindustrian												
	a. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK	%	40,52	40,97	41,38	41,76	42,11	38,23	38,37	38,62	38,52	38,11	<
	b. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB	%	40,69	41,02	41,31	41,56	41,79	38,69	38,60	39,05	39,06	39,14	<
2.3.3.8	Transmigrasi												
	Transmigrasi Umum	%	100	100	100	100	100	100	20	50	50	0	<
2.3.4	Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan												
2.3.4.1	Perencanaan Pembangunan												
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	80	85	90	90	90	80	85	90	90	90	=
2.3.4.2	Kuangan												
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
	Persentase SILPA	%	19.49	15.34	22.79	14.72	20.28	19.49	15.34	22.79	14.72	20.28	=
	Persentase SLPA terhadap APBD	%	19.49	15.34	22.79	14.72	20.28	19.49	15.34	22.79	14.72	20.28	=
	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	15	10	10	10	35	15	10	10	10	35	=
	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	38	35.52	32.41	32.36	30.60	38	35.52	32.41	32.36	30.60	=
	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14	14.39	14.21	14.37	16.12	14	14.39	14.21	14.37	16.12	=
			37,03/62,	39,08/60,	42,65/57,	41,76/58,	37,70/62,	37,03/62,	39,08/60,	42,65/57,	41,76/58,	37,70/62,	

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		97	92	36	24	30	97	92	36	24	30	=
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0.67	0.65	1.57	1.16	1.12	0.67	0.65	1.57	1.16	1.12	=
	Penetapan APBD	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
2.3.4.3	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan												
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	bulan	2	2	3	1	11	2	2	3	1	11	=
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	5	4	3	3	3	5	4	3	3	3	=
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	7	8	5	5	1	7	8	5	5	1	=
	Jumlah jabatan pimpinan dibagi pada instansi Pemerintah	jabatan	31	31	24	24	19	31	31	24	24	19	=
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah	jabatan	3,117	2,818	2,609	2,864	2,708	3,117	2,818	2,609	2,864	2,708	=
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	jabatan	6,366	5,514	5,204	4,849	4,436	6,366	5,514	5,204	4,849	4,436	=
2.3.3.4	Penelitian dan Pengembangan												
	Persentase implementasi rencana kelitbang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase pemanfaat hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	=
	Persentase kebijakan infilasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	=
2.3.3.5	Pengawasan												
	Persentase tindak lanjut temuan	%	100	100	100	100	0	100	100	100	100	0	=
	Jumlah temuan BPK	temuan	18	26	11	7	0	18	26	11	7	0	=
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH												
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi												
	a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita												
	b. Nilai Tukar Petani	Nilai	101.65	101.27	102.46	103.21	NA	101.65	101.27	102.46	103.21	NA	=
	c. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)	%											
2.4.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur												
	a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	%	25	30	35	40	45	25	30	35	40	45	=

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	b. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan;	km/kendaraan	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	=
	c. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum;	orang	66.907	65.865	65.955	65.976.	65.906	66.907	65.865	65.955	65.976.	65.906	=
	d. Luas Wilayah Produktif	ha	41.575	41.566	41.544	41.544	41.544	41.575	41.566	41.544	41.544	41.544	=
	Rasio luas wilayah produktif	%	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	=
	e. Luas Wilayah Industri;	ha			591,139	591,139	591,139			591,139	591,139	591,139	=
	f. Luas Wilayah Kebanjiran;												
	Resiko Tinggi	ha	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	6.322	=
	Resiko Sedang	ha	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	18.459	=
	Resiko Rendah	ha	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	24.543	=
	g. Luas Wilayah Kekeringan												
	Resiko Tinggi	ha	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	5.982	=
	Resiko Sedang	ha	16.202	16.202	16.202	16.202	16.202	16.202	16.202	16.202	16.202	16.202	=
	Resiko Rendah	ha	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	27.139	=
	h. Luas Wilayah Perkotaan	ha			25.966	25.966	25.966			25.966	25.966	25.966	=
2.4.3	Fokus Sumber Daya Manusia												
	a. Rasio Ketergantungan	%	53	48	51	51	49	53	48	51	51	49	=
	b. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	%											
	SD	%	47,55	37	0	0	0	47,55	37	0	0	0	=
	SMP	%	10,28	17,87	0	0	0	10,28	17,87	0	0	0	=

Kode	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SMA	%	29,88	32,83	0	0	0	29,88	32,83	0	0	0	=
	Perguruan Tinggi	%	12,29	12,3	0	0	0	12,29	12,3	0	0	0	=
	c. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	penduduk											
	Berusaha sendiri	penduduk	0	97.525	98.153	105.166	98.618	0	97.525	98.153	105.166	98.618	=
	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	penduduk	0	43.248	47.618	39.003	41.416	0	43.248	47.618	39.003	41.416	=
	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	penduduk	0	17.132	18.216	15.169	13.369	0	17.132	18.216	15.169	13.369	=
	Buruh/Karyawan/Pegawai	penduduk	0	226.930	226.706	240.119	224.214	0	226.930	226.706	240.119	224.214	=
	Pekerja bebas	penduduk	0	46.896	38.657	36.615	45.010	0	46.896	38.657	36.615	45.010	=
	Pekerja keluarga/tak dibayar	penduduk	0	18.549	29.509	24.882	31.792	0	18.549	29.509	24.882	31.792	=

Keterangan :

- Merah : Belum tercapai (<)
Kuning : Target sama tahun lalu (=)
Hijau : Sudah Tercapai (>)

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia 2020, termasuk Indonesia. Covid-19 menyebar ke hampir 178 negara di dunia dan menginfeksi lebih dari 85 juta jiwa, dengan membawa lebih dari 1,8 juta jiwa kematian selama 2020. Kondisi ini kemudian tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga mengakibatkan krisis ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di berbagai negara. Perkembangan kurang menguntungkan kepada perekonomian global ini tidak dapat dihindari sebagai akibat penerapan kebijakan pembatasan mobilitas untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Berbagai indikator menunjukkan aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi di banyak negara tertekan tajam dan mengakibatkan penurunan perdagangan internasional. Tekanan berat juga sempat terjadi di pasar keuangan sejalan ketidakpastian prospek global, yang bila terus berlanjut akan berisiko memberikan dampak rambatan pada stabilitas sistem keuangan.

Covid-19 juga memberikan tekanan kuat kepada perekonomian Indonesia 2020 dengan sumber gejala yang belum pernah dialami sebelumnya. Sebagaimana kondisi dunia, gejala bersumber dari permasalahan kesehatan dan kemanusiaan, yang kemudian merambat ke permasalahan ekonomi. Respons segera Pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui PSBB tidak dapat dihindari menurunkan kinerja perekonomian. Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Perekonomian yang lemah menjadi perhatian bersama karena bila tidak ditangani dengan segera akan berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, dan menahan upaya percepatan menjadi negara maju. Sinergi kebijakan ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait untuk memitigasi dampak luar biasa dari Covid-19 tersebut dan terus membangun optimisme pemulihan ekonomi. Sinergi didukung landasan hukum yang kuat, yakni UU No. 2 Tahun 2020, sehingga respons untuk mengatasi kegentingan akibat Covid-19 tetap dilandasi prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola yang baik, serta transparan dan akuntabel. Dalam kaitan ini, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan APBN 2020. Di tengah inflasi yang rendah, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif dengan pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter (*Quantitative Easing* atau *QE*) dalam jumlah besar. Kebijakan itu didukung langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah, pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran. Penguatan koordinasi kebijakan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi, serta inisiatif lainnya untuk menjaga fungsi intermediasi pembiayaan yang ditempuh

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut merelaksasi kebijakan untuk mengurangi tekanan likuiditas perbankan.

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 mencapai 36,91 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,06 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 36,97 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh turunnya produksi di beberapa lapangan usaha akibat adanya pandemi. Berdasarkan tahun dasar 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 27,08 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 26,62 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo mengalami kontraksi sebesar - 1,70 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh turunnya produksi di beberapa lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Struktur perekonomian di Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh lima lapangan usaha yang berperan dalam membentuk PRDB Kabupaten Sukoharjo, yaitu secara berurutan Industri Pengolahan (39,14%), Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17,00%), Pertanian Kehutanan dan Perikanan (8,75%), Konstruksi (6,71%), dan Informasi dan komunikasi (6,03%).

Sementara itu lima sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang (0,04%), Pengadaan Listrik dan Gas (0,11%), Pertambangan dan Penggalian (0,43%), Jasa Perusahaan (0,44%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,15%)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi yang sedang berlangsung. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 33,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 41,45 juta rupiah. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 40,66 juta rupiah.

3.3. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran

yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD ditunjukkan dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) serta pembiayaan daerah.

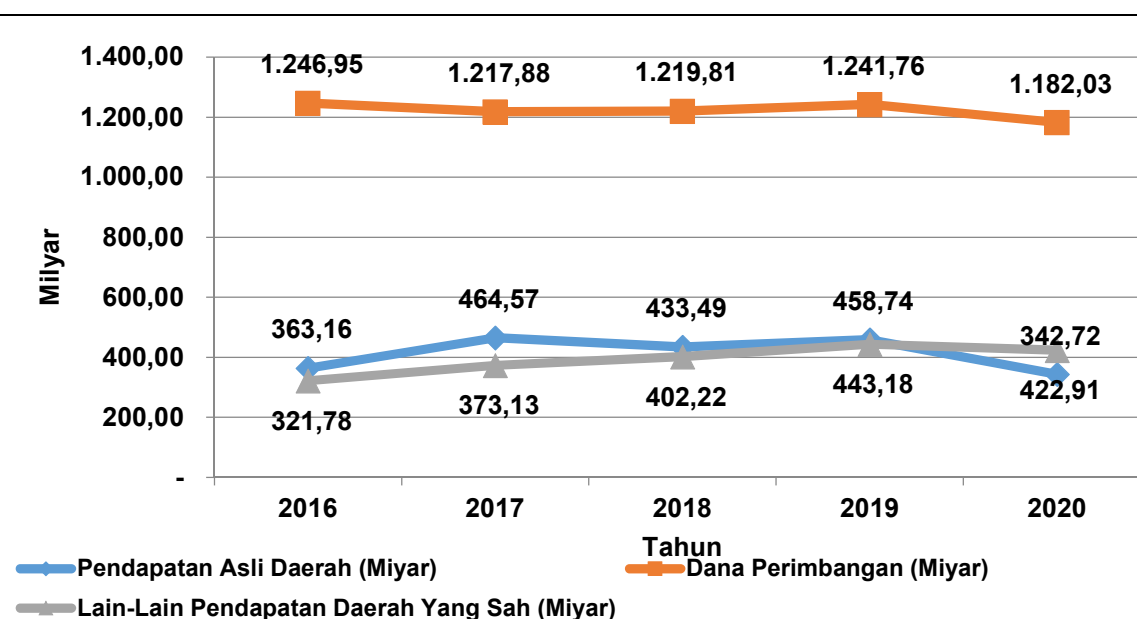
1. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Pendapatan Transfer; dan c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020, diketahui pula bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 adalah sebesar 1,12%. Angka tersebut dipengaruhi dari angka rata-rata pertumbuhan dari semua komponen pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun rata-rata pertumbuhan PAD adalah sebesar 5,86%, dan Dana Perimbangan terjadi rata-rata negatif sebesar -1,34%, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 5,31%.

Secara rinci realisasi pendapatan daerah beserta rata-rata pertumbuhan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



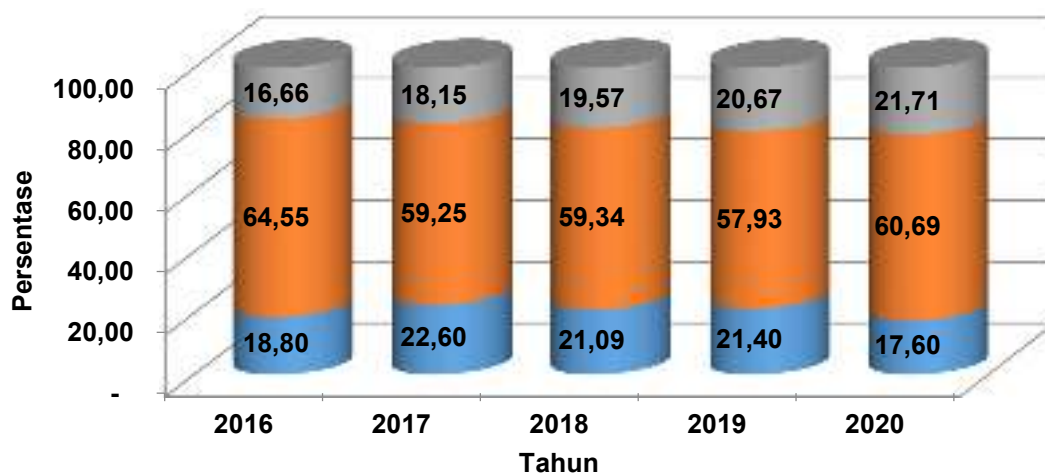
Sumber: BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan pendapatan asli daerah. Semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2016-2020 didominasi dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Kontribusi Dana Perimbangan mengalami penurunan dari sebesar 64,55% pada tahun 2016 menjadi 59,25% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 60,69% pada tahun 2020. Kondisi kontribusi pendapatan daerah tersebut digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 3. 2
Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021



■ Pendapatan Asli Daerah (Miyar) ■ Dana Perimbangan (Miyar) ■ Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Miyar)

Sumber: BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Dalam hal pengelolaan daerah rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal sangat penting, karena hal tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Dengan melihat gambar di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tingkat kemandiriannya masih rendah atau tingkat ketergantungan terhadap pihak luar/sumber dana eksternal masih sangat besar. Kondisi tersebut disebabkan adanya :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mana kebijakan tersebut akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan, baik itu Pendapatan Transfer, PAD maupun Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun kebijakan-kebijakannya meliputi :
 - a) mengalihkan dana tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK fisik maupun DAK non fisik;
 - b) Alokasi dana desa yang yang disalurkan lewat APBD Kabupaten;
 - c) PDAM Tirta Makmur belum ditetapkan targetnya karena sebagaimana kebijakan dari Pemerintah untuk PDAM yang belum memenuhi ketentuan cakupan layanan belum diwajibkan menyetorkan bagian laba untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Dalam memaksimalkan dan mendorong laju pertumbuhan pendapatan asli daerah terutama, dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan menyempurnakan

dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah (intensifikasi) yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada, serta membuat peraturan daerah baru untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru pula. Dalam penyusunan perda baru tersebut diupayakan sebagai respon terhadap perubahan ketentuan penarikan jenis pajak daerah, retribusi daerah, untuk merespon dimungkinkannya penarikan jenis pajak daerah maupun retribusi daerah baru yang sebelumnya belum diatur oleh peraturan manapun, termasuk oleh pemerintah pusat. Penyempurnaan administrasi pendapatan daerah menyangkut melakukan reformasi pengaturan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini ditujukan agar para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dapat secara optimal memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana mestinya. Serangkaian cara dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini, seperti: melakukan perbaikan metode identifikasi, mekanisme registrasi, dan pemungutan; mengembangkan sistem evaluasi; merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan, dan pelaporan keuangannya.

Upaya mendongkrak perolehan laba usaha kepada pemerintah daerah dilakukan dengan penambahan modal yang diberikan kepada BUMD, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penyusunan Road Map BUMD yang terintegrasi kepada RPJMD, menerbitkan pedoman tentang Investasi Pemerintah Daerah dan optimalisasi manajemen.

3. Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan.

Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena pemerintah daerah akan lebih leluasa menerapkan kebijakan-kebijakan dalam hal percepatan pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dan aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang baik akan menggerakkan semua sektor perekonomian yang ada secara cepat dan ini sekaligus dapat menimbulkan lapangan-lapangan usaha, sehingga akan dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 - 2020

KODE	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
1	PENDAPATAN	1.931.896.575.824,00	2.055.571.033.667,00	2.055.517.964.074,00	2.143.687.569.516,00	2.040.394.761.328,00	1,12
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	363.163.428.162,00	464.567.409.857,00	433.485.481.219,00	458.742.223.869,00	469.540.567.890,00	5,86
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	182.010.505.527,00	221.901.158.399,00	235.894.522.749,00	262.419.139.461,00	235.186.691.560,00	5,84
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.447.334.859,00	22.340.480.906,00	23.045.710.072,00	19.063.457.759,00	16.773.376.084,00	-5,69
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.388.912.261,00	15.495.303.717,00	20.894.425.195,00	22.647.818.941,00	33.756.900.228,00	39,28
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	146.316.675.515,00	204.830.466.835,00	153.650.823.203,00	154.611.807.708,00	183.822.600.018,00	5,13
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.246.954.769.893,00	1.217.877.693.551,00	1.219.811.099.454,00	1.241.762.236.865,00	1.163.627.289.398,00	-1,34
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0	0	0	17.113.151.303,00	39.941.956.429,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum / Dana Transfer Umum	959.910.211.435,00	939.544.746.129,00	932.923.827.592,00	946.104.486.000,00	859.146.406.000,00	-2,10
1.2.3	Dana Alokasi Khusus / Dana Transfer Khusus	287.044.558.458,00	278.332.947.422,00	286.887.271.862,00	278.544.599.562,00	264.538.926.969,00	-1,57
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	321.778.377.769,00	373.125.930.259,00	402.221.383.401,00	443.183.108.782,00	407.226.904.040,00	5,31
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.989.000.000,00	10.028.344.700,00	75.882.026.633,00	72.448.960.000,00	74.920.940.000,00	130,01
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	109.901.181.360,00	152.241.844.678,00	152.732.310.427,00	167.900.983.786,00	133.988.064.440,00	4,38
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.619.355.000,00	123.576.433.000,00	126.076.256.000,00	43.339.923.000,00	52.189.671.000,00	-9,20
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	67.292.434.000,00	31.934.457.881,00	11.780.790.341,00	12.830.754.996,00	1.154.709.000,00	-19,66
1.3.6	Pendapatan Lainnya	37.976.407.409,00	0	0	146.662.487.000,00	144.973.519.600,00	56,35
	Dana Insentif Daerah (DID)	0	55.344.850.000,00	35.750.000.000,00	0	0	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2020

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan penerimaan daerah Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Perkembangan PAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2016	182.010.505.527,00	23.447.334.859,00	11.388.912.261,00	146.316.675.515,00
2017	221.901.158.399,00	22.340.480.906,00	15.495.303.717,00	204.830.466.835,00
2018	235.894.522.749,00	23.045.710.072,00	20.894.425.195,00	153.650.823.203,00
2019	262.419.139.461,00	19.063.457.759,00	22.647.818.941,00	154.611.807.708,00
2020	235.186.691.560,00	16.773.376.084,00	33.756.900.228,00	183.822.600.018,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasar data pada tabel diatas terlihat bahwa trend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang sah selalu naik dari tahun ke tahun, akan tetapi untuk retribusi daerah bersifat fluktuatif. Berikut Proporsinya PAD terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Proporsi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 – 2020

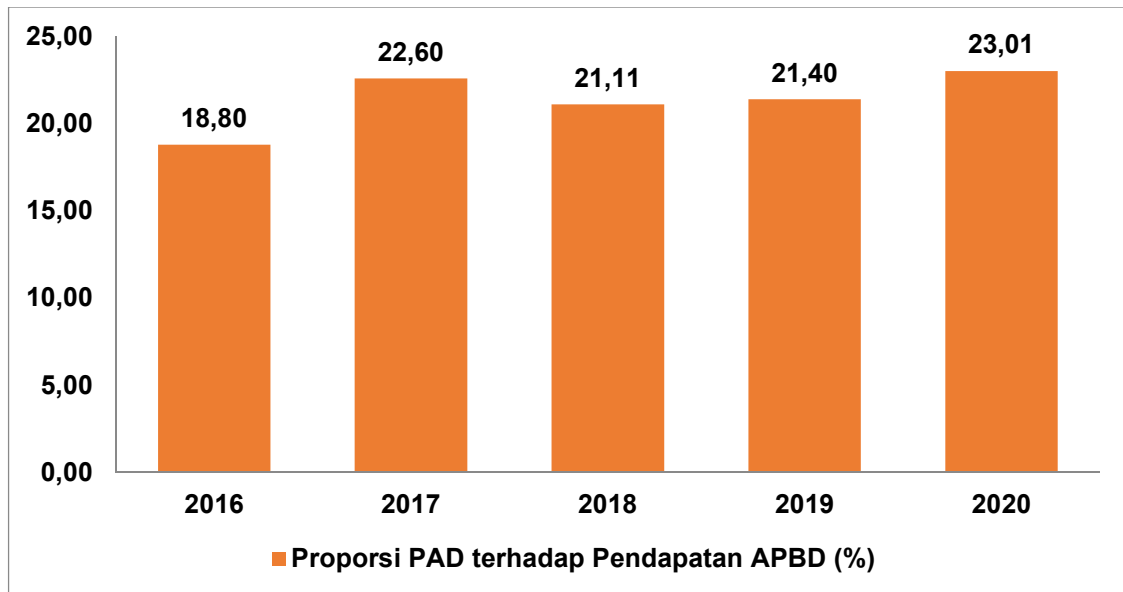
Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan APBD (%)
2016	363.163.428.162,00	1.931.896.575.824	18,80
2017	464.567.409.857,00	2.055.571.033.667	22,60
2018	434.001.906.195,00	2.056.034.389.050	21,11
2019	458.742.223.869,00	2.143.687.569.516	21,40
2020	469.540.567.890,00	2.040.394.761.328,00	23,01

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2020

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 meningkat namun tahun 2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Lebih jelasnya kontribusi PAD tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. 3

**Kontribusi/ Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020**



Sumber: BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo bersumber dari Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat. Berdasarkan Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 – 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA2 PERTUMBUHAN (%)
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
DANA PERIMBANGAN	1.246.954.769.893,00	1.217.877.693.551,00	1.219.811.099.454,00	1.241.762.236.865,00	1.163.627.289.398,00	-1,34
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0	0	0	17.113.151.303,00	39.941.956.429,00	0,00
Dana Alokasi Umum / Dana Transfer Umum	959.910.211.435,00	939.544.746.129,00	932.923.827.592,00	946.104.486.000,00	859.146.406.000,00	-2,10
Dana Alokasi Khusus / Dana Transfer Khusus	287.044.558.458,00	278.332.947.422,00	286.887.271.862,00	278.544.599.562,00	264.538.926.969,00	-1,57

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasar data pada tabel diatas terlihat bahwa rata-rata rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan sebesar -1,34%. Untuk mengetahui proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

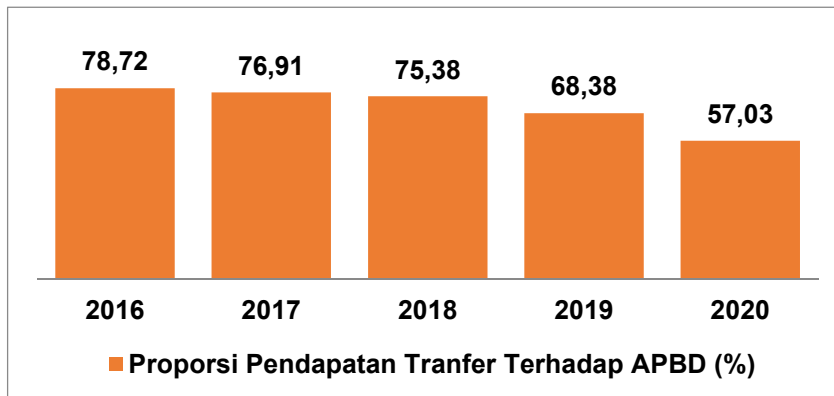
Tabel 3.5.
Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Proporsi Pendapatan Tranfer Terhadap APBD (%)
2016	1.520.767.740.253,00	1.931.896.575.824,00	78,72
2017	1.580.975.279.110,00	2.055.571.033.667,00	76,91
2018	1.549.767.522.855,00	2.056.034.389.050,00	75,38
2019	1.465.833.898.647,00	2.143.687.569.516,00	68,38
2020	1.163.627.289.398,00	2.040.394.761.328,00	57,03

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasarkan Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 diketahui bahwa Kabupaten Sukoharjo dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung pemerintah pusat. Lebih jelasnya kontribusi Dana Perimbangan tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. 4
Kontribusi/ Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2020

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Hibah, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya serta Pendapatan daerah lainnya. Berdasarkan Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA2 PERTUMBUHAN (%)
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	321.778.377.769,00	373.125.930.259,00	402.221.383.401,00	443.183.108.782,00	407.226.904.040,00	5,31
Pendapatan Hibah	9.989.000.000,00	10.028.344.700,00	75.882.026.633,00	72.448.960.000,00	74.920.940.000,00	130,01
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	109.901.181.360,00	152.241.844.678,00	152.732.310.427,00	167.900.983.786,00	133.988.064.440,00	4,38
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	96.619.355.000,00	123.576.433.000,00	126.076.256.000,00	43.339.923.000,00	52.189.671.000,00	-9,20
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	67.292.434.000,00	31.934.457.881,00	11.780.790.341,00	12.830.754.996,00	1.154.709.000,00	-19,66
Pendapatan Lainnya	37.976.407.409,00	0	0	146.662.487.000,00	144.973.519.600,00	56,35
Dana Insentif Daerah (DID)	0	55.344.850.000,00	35.750.000.000,00	0	0	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasar data pada tabel diatas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 adalah 5,31%. dimana Kontribusi/ Proporsi terbesar berasal dari Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Untuk mengetahui proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada tabel berikut:

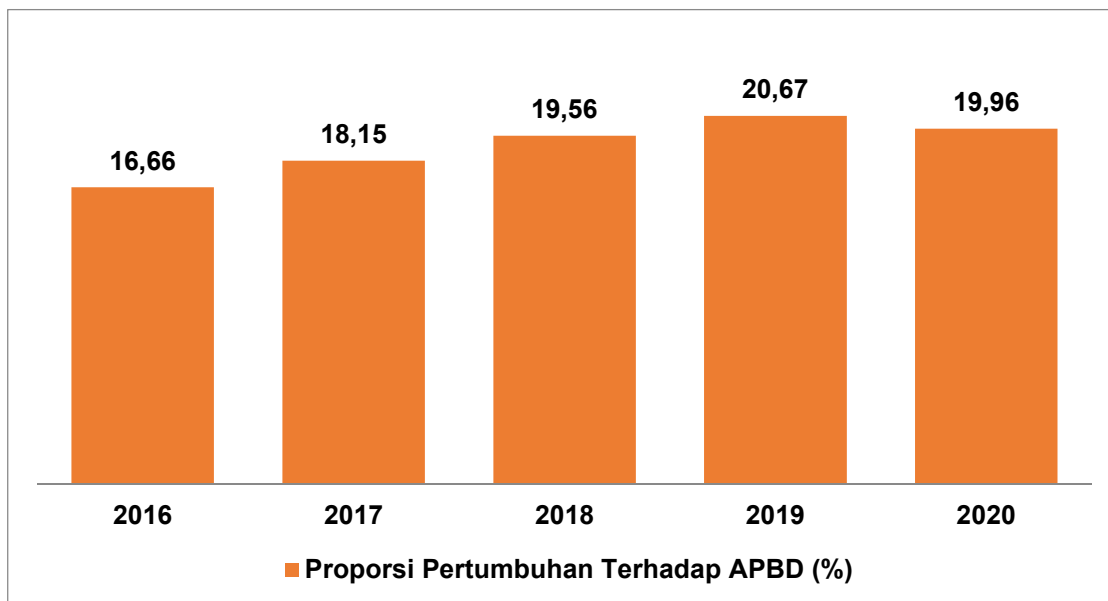
Tabel 3.7.
Kontribusi/Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap
Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2020

Tahun	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Pendapatan APBD	Proporsi Pertumbuhan Terhadap APBD (%)
2016	321.778.377.769,00	1.931.896.575.824,00	16,66
2017	373.125.930.259,00	2.055.571.033.667,00	18,15
2018	402.221.383.401,00	2.056.034.389.050,00	19,56
2019	443.183.108.782,00	2.143.687.569.516,00	20,67
2020	407.226.904.040,00	2.040.394.761.328,00	19,96

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasarkan Kontribusi/Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016- 2020 diketahui bahwa proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Sukoharjo relatif kecil dibanding dengan dana perimbangan, namun sangat menunjang kemampuan pendanaan APBD. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/ kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Lebih jelasnya kontribusi/ proporsi lain-lain pendapatan yang sah tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.5.
Kontribusi/ Proporsi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2020

3.3.2. Kinerja Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Dalam realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2017 realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rancangan Rp.1.887.503.285.006,00 dan meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar Rp.2.050.161.904.519,00, kemudian pada tahun anggaran 2019 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.114.149.361.513,00 dan pada tahun anggaran 2020 menurun menjadi Rp. 2.073.080.966.909,00 dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 2,06%.

Belanja operasi diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan, Belanja Modal diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Berdasarkan realisasinya, belanja operasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,81

%, dan realisasi belanja modal memiliki rata-rata pertumbuhan terendah yaitu -5,43 %. Hal ini menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian dan investasi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sementara realisasi belanja tidak terduga ada kenaikan yang signifikan disebabkan karena untuk penanganan darurat COVID-19, hasil dari rasionalisasi anggaran APBD.

Untuk melihat gambaran kinerja belanja daerah disajikan dalam tabel 3.8 dan 3.9 di bawah.

Tabel 3.8.
Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 -2020 (%)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA	97,31	91,82	99,74	98,62	101,60
BELANJA OPERASI	80,34	79,59	80,83	82,26	86,75
Belanja Pegawai	52,34	40,88	41,69	41,25	41,10
Belanja Pegawai	5,62	1,88	1,99	2,01	2,59
Belanja Barang dan Jasa	13,46	21,80	21,65	23,01	24,01
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	1,57	1,26	1,65	1,35	3,50
Belanja Bantuan Sosial	1,09	0,76	0,79	0,89	1,22
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	0,65	0,59	1,57	1,14	1,13
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	11,22	14,29	13,48	14,63	15,79
BELANJA MODAL	16,96	12,21	18,90	16,35	11,70
Belanja Modal	16,96	12,21	18,90	16,35	11,70
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,01	0,03	0,01	0,01	3,15
Belanja Tidak Terduga	0,01	0,03	0,01	0,01	3,15

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Tabel 3.8 di atas menggambarkan bahwa kinerja realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai di atas 90%. Kinerja Belanja Operasi juga mengalami kecenderungan membaik dari 80,34% di tahun 2016 meningkat menjadi 101,60 % di tahun 2020. Kinerja penyerapan belanja terbesar ada di belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa yang mencapai lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah meningkatkan kinerja realisasi belanja modalnya, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur wilayah, seperti jalan dan jembatan, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat gambaran kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari perhitungan proporsi jenis belanja terhadap total belanja daerah berikut.

Tabel 3.9.
Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 s.d Tahun 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	%	%	%	%	%
BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	62,97	60,92	57,35	58,05	62,30
Belanja Pegawai	48,02	42,48	39,80	39,78	60,84
Belanja Pegawai	5,77	2,04	2,00	2,04	6,75
Belanja Barang dan Jasa	13,83	23,75	21,71	23,33	62,69
Belanja Bunga	0,00	-	-	-	-
Belanja Hibah	1,61	1,37	1,66	1,37	5,53
Belanja Bantuan Sosial	1,12	0,83	0,79	0,90	1,93
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	0,67	0,65	1,57	1,15	1,79
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	11,53	15,56	13,52	14,84	24,94
BELANJA MODAL					
Belanja Modal	17,43	13,29	18,95	16,58	30,55
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	0,01	0,03	0,01	0,01	4,97

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo lebih berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan porsi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang lebih besar dibanding jenis belanja lainnya, termasuk belanja pegawai. Secara total, proporsi kedua belanja merupakan yang terbesar mencapai 89,99% sehingga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan memiliki komitmen untuk peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah, dan diharapkan dapat mempertahankan alokasi anggaran kedua belanja tersebut di masa mendatang. Hal ini terlihat jelas pada persentase proporsi realisasi kedua belanja tersebut selama 5 tahun terakhir dimana belanja barang dan jasa berada pada kisaran 60%-85%, sedangkan belanja modal berada di kisaran 15-25%. Untuk dapat menghitung proyeksi belanja daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 5 tahun terakhir, sesuai yang diminta dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
BELANJA	1.879.860.885.343,00	1.887.503.285.006,00	2.050.161.904.519,00	2.114.149.361.513,00	2.073.080.966.909,00	2,06
BELANJA OPERASI	1.552.032.550.898,00	1.636.029.249.932,00	1.661.510.751.281,00	1.763.457.458.854,00	1.770.127.747.604,00	2,81
Belanja Pegawai	1.011.210.156.899,00	840.372.861.444,00	856.943.060.675,00	884.166.878.630,00	838.548.756.755,00	-3,41
Belanja Barang dan Jasa	259.971.924.851,00	448.191.857.488,00	445.037.515.606,00	493.197.006.024,00	490.000.647.249,00	17,70
Belanja Bunga	2.779.148,00	0	0	0	0	-20,00
Belanja Hibah	30.310.745.000,00	25.907.256.000,00	33.963.567.000,00	29.017.219.200,00	71.383.208.000,00	27,10
Belanja Bantuan Sosial	21.080.500.000,00	15.577.000.000,00	16.245.000.000,00	19.074.000.000,00	24.923.500.000,00	3,65
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	12.653.337.000,00	12.221.647.000,00	32.211.620.000,00	24.345.536.000,00	23.123.358.000,00	16,55
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	216.803.108.000,00	293.758.628.000,00	277.109.988.000,00	313.656.819.000,00	322.148.277.600,00	9,72
BELANJA MODAL	327.611.459.445,00	250.940.426.244,00	388.468.318.338,00	350.577.750.659,00	238.738.380.776,00	-5,43
Belanja Modal	327.611.459.445,00	250.940.426.244,00	388.468.318.338,00	350.577.750.659,00	238.738.380.776,00	-5,43
BELANJA TIDAK TERDUGA	216.875.000,00	533.608.830,00	182.834.900,00	114.152.000,00	64.214.838.529,00	5901,83
Belanja Tidak Terduga	216.875.000,00	533.608.830,00	182.834.900,00	114.152.000,00	64.214.838.529,00	5901,83

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2016-2020

3.3.3. Kinerja Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya bersumber dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja dan sisa belanja PD. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sebagian besar dari sisa dana Tambahan Penghasilan Guru (dana sertifikasi), Tambahan penghasilan guru (non sertifikasi) dan sisa DAK. Kondisi SILPA dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dan di tahun 2018 sempat mengalami penurunan dikarenakan ada sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan RPJMD 2016-2021.
- b. Pencairan Dana Cadangan, merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dimaksudkan dalam rangka menyediakan dana guna membiayai pembangunan yang strategis dan berskala besar yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penggunaan dana cadangan di tahun 2017, 2019 dan 2020 bertujuan untuk pembangunan Masjid Agung Baiturrahman, Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah, dan Pembangunan Gedung Budi Sasono.

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

- a. Pembentukan dana cadangan, terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, untuk membiayai proyek strategis pemerintah daerah.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, penyertaan modal ini bertujuan untuk peningkatan investasi dan peningkatan pendapatan daerah.
- c. Pembayaran pokok utang, pembayaran ini terjadi pada tahun 2016 dimana merupakan pinjaman LOAN-ADB (P3KT) No SLA-855/DP3/1996 Tanggal 23 Januari 1996, dengan Keputusan Bupati Nomor 050/145/219/III/1995 Tanggal 31 Maret 1995 dan Keputusan DPRD Nomor 170/872/IV/1995 Tanggal 15 April 1995 yang berakhir pada tahun 2016.

Dalam hal pembiayaan daerah untuk melaksanakan pembangunan selain dibiayai dari APBD Kabupaten, juga dibiayai dari APBD provinsi melalui Bantuan keuangan khusus dan kegiatan di SKPD provinsi, APBN melalui dana tugas Pembantuan dan CSR.

Tabel 3.11.
Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
A	Realisasi Pendapatan Daerah	1.931.896.575.824	2.055.571.033.667	2.055.517.964.074	2.143.687.569.516	2.040.394.761.328,00
B	Realisasi Belanja Daerah	1.879.860.885.343	1.887.503.285.006	2.050.161.904.519	2.114.149.361.513	2.073.080.966.909,00
	Surplus (Defisit) Anggaran	52.035.690.481	168.067.748.661	5.356.059.555	29.538.208.003	(32.686.205.581,00)
C	Pembiayaan Daerah					
1	Penerimaan Pembiayaan	366.310.929.362	387.853.956.767	467.281.226.263	441.750.796.760	420.458.357.396,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	366.310.929.362	289.621.352.709	467.281.226.263	310.182.333.525	420.458.357.396,00
	Pencairan Dana Cadangan	-	98.232.604.058	-	131.568.463.235	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	128.725.267.134	88.640.479.064	162.454.952.293	50.830.647.367	29.318.552.621,00
	Pembentukan Dana Cadangan	95.022.990.867	53.460.228.064	127.154.952.293	5.430.647.367	2.094.552.621,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	33.656.000.000	35.180.251.000	35.300.000.000	45.400.000.000	27.224.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	46.276.267	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Surplus (Defisit) Pembiayaan		299.213.477.703	304.826.273.970	390.920.149.393	391.139.804.775,00
		237.585.662.228				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	289.621.352.709	467.281.226.364	310.182.333.525	420.458.357.396	358.453.599.194,00

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

3.3.4. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan good government governance dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah. Berikut ini tabel 3.12 perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Tabel 3.12 berikut akan menyajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama 5 tahun terakhir.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 dikatakan masih fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 2,66 persen, dimana rata-rata pertumbuhan terbesar ada pada investasi jangka panjang yaitu sebesar 5,44 persen, pada aset lancar sebesar -2,29 persen dan yang paling kecil adalah rata-rata pertumbuhan pada aset lainnya, hanya sebesar -26,48 persen. Adapun nilai aset daerah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 4.503.212.327.840,72 dan per 31 Desember tahun 2020 naik menjadi Rp. 5.671.897.389.399,22.

Tabel 3.12.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Sukoharjo

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2016	PER 31 DESEMBER 2017	PER 31 DESEMBER 2018	PER 31 DESEMBER 2019	PER 31 DESEMBER 2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
(1)	(AUDITED) (Rp.)	(AUDITED) (Rp.)	(AUDITED) (Rp.)	(AUDITED) (Rp.)	(AUDITED) (Rp.)	(7)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	440.383.729.113,00	246.304.477.485,00	283.002.178.413,00	388.999.128.749,00	292.917.233.361,00	-2,64
Kas di Bendahara Penerimaan	46.155.000,00	24.130.000,00	4.601.000,00	0	0	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0	0,00
Kas di Bendahara BLUD	4.716.808.993,00	20.651.027.258,00	6.931.470.953,00	31.296.258.766,00	64.757.420.956,00	16,99
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	21.840.722.152,00	22.641.717.966,00	19.936.690.415,00	0	0	0,00
Kas di Bendahara Dana BOS	293.811.005,00	0	307.392.744,00	495.561.021,00	786.741.942,00	8,14
Kas Lainnya	253.179.096,00	1.186.829.767,00	110.210.493,00	110.210.493,00	110.210.493,00	-25,94
Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0,00
Piutang Pendapatan	55.627.740.215,00	80.008.840.500,00	79.410.091.424,38	90.889.955.658,03	77.286.976.013,38	7,76
Penyisihan Piutang Pendapatan	-21.627.851.768,70	-50.636.834.157,45	-32.808.885.418,30	-37.239.186.583,20	-41.999.737.577,65	8,38
Piutang Lainnya	1.673.967.000,00	1.677.167.000,00	1.673.967.000,00	1.673.967.000,00	1.670.967.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	-1.255.475.250,00	-838.083.500,00	-1.673.967.000,00	-1.673.967.000,00	-1.670.967.000,00	5,00
Beban Dibayar Dimuka	0	5.208.333,00	0	0	0	0,00
Persediaan	50.349.730.747,97	17.978.391.824,43	18.195.288.591,25	20.898.943.280,21	24.690.355.626,25	-28,18
JUMLAH ASET LANCAR	552.302.516.303,27	339.002.872.475,98	375.089.038.615,33	495.450.871.384,04	418.549.200.813,98	-2,29
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
Investasi dalam Obligasi	0	0	0	0	0	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0,00
Deposito Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	0	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	210.591.928.097,60	186.109.313.300,22	248.650.962.067,97	289.319.372.104,49	321.245.401.645,29	5,44
Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	210.591.928.097,60	186.109.313.300,22	248.650.962.067,97	289.319.372.104,49	321.245.401.645,29	5,44
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	210.591.928.097,60	186.109.313.300,22	248.650.962.067,97	289.319.372.104,49	321.245.401.645,29	5,44

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2016	PER 31 DESEMBER 2017	PER 31 DESEMBER 2018	PER 31 DESEMBER 2019	PER 31 DESEMBER 2020	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
(1)	(AUDITED) (Rp.) (2)	(AUDITED) (Rp.) (3)	(AUDITED) (Rp.) (4)	(AUDITED) (Rp.) (5)	(AUDITED) (Rp.) (6)	(7)
ASET TETAP						
Tanah	2.203.915.079.745,00	2.211.948.315.709,00	2.219.870.143.974,00	2.308.294.119.855,00	2.782.002.677.561,00	0,90
Peralatan dan Mesin	415.208.991.267,94	361.880.341.337,94	433.751.632.697,14	520.525.150.518,44	591.507.488.388,44	4,05
Gedung dan Bangunan	913.462.027.141,00	786.078.175.735,00	1.004.304.418.979,00	1.181.498.323.407,91	1.209.416.147.963,91	4,54
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.015.827.138.760,06	903.534.056.935,06	1.157.306.027.757,06	1.472.993.062.257,19	1.554.415.395.885,19	6,21
Aset Tetap Lainnya	73.483.264.966,85	60.155.051.303,53	105.088.733.825,47	93.186.151.014,47	97.629.238.896,47	4,23
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.695.166.850,00	224.419.000,00	96.317.520.488,00	3.588.082.550,00	5.285.635.626,00	-50,76
Akumulasi Penyusutan	-981.523.979.269,00	-840.848.211.011,00	-1.091.665.339.632,00	-1.237.388.149.063,91	-1.377.720.394.785,22	4,14
JUMLAH ASET TETAP	3.653.067.689.461,85	3.482.972.149.009,53	3.924.973.138.088,67	4.342.696.740.539,10	4.862.536.189.535,79	3,18
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	50.250.614.873,00	95.022.990.867,00	177.405.567.166,00	51.267.751.298,00	53.362.303.919,00	0,40
JUMLAH DANA CADANGAN	50.250.614.873,00	95.022.990.867,00	177.405.567.166,00	51.267.751.298,00	53.362.303.919,00	0,40
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	963.037.500,00	963.037.500,00	963.037.500,00	755.137.500,00	755.137.500,00	-5,51
Aset Tidak Berwujud	13.535.827.662,00	8.992.380.300,00	14.365.378.984,00	19.081.474.247,00	20.248.357.811,00	5,81
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-2.986.247.559,00	-2.494.651.433,50	-3.282.345.605,00	-3.915.911.178,01	-4.799.201.825,84	4,75
Aset Lain-lain	29.656.750.148,00	2.672.629.117,00	4.125.161.932,00	7.443.356.775,00	5.566.519.374,00	-59,69
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-4.169.788.646,00	-2.672.629.117,00	-4.125.161.932,00	-7.443.356.775,00	-5.566.519.374,00	8,80
JUMLAH ASET LAINNYA	36.999.579.105,00	7.460.766.366,50	12.046.070.879,00	15.920.700.568,99	16.204.293.485,16	-26,48
JUMLAH ASET	4.503.212.327.840,72	4.110.568.092.019,23	4.738.164.776.816,97	5.194.655.435.894,62	5.671.897.389.399,22	2,66
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0	332.591.140,00	0	20,00
Utang Bunga	0	0	0	0	0	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.858.536.165,83	33.791.667,00	5.180.215.642,39	5.521.358.237,50	5.234.260.229,00	2,40
Utang Beban	7.183.289.418,00	6.420.197.819,00	7.662.566.811,00	8.560.573.966,00	13.632.800.157,00	3,22
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0	8.793.871.250,00	8.793.871.250,00	20,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.041.825.583,83	6.453.989.486,00	12.842.782.453,39	23.208.394.593,50	27.660.931.636,00	9,62
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0	0,00

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2016 (AUDITED) (Rp.)	PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) (Rp.)	PER 31 DESEMBER 2018 (AUDITED) (Rp.)	PER 31 DESEMBER 2019 (AUDITED) (Rp.)	PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED) (Rp.)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH KEWAJIBAN	12.041.825.583,83	6.453.989.486,00	12.842.782.453,39	23.208.394.593,50	27.660.931.636,00	9,62
EKUITAS						
JUMLAH EKUITAS	4.491.170.502.256,89	4.104.114.102.533,23	4.725.321.994.363,58	5.171.447.041.301,12	5.644.236.457.763,22	2,63
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.503.212.327.840,72	4.110.568.092.019,23	4.738.164.776.816,97	5.194.655.435.894,62	5.671.897.389.399,22	2,66

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cair (*quick ratio*). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan Rasio cair adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Kedua alat analisis tersebut, bertujuan sama yaitu untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perbedaannya Rasio Cair sudah mengeluarkan nilai persediaan dari aset lancar, karena persediaan meskipun termasuk aset lancar dianggap kurang cepat untuk dicairkan (kurang likuid). Angka rasio di atas 100 % menunjukkan hasil yang baik. Artinya Pemerintah Daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang ada. Sedangkan angka di bawah 100 % menunjukkan hasil yang kurang. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016 – 2019 di atas 100 persen dimana tahun 2016 sebesar 1.4586,53 persen menjadi 2134,79 persen pada tahun 2019. Nilai-nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan dengan rasio lancar (*current ratio*), karena rasio cair telah mempertimbangkan mengeluarkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai rasio cair neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bahwa nilai quick ratio dari tahun 2016 – 2019 tahun 2016 sebesar 3.882,58 menjadi 1.813,57 pada tahun 2019. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Tabel 3.13.
Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016-2020

No	Rasio Likuiditas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar	45,87	52,53	29,21	21,35	15,13
2	Ratio Cepat	38,83	45,06	24,16	18,14	14,24

Sumber: BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Rasio Solvabilitas disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva yang dimiliki dibiayai dengan hutang. Dari data pada neraca daerah, rasio solvabilitas yang dapat dihitung adalah rasio kewajiban terhadap aset (*Total Debt to Total Asset Ratio*) dan rasio kewajiban terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio kewajiban terhadap ekuitas merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan pemerintahan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dihitung

dengan rumus total kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang terhadap jumlah seluruh aktiva yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dihitung dengan rumus total kewajiban dibagi dengan total aset.

Tabel 3.14.
Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Rasio Solvabilitas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	0,00267	0,00157	0,00271	0,00447	0,0052
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,00268	0,00157	0,00272	0,00449	0,0049

Sumber: BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2016 sebesar 0,00267 atau 0,267% dan pada tahun 2019 sebesar 0,00447 atau 0,447%. Semakin kecil nilai rasio solvabilitas, maka semakin baik. Jika dilihat dari hasil penghitungan tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan selama tahun 2016-2019 tidak tergantung dari pinjaman. Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan keseluruhan kewajiban. Rasio kewajiban terhadap ekuitas dihitung dengan membandingkan keseluruhan ekuitas dana dengan keseluruhan kewajiban.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2016 sebesar 0,268 persen dan pada tahun 2019 sebesar 0,449 persen. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya. Kinerja keuangan Pemda yang sangat baik, karena ekuitas dana yang dijadikan jaminan kewajiban hanya kecil sekali bahkan dibawah angka 1%.

Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sendiri dalam membiayai pembangunan. Angka rasio yang mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri.

3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

3.4.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sukoharjo selama 5 tahun terakhir. Tabel berikut akan menyajikan proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Daerah untuk menentukan seberapa efisien alokasi anggaran belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama ini dan bagaimana kebijakan di masa mendatang terkait dengan belanja aparatur ini.

Tabel 3.15.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Sukoharjo

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
1	2016	1.271.182.081.750	2.008.586.152.477	63,29
2	2017	1.288.564.718.932	1.976.143.764.070	65,21
3	2018	1.301.980.576.281	2.212.616.856.812	58,84
4	2019	1.377.363.884.654	2.164.980.008.880	63,62
5	2020	1.328.549.404.004	2.102.399.519.530	63,19

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Dari tabel analisis tersebut diatas, persentase tertinggi dari Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sukoharjo yaitu pada tahun 2017 sebesar 65,21 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.

3.4.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.16.
Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Realisasi Pendapatan Daerah	1.931.896.575.824	2.055.571.033.667	2.055.517.964.074	2.143.687.569.516	2.040.394.761.328,00
B	Realisasi Belanja Daerah	1.879.860.885.343	1.887.503.285.006	2.050.161.904.519	2.114.149.361.513	2.073.080.966.909,00
	Surplus (Defisit) Anggaran	52.035.690.481	168.067.748.661	5.356.059.555	29.538.208.003	(32.686.205.581,00)
C	Pembiayaan Daerah					
1	Penerimaan Pembiayaan	366.310.929.362	387.853.956.767	467.281.226.263	441.750.796.760	420.458.357.396,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	366.310.929.362	289.621.352.709	467.281.226.263	310.182.333.525	420.458.357.396,00
	Pencairan Dana Cadangan	-	98.232.604.058	-	131.568.463.235	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	128.725.267.134	88.640.479.064	162.454.952.293	50.830.647.367	29.318.552.621,00
	Pembentukan Dana Cadangan	95.022.990.867	53.460.228.064	127.154.952.293	5.430.647.367	2.094.552.621,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	33.656.000.000	35.180.251.000	35.300.000.000	45.400.000.000	27.224.000.000,00
	Pembayaran Pokok Utang	46.276.267	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Surplus (Defisit) Pembiayaan	237.585.662.228	299.213.477.703	304.826.273.970	390.920.149.393	391.139.804.775,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	289.621.352.709	467.281.226.364	310.182.333.525	420.458.357.396	358.453.599.194,00

Sumber: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2016-2020, BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020 (diolah)

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya bersumber dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja dan sisa belanja PD. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sebagian besar dari sisa dana Tambahan Penghasilan Guru (dana sertifikasi), Tambahan penghasilan guru (non sertifikasi) dan sisa DAK. Kondisi SILPA dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami peningkatan dan di tahun 2018 sempat mengalami penurunan dikarenakan ada sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan RPJMD 2016-2021.
- b. Pencairan Dana Cadangan, merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dimaksudkan dalam rangka menyediakan dana guna membiayai pembangunan yang strategis dan berskala besar yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penggunaan dana cadangan di tahun 2017, 2019 dan 2020 bertujuan untuk pembangunan Masjid Agung Baiturrahman, Pembangunan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah, dan Pembangunan Gedung Budi Sasono.

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

- a. Pembentukan dana cadangan, terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, untuk membiayai proyek strategis pemerintah daerah.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, penyertaan modal ini bertujuan untuk peningkatan investasi dan peningkatan pendapatan daerah.
- c. Pembayaran pokok utang, pembayaran ini terjadi pada tahun 2016 dimana merupakan pinjaman LOAN-ADB (P3KT) No SLA-855/DP3/1996 Tanggal 23 Januari 1996, dengan Keputusan Bupati Nomor 050/145/219/III/1995 Tanggal 31 Maret 1995 dan Keputusan DPRD Nomor 170/872/IV/1995 Tanggal 15 April 1995 yang berakhir pada tahun 2016.

Dalam hal pembiayaan daerah untuk melaksanakan pembangunan selain dibiayai dari APBD Kabupaten, juga dibiayai dari APBD provinsi melalui Bantuan keuangan khusus dan kegiatan di SKPD provinsi, APBN melalui dana tugas Pembantuan dan CSR.

Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila nilainya positif dikategorikan surplus anggaran, sebaliknya apabila negatif dikategorikan defisit anggaran. Selama kurun waktu 2016-2020, APBD Kabupaten Sukoharjo mengalami empat kali defisit anggaran tahun 2016 mencapai Rp. 76.689.576.653,- tahun 2018 sebesar Rp. 157.098.892.738,- dan tahun 2019 sebesar Rp. 21.292.439.364,-, sedangkan tahun 2020 belum dapat dihitung. Namun demikian, defisit tersebut masih dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Surplus anggaran terjadi pada tahun 2017. Surplus anggaran yang terjadi disebabkan meningkatnya pendapatan daerah dan sisa belanja di SKPD yang sifatnya kontra pos yang terdiri dari sisa dana Tambahan Penghasilan Guru (dana sertifikasi), tambahan penghasilan guru (*non sertifikasi*).

Tabel 3.17
Defisit dan Surplus Riil Anggaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.931.896.575.824	2.055.571.033.667	2.055.517.964.074	2.143.687.569.516	2.040.394.761.328
	dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.879.860.885.343	1.887.503.285.006	2.050.161.904.519	2.114.149.361.513	2.073.080.966.909
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	128.725.267.134	88.640.479.064	162.454.952.293	50.830.647.367	29.318.552.621
A.	Surplus/(Defisit) Riil	(76.689.576.653)	79.427.269.597	(157.098.892.738)	(21.292.439.364)	(62.004.758.202)
	ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	366.310.929.362	289.621.352.709	467.281.226.263	310.182.333.525	420.458.357.396
	Pencairan Dana Cadangan	-	98.232.604.058	-	131.568.463.235	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	366.310.929.362	387.853.956.767	467.281.226.263	441.750.796.760	420.458.357.396
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	289.621.352.709	467.281.226.364	310.182.333.525	420.458.357.396	358.453.599.194
		(76.689.576.653)	79.427.269.597	(157.098.892.738)	(21.292.439.364)	(62.004.758.202)

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Penutup defisit anggaran Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan Penerimaan Piutang.

Untuk tahun 2017 APBD Kabupaten Sukoharjo terjadi surplus anggaran, maka terjadi SiLPA tahun berjalan dari akumulasi surplus anggaran, SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan Piutang. Secara lengkap komposisi penutup defisit dan surplus riil anggaran tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.18
Komposisi Penutup Defisit Dan Surplus Riil Anggaran Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020*
		%	%	%	%	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	(477,65)	364,64	(297,44)	(1.456,77)	(678,11)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	123,68	-	(617,91)	-
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
5	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	(377,65)	588,31	(197,44)	(1.974,68)	(578,11)

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

3.4.3. Analisis Fiskal Daerah

Analisis fiskal merupakan analisis yang menggunakan indikator rasio sederhana untuk memotret kondisi kesehatan fiskal Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Daerah per Kapita di Kabupaten Sukoharjo fluktuatif di angka 2,2-2,4 juta rupiah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk tiap tahunnya maka harus diimbangi dengan upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga pelayanan yang diberikan dapat optimal. Berikut Gambaran Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.19
Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Daerah Per Kapita (Rp)
2016	1.931.896.575.824	871.397	2.217.011
2017	2.055.571.033.667	878.374	2.340.200
2018	2.055.517.964.074	885.205	2.322.081

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Daerah Per Kapita (Rp)
2019	2.143.687.569.516	891.912	2.403.474
2020	2.040.394.761.328	907.587	2.248.153

Sumber: Analisa Bappelbangda, (Data BKD dan BPS Kab. Sukoharjo), 2016-2020

2. Kemampuan Keuangan Daerah

a. *Input Based*

Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari PAD diperkuat dan diperluas. Kewenangan pemerintah daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan terdapat peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah.

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam revidu kemandirian fiskal daerah adalah dengan menilai implementasi desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah (pemda). Kriteria yang digunakan berupa instrumen empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu (1) pelimpahan wewenang pembelanjaan; (2) pelimpahan wewenang penerimaan; (3) transfer antartingkat pemerintahan; dan (4) pinjaman daerah. Berikut Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020:

Tabel 3.20

Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

No	Tahun	Nilai IKF	Status
1	2016	0,1880	Belum Mandiri
2	2017	0,1943	Belum Mandiri
3	2018	0,2109	Belum Mandiri
4	2019	0,2140	Belum Mandiri
5	2020	0,2269	Belum Mandiri

Sumber: Laporan Hasil Review Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 BPK RI (2020)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa status Kemandirian Fiskal adalah “Belum Mandiri”, akan tetapi menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

daerah dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah, dan kedepannya akan didukung oleh berbagai upaya dalam menaikkan pendapatan tersebut.

b. Output Based

Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021, (dalam Bab II tabel 2.14) terlihat dominasi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 70,62% di tahun 2016 dan berfluktuasi setiap tahunnya dikisaran 69% hingga tahun 2020. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo relatif masih didominasi oleh belanja konsumsi rumah tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah konsumsi pemerintah yang berkisar 5-6% dari tahun 2016-2020. Aspek pembentukan investasi daerah melalui PMTB, relatif tetap di kisaran 23% dari tahun 2016-2020.

Peran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pertumbuhan ekonomi terhadap PDRB dapat dilihat pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5-6%. Sedangkan Kontribusi pada belanja modal dalam APBD dalam komponen PMTB masih cukup kecil. Kedepannya perlu didorong agar kebijakan dari pemerintah daerah dalam menyusun pengeluaran pemerintah dalam hal ini anggaran belanja daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata sehingga mampu meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun.

Dominasi konsumsi rumah tangga di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sukoharjo seharusnya dapat diimbangi dengan menambah sektor produktif untuk dapat memperluas lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menjadi prioritas dengan status bonus demografi yang sudah dinikmati saat ini oleh Kabupaten Sukoharjo.

3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhannya. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian Kabupaten Sukoharjo.

Pada tahun 2016, ruang fiskal Kabupaten Sukoharjo sebesar 27,28 persen, dan meningkat menjadi 39,7 % di tahun 2020. Dengan mengetahui angka fiskal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dituntut agar menyusun program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur. Gambaran tentang ruang fiskal Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21.
Gambaran Ruang Fiskal Kabupaten Sukoharjo

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus/Dana Darurat	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal
2016	1.931.896.575.824	9.989.000.000	287.044.558.458	96.619.355.000	1.011.210.156.899	527.033.505.467	27,28
2017	2.055.571.033.667	10.028.344.700	278.332.947.422	123.576.433.000	840.372.861.444	803.260.447.101	39,08
2018	2.055.517.964.074	75.882.026.633	286.887.271.862	126.076.256.000	856.943.060.675	709.729.348.904	34,53

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus/Dana Darurat	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiskal
2019	2.143.687.569.516	72.448.960.000	278.544.599.562	43.339.923.000	884.166.878.630	865.187.208.324	40,36
2020	2.040.394.761.328	74.920.940.000	264.538.926.969	52.189.671.000	838.548.756.755	810.196.466.604	39,71

Sumber: Analisis Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2021

4. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah dari tahun 2016-2021 fluktuatif di kisaran 1,14-1,23. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mengembangkan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif diantaranya memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, peningkatan peran swasta melalui kegiatan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), peningkatan peran filantropi dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infak dalam kegiatan pembangunan. Gambaran tentang Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.22.

Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah	Kemampuan	
1	2	3	4	5	6 (2+3)	7 (4+5)	8 (6/7)
2016	1.931.896.575.824	366.310.929.362	1.879.860.885.343	128.725.267.134	2.298.207.505.186	2.008.586.152.477	1,14
2017	2.055.571.033.667	387.853.956.767	1.887.503.285.006	88.640.479.064	2.443.424.990.434	1.976.143.764.070	1,24
2018	2.055.517.964.074	467.281.226.263	2.050.161.904.519	162.454.952.293	2.522.799.190.337	2.212.616.856.812	1,14
2019	2.143.687.569.516	441.750.796.760	2.114.149.361.513	50.830.647.367	2.585.438.366.276	2.164.980.008.880	1,19
2020	2.040.394.761.328	420.458.357.396	2.073.080.966.909	29.318.552.621	2.460.853.118.724	2.102.399.519.530	1,17

Sumber: Analisis Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2021

5. Belanja Modal

Ratio Belanja Modal terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020 berfluktuatif di kisaran 11-18 persen, hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Pada tiga tahun pertama RPJMD Tahun 2016-2021 prioritas pembangunan berfokus kepada infrastruktur. Sedangkan pada tahun 2020 rasio belanja modal turun menjadi 11,52 persen, dikarenakan adanya refofusing program dan kegiatan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19. Berikut gambaran Ratio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020:

Tabel 3. 23.
Ratio Belanja Modal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Ratio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
2016	327.611.459.445	1.879.860.885.343	17,43
2017	250.940.426.244	1.887.503.285.006	13,29
2018	388.468.318.338	2.050.161.904.519	18,95
2019	350.577.750.659	2.114.149.361.513	16,58
2020	238.738.380.776	2.073.080.966.909	11,52

Sumber: Analisis Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2021

6. Belanja Pegawai

Ratio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Pada tahun 2017 belanja pegawai turun signifikan disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pengalihan kewenangan dari kabupaten/ kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu pengalihan guru SMA/SMK, penyuluh, staf kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan staf TU SMA/SMK. Berikut gambaran Ratio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020:

Tabel 3. 24.
Ratio Belanja Pegawai Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Ratio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja
2016	902.690.059.304	1.879.860.885.343	48,02
2017	801.795.142.738	1.887.503.285.006	42,48
2018	816.026.582.051	2.050.161.904.519	39,80
2019	840.975.292.704	2.114.149.361.513	39,78
2020	846.713.145.000	2.073.080.966.909	40,84

Sumber: Analisis Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2021

7. Tax Ratio

Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Namun dari berbagai literatur, tax ratio bukanlah satu satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak. Walaupun demikian, hingga saat ini tax ratio menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu negara. Adapun definisi sederhana tax ratio di daerah adalah perbandingan antara total penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimasa yang sama. Tax ratio Kabupaten Sukoharjo bekisar pada angka 0,62-0,71. Hal ini masih perlu ditingkatkan karena masih berada di bawah 1%. Indikasi penyebab rendahnya angka tax ratio daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan. Berikut gambaran Ratio Belanja Tax Ratio Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020:

Tabel 3.25
Tax Ratio Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak (Rp.)	PDRB (Rp. Juta)	Tax Ratio
2016	182.010.505.527	29.130.306,98	0,62
2017	221.901.158.399	31.621.414,17	0,70
2018	235.894.522.749	34.211.246,04	0,69
2019	262.419.139.461	36.970.814,29	0,71
2020	235.186.691.560	36.911.517,77	0,64

Sumber: Analisis Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2021

3.5. Kerangka Pendanaan

3.5.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebagaimana pada tabel 3.3 dan 3.4 di atas menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif sangat optimistik. Rata-rata pertumbuhan pada komponen PAD diatas 8,03% dengan angka pertumbuhan setiap tahunnya sangat fluktuatif (turun-naik). Sedangkan, perkembangan Dana Perimbangan relatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,96%, meski tingkat pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sangat optimis, yaitu rata-rata naik 18,44% dan 61,60% per tahun, dikarenakan pada tahun 2019 terdapat kenaikan yang cukup signifikan akibat adanya koreksi realisasi lebih bayar dari Pemerintah. Begitu juga, pada pos Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi perlu mendapatkan perhatian. Rata-rata pertumbuhan pendapatan bagi hasil dari pajak Pemerintah Provinsi sebesar 11,93% juga sangat optimis. Belum lagi dengan adanya dampak krisis ekonomi akibat adanya wabah Covid-19 tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD maupun Dana Transfer dari Pemerintah.

Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan hanya mengakui angka pertumbuhan sebesar 50%, serta mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19. Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan. Penerimaan Dana Alokasi Umum juga diperkirakan akan terjadi pada 2 tahun ke depan, sesuai dengan arahan dari Pemerintah, sebesar 10%- 20% dari realisasi TA 2020.

Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya wabah Covid-19 yang tertuang dalam Perubahan APBD TA 2020. Adanya wabah nasional dan dunia berupa pandemi covid 19

(virus corona) yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat, selain ancaman korban jiwa yang semakin banyak. Oleh karena itu, selain tentu pastinya akan terjadi penurunan kapasitas fiskal, juga perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengadakan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan, termasuk keuangan daerah, untuk mengatasi dan menanggulangi wabah beserta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah aturan setingkat Perppu sampai dengan aturan teknis setingkat Menteri terkait, untuk menanggulangi kejadian bencana kesehatan seperti saat ini.

Seperangkat regulasi tersebut merumuskan pentingnya perubahan kebijakan anggaran dari anggaran Pemerintah yang tertuang dalam APBN, sampai dengan perubahan kebijakan anggaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam APBD. Perubahan kebijakan anggaran tersebut dipayungi dengan aturan yang tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Perppu tersebut memberikan payung hukum tertinggi dalam kondisi darurat agar Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, melakukan langkah-langkah cepat dalam perubahan anggaran. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan:

1. pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) termasuk kewenangan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) untuk melakukan perubahan alokasi antar program;
2. perubahan alokasi; dan
3. penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian, Presiden RI mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Berdasarkan Inpres tersebut, kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk:

- a. Penanganan Kesehatan, antara lain:
 1. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara

- lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangankaret dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
2. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 3. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien COVID-19;
 4. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
 5. Penyemprotan desinfektan;
 6. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 7. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
 8. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 9. Penanganan jenazah korban positif COVID-19;
 10. Penanganan kesehatan lainnya.
- b. Penanganan dampak ekonomi, antara lain:
1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
 2. Pemberian insentif berupa:
 - a) Pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c) Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
 3. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
 4. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. Penyediaan *social safety net* / jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemda secara memadai kepada antara lain:
- 1) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 - 2) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - 3) Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

Pemberian Hibah/Bansos dimaksud diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemda berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta evidence-based dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi

yang muncul dan/atau permintaan penerima Hibah/Bansos. Tata cara pemberian Hibah/Bansos dimaksud tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, yang telah diperbarui dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.

Kedua aturan teknis di atas, kemudian dianggap masih belum memadai untuk Daerah melakukan perubahan anggaran disebabkan adanya aturan lain yang mengikat pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, dikeluarkanlah aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan yang tertuang dalam SKB Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.7/2020 yang mengatur antara lain:

1. Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui:
 - a. Penyesuaian Dana Perimbangan ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
2. Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:
 - a. Rasionalisasi belanja pegawai;
 - b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%;
 - c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%.
3. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja, digunakan untuk mendanai:
 - a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID- 19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
 - b. Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau
 - c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
4. Penggunaan belanja dilakukan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamakan penggunaan anggaran tersebut; dan

- b. Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Wali Kabupaten Sukoharjo kepada Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI terkait Revisi Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Atas dasar hal tersebut maka untuk tahun dasar menggunakan data penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Sedangkan, untuk proyeksi tahun 2021 menggunakan data yang sudah diproyeksikan dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021. Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi penerimaan daerah disajikan dalam tabel 3.26 sebagai berikut.

Tabel 3. 26.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021 s/d Tahun 2026

NO	U R A I A N	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.954.129.147.000	1.965.656.116.000	1.979.198.075.000	1.995.323.675.000	2.013.653.176.000	2.035.153.588.000
1.	1. Pendapatan Asli Daerah	343.113.739.000	353.953.756.000	366.663.129.000	381.875.937.000	399.209.652.000	419.628.214.000
1.	1. 1 Hasil Pajak Daerah	165.755.493.000	174.043.268.000	184.485.865.000	197.399.876.000	212.402.267.000	230.456.460.000
1.	1. 2 Hasil Retribusi Daerah	19.132.880.000	19.706.867.000	20.101.005.000	20.503.026.000	20.913.087.000	21.331.349.000
1.	1. 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.400.013.000	27.060.014.000	27.601.215.000	28.153.240.000	28.716.305.000	29.290.632.000
1.	1. 4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.825.353.000	133.143.607.000	134.475.044.000	135.819.795.000	137.177.993.000	138.549.773.000
1.	2. Pendapatan Transfer	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000
1.	2. 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000
1.	2. 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000
1.	3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	71.695.199.000	72.382.151.000	73.214.737.000	74.127.529.000	75.123.315.000	76.205.165.000
1.	3. 1 Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1.	3. 2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan per-UU	68.695.199.000	69.382.151.000	70.214.737.000	71.127.529.000	72.123.315.000	73.205.165.000
	Jumlah Pendapatan	1.954.129.147.000	1.965.656.116.000	1.979.198.075.000	1.995.323.675.000	2.013.653.176.000	2.035.153.588.000

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam upaya jangka menengah untuk mencapai target pendapatan daerah utamanya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:

- a. Penguatan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah termasuk penyusunan peraturan mengenai pengelolaan PAD (termasuk PDRD) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk menggali keunggulan budaya dan potensi asli daerah.
- c. Modernisasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM daerah, termasuk modernisasi proses pemungutan pajak (seperti penggunaan sistem teknologi informasi dan pembaruan data wajib pajak secara elektronik).
- d. Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah.
- e. Sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, dan perbankan.
- f. Penjajakan pembiayaan kreatif seperti pinjaman daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.10 dijelaskan bahwa pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Tabel di bawah merupakan data perkembangan realisasi pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama 3 tahun terakhir serta pertumbuhan per tahunnya.

Tabel 3.27.
Perkembangan Realisasi Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 *) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Belanja Wajib dan Mengikat	1.650.187.565.343	1.580.989.401.176	1.740.657.461.619	1.776.032.854.513	1.663.633.243.580	0,16
1,	Belanja Pegawai	1.011.210.156.899	840.372.861.444	856.943.060.675	884.166.878.630	838.669.798.636	-3,14
2,	Belanja Barang dan Jasa	587.583.384.296	699.132.283.732	833.505.833.944	843.774.756.683	728.656.736.944	4,80
3,	Belanja Bunga	2.779.148	0	0	0	0	
4,	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	
5,	Belanja Hibah	30.310.745.000	25.907.256.000	33.963.567.000	29.017.219.200	71.383.208.000	27,10
6,	Belanja Bantuan Sosial	21.080.500.000	15.577.000.000	16.245.000.000	19.074.000.000	24.923.500.000	3,65
2	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	33.702.276.267	133.412.855.058	35.300.000.000	176.968.463.235	27.224.000.000	-3,84
1,	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	46.276.267	0	0	0	0	
2,	Penyertaan modal daerah	33.656.000.000	35.180.251.000	35.300.000.000	45.400.000.000	27.224.000.000	-3,82
3,	Pembentukan dana cadangan	0	98.232.604.058	0	131.568.463.235	0	
4,	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	
5,	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	
	TOTAL (1+2)	1.683.889.841.610	1.714.402.256.234	1.775.957.461.619	1.953.001.317.748	1.690.857.243.580	0,08

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Berdasarkan perhitungan di tabel 3.27 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan per tahun tidak disebabkan karena adanya kenaikan yang tidak merata tiap tahunnya. Jika dilihat data keuangan per tahun anggaran maka, data yang ada menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar tiap tahunnya. Berbeda halnya dengan pengeluaran pembiayaan, selama 3 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan kebijakan penyertaan modal maupun pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan penentuan proyeksi pendapatan, khusus untuk proyeksi tahun 2021 perlu mempertimbangkan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebagai tahun dasar, setelah adanya penyesuaian kebijakan anggaran akibat adanya dampak wabah Covid-19. Untuk menentukan proyeksi belanja tahun 2021, tidak dengan mengkalikan anggaran belanja tahun 2020 sebagai tahun dasar dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Melainkan, ditentukan dengan cara menggunakan data proyeksi yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021. Perubahan yang terjadi pada alokasi anggaran belanja dengan adanya kebijakan refocusing anggaran juga penting untuk melihat kemungkinan alokasinya di tahun 2021. Perkiraan dari sejumlah hasil riset dan pendapat ahli, bahwa kemungkinan dampak dari adanya wabah pandemic Covid-19 ini, terutama untuk pemulihan perekonomian, akan memakan waktu sampai dengan 2 tahun ke depan, atau sampai dengan tahun 2022. Informasi tersebut tentu akan berdampak pada perkiraan alokasi anggaran belanja pada tahun 2 tahun pertama, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.

Baru kemudian, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 untuk menentukan proyeksi belanja tidak langsung dilakukan dengan mengkalikan proyeksi terakhir dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Sedangkan, proyeksi realisasi pengeluaran pembiayaan yang kemungkinan dari penyertaan modal, dianggarkan berdasarkan kewajiban penyertaan modal daerah sesuai dengan Perda penyertaan modal. Dengan demikian proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat disajikan sebagaimana tabel 3.28 di bawah.

Tabel 3.28.
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

NO	URAIAN	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	BELANJA DAERAH	2.247.461.474.000	2.179.408.362.000	2.188.175.517.000	2.199.621.809.000	2.213.365.588.000	2.230.371.992.000
2.	1. Belanja Operasi	1.495.770.203.224	1.495.876.682.000	1.499.869.024.000	1.506.255.661.000	1.514.692.863.000	1.526.049.036.000
2.	1. 1 Belanja Pegawai	900.347.880.400	922.247.139.000	946.629.019.000	972.589.612.000	997.468.937.000	1.022.425.095.000
2.	1. 2 Belanja Barang dan Jasa	531.531.231.260	509.738.451.000	489.348.913.000	469.774.957.000	453.332.834.000	439.732.849.000
2.	1. 3 Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
2.	1. 4 Belanja Subsidi	6.420.312.864	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000
2.	1. 5 Belanja Hibah	48.335.122.700	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000
2.	1. 6 Belanja Bantuan Sosial	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000
2.	2. Belanja Modal	410.126.534.480	369.113.882.000	372.805.021.000	376.533.072.000	380.298.403.000	384.101.388.000
2.	3. Belanja Tidak Terduga	39.033.115.296	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
2.	4. Belanja Transfer	302.531.621.000	303.417.798.000	304.501.472.000	305.833.076.000	307.374.322.000	309.221.568.000
2.	4. 1 Belanja Bagi Hasil	27.298.997.000	28.185.174.000	29.268.848.000	30.600.452.000	32.141.698.000	33.988.944.000
2.	4. 2 Belanja Bantuan Keuangan	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000
	Jumlah Belanja	2.247.461.474.000	2.179.408.362.000	2.188.175.517.000	2.199.621.809.000	2.213.365.588.000	2.230.371.992.000

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Belanja Daerah untuk tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.247.461.474.000,- sedangkan akhir 2026 diproyeksikan menjadi Rp. 2.230.371.992.000,-. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa tingkat PAUD-SD-SMP, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Desa) yang dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;

- b. Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

3.5.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah sebagaimana pada tabel 3.19 di atas ditambah dengan pencairan Dana Cadangan dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran seperti pada tabel 3.21 di atas, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama (tabel 3.21) sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 s.d tahun 2026 disajikan pada tabel 3.22 berikut.

Tabel 3. 29.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi Tahun					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendapatan	1.954.129.147.000	1.965.656.116.000	1.979.198.075.000	1.995.323.675.000	2.013.653.176.000	2.035.153.588.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	60.000.000.000	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	318.320.327.000	295.364.920.000	297.767.815.000	292.175.213.000	283.410.157.000	270.554.178.000
	Total penerimaan	2.272.449.474.000	2.261.021.036.000	2.276.965.890.000	2.347.498.888.000	2.297.063.333.000	2.305.707.766.000
	Dikurangi:						
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.242.901.567.264	1.248.500.310.000	1.254.320.113.000	1.260.411.527.000	1.266.736.382.000	1.273.391.155.000
5	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.029.547.906.736	1.012.520.726.000	1.022.645.777.000	1.087.087.361.000	1.030.326.951.000	1.032.316.611.000

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

Tabel 3.29 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo cukup tinggi, namun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kapasitas riil tahun 2019. Ini dikarenakan adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan tekanan anggaran (*fiscal distress*). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya pandemi, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 pandemi akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Di masa 2 tahun ke depan diperkirakan fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan dan penurunan kapasitas. Sehingga, diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020 ini, baru pada tahun 2023 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan melampaui dari tahun anggaran 2019.

Pembentukan dana cadangan dimulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan alokasi per tahun yaitu Rp 20.000.000.000,-. Dana ini diperuntukkan untuk dana cadangan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Kemudian, hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD. Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

3.5.3. Analisa Kesehatan Kapasitas Keuangan Kabupaten Sukoharjo.

Kesehatan kapasitas fiskal daerah diukur dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal daerah. Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dari Total Pendapatan Daerah dikurangi Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan ditambah belanja tertentu.

Berdasarkan indeks yang dirilis oleh PMK tersebut, Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,544 atau termasuk dalam katagori tinggi.

Selanjutnya berdasarkan kajian dan analisa proyeksi keuangan Tahun 2021 sampai dengan 2026, diproyeksikan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Sukoharjo terus sehat dan berada pada rentang Indeks IKFD Tinggi ($1,168 < IKFD$

<2,145. Diproyeksikan Tahun 2021 sebesar 1,484. Tahun 2022 : 1,561 Tahun 2023 : 1,649 Tahun 2024 : 1,750 Tahun 2025 :1,864 Tahun 2026: 1,994.

Proyeksi tersebut didasarkan dengan asumsi Pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo diperkirakan terus meningkat, baik dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan juga lain-lain PAD yang Sah. Sektor PAD, akan tetap mendapat kontribusi terbesar dari Pajak PBB, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan, hal ini disebabkan karena potensi pengembangan kawasan pemukiman dan industri, serta diperkirakan terus masuknya investasi ke Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan dari dana Transfer, Kabupaten SUkoharjo mengandalkan Transfer dari Pemerintah Provinsi yang berasal dari bagi hasil pajak utamanya Pajak Kendaraan Bermotor dan BBM. Hal ini didasari perkiraan tetap tumbuhnya industri otomotif serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kapasitas Fiskal atau Keuangan Daerah kabupaten Sukoharjo untuk 5 (lima) tahun kedepan diperkirakan akan tetap sehat dan tinggi.

Tabel 3.30
Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2021-2026

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.954.129.147.000	1.965.656.116.000	1.979.198.075.000	1.995.323.675.000	2.013.653.176.000	2.035.153.588.000
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	343.113.739.000	353.953.756.000	366.663.129.000	381.875.937.000	399.209.652.000	419.628.214.000
1. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	165.755.493.000	174.043.268.000	184.485.865.000	197.399.876.000	212.402.267.000	230.456.460.000
1. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	19.132.880.000	19.706.867.000	20.101.005.000	20.503.026.000	20.913.087.000	21.331.349.000
1. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.400.013.000	27.060.014.000	27.601.215.000	28.153.240.000	28.716.305.000	29.290.632.000
1. 1. 4.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.825.353.000	133.143.607.000	134.475.044.000	135.819.795.000	137.177.993.000	138.549.773.000
1. 2.	Pendapatan Transfer	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000
1. 2. 1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000
1. 2. 2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000
1. 3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	71.695.199.000	72.382.151.000	73.214.737.000	74.127.529.000	75.123.315.000	76.205.165.000
1. 3. 1.	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1. 3. 2.	Lain-2 Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan per-UU	68.695.199.000	69.382.151.000	70.214.737.000	71.127.529.000	72.123.315.000	73.205.165.000
	Jumlah Pendapatan	1.954.129.147.000	1.965.656.116.000	1.979.198.075.000	1.995.323.675.000	2.013.653.176.000	2.035.153.588.000
2.	BELANJA DAERAH	2.247.461.474.000	2.179.408.362.000	2.188.175.517.000	2.199.621.809.000	2.213.365.588.000	2.230.371.992.000
2. 1.	Belanja Operasi	1.495.770.203.224	1.495.876.682.000	1.499.869.024.000	1.506.255.661.000	1.514.692.863.000	1.526.049.036.000
2. 1. 1.	Belanja Pegawai	900.347.880.400	922.247.139.000	946.629.019.000	972.589.612.000	997.468.937.000	1.022.425.095.000
2. 1. 2.	Belanja Barang dan Jasa	531.531.231.260	509.738.451.000	489.348.913.000	469.774.957.000	453.332.834.000	439.732.849.000
2. 1. 3.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0

2.	1.	4	Belanja Subsidi	6.420.312.864	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000
2.	1.	5	Belanja Hibah	48.335.122.700	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000
2.	1.	6	Belanja Bantuan Sosial	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000
2.	2.		Belanja Modal	410.126.534.480	369.113.882.000	372.805.021.000	376.533.072.000	380.298.403.000	384.101.388.000
2.	3.		Belanja Tidak Terduga	39.033.115.296	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
2.	4.		Belanja Transfer	302.531.621.000	303.417.798.000	304.501.472.000	305.833.076.000	307.374.322.000	309.221.568.000
2.	4.	1	Belanja Bagi Hasil	27.298.997.000	28.185.174.000	29.268.848.000	30.600.452.000	32.141.698.000	33.988.944.000
2.	4.	2	Belanja Bantuan Keuangan	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000
			Jumlah Belanja	2.247.461.474.000	2.179.408.362.000	2.188.175.517.000	2.199.621.809.000	2.213.365.588.000	2.230.371.992.000
			Surplus / (Defisit)	-293.332.327.000	-213.752.246.000	-208.977.442.000	-204.298.134.000	-199.712.412.000	-195.218.404.000
3.			PEMBIAYAAN DAERAH	293.332.327.000	213.752.246.000	208.977.442.000	204.298.134.000	199.712.412.000	195.218.404.000
3.	1.		Penerimaan Pembiayaan	318.320.327.000	258.740.246.000	253.965.442.000	249.286.134.000	224.700.412.000	220.206.404.000
3.	1.	1	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)</i>	<i>318.320.327.000</i>	<i>258.740.246.000</i>	<i>253.965.442.000</i>	<i>249.286.134.000</i>	<i>224.700.412.000</i>	<i>220.206.404.000</i>
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	318.320.327.000	258.740.246.000	253.965.442.000	249.286.134.000	224.700.412.000	220.206.404.000
3.	2.		Pengeluaran Pembiayaan	24.988.000.000	44.988.000.000	44.988.000.000	44.988.000.000	24.988.000.000	24.988.000.000
3.	2.	1	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	<i>0</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	2.	2	<i>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</i>	<i>24.988.000.000</i>	<i>24.988.000.000</i>	<i>24.988.000.000</i>	<i>24.988.000.000</i>	<i>24.988.000.000</i>	<i>24.988.000.000</i>
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.988.000.000	44.988.000.000	44.988.000.000	44.988.000.000	24.988.000.000	24.988.000.000
			Pembiayaan Netto	293.332.327.000	213.752.246.000	208.977.442.000	204.298.134.000	199.712.412.000	195.218.404.000
3.	3.		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0	0	0

Sumber : BKD Kabupaten Sukoharjo, 2020

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini membahas permasalahan dan isu strategis. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Kondisi yang belum ideal ini dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan periode 2016–2020.

Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sukoharjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional.

4. 1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Sukoharjo dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan urusan serta dielaborasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Perangkat Daerah. Rumusan Permasalahan Pembangunan secara detil disajikan dalam tabel di bawah ini.

Berdasarkan gambaran umum serta permasalahan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 sampai dengan RKPD Tahun 2020, berikut merupakan identifikasi permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Sukoharjo :

4.1.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Masih ada permasalahan dari aspek input, proses, dan output dan outcome pendidikan. Data pendukung sebagai berikut.

- 1) Belum optimalnya capaian SPM bidang pendidikan sehingga outcome partisipasi sekolah masih di bawah 100% dan masih ada yang putus sekolah. Hal ini ditunjukkan dari:
 - a. Partisipasi sekolah : data Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok usia 7-12 tahun sebesar 99,60, dan kelompok 13-15 tahun sebesar 98,86, masih dibawah 100%, termasuk kelompok 16-18 tahun yang setara jenjang SMA menjadi tanggungjawab provinsi, masih 82,60.
 - b. Putus sekolah: SD sebesar 0,02 dan SMP sebesar 0,04
- 2) Partisipasi kelompok 1-6 tahun atau usia PAUD masih rendah.

- 3) Masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang perlu dibangun atau direhab, yaitu sebesar 24% (rusak sedang dan rusak berat);
- 4) Masih banyak pendidik yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 baru mencapai 93,12%

2. Kesehatan

- 1) Masih adanya kasus kematian bayi (7,49), balita (8,88), dan ibu (57,08). Secara implisit kondisi ini mencerminkan masih ada masalah pada:
 - a) perilaku hidup sehat masyarakat yang berdampak pada perilaku konsumsi makanan sehat;
 - b) Kemampuan masyarakat mengakses layanan kesehatan yang tepat. Kemungkinan terkait dengan kemampuan membayar biaya kesehatan atau persolan pemenuhan layanan kesehatan belum tepat sesuai kebutuhan.
- 2) Perlunya peningkatan rasio tenaga kesehatan jika mengacu pada ;
 - a) Dokter gigi 81: 910.024 = 1: 11.234 (kurang)
 - b) Rasio Bidan terhadap penduduk adalah 728 : 910.024 = 1: 1250 (kurang)
 - c) Tenaga gisi 94:910.024 = 1:9.681 (kurang)
- 3) Rasio Puskesmas dibanding jumlah penduduk 1:75.385 masih di bawah standar nasional yang seharusnya 1: 16.000. Namun untuk jumlah Puskesmas Pembantu 1 melampaui/berlebih dibanding standar nasional 1: 1.500. Oleh karena itu permasalahannya adalah perlu kenaikan kelas dari Puskesmas pembantu ke Level Puskesmas.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Secara keseluruhan kondisi permukaan jalan di Kabupaten Sukoharjo tidak maksimal, karena jalan dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat sebesar (33,90%);
- 2) Masih luasnya kawasan yang terdampak banjir dan genangan, yaitu sekitar 42,78 % dari luas daerah genangan di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara drainase yang dibarengi dengan ada dan kurangnya pengawasan serta pengendalian terhadap pengelolaan jaringan drainase. Disamping itu juga disebabkan karena sistem drainase perkotaan belum terintegrasi dan kapasitas/dimensi jaringan drainase kota yang tidak memadai;
- 3) Masih adanya jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak, dimana kondisi rusak sedang hingga rusak berat sebesar 71%;
- 4) Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pada air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Pada tahun 2020 ada 7,76% penduduk yang belum mengakses air minum perpipaan maupun non perpipaan;
- 5) Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;

- (1) Pada tahun 2020 baru dibangun 11.348 KK yang menapat layanan IPAL dari 301.162 KK atau sebesar 4%;
 - (2) Capaian Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat dan Terpusat atau capaian sanitasi pada tahun 2020 sebesar 2,19%;
 - (3) Capaian sanitasi layak tahun 2020 masih 97,91, sehingga masih ada 2,9 % penduduk yang belum memiliki sanitasi layak.
- 6) Belum seluruh Perkotaan mempunyai rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar perijinan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni pada tahun 2020 sebanyak 10.866;
- 2) Masih adanya kawasan permukiman kumuh, pada tahun 2020 masih ada 45,884 ha atau 0,098% dari luasan kabupaten. Hal ini disebabkan oleh ketidakteraturan bangunan, kurangnya drainase lingkungan, pelayanan persampahan yang belum optimal, pembuangan limbah yang tidak terkendali, jalan lingkungan yang tidak memadai dan kurangnya proteksi terhadap bahaya kebakaran;
- 3) Belum optimalnya cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), pada tahun 2020 baru pada tahun 2020 baru sebanyak 16 atau 46 pengembang yang menyerahkan PSU kepada pemerintah kabupaten Sukoharjo.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Belum optimalnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, pada tahun 2020. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) masih 98%;
- 2) Belum optimalnya penanganan korban bencana:
 - a) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota masih 90%
 - b) Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih 95%.

6. Sosial

- 1) Kualitas pengelolaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perlu ditingkatkan;
- 2) Belum tersedianya rumah singgah untuk penampungan sementara penyandang masalah keterlantaran.

4.1.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

- 1) Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi, di tahun 2020 daru 166 orang dari 2.977 pencari kerja;

- 2) Belum optimalnya Rasio Kesempatan Kerja, terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 65,85 ke tahun 2020 sebesar 63,96.
- 3) Belum optimalnya penempatan tenaga kerja, di tahun 2020 ada 2.021 dari 2.977 pencari kerja;
- 4) Belum optimalnya hubungan industrial, pada tahun 2020 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun ada 20 kasus; Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek sebesar 79,%, Keselamatan dan perlindungan sebesar 39,45%.

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- 1) Kontribusi perempuan di sektor ekonomi masih rendah, dibuktikan dari sumbangan pendapatan perempuan 41,02%;
- 2) Belum optimalnya pemenuhan kabupaten layak anak, Kabupaten Sukoharjo baru bisa mendapatkan penghargaan dengan kriteria Madya;
- 3) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibuktikan dengan masih ada KDRT sebesar 0,015 pada tahun 2020, dan ada 31 kasus kekerasan perempuan dan 14 kasus kekerasan anak;
- 4) Perencanaan dan penganggaran belum *responsif gender*.

3. Pangan

- 1) Pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan belum terjaga
- 2) Distribusi pangan kemasyarakatan belum merata akibat adanya pandemic Covid-19.

4. Pertanian

Belum optimalnya pembebasan bidang tanah untuk pembangunan infrastruktur masih ada potensi konflik lahan, meskipun layanan sertifikat sudah 100% di tahun 2020, namun perkembangan pembangunan tetap akan membutuhkan pembebasan tanah yang rawan konflik.

5. Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup;
- 2) Belum optimalnya capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA), yang tercemar dari sedang hingga berat 95,73%;
- 3) Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energi dan transportasi, berdampak pada penurunan IKU dari tahun 2019 sebesar 88,02, menjadi 87,23 pada tahun 2020;
- 4) Belum optimalnya pengurangan sampah dari sumbernya dan Kapasitas TPA perlu ditingkatkan, dibuktikan dengan kapasitas TPA Mojorejo hampir penuh, sudah terpakai 91,58 %;
- 5) Belum optimalnya jumlah limbah yang diolah, hingga tahun 2020 baru ada 18 perusahaan yang telah memiliki izin mengelola limbah B3;

- 6) Belum optimalnya ruang terbuka hijau sampai tahun 2020 RTH baru 14,20 km², dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo 493,23 km².

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Belum terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik diantaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian, dimana sampai tahun 2020 rasio kepemilikan KTP, akte kelahiran, akte perkawinan masih di bawah 100%.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan, salah satu buktinya adalah dari 125 BUMDesa yang memenuhi kriteria maju baru 3 buah.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Belum optimalnya pencapaian pemakaian kontrasepsi modern, dibuktikan dari capaian indikator angka pemakaian kontrasepsi 67,84% dan MKJP 85,23%;
- 2) Belum optimalnya angka *unmet need* KB, masih ada 15,65%;
- 3) Belum optimalnya penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun, dibuktikan dengan angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19 tahun) sebesar 5,02.

9. Perhubungan

- 1) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas LLAJ, baru mencapai 87,500;
- 2) Belum optimalnya rasio konektivitas kabupaten, ditengarai dari Jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung mengalami penurunan, dari 66.907 (2016) menjadi 65.906 (2016).
- 3) Belum optimalnya kinerja lalu lintas, salah satu bukti pendukungnya adalah rasio trayek dengan jumlah penduduk baru 0,000023;
- 4) Belum optimalnya kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan uji berkala dimana rasio uji baru 0,70;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan perparkiran, dengan bukti capaian pendapatan dari pengelolaan parkir masih di bawah potensi parkir yang diperkirakan.

10. Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditandai dengan capaian nilai indeks SPBE Tahun 2020 dengan nilai 3,54 dari indeks maksimal yaitu 5,00.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ditandai dengan nilai indeks keterbukaan informasi publik yang masih dalam kriteria menuju informative agar mencapai informatif.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Belum optimalnya koperasi yang berkualitas, ditandai dengan koperasi baru 81,67%;

- 2) Perlunya penguatan pendampingan kelembagaan koperasi;
- 3) Pertumbuhan usaha menengah dari tahun 2019-2020 rerata sebesar 24,7%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan usaha makro yang tumbuh 5,4% dan usaha mikro tumbuh 5,8 %. Hal ini diduga kemampuan berkembang yang dipengaruhi kemampuan modal dan relasi pemasaran berpengaruh pada perkembangan. Diduga usaha menengah memiliki kapasitas lebih dibanding usaha makro dan mikro. Oleh karena itu, persoalan yang diduga menjadi akar masalah adalah kapasitas modal dan jejaring usaha dari kelompok usaha makro dan mikro perlu lebih difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

12. Penanaman Modal

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dibuktikan data tahun 2020 tercatat penurunan investasi sebesar -51%;
- 2) Pertumbuhan serapan tenaga kerja tahun 2019-2020 naik sebesar 35% (data Tabel 2.101), namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah investor PMDN dan PMA sebesar 147%. Diduga permasalahannya adalah belum optimalnya penambahan peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah untuk mewajibkan penyerapan tenaga kerja di proyek investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan, ditandai capaian indikator persentase organisasi pemuda yang aktif sebesar 46;
- 2) Belum optimalnya data kepemudaan, salah satu bukti permasalahan ini adalah tidak diperolehnya data kewirausahaan pemuda (Tabel 2.103);
- 3) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, dibuktikan dengan capaian indikator cakupan pembinaan olahraga baru 55%, cakupan pelatih tersertifikasi sebesar 55%, dan cakupan pembinaan atlet muda 50%;

14. Statistik

Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan statistik sektoral ditandai dengan capaian persentase ketersediaan data statistik yang baru mencapai 62,96%.

15. Persandian

Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi ditandai dengan belum dilaksanakannya assessment indeks keamanan informasi.

16. Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya event kesenian dan budaya di tahun 2020 hanya 13 even;
- 2) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya, dimana dalam 2016-2020 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tidak ada (0);

- 3) Belum optimalnya pembinaan pelestarian sejarah menuju objek wisata budaya, hanya ada penambahan 5 obyek yang dikelola terpadu dalam kurun 2016-2020.

17. Perpustakaan

- 1) Belum optimalnya rasio pengunjung perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 tahun), selama kurun 2016-2020 rata-rata rasio kunjungan ke perpustakaan sebesar 2,16%;
- 2) Belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat, dibuktikan dengan data pendukung besarnya prosentase kunjungan ke perpustakaan masih sebesar 2,16%.

18. Kearsipan

- 1) Belum optimalnya tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, alat bukti yang sah, dan akuntabilitas kinerja, ditandai dengan data capaian kinerja Cakupan Arsip Yang Berhasil Dikelola sebesar 53,58%;
- 2) Belum optimalnya kinerja pelayanan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK.

4.1.3. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

- 1) Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya, pada tahun 2020 total produksi sebesar 13.874,85 sehingga produksi komersial untuk perairan umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo hanya mampu memenuhi pasar lokal untuk dikonsumsi masyarakat sekitar/lokal saja;

2. Pariwisata

- 1) Belum optimalnya kontribusi sector pariwisata terhadap PAD, pada tahun 2020 sebesar Rp. 94.615.000;
- 2) Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan, pada tahun 2020 sebesar 81.775.

3. Pertanian

- 1) Belum optimalnya produksi pertanian, tahun 2020 produksi tanaman pangan sebesar 369.873 ton, tanaman hortikultura sebesar 860,8 ton, tanaman buah-buahan sebesar 40.425,4 ton, tanaman biofarmaka sebesar 1.627,434 ton, tanaman perkebunan sebesar 3.398,74 ton;
- 2) Rendahnya pengembangan pasca panen, olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung aktifitas usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- 4) Belum optimalnya pengembangan potensi sektor pertanian;
- 5) Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha pertanian (petani, pekebun dan peternak);

- 6) Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sebagai akibat cuaca ekstrem;
- 7) Masih rendahnya kesejahteraan petani.

4. Perdagangan

Belum optimalnya peningkatan volume ekspor, pertumbuhan tahun 2020 sebesar 3,65, dan proporsi sumbangannya pada PDRB 0,01%.

5. Perindustrian

Pelaku industri didominasi industri kecil (83%) disusul industri menengah (15%) dan industri besar (2%) (tabel 2.131) sehingga berdampak pada keluasan daya serap tenaga kerja, dimana daya serap tenaga kerja industri kecil tentunya lebih sedikit dibanding industri besar.

4.1.4. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan

- 1) Belum optimalnya koordinasi pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- 2) Belum sinkronnya implementasi sistem informasi perencanaan dan penganggaran.
- 3) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi target capaian linerja perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah, terutama komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung masih lebih besar belanja tidak langsung, 37,70 banding 62,30;

3. Kepegawaian

- 1) Belum optimalnya pengembangan karier PNS, ditengarai dari data persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 1 % dan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 3%;
- 2) Belum optimalnya keterisian jabatan, ditengarai dari indikator jumlah jabatan pimpinan dibagi pada institusi pemerintah semakin menurun dari 31 (tahun 2017) menjadi 19 (tahun 2020).

4. Pendidikan dan Pelatihan

Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya, ditengarai dari data persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 1 % dan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 3%.

5. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan, ditengarai dari indikator persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan SIDA masih belum ada data;
- 2) Belum optimalnya hasil litbang dan inovasi untuk mendukung daya saing daerah, ditengarai dari indikator persentase kebijakan infilasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA masih belum ada data.

4.1.6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Daerah

- 1) Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, ditengarai dari indikator capaian maturitas SPIP di level 3;
- 2) Belum optimalnya Level Kapabilitas APIP, masih di level 3.

4.1.7. UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan

1. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat;
4. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum.

4.1.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
2. Belum optimalnya pemahaman etnis/suku/agama/ormas dan LSM tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
3. Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial;
4. Belum optimalnya pendidikan politik bagi partai politik dan lembaga pendidikan.

4.1.9. NON URUSAN

1. Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja;
2. Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
3. Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah;
5. Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah;
7. Belum optimalnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi;

8. Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian dan diprioritaskan untuk direncanakan pembangunannya karena berdampak besar, mendasar dan penting, serta berpengaruh kepada keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah dan tujuan pembangunan daerah di masa datang dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, isu strategis diidentifikasi berdasarkan telaah Isu Strategis Lingkungan Global, Isu strategis pembangunan dalam RPJMN, Isu atau Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

4.2.1. Telaah Isu Lingkungan Strategis Global

1. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: a) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; b) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; c) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; d) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; e) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; f) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; g) Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; h) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; i) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; j) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; k) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; l) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; m) Mengambil tindakan cepat untuk

mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; n) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; o) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; p) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta q) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Revolusi Industri 4.0 dan Implikasinya

Digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui distance learning, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fin-tech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia.

Tantangan bagi Kabupaten Sukoharjo adalah: (i) menyiapkan masyarakat adaptasi dengan sistem ekonomi digital, salah satunya adalah pengembangan *e-commerce*; (ii) menyiapkan penyesuaian regulasi nasional terkait pengawasan transaksi *online*; (ii) menyiapkan penyesuaian regulasi terkait potensi pajak transaksi *online*.

Era digital menuntut penyesuaian *digital governance*. Implikasi bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu: (i) menyiapkan infrastruktur digital untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik; (ii) menyiapkan ASN untuk terbiasa dengan layanan digital; (iii) menyiapkan masyarakat kabupaten Sukoharjo untuk melek Teknologi Informasi sehingga mampu mengakses layanan publik era digital; (iv) menyiapkan sistem informasi dan data untuk terbiasa dengan pemanfaatan Big Data untuk perencanaan pembangunan dan ekspansi kualitas pelayanan publik.

Era revolusi industri 4.0 membuat masyarakat global menjadi nyaris tanpa batas. Implikasinya, semua ideologi, kultur, tata nilai, akan mudah bergerak saling mempengaruhi lintas etnis, lintas usia, lintas batas administratif kewilayahan. Tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo adalah: (i) menjaga tata nilai budaya lokal tetap dapat dimajukan dalam konteks global (pemajuan kebudayaan); (ii) menjaga kondusivitas daerah dari ideologi yang berbahaya; (iii) menjaga harmoni sosial supaya tidak mudah terprovokasi karena lalu lintas informasi yang bebas di era digital.

3. Pasar Bebas

Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran kekuatan perekonomian global karena ± 41 persen penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, perekonomian Asia Pasifik memperlihatkan kondisi mulai pulih dan membaik, hal ini akan terus mendorong pertumbuhan kawasan ini dengan ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Tren ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat di dunia. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships (TPP)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, *East Asia Summit (EAS)*, serta *Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF)*.

China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia pada umumnya dan kota Padang khususnya. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Adapun implikasi pasar bebas terhadap pembangunan Kabupaten Sukoharjo yaitu berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor. Barang-barang luar negeri dengan mudah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan harga yang cenderung bersaing. Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah (i) meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri; (ii) meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan (iii) memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada secara optimal guna memperluas pemasaran produk.

4. Isu Pandemi Covid 19

Tahun 2020 terjadi kejadian global yang luar biasa, yaitu Pandemi COVID-19. Penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Kondisi ini dalam rangka menyikapi penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, dimana WHO (World Health Organization) telah

menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Sampai saat ini, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan memberi dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Berbagai sektor mengalami tekanan, seperti sektor kesehatan terkait penanganan wabah. Selama tahun 2020, jumlah penderita terus mengalami kenaikan dan memberikan dampak kepada tenaga medis dalam rangka penanganan kasus tersebut. Selain sektor kesehatan, covid-19 juga berdampak pada sektor pendidikan. Adanya pandemi ini membatasi kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, sehingga pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh melalui daring. Metode ini berdampak pada kebutuhan jaringan internet untuk kelancaran kegiatan pembelajaran. Sektor transportasi dan pariwisata banyak mengalami kerugian yang mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja. Pandemi ini juga memberikan dampak kepada sektor perekonomian. Dampak terhadap sektor perekonomian ini sangat terlihat dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional turun sebesar -2,07% di tahun 2020.

Implikasi dampak pandemi Covid-19 pada skenario perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo pada masa kehidupan normal baru ini antara lain: (i) mitigasi risiko pada perencanaan jangka menengah. Respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian dan meningkatkan resiliensi masyarakat Sukoharjo; (ii) perbaiki pelayanan kesehatan; (iii) revolusi budaya dimana protokol kesehatan bersama Covid-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah, bahkan jangka panjang; (iv) Peningkatan akses terhadap jaringan teknologi informasi untuk pendidikan, ekonomi, layanan publik, dan layanan sosial; (v) Perluasan akses terhadap jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

5. Perubahan Iklim Ekstrem dan Ketahanan Bencana

Bagian penting dalam SDGs ini adalah isu perubahan iklim. Dampak aktivitas manusia di seluruh dunia menyebabkan ancaman perubahan iklim yang membahayakan kehidupan planet bumi. Aktivitas yang dimaksud yaitu: emisi dari permukiman, transportasi, industri telah mengakibatkan pemanasan global. Fenomena ini memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Maka sangat mendesak untuk diupayakan adaptasi dan mitigasi dan untuk menangani pengaruhnya pada pembangunan wilayah dan kota. Dampak perubahan iklim antara lain: (i) ekosistem akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi; (ii) Intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut; (iii) terbenamnya permukiman; (iv) kekurangan ketersediaan air bersih; (v) ancaman ketahanan pangan; (vi) Perubahan pola musim dan hujan; (vii) kerentanan gangguan kesehatan dan malnutrisi.

Tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo yaitu: (i) penyiapan kesiagaan bencana akibat iklim ekstrem seperti banjir, kekeringan, angin ribut, tanah lngsor; (ii) kesiagaan ketahanan pangan untk mengantisipasi risiko bencana kekuaranag pangan karena dampak perubahan iklim; (iii) kebijakan dana kontingensi

kesehatan untuk menjaga perlindungan kesehatan masyarakat jika terjadi gangguan kesehatan massal karena dampak iklim ekstrem.

6. Bonus Demografi

Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Kondisi ini mengakibatkan adanya penurunan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan yang semakin kecil menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang bisa mendorong produktivitas. Kondisi ini mendorong pembukaan lapangan kerja yang lebih luas untuk dapat menampung angkatan kerja yang ada. Di sisi lain, bonus demografi akan memberi dampak negatif ketika kondisi ini tidak mampu dimanfaatkan, salah satunya adalah banyaknya pengangguran usia produktif.

Pada era bonus demografi (2020-2030) persaingan lapangan kerja akan semakin tinggi. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, etos kerja, dan produktivitas tenaga kerja sangat perlu dipersiapkan agar tenaga kerja yang ada dapat terserap dalam lapangan pekerjaan. Permasalahan yang harus dipecahkan adalah penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja, khususnya tenaga kerja yang masuk dalam kategori generasi millennial.

Tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo adalah: (i) perluasan lapangan kerja, (ii) Fasilitasi penyaluran tenaga kerja ke perusahaan dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan penyerapan angkatan kerja, (iii) penguatan UMKM dan IKM yang ada diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja; (iv) penguatan sertifikasi kompetensi kerja secara khusus untuk kelompok usia pemuda.

4.2.2. Isu strategis pembangunan dalam RPJMN

Isu-isu strategis pembangunan dalam RPJMN yang harus dijadikan salah satu acuan pembangunan Kabupaten Sukoharjo 5 tahun ke depan yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - b. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
 - c. Pemenuhan Layanan Dasar
 - d. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
 - e. Pengentasan Kemiskinan
 - f. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
2. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
 - a. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
 - b. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
 - c. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama
 - d. Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan
 - e. Belum Optimalnya Peran Keluarga
 - f. Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
 - a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam
 - b. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
 - c. Transformasi Struktural Berjalan Lambat
 - d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - a. Infrastruktur Pelayanan Dasar, meliputi : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau; Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan; Keselamatan dan Keamanan Transportasi; Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
 - b. Infrastruktur Ekonomi : Konektivitas Jalan; Konektivitas Kereta Api; Konektivitas Laut; Konektivitas Udara; dan Konektivitas Darat.
 - c. Infrastruktur Perkotaan : Transportasi Perkotaan; Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan; Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan; Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan; dan Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.
 - d. Energi dan Ketenagalistrikan : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan; Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan; Transformasi Digital; Penuntasan Infrastruktur TIK; Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
5. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan. Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim : a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik : a) Konsolidasi Demokrasi; b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; c) Penegakan Hukum Nasional; d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

4.2.3. Isu atau Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*). Penduduk Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan September 2018 sebanyak 3,87 juta jiwa atau 11,19 persen, membaik dibandingkan bulan September 2017 (12,23 persen). Namun demikian

angkaini masih di atas capaian nasional yaitu sebesar 9,66 persen. Sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah masih didominasi di wilayah pedesaan sebanyak 2,16 juta jiwa (12,80 persen), sedangkan penduduk miskin perkotaan sebanyak 1,71 juta jiwa (9,67 persen). Masih tingginya tingkat kemiskinan diperdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh petani, petani gurem dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil).

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2017, IPM Jawa Tengah membaik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,52 dan masuk dalam kategori tinggi. Namun demikian angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,81. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan, yang angkanya masih dibawah rata-rata provinsi lain di Pulau Jawa dan nasional. Harapan lama sekolah Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 12,85 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,27 tahun (setara SMP kelas I atau kelas VII), dan pengeluaran perkapita sebesar 10.377 ribu rupiah, yang angka tersebut dibawah provinsi lain di Pulau Jawa dan nasional.

3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 mencapai angka 5,32 persen, membaik dari tahun 2017 (5,26 persen). Tiga sektor unggulan ekonomi Jawa Tengah (industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan jasa) juga menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun lajunya tidak cukup tinggi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus diantisipasi karena akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan. Beberapa kondisi yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan ADAL : a. Sektor Industri Pengolahan; b. Sektor Perdagangan dan Jasa; c. Sektor Pertanian; dan d. Investasi.

4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung

Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*

Goals/SDGs) dimana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

Isu berkaitan dengan sumberdaya air di Jawa Tengah adalah penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa Tengah, yang disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri, dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Kedaulatan pangan dan energi

Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Namun tidak demikian dengan produksi pertanian lainnya seperti kedelai dan jagung, yang masih harus ditingkatkan kedepan. Disisi lain, arus bahan pangan impor semakin terbuka dan tidak dibarengi dengan kebijakan mekanisme pengamanan yang kuat dari pemerintah. Menyempitnya lahan pertanian (LP2B) karena desakan kebutuhan lahan untuk industri dan permukiman, serta makin menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian akan berpotensi menurunkan persediaan dan produksi pangan.

Isu lain adalah terkait sistem distribusi pangan, dimana pemerintah harus mampu memfasilitasi kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat, yang terbentuk dalam satu sistem logistik daerah. Hal tersebut juga harus didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal.

6. Kesenjangan wilayah

Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belumlah merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,62 di tahun 2016. Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kotalain di Jawa Tengah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan,

dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai (termasuk revitalisasi kereta api antar kota), jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting.

7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasiserta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat.

Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi.

4.2.4. Isu RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Isu strategis terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan yang diamanatkan RTRW Kabupaten Sukoharjo yaitu : Peralihan peruntukan Lahan dan ruang; dan Permasalahan infrastruktur kota, baik dalam kota maupun lintas daerah.

1. Permasalahan infrastruktur lintas daerah yaitu:

- a. Prasarana transportasi, meliputi: (i) Sistem dan fungsi prasarana jalan lintas daerah; (ii) Sistem koneksi terminal penumpang antar daerah; (iii) Sistem angkutan umum umum; (iv) Sistem terminal dan angkutan barang;
- b. Prasarana Energi, meliputi: (i) Sistem koneksi jaringan minyak dan gas bumi; (ii) Sistem jaringan listrik;
- c. Prasarana telekomunikasi: Pelayanan jaringan telekomunikasi seluler
- d. Prasarana Sumber Daya Air, meliputi: (i) Penyediaan sumber air baku; (ii) Pemanfaatan Sungai
- e. Prasarana Persampahan: TPA Regional
- f. Air Minum: Sumber air air Minum; Pengembangan Jaringan Air Minum Limbah: Limbah B3
- g. Drainase: sistem drainase wilayah

2. Permasalahan infrastruktur dalam daerah yaitu:

- a. Prasarana transportasi: (i) Sistem dan fungsi jalan dalam kota; (ii) Sistem koneksi antar pusat pelayanan; (iii) Sistem angkutan umum umum dalam kota;
- b. Prasarana Energi: (i) Pengembangan gas perkotaan; (ii) Pengembangan sistem jaringan listrik yang terpadu dan estetis

- c. Prasarana telekomunikasi: Pengaturan lokasi dan bentuk Menara telekomunikasi
- d. Prasarana Sumber Daya Air: (i) Pembangunan fasilitas resapan air; (ii) Kualitas sumber air tanah
- e. Prasarana Persampahan: (i) Pengurangan sampah dari sumbernya; (ii) Pengelolaan persampahan kota
- f. Air Minum: (i) Kualitas air Minum; (ii) Pengembangan Jaringan Air Minum di wilayah kota
- g. Limbah: Pengelolaan Limbah B3 dari sumbernya
- h. Drainase: Sistem drainase

RTRW Kabupaten/Kota sekitar, SUBOSUKAWONOSRATEN agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka panjang sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi/kabupaten/kota.

1. RTRW Kota Surakarta 2021-2031

Kota Surakarta dalam RTRW Nasional merupakan Pusat Kegiatan Nasional (II/C/1), yang berarti merupakan pengembangan pada Tahap II dengan focus pengembangan/peningkatan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Untuk mendukung fungsi ini, Surakarta direncanakan terhubung dengan dua ruas jalan bebas hambatan, yaitu ruas Semarang-Solo (Notasi II/5 yang berarti pemantapan ruas jalan bebas hambatan) dan Yogyakarta-Solo (Notasi II/6 yang berarti pembangunan ruas jalan bebas hambatan).

Berdasarkan sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta merupakan PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Dengan ditunjuknya Kota Surakarta sebagai PKN, maka beberapa fungsi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- b. Sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
Sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

2. RTRW Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031

Pada Rencana Sistem Prasarana Transportasi Darat, Kabupaten Boyolali dilalui oleh pengembangan jalan bebas hambatan yang meliputi ruas Semarang-Solo, ruas Solo-Mantingan, dan ruas Yogyakarta-Solo. Selain itu, Kabupaten Boyolali memiliki jaringan trayek angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi yang menghubungkan perkotaan Boyolali ke kota-kota lain termasuk Kota Surakarta. Rencana sistem jaringan perkeretaapian Kabupaten Boyolali meliputi pengembangan jalur kereta api Solo-Semarang dan jalur kereta api komuter yang akan melayani trayek Kec. Banyudono-Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali-Kartosuro-Purwosari-Kota Solo-Palur.

3. RTRW Kabupaten Karanganyar tahun 2011-2031

Pengembangan jaringan jalan yang dapat mendukung kawasan perkotaan Kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan bagian Barat Kabupaten Karanganyar:

- a. Mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung jaringan jalan Tol Solo-Mantingan dan ruas jalan tol Solo-Semarang;
- b. Pengembangan sistem jaringan jalan arteri meliputi: ruas jalan batas Kota Surakarta-Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu dan ruas jalan batas Kota Surakarta-Palur, serta jalan kolektor meliputi: ruas jalan batas Kota Surakarta-batas Kecamatan Kalijambe Sragen dan jalan Lingkar Utara Surakarta
- c. Rencana pengembangan angkutan orang Surakarta-Klodran (Colomadu)-Tuban (Gondangrejo)
- d. Pengembangan jalan rel ganda jalur Solo-Madiun yang melewati Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat.

4.2.5. Telaah RPJP Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025

RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dalam Dokumen RPJPD tersebut, visi yang akan diwujudkan adalah “Sukoharjo Yang Maju, Adil, dan Makmur”. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius;
2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan dari masing-masing misi pada tahap rencana pembangunan lima tahunan keempat, diarahkan pada:

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.
2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4.2.6. Hasil Telaahan KLHS Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan telaah terhadap permasalahan dari capaian TPB yang membutuhkan upaya tambahan serta pendataan indikator yang belum terdapat data, maka dihasilkan 8 isu strategis. Selain itu, dalam kegiatan uji publik pertama untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan untuk isu strategis juga telah ditambahkan terutama dalam identifikasi permasalahan lingkungan hidup. Secara garis besar isu yang muncul dalam kegiatan uji publik adalah status lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob.

Berikut adalah isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Pekalongan berdasarkan kelompok pilar.

1. Pilar Sosial : (1) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan; (3) Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
2. Pilar Ekonomi : (4) Pengembangan ekonomi dengan mendorong sektor industri dan pariwisata dan berkontribusi terhadap PDRB;
3. Pilar Lingkungan : (5) Peningkatan kualitas sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan perbaikan sanitasi; (6) Peningkatan kuantitas dan kualitas tutupan lahan untuk pengaturan iklim, kawasan resapan air dan perlindungan biodiversity; (7) Penurunan risiko bencana serta peningkatan adaptasi perubahan iklim;
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola : (8) Tata kelola pemerintah sebagai bagian pelayanan masyarakat; (9) Kondusivitas wilayah.

Sasaran strategis disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihasilkan dari perumusan capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo. Isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis merupakan rekomendasi KLHS dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2024. Selain itu sasaran strategis juga menjadi dasar dalam penyusunan program.

Tabel 4.1.
Sasaran Strategis KLHS Kabupaten Sukoharjo

No	Pilar/ Tujuan TPB/Indikator TPB	Isu Strategis TPB	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PILAR SOSIAL		
1	Pilar Sosial TPB 1	Resiko dan Mitigasi bencana	<p>Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang</p> <p>Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah</p> <p>Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial</p> <p>Meningkatnya pendampingan psikososial korban bencana sosial</p> <p>Terwujudnya kegiatan pendidikan layanan khusus kesiapsiagaan bencana</p> <p>Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)</p> <p>Menurunnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana</p> <p>Terwujudnya penyusunan dokumen strategi pengurangan resiko bencana daerah secara berkala</p>
2	Pilar Sosial TPB 2	Kerawanan pangan	<p>Menurunnya nilai Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).</p> <p>Menurunnya nilai prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.</p> <p>Menurunnya nilai prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat</p> <p>Menurunnya presentase stunting pada anak di bawah lima tahun/balita</p> <p>Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta</p> <p>Menurunnya nilai prevalensi malnutrisi pada balita.</p> <p>Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil</p> <p>Meningkatnya persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif</p> <p>Penanggulangan kekurangan gizi pada anak balita</p> <p>Meningkatnya capaian target skor PPH</p> <p>Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian</p>
3	Pilar Sosial TPB 1	Kesenjangan sosial	<p>Menurunnya jumlah proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional</p> <p>Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</p> <p>Meningkatnya peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan</p> <p>Terwujudnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</p> <p>Meningkatnya presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas</p> <p>Meningkatnya persentase rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan</p> <p>Meningkatnya proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan</p>
4	Pilar Sosial TPB 3	Kualitas dan Pelayanan Kesehatan	Menurunnya Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.

No	Pilar/ Tujuan TPB/Indikator TPB	Isu Strategis TPB	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Menurunnya kejadian malaria per 1000 orang.</p> <p>Menurunnya jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).</p> <p>Menurunnya jumlah daerah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).*</p> <p>Menurunnya persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.</p> <p>Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi.</p> <p>Tersedianya sistem informasi pendataan terkait angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.</p> <p>Menurunnya Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.</p> <p>Meningkatnya jumlah kabupaten/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.</p> <p>Tersedianya sistem informasi pendataan terkait konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.</p> <p>Menurunnya konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.</p> <p>Meningkatnya proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.</p> <p>Meningkatnya Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.</p> <p>Menurunnya angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)</p> <p>Menurunnya angka <i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan</p> <p>Meningkatnya jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.</p> <p>Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <p>Menurunnya proporsi kematian akibat keracunan.</p> <p>Menurunnya persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.</p> <p>Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.</p> <p>Meningkatnya kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.</p>
5	Pilar Sosial TPB 5	Kualitas dan pelayanan kesehatan	<p>Tersedianya sistem informasi pendataan proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.</p> <p>Menurunnya proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi</p> <p>Menurunnya <i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).</p> <p>Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.</p>

No	Pilar/ Tujuan TPB/Indikator TPB	Isu Strategis TPB	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Pilar Sosial TPB 4	Kualitas dan pelayanan pendidikan	Meningkatnya proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika
			Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
			Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
			Meningkatnya Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
			Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
			Tersedianya sistem informasi pendataan terkait proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi.
			Meningkatnya proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi Meningkatnya Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
			Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
			Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
			Meningkatnya proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).
Meningkatnya persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.			
7	Pilar Sosial TPB 5	Kesetaraan gender	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
			Menurunnya proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
			Menurunnya proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
			Menurunnya proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
			Tersedianya sistem informasi pendataan median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
Menurunnya Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).			

No	Pilar/ Tujuan TPB/Indikator TPB	Isu Strategis TPB	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pilar Sosial TPB 1	Pemenuhan hak yang sama atas pelayanan dasar	<p>Meningkatnya persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</p> <p>Meningkatnya persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.</p> <p>Meningkatnya prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin</p> <p>Meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</p> <p>Meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</p> <p>Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.</p> <p>Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat</p> <p>Meningkatnya persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.</p> <p>Meningkatnya persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.</p> <p>Meningkatnya pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.</p>
II	PILAR EKONOMI		
1	Pilar Ekonomi TPB 8	Kesenjangan sosial	<p>Menurunnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur</p> <p>Menurunnya tingkat setengah pengangguran</p> <p>Meningkatnya usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)</p>
2	Pilar Ekonomi TPB 10	Kesenjangan sosial	<p>Menurunnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur</p> <p>Meningkatnya daerah tertinggal yang terentaskan</p> <p>Menurunnya jumlah desa tertinggal</p> <p>Meningkatnya jumlah desa mandiri</p> <p>Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal</p> <p>Menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas</p> <p>Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan</p>
3	Pilar Ekonomi TPB 8	Daya saing daerah	<p>Meningkatnya persentase tenaga kerja formal.</p> <p>Meningkatnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.</p> <p>Tersedianya sistem informasi pendataan persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.</p> <p>Meningkatnya persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.</p> <p>Meningkatnya upah rata-rata per jam pekerja.</p>

No	Pilar/ Tujuan TPB/Indikator TPB	Isu Strategis TPB	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Tersedianya sistem informasi proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB</p> <p>Meningkatnya proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.</p> <p>Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara</p> <p>Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara.</p> <p>Meningkatnya jumlah devisa sektor pariwisata.</p> <p>Tersedianya sistem informasi pendataan terkait jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja</p> <p>Meningkatnya jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.</p> <p>Tersedianya sistem informasi pendataan terkait jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa</p> <p>Meningkatnya jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa</p> <p>Tersedianya sistem informasi pendataan terkait rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).</p> <p>Meningkatnya jangkauan rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).</p> <p>Tersedianya sistem informasi pendataan terkait proporsi kredit UMKM terhadap total kredit</p> <p>Meningkatnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit</p>
4	Pilar Ekonomi TPB 9	Daya saing daerah	<p>Meningkatnya proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.</p> <p>Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur</p> <p>Meningkatnya proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.</p> <p>Meningkatnya proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.</p> <p>Tersedianya sistem informasi pendataan terkait proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.</p> <p>Meningkatnya proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.</p> <p>Meningkatnya proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.</p>
5	Pilar Ekonomi TPB 17	Daya saing daerah	<p>Meningkatnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB.</p> <p>Meningkatnya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.</p> <p>Meningkatnya jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).</p> <p>Meningkatnya jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).</p>
6	Pilar Ekonomi TPB 10	Keadilan yang merata	<p>Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil.</p> <p>Meningkatnya jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.</p>

No	Pilar/ Tujuan TPB/Indikator TPB	Isu Strategis TPB	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
			Tersedianya sistem informasi pendataan kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata
			Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
7	Pilar Ekonomi TPB 17	Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah	Meningkatnya tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan. Meningkatnya proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>
			Meningkatnya proporsi individu yang menggunakan internet.
8	Pilar Ekonomi TPB 9	Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah	Meningkatnya panjang jalur kereta api
			Meningkatnya proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .
			Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam. Meningkatnya proporsi individu yang menggunakan Internet.
9	Pilar Ekonomi TPB 8	Pemulihan ekonomi akibat Covid-19	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB per kapita
			Meningkatnya PDB per kapita
			Meningkatnya laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
10	Pilar Ekonomi TPB 17	Akses Ketersediaan Data	Meningkatnya persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
			Meningkatnya jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> . Meningkatnya persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).
III	PILAR LINGKUNGAN		
1	Pilar Lingkungan TPB 6	Infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya penduduk yang memiliki akses air minum layak
			Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri.
			Meningkatnya proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
			Meningkatnya proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
			Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
			Mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
			Mempertahankan capaian indikator jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
			Meningkatnya jumlah lokasi yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
			Meningkatnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
			Meningkatnya jumlah sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

No	Pilar/ Tujuan TPB/Indikator TPB	Isu Strategis TPB	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Meningkatnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja</p> <p>Meningkatnya kualitas air danau</p> <p>Meningkatnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku.</p> <p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKA)</p> <p>Tersedianya sistem informasi pendataan insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri</p> <p>Terwujudnya penerapan insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri</p> <p>Meningkatnya ketersediaan air secara berkelanjutan</p> <p>Meningkatnya jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</p> <p>Meningkatnya jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.</p> <p>Meningkatnya kegiatan penataan kelembagaan sumberdaya air.</p>
2	Pilar Lingkungan TPB 11	Infrastruktur pelayanan dasar	<p>Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau</p> <p>Meningkatnya persentase sampah perkotaan yang tertangani</p> <p>Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup (IKU)</p>
3	Pilar Lingkungan TPB 12	Infrastruktur pelayanan dasar	<p>Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)</p> <p>Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang</p> <p>Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup (IKU)</p>
4	Pilar Lingkungan TPB 11	Resiko dan Mitigasi bencana	<p>Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana</p> <p>Menurunnya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)</p> <p>Terwujudnya peningkatan jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan</p> <p>Terlaksananya pendataan jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana</p> <p>Tersusunnya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah secara berkala.</p>
5	Pilar Lingkungan TPB 13	Resiko dan Mitigasi bencana	<p>Tersusunnya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah secara berkala.</p> <p>Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana</p>
6	Pilar Lingkungan TPB 11	Indeks tutupan lahan	Terwujudnya kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
7	Pilar Lingkungan TPB 15	Indeks tutupan lahan	<p>Meningkatnya proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.</p> <p>Tercapainya peningkatan keberadaan tutupan hutan</p> <p>Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup (IKTL)</p> <p>Meningkatnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi</p> <p>Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup (IKTL)</p>
8	Pilar Lingkungan TPB 6	Kualitas air	Meningkatnya kualitas air danau

No	Pilar/ Tujuan TPB/Indikator TPB	Isu Strategis TPB	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
			Meningkatnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKA)
9	Pilar Lingkungan TPB 12	Daya saing daerah	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Tersedianya sistem informasi pendataan jumlah produk ramah lingkungan yang teregister Meningkatnya jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. Meningkatnya jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
10	Pilar Lingkungan TPB 11	Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah	Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
11	Pilar Lingkungan TPB 15	Keanekaragaman hayati	Terlaksananya penyusunan rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati
12	Pilar Hukum dan Tata Kelola TPB 16	Keadilan yang merata	Menurunnya jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Menurunnya proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Menurunnya proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Menurunnya proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. Meningkatnya jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.
IV	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA		
1	Pilar Hukum dan Tata Kelola TPB 16	Administrasi kependudukan	Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. Tersedianya sistem informasi pendataan persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah Meningkatnya persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. Meningkatnya persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Meningkatnya ketersediaan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)
2	Pilar Hukum dan Tata Kelola TPB 16	Akuntabilitas Kelembagaan	Meningkatnya proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). Meningkatnya proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.

4.2.7. Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan gambaran umum Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020, evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2016-2020, RPJMN 2020-2024, serta perkembangan kondisi nasional dan global, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo lima tahun mendatang. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas

Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas bermakna bagaimana kabupaten Sukoharjo menggunakan daya saing kompetitif dan daya saing komparatifnya untuk mengatasi tantangan dan hambatan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu bertumbuh positif dan merata, sehingga kesenjangan serta ketimpangan daerah dapat dikendalikan. Isu bidang ekonomi yang dihadapi kabupaten Sukoharjo yaitu;

a. Kemandirian Desa Berkelanjutan.

Sektor pertanian merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo. Namun demikian seiring perkembangan kota baru, sektor pertanian menghadapi tantangan serius untuk keberlanjutannya, antara lain:

- 1) Daya dukung lahan pertanian produktif yang berkurang karena alih fungsi lahan
- 2) Risiko perubahan iklim (*Cimate change*) yang mengancam pertanian, seperti kekerngan, hujan dan angin ribut yang merusak tanaman, dan bencana pertanian lainnya
- 3) Keberlanjutan mata pencaharaan petani;
Kesejahteraan petani berpengaruh pada keberlanjutan profesi petani. Perlu kebijakan khusus pemerintah untuk membuat daya tarik profesi petani bagi generasi muda
- 4) Keberlanjutan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan

Kabupatn Sukoharjo sebagai daerah pertanian, harus meningkatkan produksi pertanian, disamping peternakan dna perikanan. Keberlanjutan produksi pertanian berpengaruh pada mata rantai pasokan pangan regional dan nasional. Penyediaan bahan pangan yang aman dalam rangka mendukung daya saing SDM juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan 5 tahun ke depan.

b. Daya Saing UMKM dan Koperasi di Era Ekonomi digital

Ekonomi konvensional akan tergantikan oleh ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan. Era teknologi informasi telah memasuki segala aspek kegiatan ekonomi di dunia global. Pengguna internet penduduk Indonesia mencapai 51 persen dari keseluruhan penduduk dan lebih 100 juta penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial. Potensi dan sekaligus ancaman yang luar biasa bagi

perkembangan ekonomi konvensional. Tantangan isu strategis daya saing UMKM di era ekonomi digital antara lain:

- 1) Fasilitasi UMKM dan pelaku ekonomi konvensional supaya SDM siap bertransformasi menuju ekonomi digital;
- 2) Peningkatan akses pembiayaan UMKM ,
- 3) Peningkatan kualitas produksi dan daya saing ekspor,
- 4) Peningkatan kapasitas koperasi memiliki jaringan sosial dengan asosiasi pengusaha untuk perluasan pemasaran nasional dan internasional

c. Pengembangan Kapasitas Wirausaha muda

Undang-undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menyebut Kelompok usia 16-30 tahun adalah kelompok Pemuda. Isu strategis ke depan adalah bagaimana pemerintah kabupaten Sukoharjo menjadikan kelompok ini sebagai target pengembangan kewirausahaan berbasis hasil pertanian. Kelompok pemuda ini juga menjadi target kelompok yang perlu dibangun visi pertanian modern, karena kabupaten Sukoharjo sebagai daerah penghasil pertanian.

d. Peningkatan daya tarik Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Investasi pertanian modern dan industri pengolahan hasil produk pertanian modern perlu menjadi fokus investasi, karena Kabupaten Sukoharjo memiliki keunggulan daerah sektor pertanian.

2. Disparitas Wilayah

Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah, yang ditandai oleh: (a) Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan (b) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.

Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, yang ditandai dengan: (a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000; dan (b) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;

Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni baru mencapai 95,67persen, air minum layak 92,24 persen, sanitasi (air limbah) layak 97,91 persen; (b) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70 persen APBD Kabupaten dan >50 persen APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal; (c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis, (d) belum optimalnya Kerjasama

dan Inovasi Daerah yang belum berkembang; dan (e) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, (f) Belum optimalnya sinergi perencanaan Pusat-daerah.

3. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

a. Pemenuhan Layanan Dasar

Isu peningkatan akses serta mutu pendidikan. Dari sisi akses, prioritas utama adalah terkait dengan pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini. Seperti yang termuat dalam Bab II dokumen ini, tingkat partisipasi dalam PAUD masih cukup rendah. Permasalahan kedua adalah terkait dengan mutu. Mutu disini dilihat dari aspek sarana prasarana, dan juga SDM pendidik yang ada. Penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang baik dan berkualitas, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar serta kompetensi masih harus ditingkatkan.

Variabel kesehatan dipengaruhi oleh komponen medis dan non-medis, yaitu lingkungan sosial ekonomi dan fisik. Oleh karena itu, intervensi penyelesaian masalah kesehatan juga memerlukan intervensi dari sektor di luar kesehatan, misalnya kebijakan sarana prasarana lingkungan, jaminan kesejahteraan sosial, komunitas siaga, dan sebagainya. Dengan demikian, pemberdayaan komunitas untuk membentuk pola hidup bersih dan sehat perlu dibangun sebagai salah satu alternatif menjawab masalah kesehatan di masa mendatang. Tantangan ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah tentang pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.

b. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Isu strategis bidang kependudukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Hak identitas hukum kependudukan menjadi hak semua penduduk. Tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo adalah bagaimana melayani administrasi bagi semua warga dengan tepat dan cepat. Terkait era dengan pengendalian penduduk adalah pengembangan kualitas penduduk sejak dari fondasi keluarga. Ketahanan keluarga serta pengendalian perkembangan penduduk sangat strategis untuk dikelola supaya daya dukung ruang dan lingkungan memadai untuk lingkungan layak huni. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan beban kesejahteraan jika tidak diikuti kemampuan ekonomi yang baik. Namun jika produktivitas ekonomi penduduk, dan ketahanan keluarga baik, maka dapat menjadi modal pembangunan yang kuat.

c. Kesetaraan gender, perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak.

Salah satu tujuan dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut *United Nations* mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Dalam membangun sumber daya manusia, menempatkan kesetaraan gender menjadi prioritas untuk melindungi hak perempuan dan anak agar terhindar dari diskriminasi dan kekerasan. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai arus utama dalam setiap langkah pembangunan, maka akan mendukung upaya meningkatkan ketahanan keluarga.

d. Penguatan Keberdayaan Pemuda

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya.

Dalam pembangunan kepemudaan beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menghindarkan pengaruh buruk kemajuan zaman, teknologi dan informasi terhadap pemuda itu sendiri. Pemuda yang berkualitas akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang berkualitas.

4. Ketenagakerjaan

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja menjadi salah satu tugas yang harus dikedepankan. Tantangan globalisasi revolusi industri 4.0 adalah penyesuaian kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan lapangan

Jumlah pencari kerja terdaftar dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Sampai dengan tahun 2020, pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2.977 orang. Di tahun 2020 pencari kerja terbanyak di lulusan SLTA/SMK sebanyak 2006 orang. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode tahun 2016-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 63,98 %, rasionya menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 65,85%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2016-2020 cenderung menurun, dan mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 66,08 % menjadi 68,74% pada tahun 2020. Penurunan Partisipasi Angkatan Kerja tahun

2016-2018 dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan berubahnya status penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Perkembangan TPT Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 2,78 pada tahun 2016 sampai dengan 2,27 pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan pada angka 6,93. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena corona virus disease di akhir 2020 sehingga banyak terjadi PHK di sektor industri mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Meskipun terjadi kenaikan, TPT Kabupaten Sukoharjo Relatif berada di bawah TPT Nasional.

5. Kemiskinan

Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor yang menjadi andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Berdasarkan data BPS Tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 7,68 persen, terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 7,14 persen, tahun 2018 sebesar 7,41 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tersebut merupakan salah satu adanya dampak corona virus disease 2019 yang terjadi di Indonesia.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini yang perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

6. Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Daya saing sumber daya manusia yang berbasis pada nilai-nilai budaya menjadi fokus perhatian. Tantangan strategis adalah bagaimana memajukan eksistensi budaya lokal yang termanifestasi dalam pola kebiasaan hidup sehari-hari, pengembangan seni dan industri kreatif berbasis budaya. Penguatan budaya produktif dan kerja cerdas di masyarakat. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya. Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi salah satu upaya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal dalam perkembangan kabupaten Sukoharjo masa kini.

7. Penguatan Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

a. Kualitas infrastruktur Konektivitas Wilayah

Infrastruktur konektivitas wilayah mencakup jalan raya, perhubungan, dan sarana prasarana komunikasi informasi. Disparitas atau ketimpangan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia serta infrastruktur tiap daerah. Beberapa penyebab ketimpangan wilayah antara lain, pertama, kondisi wilayah yang lebih menguntungkan/kurang menguntungkan secara ekonomi. Kedua, perbedaan kualitas kemampuan penduduk. Semakin tinggi kualitas kelompok masyarakat tertentu semakin tinggi potensi pendapatan dan penguasaan masyarakat, sehingga pertumbuhan aktivitas ekonomi relatif tinggi. Sebaliknya, penambahan penduduk yang tinggi dan kurang berkualitas akan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Ketiga, perbedaan kecukupan dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang kurang baik akan mengganggu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Keempat, perbedaan investasi dan alokasi dana pembangunan antar wilayah akan berpengaruh pada ragam fasilitas dan layanan publik, sehingga menambah ketimpangan wilayah. Ketimpangan infrastruktur dampak berdampak pada hambatan mobilitas sosial, sehingga menambah ketimpangan wilayah.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai enabler maupun katalisator dalam upaya perbaikan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui komponen smart people (masyarakat cerdas) dan aparatur yang cerdas, dan smart government (pemerintahan yang cerdas). Untuk itu perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika serta sumber daya manusia (SDM) aparatur. Pada aspek manajerial perlu perbaikan manajemen SDM aparatur melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jadi tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo yaitu bagaimana Memperkuat Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan Berwawasan Lingkungan merata di seluruh wilayah sehingga tidak memperkecil kesenjangan antar wilayah;

b. Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan Sehat

Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman berdampak pada keberlanjutan kesejahteraan penduduk kabupaten.

Tantangan yang perlu diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai, antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan serta sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan. Permasalahan lain terkait dengan pemenuhan sarana perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan sarana pemakaman. Kepadatan penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan daya tampung pemakaman umum.

8. Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim.

Pertumbuhan wilayah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Tantangan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang perlu diperhatikan adalah terkait kebersihan air, udara, tanah dari polusi.

Permasalahan strategis terkait dengan pencemaran dan lingkungan yaitu penambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan limbah cair domestik yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, adanya peningkatan sarana dan prasarana perekonomian seperti industri dan UMKM/IKM, rumah sakit, sarana pendidikan, mall, hotel dan restoran, dan lainnya menyebabkan peningkatan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air tanah.

Pencemaran udara dipengaruhi oleh peningkatan jumlah rumah tangga yang menggunakan alat elektronik kontributor kerusakan ozon dan jumlah kendaraan bermotor. Sumber pencemaran lingkungan lainnya adalah sampah. Persampahan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung/wisatawan yang berkativitas sosial/ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus menerus tanpa pengurangan yang signifikan.

Lingkungan yang tidak dijaga juga berpotensi tidak tangguh menghadapi risiko bencana. Kesejahteraan masyarakat akan terganggu dengan kehadiran bencana. Kehadiran bencana tidak selalu dapat diduga. Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi risiko bencana menjadi keniscayaan. Oleh karena itu tantangan strategisnya adalah penguatan jejaring keswadayaan masyarakat untuk siaga bencana.

Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, sosial, dan budaya jangan sampai membahayakan keberlanjutan lingkungan. Tantangannya adalah membangun lingkungan sehat dan tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana.

9. Kondusivitas Daerah dan pelayanan publik

a. Kondusivitas Daerah

Kesadaran masyarakat yang tinggi harus ditanamkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan politik yang demokrasi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberi ruang partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Penyusunan regulasi yang memberi payung bagi keterlibatan masyarakat dalam mekanisme demokrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan merupakan tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Perlindungan HAM dan hak-hak dasar masyarakat merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya membangun sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan bagi semua kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan penataan hukum, pemantapan pelaksanaan hukum dan budaya hukum yang pada akhirnya tertuju pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tantangan pemerintah adalah meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan disiplin aparatur pemerintah melalui penerapan peraturan dan perundangan-undangan yang menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran dengan menyiapkan peraturan daerah dan perangkat hukum daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada perwujudan penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan aparatur hukum yang profesional.

Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah menjalin koordinasi lintas sektor terkait yaitu kesbanglinmas, kantor polisi, dan pengaduan masyarakat penyebab gangguan dan ketertiban sebagai upaya mengantisipasi adanya gangguan ketertiban; dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk melembagakan rasa peduli keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir: (i) berbasis data evaluasi masa lalu; (ii) melakukan proyeksi dan target kinerja; (iii) kolaboratif dan inovatif lintas sektor dan lintas stakeholder. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang berbasis sistem merit, mampu menciptakan pelayanan publik yang agile (lincah).

Perkembangan teknologi informasi membawa konsekuensi pada kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan tata administrasi perkantoran maupun pelayanan publik. Perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya website oleh perangkat daerah, khususnya terkait dengan updating dan penyediaan data terkait kewenangan pemerintah kabupaten. Dengan kata lain diperlukan akselerasi pengembangan smart governance dalam

rangka peningkatan kinerja pelayanan publik dan administrasi perkantoran dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel memerlukan analisis pembangunan daerah, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi berbasis data yang akurat dan terbaru, serta menghasilkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang baik.

Kualitas pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal daerah sebagai input. Permasalahan Keuangan yang harus diantisipasi dalam jangka panjang yaitu kemampuan fiskal yang masih rendah, yang diindikasikan oleh: (i) rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih rendah; (ii) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum tinggi; (iii) Masih tingginya ketergantungan daerah dengan pemerintah. Manajemen keuangan daerah juga menghadapi persoalan yang dapat berdampak jangka panjang, yaitu: (i) Permasalahan akuntabilitas, bahwa alokasi keuangan belum konsisten dengan dokumen perencanaan; (ii) Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah; (iii) Belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk peningkatan PAD.

Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas-akademisi-media (Pentahelix) mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Isu penting untuk pemasaran (marketing) potensi daerah adalah mendapat investor yang dapat membantu pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan membesarkan pelaku ekonomi lokal di era ekonomi digital yang ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur terutama daerah, diperlukan kontribusi pembangunan yang dapat diperoleh dari swasta atau yang disebut Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tantangan pemerintah adalah bagaimana menjaga kepuasan masyarakat sebagai dasar peningkatan kinerja pelayanan. Tantangan berikutnya adalah menggunakan secara efektif unit aduan yang mengelola dan menindaklanjuti setiap aduan yang diberikan oleh penerima layanan yang dalam hal ini adalah responden survey kepuasan masyarakat. peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan kolaborasi pemerintah dengan pilat pentahelix, yaitu: dunia usaha, forum komunitas, akademisi, media.

Tabel 4.2.
Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo dengan Isu Internasional, Isu/Kebijakan Nasional, Isu/Kebijakan Provinsi Jawa Tengah, dan Isu RPJPD Kabupaten Sukoharjo, serta Isu Strategis KLHS

Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo	Tantangan	SDGs	RPJMN Tahun 2018-2024	RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sukoharjo	KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	a. Kemandirian Desa Berkelanjutan. b. Daya Saing UMKM dan Koperasi di Era Ekonomi digital c. Pengembangan Kapasitas Wirausaha muda d. Peningkatan daya tarik Investasi	a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua b. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas : a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam; b. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi; c. Transformasi Struktural Berjalan Lambat; d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	a. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha b. Kedaulatan pangan dan energi	Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Kerawanan pangan Daya saing daerah Keadilan yang merata Pemulihan ekonomi akibat Covid-19
Disparitas Wilayah	Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah	c. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan. Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah.	Kesenjangan wilayah	Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.	Kesenjangan sosial
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Pemenuhan Layanan Dasar b. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	a. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing : a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan b. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.	a. Kualitas dan pelayanan kesehatan b. Kualitas dan pelayanan pendidikan c. Kesetaraan gender d. Administrasi kependudukan

Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo	Tantangan	SDGs	RPJMN Tahun 2018-2024	RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sukoharjo	KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c. Kesetaraan gender, perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak. d. h. Penguatan Keberdayaan Pemuda		c. Pemenuhan Layanan Dasar d. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda e. Pengentasan Kemiskinan f. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing			
Ketenagakerjaan	Kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam b. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi c. Transformasi Struktural Berjalan Lambat d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	Daya saing daerah
Kemiskinan	Mengurangi Kemiskinan	a. Mengakhiri segala bentuk b. kemiskinan dimana pun; c. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian d. berkelanjutan; e. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan b. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk c. Pemenuhan Layanan Dasar d. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda e. Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.	Pemenuhan hak yang sama atas pelayanan dasar

Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo	Tantangan	SDGs	RPJMN Tahun 2018-2024	RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sukoharjo	KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		f. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan g. belajar sepanjang hayat untuk semua; h. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; i. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan j. kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;	f. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing			
Kebudayaan dan Karakter Bangsa	Bagaimana memajukan eksistensi budaya lokal yang termanifestasi dalam pola kebiasaan hidup sehari-hari, pengembangan seni dan industri kreatif berbasis budaya.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;	Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa a. Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa b. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia c. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama d. Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.	Pemenuhan hak yang sama atas pelayanan dasar

Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo	Tantangan	SDGs	RPJMN Tahun 2018-2024	RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sukoharjo	KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			e. Belum Optimalnya Peran Keluarga f. Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas			
Penguatan Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a. Kualitas infrastruktur Konektivitas Wilayah b. Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan Sehat	a. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; . b. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; c. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar a. Infrastruktur Pelayanan Dasar, meliputi : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau; Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan; Keselamatan dan Keamanan Transportasi; Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi. b. Infrastruktur Ekonomi : Konektivitas Jalan; Konektivitas Kereta Api; Konektivitas Laut; Konektivitas Udara; dan Konektivitas Darat. c. Infrastruktur Perkotaan : Transportasi Perkotaan; Energi dan	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung	Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.	a. Infrastruktur pelayanan dasar b. Kualitas air c. Pemenuhan sarana dan prasarana wilayah

Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo	Tantangan	SDGs	RPJMN Tahun 2018-2024	RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sukoharjo	KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>Ketenagalistrikan Perkotaan; Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan; Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan; dan Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.</p> <p>d. Energi dan Ketenagalistrikan : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan; Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan; Transformasi Digital; Penuntasan Infrastruktur TIK; Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.</p>			
Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim	Keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<p>a. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</p> <p>b. Melestarikan dan memanfaatkan secara</p>	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim : a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b)	Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung	Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya	<p>a. Resiko dan Mitigasi bencana</p> <p>b. Indeks tutupan lahan</p> <p>c. Keanekaragaman hayati</p>

Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo	Tantangan	SDGs	RPJMN Tahun 2018-2024	RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sukoharjo	KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; c. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan c) Pembangunan Rendah Karbon.		alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.	
Kondusivitas Daerah dan pelayanan publik	a. Kondusivitas Daerah b. Pelayanan Publik	a. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan c. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik : a) Konsolidasi Demokrasi; b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; c) Penegakan Hukum Nasional; d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.	a. Akuntabilitas kelembagaan b. Akses ketersediaan data

Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo	Tantangan	SDGs	RPJMN Tahun 2018-2024	RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sukoharjo	KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan				

Sumber : Bappelbangda, olahan 2021

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis regional serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

5.1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu ***Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.***

MAJU, Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikr dan berusaha keras kearah peningkatan menjadi lebih baik.

AMAN, Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

KONSTITUSIONAL, Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

MANTAP, Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

UNGGUL, Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

RAPI, Rapi mengandung pengertian *apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.*

5.2. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan

Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggungjawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama.

5.3. Program Unggulan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2021-2026, secara khusus Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih 2021-2026 membuat Program Unggulan yang harus diimplementasikan/diwujudkan yaitu:

- 1. Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi, melalui:**
 - a. Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik;
 - b. Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 - c. Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
 - d. Mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian *problem solving* di masyarakat berbasis online;
 - e. Membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial dan bencana.
- 2. Penguatan Kapasitas Desa/Kelurahan, melalui:**
 - a. Bantuan kepada Lembaga Desa/Kelurahan dan RT se-Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Memfokuskan tata lingkungan di wilayah RT melalui peningkatan Alokasi Dana Desa dan Dana Kelurahan;
 - c. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa;
 - d. Penguatan BUMDes.

3. **Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Kepada Kader Pembangunan Daerah**, melalui:
 - a. Bantuan operasional kader posyandu;
 - b. Bantuan operasional kader sanggar inklusi;
 - c. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Posyandu;
 - d. Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Difabel Sanggar Inklusi;
 - e. Bantuan operasional Kader PKK Tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
4. **Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan, melalui :**
 - a. Peningkatan bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan;
 - b. Pengajian rutin;
 - c. Pembinaan mental keagamaan di setiap instansi pemerintah.
5. **Penerapan Pendidikan bagi Semua yang Terjangkau, melalui:**
 - a. Menyediakan fasilitas online untuk mendukung proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19;
 - b. Penerapan pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP Negeri;
 - c. Bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah swasta tingkat PAUD, TK, SD, SMP;
 - d. Bantuan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
 - e. Peningkatan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara berjenjang;
 - f. Penerapan pendidikan karakter kepada siswa;
 - g. Mengoptimalkan sanggar inklusi bagi masyarakat penyandang disabilitas;
 - h. Pelatihan gender.
6. **Penguatan Sistem Kesehatan dan Penanganan Pandemi Covid-19, melalui:**
 - a. Vaksinasi Covid-19 gratis;
 - b. Memperluas deteksi Covid-19 melalui *rapid test* massal dan pengadaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) *Swab test*;
 - c. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19;
 - d. Memfasilitasi bagi masyarakat yang menghadapi masalah kesehatan dengan penjemputan pasien;
 - e. Berobat gratis bagi keluarga miskin melalui Jamkesda, Jampersal dan pengelolaan Premi Asuransi Kesehatan;
 - f. Membudayakan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih Sehat (LBS);
 - g. Pembangunan Rumah Sakit di Eks - Terminal Kartasura.
7. **Jaringan Pengaman Sosial Pasca Pandemi Covid-19, melalui :**
 - a. Bantuan Sembako berbasis data terpadu;
 - b. Santunan Kematian berbasis data terpadu.
8. **Pengembangan Keolahragaan dan Pengembangan Generasi Muda, melalui:**
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dengan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR);
 - b. Pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi;
 - c. Meningkatkan event kejuaraan bidang olahraga di berbagai cabang olahraga;

d. Pelatihan *startup* untuk wirausaha muda.

9. Penguatan dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, melalui :

- a. Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. Bantuan sarana produksi bagi UMKM;
- c. Fasilitasi akses online pemasaran pada setiap pasar;
- d. Gerakan Beli Produk Sukoharjo;
- e. Jaringan Kemitraan Pemasaran dengan swalayan;
- f. Memperluas jaringan Online Toko PAS (Produk Asli Sukoharjo);
- g. Online Market Place UMKM;
- h. Pelatihan *E-commerce* bagi UMKM.

10. Penguatan Produksi Petani, melalui:

- a. Pemberdayaan petani melalui model *Corporate Farming*;
- b. Pemberian bantuan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT);
- c. Pembangunan, revitalisasi embung dan jaringan irigasi air tanah dalam sebagai sumber air irigasi pertanian;
- d. Peningkatan produksi pertanian melalui pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jalan Usaha Tani;
- e. Memberikan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), Bibit, Pupuk dan Pestisida;
- f. Pengembangan pertanian organik dan pertanian terpadu;
- g. Pengembangan Pasar Mitra Tani di setiap kecamatan.

11. Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif, melalui:

- a. Pengembangan daerah tujuan wisata di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo;
- b. Pengembangan desa wisata di setiap kecamatan;
- c. Inovasi atraksi dan festival wisata dengan komunitas masyarakat;
- d. Pelibatan wisatawan dalam proses pembuatan produk unggulan daerah;
- e. Pengembangan souvenir dan kuliner.

12. Penguatan Infrastruktur Daerah, dengan:

- a. Pengaspalan jalan lingkungan di seluruh wilayah Kelurahan dan Poros Desa;
- b. Pembangunan Gedung Pertemuan Eks Gedung Budi Sasono;
- c. Penanganan sampah melalui Bank Sampah di desa/kelurahan;
- d. Bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- e. Pengembangan tata kota kecamatan;
- f. Melanjutkan Pembangunan Jalan Lingkar Timur;
- g. Revitalisasi sistem drainase perkotaan untuk menanggulangi banjir;
- h. Mencukupi kebutuhan air minum bagi wilayah yang mengalami kekeringan.

5.4. TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran

berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati/Wakil bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 meliputi 5 (lima) tujuan dan 13 (tigabelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi ini mempunyai tujuan terwujudnya tata pemerintahan yang profesional, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), dan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel,

2. Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini mempunyai tujuan membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dengan indikator kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat; 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan; 3) Meningkatnya pengendalian penduduk; 4) Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda; 5) Meningkatnya kearifan budaya lokal dan 6) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin.

3. Misi 3: Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Per Kapita. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan produktivitas; dan 2) Meningkatnya kemandirian desa.

4. Misi 4: Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi ini mempunyai tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Resiko Bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur; dan 2) Meningkatnya kualitas lingkungan.

5. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman, dengan indikator adalah Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah 1) Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat dan 2) Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Th. 2020	Target Capaian (Tahun)						Kondisi Akhir RPJMD
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi												
		Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional		Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	56,02	62	65	68	70	79	80	80
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78,39	80	81	82	83	84	85	85
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,54	3,60	3,64	3,70	3,74	3,80	3,84	3,84
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	A	A
				Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,544	1,386	1,461	1,547	1,646	1,758	1,885	1,885
				Indeks Sistem Merit (ISM)	Kategori	NA	I	II	II	II	III	III	III
				Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	56,41	75	81	83	85	87	90	90
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas												
		Terwujudnya sumber daya manusia yang		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,98	77,69	77,73	77,89	78,06	78,23	78,40	78,40

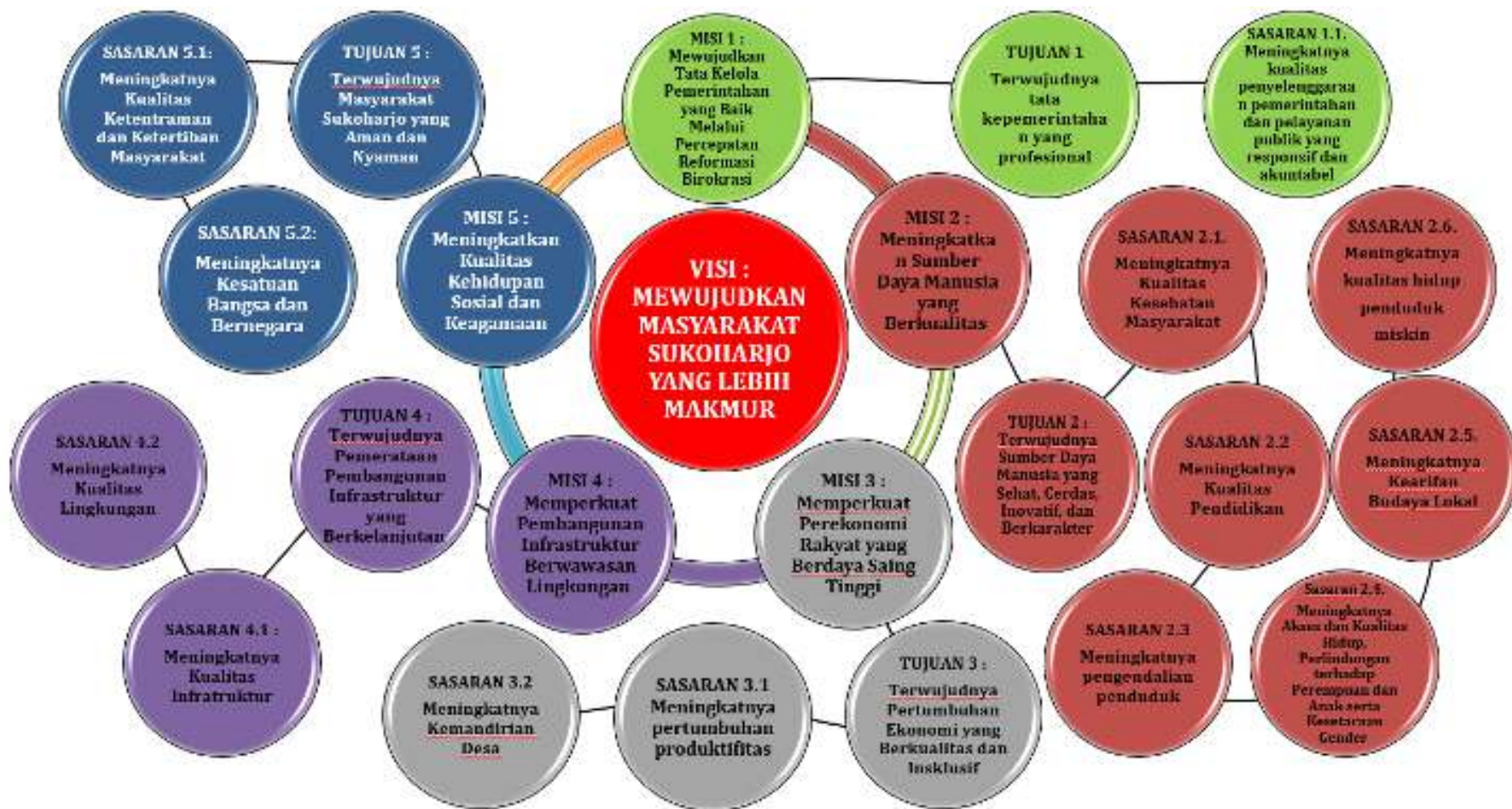
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Th. 2020	Target Capaian (Tahun)						Kondisi Akhir RPJMD
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter		Angka Kemiskinan	%	7,68	8,5-7,7	8,2-7,6	7,9-7,5	7,6-7,4	7,3-7,1	7,0-6,8	7,0-6,8
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,55	77,65	77,70	77,75	77,80	77,85	77,90	77,90
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,10	9,34	9,35	9,36	9,37	9,38	9,39	9,39
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tah-un	13,82	13,83	13,84	13,85	13,85	13,86	13,86	13,86
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,49	96,50	96,51	96,52	96,53	96,54	96,55	96,55
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	NA	39,51	41,90	44,16	46,48	49,01	51,66	51,66
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	NA	20	23	26	29	32	35	35
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4,05	4,00	4,00
				Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,94	2,90	2,85	2,80	2,75	2,70	2,65	2,65
3	Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang												

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Th. 2020	Target Capaian (Tahun)						Kondisi Akhir RPJMD
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Berdaya Saing Tinggi												
		Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,7	2,5-3,5	3,5-4,3	4,3-4,9	4,9-5,3	4,3-5,94	5,94-6,28	5,94-6,28
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,93	4,83-4,79	4,78-4,66	4,67-4,58	4,57-4,48	4,47-4,0	4,47-4,0	4,47-4,0
				Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	40,670	40,474	42,651	44,945	47,362	49,909	49,909	49,909
			Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	5	7	9	11	13	15	17	17
				Pertumbuhan Usaha Mikro Ke Usaha Kecil	%	2,60	2,70	2,80	3,10	3,50	3,60	3,70	3,70
				Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-3,50	4,60	4,69	5,08	5,30	5,40	5,60	5,60
				Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	-2,72	4,62	5,37	5,43	5,74	6,06	6,40	6,40
				Pertumbuhan investasi	%	4	8	12	16	20	24	28	28
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	2,27	2,30	2,40	2,60	2,80	3,00	3,10	3,10
				Skor Pola Pangan Harapan	%	93,3	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	93,9	93,9
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	83,00	83,00	84,00	84,00	84,00	85,00	85,00	85,00
			Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7156	0,7256	0,7356	0,7456	0,7556	0,7656	0,7656	0,7656
4	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan												

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Th. 2020	Target Capaian (Tahun)						Kondisi Akhir RPJMD		
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	55,03	57,20	58,12	62,44	65,55	68,34	69,01	69,01		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	59,05	61,03	61,12	61,22	61,32	61,41	61,51	61,51		
				Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	93,2	93,10	93,00	92,70	92,50	92,25	92,00	92,00		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	Prosentase Lingkungan Hunian Layak	%	72,49	75,54	78,59	81,65	84,70	87,76	90,81	90,81			
			Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	77,15	80,84	82,74	86,90	88,01	88,36	88,41	88,41			
			Indek Fatalitas	Angka	0,0645	0,270	0,265	0,260	0,256	0,252	0,250	0,250			
			Cakupan layanan telekomunikasi	%	1,6	2	10	20	30	40	40	40			
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	45,00	50,25	50,50	50,75	51,00	51,25	51,50	51,50			
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,23	87,23	87,23	87,24	87,24	87,25	87,25	87,25			
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,08	31,08	31,09	31,09	31,09	31,09	31,10	31,10			
			Indeks Kapasitas Daerah	Nilai	0,30	0,30	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,50			
		5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan												
				Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman		Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	85,70	86,10	86,83	87,23	87,97	88,37	88,50	88,50

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Th. 2020	Target Capaian (Tahun)						Kondisi Akhir RPJMD
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	89,90	90,34	90,72	91,11	91,49	91,88	91,90	91,90
			Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	NA	75	78	80	82	85	87	87

Gambar 5. 1
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026



BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

6. 1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Selama tahun 2021-2026 capaian reformasi birokrasi yang paling mendasar adalah berhasil menempatkan rakyat pada tempat yang terhormat dimana ruang rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penentuan arah dan pengawasan pembangunan menjadi semakin terbuka. Pada gilirannya partisipasi masyarakat mampu mendorong reformasi birokrasi yang semakin berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat secara dinamis. Birokrasi telah ditempatkan sebagai subyek reformasi yang mendapatkan manfaat (*benefit*) dari reformasi itu sendiri, serta juga telah berhasil meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi, dan akuntabel.

Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi di Kabupaten Sukoharjo tetap diarahkan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas, efisiensi dan akutabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumberdaya aparatur yang baik.

Misi kesatu Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, dengan strategi terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu :1) meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- 1) meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan

perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (*roadshow*); meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya;

- 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui:
 - a) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif;
 - b) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal;
 - c) peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah;
 - d) mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik, melalui: (1) pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, penerapan sistem renumerasi, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan *talent scouting* (penelusuran bakat), serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu; (2) perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (*output*) tetapi juga dampak (*outcome*) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

Gambar 6. 1
Skema Strategi Pencapaian Misi 1



2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, dan berbudaya.

Tujuan pada misi ini adalah Membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dengan sasaran, Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Meningkatkan pengendalian penduduk, Meningkatkan kualitas kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dan Meningkatkan kearifan budaya lokal, serta Meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- 1) *Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat, mencakup:*
 - a) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, mencakup : a) penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat; b) pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan; c) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan

efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; d) peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan; e) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); f) penguatan sistem surveilans gizi; dan g) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

- b) Peningkatan pengendalian penyakit, mencakup : a) Perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (*kusta, filariasis, schistosomiasis*), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: b) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor dan perluasan layanan berhenti merokok; c) penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; d) peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; dan e) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
- c) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), mencakup : a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antarmoda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara; c) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan d) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur.
- d) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup : a) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, yang meliputi : penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan

rekam medis online; dan penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3); b) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, meliputi : perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar (seperti tenaga promosi kesehatan, dokter keluarga layanan primer, dan perawat komunitas), dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan; c) Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan, meliputi : efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk, penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik, dan peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat tradisional; d) Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, meliputi : percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan e) Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan, meliputi : integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*, penguatan data rutin, dan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan termasuk *big data*;

2) *Meningkatkan kualitas pendidikan melalui partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, melalui :*

- a) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup : a) Penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; c) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), dan sistem pembelajaran online; d) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewarganegaraan; e) Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren; dan peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
- b) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, melalui : a) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya

tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; b) Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; c) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan d) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.

- c) Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, melalui : a) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV); b) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; c) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan d) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.
 - d) Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah : a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan; b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi; dan c) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di satuan pendidikan.
 - e) Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, melalui : a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang; d) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan; dan e) pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu;
- 3) *Pengendalian penduduk melalui peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi* mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan,

peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap; c) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; d) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah dengan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling; peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB; penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat; dan peningkatan KB pasca persalinan; dan e) peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

- 4) *Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak*, mencakup : a) penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; b) peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; c) penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; d) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; e) penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran pada anak, terutama isu perkawinan anak dan pekerja anak; dan f) peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- 5) *Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka*. Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, mencakup: a) Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat; b) Pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga didukung penerapan *sport science*, statistik keolahragaan serta penghargaan; c) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; d) Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar regional dan

nasional; e) Peningkatan prasarana dan sarana olahraga; dan f) Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

- 6) *Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah* melalui Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, mencakup: (a) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal untuk memperkuat, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga; (b) Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan arsip sebagai sumber nilai budaya dan sejarah.

Peningkatan budaya literasi, mencakup: (a) pengembangan budaya kegemaran membaca; (b) pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi; (c) peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- 7) *Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran*, mencakup: a) pengembangan digitalisasi dan integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan; b) peningkatan sinergi basis data terpadu (BDT) kesejahteraan sosial dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya; dan c) peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan.

Perlindungan sosial adaptif, mencakup: a) pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan resiko ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim dan bencana alam; b) penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana alam.

Peningkatan kesejahteraan sosial, mencakup: a) Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing terintegrasi dan holistik; b) pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas; c) penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas; d) penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; f) pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia, g) pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia; dan h) penguatan pelayanan sosial bagi kelompok rentan

Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu, mencakup : a) peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat; b) peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai pendidikan anak, kesehatan dan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga; dan c) penguatan mekanisme pengaduan, pendataan dan layanan terpadu.

Gambar 6. 2
Skema Strategi Pencapaian Misi 2



3. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ketiga mempunyai tujuan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif, dengan sasaran Meningkatkan pertumbuhan produktifitas, dan Meningkatnya kemandirian desa. Strategi yang akan dilakukan adalah :

- 1) *Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)*, mencakup : a) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; b) Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha; c) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; d) Meningkatkan penciptaan peluang usaha; dan e) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;
- a.) *Meningkatkan penataan kawasan peruntukkan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah*, mencakup : a) Pembangunan sumber daya industri; b) pembangunan sarana dan prasarana industri; c) kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; d) pemberdayaan industri kecil dan

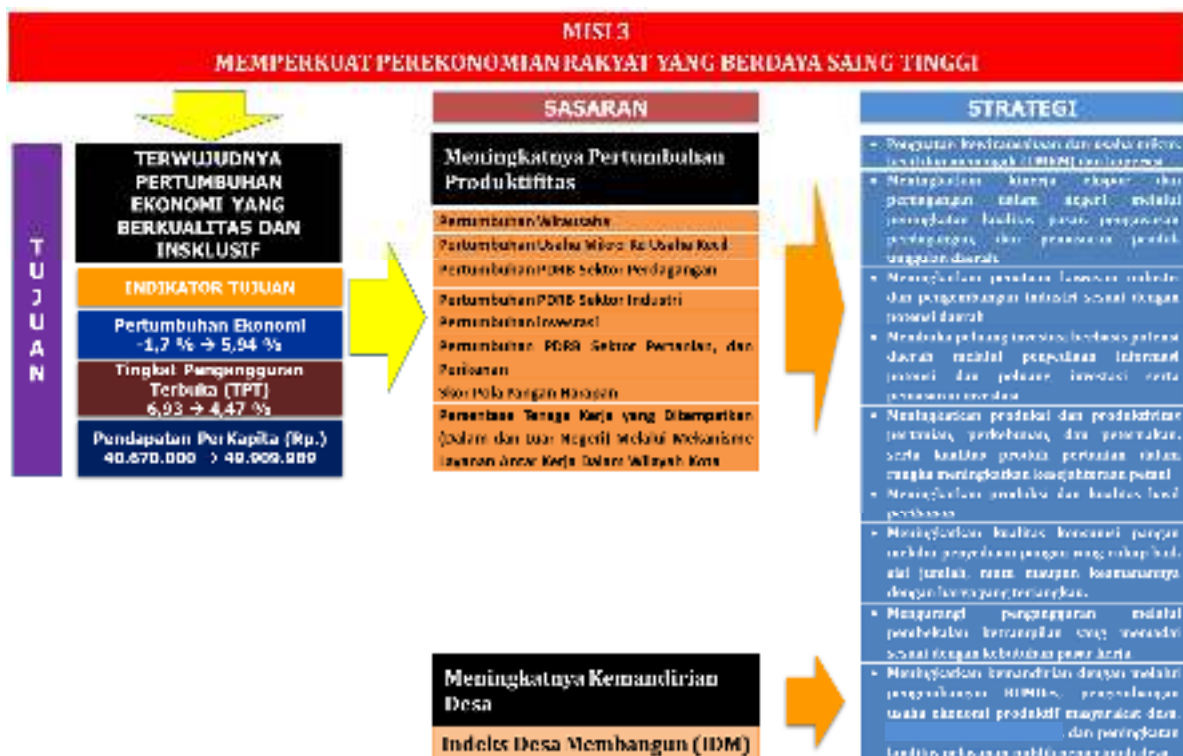
menengah; e) perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri.

- 2) *Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi.* Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dilaksanakan melalui (1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antarsektor dan wilayah; (2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi terhadap industri daerah; (3) Upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 3) *Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani,* melalui: a) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek *on-farm* dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (*off-farm*), usaha tani diarahkan melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan; b) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; c) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya.
Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: a) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap; dan b) Peningkatan kualitas dan kapasitas kelompok pembudidaya.
- 4) *Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau,* mencakup : (1) Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian; dan (3) Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian; (4) Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian.
- 5) *Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja* yang akan dilaksanakan mencakup : (1) Meningkatkan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja; (2) Meningkatkan penempatan tenaga kerja; (3) Meningkatkan hubungan industrial;

- 6) *Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi*, mencakup : a) Peningkatan promosi dan pemberdayaan pariwisata serta membangun database ekonomi kreatif berbasis ekonomi lokal; b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif yang berdaya saing, c) Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif dan kondusif, d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pelestarian, kemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- 7) *Meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa* mencakup : Pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah; Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum; dan pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah.

Gambar 6.3
Skema Strategi Pencapaian Misi 3



4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mempunyai tujuan kesatu *Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan* dengan sasaran *Meningkatnya kualitas infratraktur*, dan sasaran kedua adalah *Meningkatkan Kualitas Lingkungan, dan Meningkatkan kesiagaan dan ketangguhan bencana*.

Pembangunan infrastruktur periode 2021-2026 berfokus pada tiga kerangka utama, yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, dan Infrastruktur Ekonomi. Kerangka utama tersebut didukung oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diarahkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Infrastruktur layanan dasar yang akan dibangun mencakup penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah), pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan, keselamatan dan keamanan transportasi, dan irigasi. Pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi berfokus pada konektivitas transportasi jalan, irigasi dan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur juga didasarkan pada pengarusutamaan terhadap ketahanan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital serta modal dan sosial budaya.

Adapun strategi dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas infratraktur, adalah :

- 1) *Meningkatkan akses air minum layak dan aman*, mencakup : Meningkatkan tata kelola kelembagaan, Meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum, Pengembangan dan pengelolaan SPAM, dan Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman.
- 2) *Meningkatkan akses layanan sanitasi layak dan aman*, mencakup : Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi (air limbah dan sampah), Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi, permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, dan pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.
- 3) *Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni*, mencakup pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni; rehabilitasi rumah akibat korban bencana dan rumah yang terkena dampak program pemerintah.

Pengentasan Permukiman Kumuh, peningkatan kapasitas kelembagaan termasuk sumber daya manusia, dan peningkatan penciptaan iklim kondusif bagi perumahan seperti perizinan dan pemenuhan standar keandalan

bangunan serta memastikan penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan ketersediaan infrastruktur dasar permukiman.

- 4) *Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi, dan mewujudkan infrastruktur penghubung antar wilayah yang merata dan layak*, peningkatan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan dan jembatan, yang mendukung kawasan peruntukkan industri dan pariwisata prioritas, akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkar dan jalan akses mendukung kawasan perbatasan. Diperlukan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan. Disamping itu, diperlukan penguatan perencanaan dana alokasi khusus bidang jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah. Pembangunan drainase diarahkan untuk mengurangi cakupan genangan air di kawasan perkotaan. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan air untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- 5) *Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi*, kebijakan keselamatan transportasi difokuskan pada keselamatan lalu lintas jalan. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan melalui pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas. Untuk moda transportasi lainnya, kebijakan keselamatan diarahkan pada penguatan peran kelembagaan, peningkatan kelaikan keselamatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung kinerja keselamatan.
- 6) *Penuntasan Infrastruktur TIK; Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital. (1) Penuntasan Infrastruktur TIK* melalui penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat; *(2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK*: (a) Perluasan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik serta informasi pertanian; (b) Meningkatkan dan memfasilitasi pertumbuhan *start up* yang ada, terutama yang mempunyai potensi untuk mendapatkan pendanaan dari investor; dan (c) Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi). *(3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital* : mendorong pelaksanaan satu data dalam rangka pemanfaatan data yang mudah diakses, terstandar serta dapat dibagi pakaikan, mendorong pemanfaatan data untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan.

Adapun strategi dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan, dan Meningkatnya kesiagaan dan ketangguhan bencana, adalah :

- 1) *Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara*, mencakup : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 2) *Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana*, yang mencakup antara lain Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

Gambar 6. 4
Skema Strategi Pencapaian Misi 4



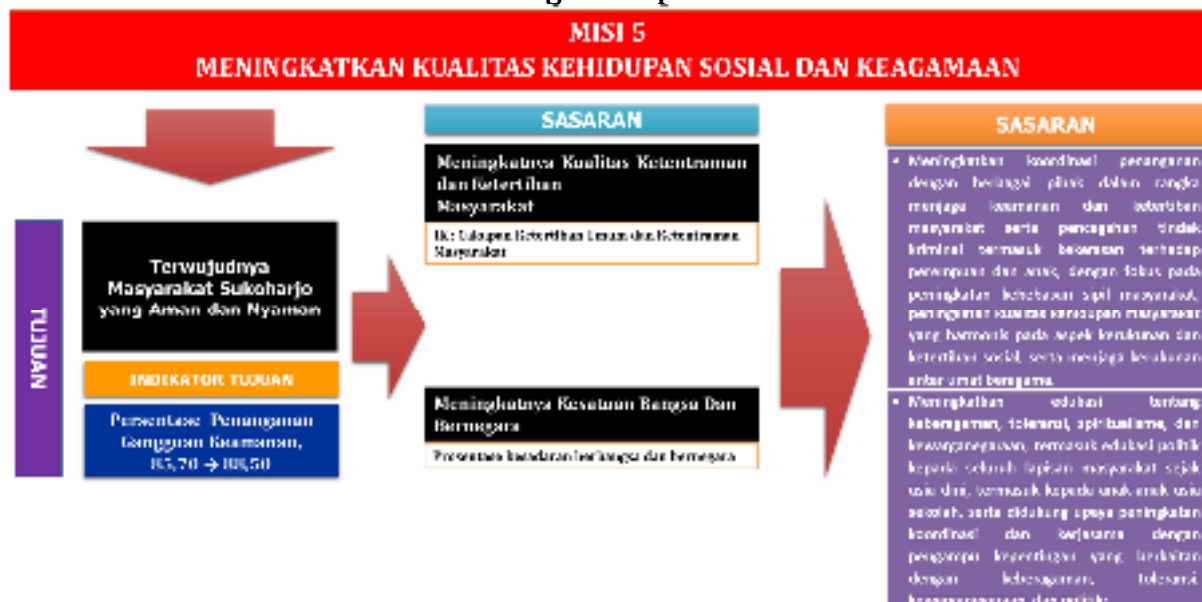
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang aman dan nyaman, kerukunan antar umat beragama, pluralisme, tanpa ada konflik sosial maupun agama. Dengan tujuan pada misi ini yaitu *Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman*, dan dengan sasaran 1) Meningkatkan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan 2) Meningkatkan Kesatuan Bangsa Dan Bernegara.

Strategi dari sasaran meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah : *Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.*

Strategi dari sasaran meningkatnya Kesatuan Bangsa dan Bernegara adalah: *Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik.*

Gambar 6. 5
Skema Strategi Pencapaian Misi 5



Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo tertuang dalam Tabel 6.1. berikut.

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR				
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (<i>direct services</i>) • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. • Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya.
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pendidikan melalui partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan
			Meningkatnya pengendalian penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penduduk melalui peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak.
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.
			Meningkatnya kearifan budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah • Peningkatan budaya literasi
			Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, Peningkatan kesejahteraan social, Perlindungan sosial adaptif, dan Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah
				<ul style="list-style-type: none"> • Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani • Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
			Meningkatnya Kemandirian Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infratraktur	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses air minum layak dan aman
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses layanan sanitasi layak dan aman (air limbah dan sampah)
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni • Pengentasan Permukiman Kumuh
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi. • Mewujudkan infrastruktur penghubung antar wilayah yang merata dan layak

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
				<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan Infrastruktur TIK; Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
		Terwujudnya lingkungan sehat, aman, tangguh, berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara
				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.
5	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan	Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan

VISI : MEWUJUDKAN MASYRAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
				ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.
			Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu priode RPJMD, perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Secara umum keterkaitan Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026 sebagai berikut.

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sukoharjo 2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	
1. Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (<i>direct services</i>) 2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel 3. Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya.	1. Percepatan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral; 2. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat 3. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045
Misi 2 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit	4. Percepatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

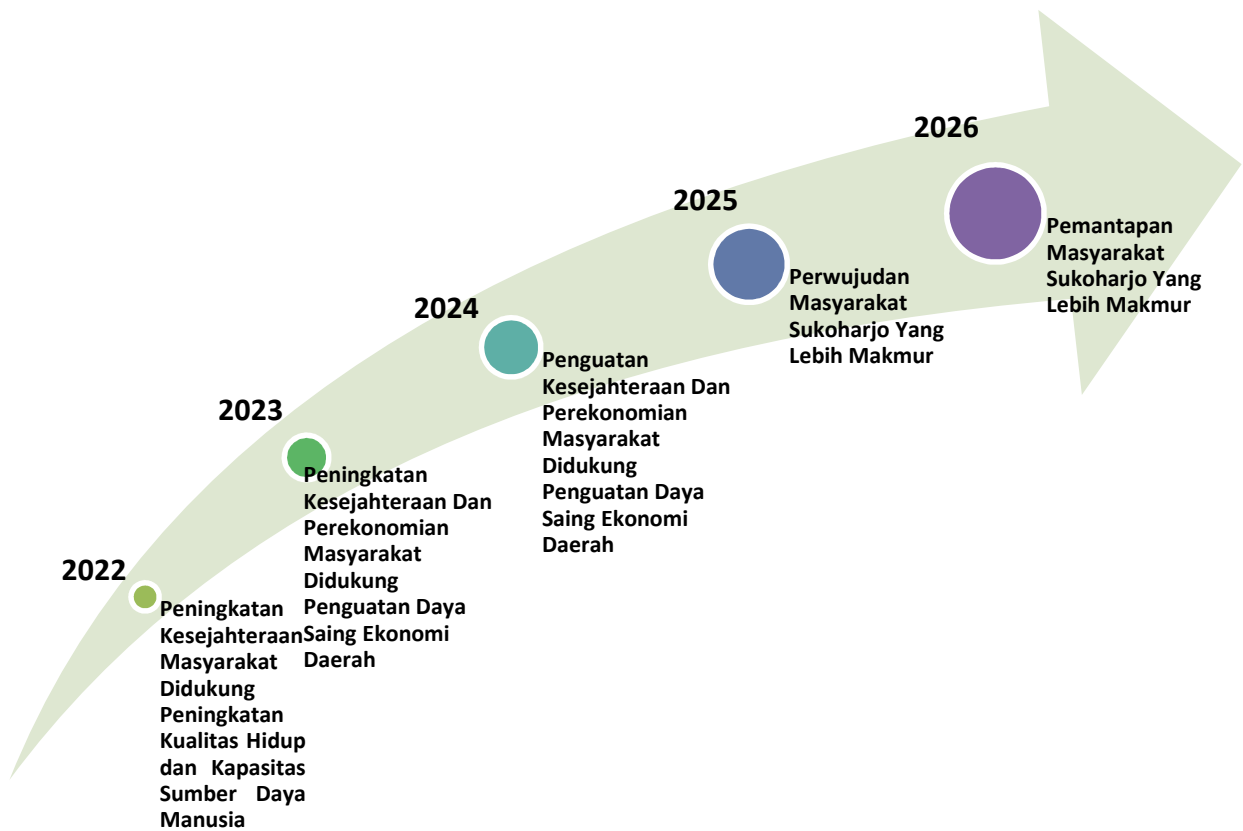
Strategi	Arah Kebijakan	
menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat		
5. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan		
6. Peningkatan budaya literasi		
7. Percepatan cakupan administrasi, dan peningkatan kependudukan integrasi sistem administrasi kependudukan		
8. Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak.		
9. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.		
10. Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah		
11. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran 12. Peningkatan kesejahteraan sosial 13. Perlindungan sosial adaptif 14. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu		5. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Misi 3 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif		
15. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi		6. Percepatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
16. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.		
17. Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensi daerah		
18. Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi		

Strategi	Arah Kebijakan
<p>19. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani</p> <p>20. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan</p>	
<p>21. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.</p>	
<p>22. Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.</p>	
<p>23. Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi</p>	
<p>24. Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.</p>	
Misi 4 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	
<p>25. Meningkatkan akses air minum layak dan aman</p>	<p>7. Percepatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;</p>
<p>26. Meningkatkan akses layanan sanitasi layak dan aman (air limbah dan sampah)</p>	
<p>27. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni</p>	
<p>28. Pengentasan Permukiman Kumuh</p>	
<p>29. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi.</p>	
<p>30. Mewujudkan infrastruktur penghubung antar wilayah yang merata dan layak</p>	
<p>31. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi</p>	
<p>32. Penuntasan Infrastruktur TIK; Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital</p>	

Strategi	Arah Kebijakan
33. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tanah dan udara	
34. Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan	
35. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.	8. Percepatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
36. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;	

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, pembangunan kabupaten, janji politik, serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting. Hasil perumusan arah kebijakan yang menjadi prioritas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6. 6
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026



1. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukoharjo lima tahun kedepan, yang dilaksanakan dengan RKPD 2022. Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 ditujukan untuk **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Percepatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- b. Percepatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
- c. Percepatan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral;
- d. Percepatan Pengurangan Kemiskinan;
- e. Percepatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
- f. Percepatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBUs), dan kerjasama dengan komponen masyarakat;

- h. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

2. Arah Kebijakan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukoharjo lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022, yang dilaksanakan sengan RKPD 2023. ditujukan untuk **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- b. Peningkatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
- c. Peningkatan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral;
- d. Pengurangan Kemiskinan;
- e. Peningkatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
- f. Peningkatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat;
- h. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

3. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukoharjo lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Peningkatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Peningkatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- c. Peningkatan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral;
- d. Pengurangan Kemiskinan;
- e. Peningkatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
- f. Peningkatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat;

- h. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

4. Arah Kebijakan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan pada **“Penguatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
- b. Penguatan Pengurangan Kemiskinan;
- c. Penguatan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral;
- d. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- e. Penguatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
- f. Penguatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat;
- h. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

5. Arah Kebijakan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan pada **“Perwujudan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Perwujudan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
- b. Perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral;
- c. Perwujudan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- d. Perwujudan Pengurangan Kemiskinan;
- e. Perwujudan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
- f. Perwujudan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat;
- h. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

6. Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan pada “**Pemantapan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur**”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;
- b. Pemantapan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral;
- c. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- d. Pemantapan Pengurangan Kemiskinan;
- e. Pemantapan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. Pemantapan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana;
- g. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat;
- h. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

No	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Percepatan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral;						
	a. Fokus penataan sesuai regulasi baru dan RPJMD baru						
	b. Fokus membangun habituais diantara ASN						
	c. Fokus pemberlakuan insentif dan disinsentif						
2	Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat						
	a. Fokus inisiasi dan eksekusi						
	b. Fokus menambah jumlah mitra						
	c. Fokus memperluas varian mitra (antar regional daerah/dunia usaha/komunitas /masyarakat)						
3	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045						
	a. Fokus kajian teknokratis						
	b. Penyusunan dokumen						

No	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Percepatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing						
4.1.	Bidang Pendidikan						
	a. Fokus penyusunan kurikulum muata l nilai-nilai budaya lokal dan strategi pembelajaran berbasis TIK untuk meningkatkan literasi masyarakat						
	b. Fokus sosialisasi dan aksi / implementasi						
	c. Fokus evaluasi melalui aksi kompetisi						
4.2	Bidang Kesehatan						
	Pelayanan kesehatan unggul dan habituasi masyarakat berpola hidup bersih dna sehat						
	a. Fokus penyelesaian pemulihan Covid-19 dan Cakupan Vaksin 19 untuk semua warga						
	b. Fokus memenuhi standar kualitas pelayanan untuk sarana prasarana dan kebutuhan tenaga kesehatan						
	c. Fokus habituasi gerakan masyarakat sehat dalam standar kenormalan baru						
4.3.	Bidang Administrasi kependudukan						
	a. Fokus Pengembangan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif berbasis teknologi informasi						
	b. Fokus sosialisasi dan impementasi, evaluasi						
4.4.	Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan						
	Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, kompetitif						
	a. Fokus menghubungkan dengan jaringan sosial yang dapat membantu pelatihan, peminjaman modal modal kerja/ usaha/ pemasaran produk/ jasa						
	b. Fokus pendampingan usaha/memastikan ada kegiatan produktif untuk ART Miskin						
	c. Fokus membantu keberlanjutan usaha/pemasaran/mengatasi kegagalan usaha ART miskin						
4.5	Bidang Perlindungan Perempuan dan anak						
	Pengembangan inovasi pelayanan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak (PUHA) yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai budaya lokal						
	a. Fokus Rencana dan sosialisasi produk inovasi pelayanan						
	b. Fokus implementasi aplikasi dan evaluasi						
4.6.	Bidang nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah						

No	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Ekspansi pemasaran industri seni budaya, wisata sejarah dan industri kreatif, dengan mengoptimalkan Teknologi Informasi dan Digital Governance						
	a. Fokus membangun brand dan strategi kemitraan promosi						
	b. Fokus pendampingan/ fasilitasi menjalin kerjasama mitra (target pasar)						
	c. Fokus pendampingan/fasilitasi perluasan dan evaluasi pasar						
5.	Percepatan Pengurangan Kemiskinan						
	a. fokus jaminan sosial pasca pandemi						
	b. Fokus menghubungkan dengan jaringan sosial yang dapat membantu modal kerja/uusaha/pemasaran produk/jasa						
	c. Fokus pendampingan usaha/memastikan ada kegiatan produktif untuk ART Miskin						
	d. Fokus membantu keberlanjutan usaha/pemasaran/mengatasi kegagalan usaha ART miskin						
6	Percepatan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian;						
	a. Fokus fasilitasi menghubungkan kelompok binaan (UMKM/ Pencari kerja) dengan jaringan sosial yang dapat membantu pelatihan, peminjaman modal modal kerja/ usaha/ pemasaran produk/ jasa						
	b. Fokus pendampingan usaha/memastikan ada kegiatan produktif untuk kelompok binaan (UMKM/ Pencari kerja)						
	c. Fokus membantu keberlanjutan usaha/pemasaran/mengatasi kegagalan usaha untuk kelompok binaan (UMKM/ Pencari kerja)						
7.	Percepatan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana						
	a. Fokus DED dan perencanaan (obyek yang ditargetkan)						
	b. Fokus pelaksanaan (obyek yang ditargetkan)						
	c. Fokus pemeliharaan (obyek yang ditargetkan) komunitas tangguh bencana						
	d. Perancangan strategi pembentukan komunitas tangguh bencana						
	e. sosialisasi, implementasi, dan evaluasi pemberdayaan						
8.	Percepatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.						

No	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penguatan budaya rukun agawe sentosa, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dikalangan aparatur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun kewaspadaan dini penangkalann gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat						
	a. Fokus Rencana						
	b. Fokus sosialisasi dan ujicoba aplikasi						
	c. Fokus implementasi dan evaluasi						

6.3. Arah Kebijakan Kewilayahan

1. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Nasional

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah. Pembangunan kewilayahan sekaligus merupakan penjabaran dari pembangunan nasional. Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah. Tujuan pembangunan utamanya disusun untuk mneyelesaikan isu ketimpangan antar wilayah, antara lain:

- a. Meningkatkan pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah
- c. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
- d. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2020-2024 dibuat dalam 3 (tiga) skenario yaitu: (i) skenario rendah yaitu 5,4; (ii) skenario moderat sebesar 5,7; dan (iii) skenario tinggi sebesar 6,0. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional moderat tersebut kemudian diturunkan dalam target pertumbuhan ekonomi setiap pulau besar dan setiap provinsi.

2. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menargetkan Kawasan Subosukawonosraten dapat mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 5,45% sampai dengan 6,80%, (2) angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran 3,12% sampai dengan 11,50%, (3) TPT dengan rata-rata kisaran 2,05% sampai dengan 4,40% serta (4) IPM pada rata-rata kisaran 73,10 sampai dengan 84,40. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

- 1) Optimasi konektivitas melalui rehabilitasi jalan, angkutan aglomerasi, pengembangan jalan lingkar serta jalan tol yang dapat mendukung distribusi barang/jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian, komoditas industri, mengurai kemacetan di pusat perkotaan hingga mendukung alur perjalanan aktivitas pariwisata yang menghubungkan koridor DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya dengan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- 2) Pengembangan destinasi baru di koridor antar kawasan DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya, baik potensi wisata alam, nonalam, dan buatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: (1) Potensi sumber daya air melalui pengembangan SPAM dan Waduk, (2) pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan dan pasar sentra produksi, serta (3) utilitas seperti sistem persampahan terpadu;
- 4) Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata;
- 5) Pengembangan sektor pertanian komoditas tanaman pangan serta peternakan utamanya komoditas sapi yang dapat diarahkan menuju sektor agro industri serta agrowisata;
- 6) Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah khususnya berfokus pada penanganan permasalahan banjir di DAS Bengawan Solo;
- 7) Penguatan kelembagaan dalam sektor perencanaan kerja sama antardaerah di bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW) antarwilayah administrasi di Kawasan Subosukawonosraten.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang, memberikan amanat bahwa Kawasan Subosukawonosraten potensial dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian dan perkebunan. Sektor primer didominasi oleh aktivitas pertanian dengan komoditas (1) Tanaman pangan berupa padi, jagung, dan kedelai serta (2) Hortikultura berupa bawang merah dan cabai. Sektor peternakan berupa ayam, kambing, dan sapi. Sektor peternakan sapi perah dan sapi potong berkembang baik di Kabupaten Boyolali dan Klaten. Sektor lain yang berkembang adalah jasa pariwisata, terutama berpusat pada koridor DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya serta sektor industri di wilayah Surakarta-Boyolali-Klaten-Karanganyar.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku maka akan dilakukan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku, pembangunan SPAM Regional Wosusokas (Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Kota Surakarta), dan Fasilitasi Pembangunan Waduk Gondang dan Waduk Pidekso .

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup akan dilakukan : Penanganan lahan kritis Merapi dan Lawu (Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen), Konservasi CAT Karanganyar-Boyolali dan reklamasi bekas tambang (Magelang, Klaten, Boyolali, Wonogiri), Pembangunan *Waste to Energy (Incenerator)* Kota Semarang dan Pembangunan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga (Klaten).

Selain itu Wilayah Subosukawonosraten juga akan dikembangkan kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar) dan SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang), yang diharapkan akan memberikan *multiplier effect* di wilayah ini.

3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Sukoharjo

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo – Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, mengalokasikan kegiatan yang berupa Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo; Pengembangan Kawasan Pusat Furnitur Indonesia; dan Pengembangan *Agricultural Estate* melalui *Corporate Farming*.

Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan koordinasi dengan BBWS dan survey Lapangan bersama BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo) di Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari

Pembangunan Kawasan Pusat Furniture Indonesia Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan Kajian dari Bank Indonesia, Penyiapan Lahan sesuai dengan zonanya di Kecamatan Bendosari yang meliputi Desa Manisharjo dengan luas tersedia 367,442 Ha luas existing 198 Ha; Desa Mojorejo luas tersedia 238,309 Ha luas existing 114 Ha, selanjutnya telah dilaksanakan Koordinasi dan Paparan dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Jakarta yang ditindak lanjuti dengan Koordinasi survey lahan dan perencanaan Pembebasan lahan

Pengembangan *Agriculture Estate* melalui *Corporate Farming* Kabupaten Sukoharjo telah melakukan Koordinasi dengan dinas terkait Lokasi Sawah Tadah Hujan dan Irigasi Sederhana di Kecamatan Bendosari yang melibatkan Gapoktan Tani Makmur desa Paluhombo, Gapoktan Marsudi Tani Desa Puhgogor, Gapoktan Ngesti Raharjo Desa Mojorejo. Sosialisasi dan Pendampingan kepada petani dan kelompok serta Konsolidasi lahan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, mengamanatkan bahwa Posisi wilayah Kabupaten Sukoharjo berada pada posisi jalur yang sangat strategis yaitu pada kawasan simpang segitiga emas JOGLOSEMAR

(Yogya – Solo – Semarang), yang merupakan simpang kutub pusat pertumbuhan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Yogyakarta, Solo dan Semarang. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah yang termasuk bagian dalam kawasan wilayah pengembangan regional SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Selain itu, posisi Kabupaten Sukoharjo berada pada jalur akses menuju Kawasan Pantai Selatan (PANSELA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten berpusat di kawasan perkotaan Surakarta dengan arah pengembangan meliputi: 1. memadukan pembangunan Kota Surakarta dan wilayah disekitarnya; 2. pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi: a) perdagangan dan jasa; b) industri; c) pertanian; d) pariwisata; dan e) panas bumi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, mengamanatkan Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kawasan perkotaan meliputi: Kecamatan Sukoharjo; Kecamatan Kartasura; dan Kecamatan Grogol;
- b. kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari;
- c. kawasan perbatasan kabupaten meliputi: 1) koridor jalan arteri primer di Kecamatan Gatak berbatasan dengan Kabupaten Boyolali; 2) koridor jalan perbatasan Kecamatan Baki berbatasan dengan Kabupaten Klaten; 3) Kecamatan Weru berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul; dan 4) Kecamatan Mojolaban berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- d. Kawasan agropolitan meliputi: Kecamatan Weru; Kecamatan Bulu; Kecamatan Tawang Sari; Kecamatan Nguter; Kecamatan Bendosari; Kecamatan Polokarto; Kecamatan Mojolaban; Kecamatan Baki; dan Kecamatan Gatak.

Berdasarkan karakteristik perkembangannya, Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan bagian utara, kawasan bagian tengah dan kawasan bagian selatan.

Tabel 6.4
Karakteristik Kawasan di Kabupaten Sukoharjo

KAWASAN	KARAKTERISTIK
KAWASAN BAGIAN UTARA	

KAWASAN	KARAKTERISTIK
Kawasan SUROGOLBANTAKI	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan ini meliputi Kecamatan Kartasura, Grogol, Mojolaban, Gatak dan Baki. • Perkembangan dipengaruhi oleh limpasan perkembangan dari Kota Surakarta. Karakteristik merupakan permukiman perkotaan, dan pusat perdagangan jasa dengan kepadatan bangunan yang berkembang dari padat menjadi sangat padat.
KAWASAN BAGIAN TENGAH	
Kawasan SUKOSARIKARTO	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan ini meliputi Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, dan Polokarto • Perkembangan kawasan dipengaruhi oleh perkembangan Kecamatan Sukoharjo sebagai pusat pelayanan kabupaten. Kepadatan bangunan berkembang dari sedang menjadi padat. Ciri perkotaan terlihat terutama pada permukiman-permukiman baru, sedangkan perkampungan umumnya masih bercampur antara ciri perkotaan dan pedesaan. Muncul aktivitas perdagangan pada koridor jalan utama, dan terdapat aktivitas industri
KAWASAN BAGIAN SELATAN	
Kawasan NGULURUSARI	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan ini meliputi Kecamatan Nguter, Bulu, Weru, dan Tawang Sari • Merupakan kawasan penyangga perkotaan, dengan perkembangan kepadatan yang masih rendah. Perkembangan kawasan sebagian besar masih bercirikan pedesaan, kawasan perkampungan berkembang sporadis dan mengelompok yang dipisahkan oleh kawasan pertanian. Kegiatan perdagangan dan jasa, serta industri berkembang linier terhadap jaringan jalan.

Sumber : Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2020

6.4. Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2021-2026 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas :

1. Isu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel, yang dijawab oleh Misi 1, dengan sub isu Pelayanan Publik.

2. Isu Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, yang dijawab oleh Misi 2, dengan sub isu:
 - a. Isu Pemenuhan Layanan Dasar;
 - b. Laju pertumbuhan penduduk;
 - c. Isu kesetaraan gender, perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak;
 - d. Isu Penguatan Keberdayaan Pemuda;
 - e. Isu peningkatan kearifan budaya lokal;
 - e. Isu kemiskinan.
3. Isu Penguatan Ekonomi Rakyat Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, yang dijawab oleh Misi 3, dengan sub isu:
 - a. Isu Kemandirian Desa Berkelanjutan;
 - b. Isu Daya Saing UMKM dan koperasi di Era Ekonomi digital;
 - c. Isu Pengembangan Kapasitas Wirausaha muda;
 - d. Isu Ketengakerjaan, Pengangguran, dan Pengembangan Kompetensi Pencari Kerja;
 - e. Isu Peningkatan daya tarik investasi.
4. Isu Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Wilayah yang Inklusif dan berwawasan lingkungan, yang dijawab oleh Misi 4, dengan sub isu:
 - a. Isu Kualitas infrastruktur Konektivitas Wilayah;
 - b. Isu Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan Sehat;
 - c. Isu Lingkungan Sehat, Aman, Berkelanjutan.
5. Isu Kondisi Daerah yang Kondusif, Aman dan Nyaman, yang dijawab oleh Misi 5, dengan sub isu:
 - a. Isu peningkatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Isu peningkatan kesatuan bangsa dan bernegara.

Program pembangunan daerah merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan kriteria sebagai berikut :

1. Mendukung program strategis nasional, provinsi, dan daerah.
2. Mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal
3. Menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Tabel 6.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Sukoharjo (Rp 000.000)

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi																	
1.1	Terwujudnya tata pemerintahan yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	56,02	62	116.121,99	65	120.712,16	68	131.789,11	70	138.048,60	79	142.456,71	80	142.189,43	SETDA
1.1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel					116.121,99		120.712,16		131.789,11		138.048,60		142.456,71		142.189,43	
1.1.1.1		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78,39	80	23.105,59	81	24.163,94	82	26.927,38	83	28.331,22	84	29.248,37	85	29.426,80	KECAMATAN,SETWAN, DKK, DISDUKCAPIL, DPMPSTSP
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Kartasura	Nilai	82,61	83	25,00	83,5	25,00	84	25,00	84,5	25,00	85	25,00	85,5	25,00	KECAMATAN KARTASURA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sukoharjo	Nilai	86,9	87	80,00	87,5	120,00	88	160,00	88,5	200,00	89	235,00	89,5	265,00	KECAMATAN SUKOHARJO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Grogol	Nilai	77	78	50,00	79	50,00	80	90,00	82	99,00	85	109,00	86	321,00	KECAMATAN GROGOL
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Mojolaban	Nilai	77	80	20,00	81	24,00	82	42,00	83	43,00	84	43,00	86	172,00	KECAMATAN MOJOLABAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai	77,88	79	15,00	80	35,00	81	50,00	82	55,00	83	70,00	84	75,00	KECAMATAN BENDOSARI

		Kecamatan Bendosari															
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Polokarto	Nilai	78,1	79	40,00	80	40,00	81	40,00	82	48,00	83	48,00	84	60,00	KECAMATAN POLOKARTO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Baki	Nilai	80	81	42,00	82	42,00	83	42,00	84	42,00	85	42,00	86	42,00	KECAMATAN BAKI
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Weru	Nilai	77,66	78	39,94	78,5	40,00	79,5	42,00	80	44,50	80,5	45,00	81	46,00	KECAMATAN WERU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Gatak	Nilai	86,74	87	42,00	87,5	42,00	88	42,00	88,5	42,00	89	42,00	89,5	42,00	KECAMATAN GATAK
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tawang Sari	Nilai	85	86	30,00	87	15,00	88	16,00	89	17,00	90	18,00	90	18,00	KECAMATAN TAWANGSARI
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Nguter	Nilai	80	81	42,00	82	42,00	83	42,00	84	42,00	85	42,00	86	42,00	KECAMATAN NGUTER
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bulu	Nilai	75,28	79	20,00	80	11,00	81	12,00	82	13,00	83	14,00	84	15,00	KECAMATAN BULU
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang mendapatkan dukungan	%	100%	100%	22.659,65	100%	23.677,94	100%	26.324,38	100%	27.660,72	100%	28.515,37	100%	28.303,80	SETWAN
1.1.1.2.		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,54	3,6	5.608,88	3,64	6.533,86	3,7	7.470,13	3,74	8.205,78	3,8	8.701,69	3,84	9.808,88	DISKOMINFO
2 16 02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Prosentase Badan Publik terbuka	%	15	25	1.660,00	35	1.584,98	45	2.021,25	55	2.356,90	65	2.552,81	75	3.610,00	DISKOMINFO
2 16 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	%	75	75	3.948,88	80	4.948,88	85	5.448,88	90	5.848,88	95	6.148,88	100	6.198,88	DISKOMINFO

1.1.1.3.		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	B	B	65.340,60	B	58.352,75	BB	64.112,88	BB	66.357,06	A	67.395,43	A	65.465,36	SETDA, BAPPELBANGDA, INSPEKTORAT, DISARPUS
4 01 01	Program Administrasi Umum					49.025,18		39.695,14		42.485,39		43.589,83		43.848,22		41.699,71	SETDA
		Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	%	100	100	44.060,10	100	34.751,22	100	36.936,49	100	37.646,68	100	37.617,96	100	35.774,72	SETDA
		Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH	%	100	100	4.965,09	100	4.943,93	100	5.548,90	100	5.943,14	100	6.230,27	100	5.924,99	SETDA
4 01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					9.214,52		8.712,78		9.528,75		10.073,80		10.405,79		10.311,06	SETDA
		Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	%	100	100	1.205,00	100	1.290,10	100	1.540,00	100	1.735,20	100	189,80	100	180,50	SETDA
		Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	%	93,5	95,5	1.600,00	96	1.571,16	96,5	1.732,50	97	1.826,78	97,5	1.945,45	97,5	1.850,13	SETDA
		Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakata	%	100	100	6.650,00	100	6.261,59	100	6.785,63	100	7.008,28	100	6.998,88	100	6.655,94	SETDA
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan					2.625,90		4.561,14		5.147,12		5.577,15		5.947,35		5.928,61	SETDA
		Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	%	100	100	1.554,30	100	1.575,52	100	1.810,18	100	1.994,30	100	2.159,59	100	2.053,77	SETDA
		Cakupan pengadaan barang dan jasa	%	99,7	100	206,60	100	2.091,77	100	2.403,32	100	2.647,77	100	2.867,23	100	2.999,41	SETDA
		Cakupan Perumusan dan Pengendalian	%	86,71	88	865,00	89	893,86	90	933,63	91	935,08	92	920,53	92	875,43	SETDA

		Kebijakan pembangunan															
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	80	80	1.600,00	80	1.359,21	80	1.626,63	80	1.706,28	80	1.599,07	80	1.795,98	BAPPELBANGDA
5 01 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah	%	80	80%	1.060,00	84%	1.884,47	88%	3.000,00	92%	3.000,00	96%	3.000,00	100%	3.000,00	BAPPELBANGDA
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil Pemeriksaan BPK	%	83,36	88,5	1.000,00	88,75	1.000,00	89	1.100,00	89,25	1.100,00	89,5	1.200,00	90	1.200,00	INSPEKTORAT
		Presentase Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP	%	100	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Cakupan penilaian mandiri SPIP	%	-	-		15		30		45		60		75		INSPEKTORAT
		Persentase jumlah PDTT yang selesai ditangani	%	100	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemenuhan kebijakan teknis di bidang pengawasan	%	100	100	700,00	100	750,00	100	800,00	100	850,00	100	900,00	100	1.000,00	INSPEKTORAT
		Cakupan pendampingan dan Sistensi di bidang Pengawasan	%	70	80		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Persentase jumlah kasus yang ditangani sesuai kewenangannya	%	100	100		100		100		100		100		100		INSPEKTORAT
		Presentase OPD yang menerapkan manajemen risiko	%		-		15%		30%		45%		60%		93%		INSPEKTORAT
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				90,00		350,00		375,00		400,00		425,00		450,00	DISARPUS
02.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna				25,00		40,00		50,00		60,00		70,00		80,00	DISARPUS
1.1.1.4.		Indek Kapasitas Fiskal Daerah	Nilai	1.544	1.386	8.054,53	1.461	15.490,72	1.547	15.490,72	1.646	15.587,75	1.758	15.587,75	1.885	15.337,75	BKD
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Dokumen Penganggaran yang tepat waktu	%	100	100	1.709,00	100	2.937,75	100	2.937,75	100	2.937,75	100	2.937,75	100	2.937,75	BKD
		Prosentase Pengendalian Luquiditas Kas Daerah	%	100	100	500,00	100	1.125,00	100	1.125,00	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00	BKD

		Prosentase Ketepatan Penyampaian Laporan Akuntansi Keuangan	%	100	100	515,00	100	1.124,60	100	1.124,60	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.200,00	BKD
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase penatausahaan aset daerah yang tertib	%	100	100	1.430,00	100	4.279,00	100	4.279,00	100	4.250,00	100	4.250,00	100	4.000,00	BKD
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Target PAD	%	2,35	3	3.900,53	3,5	6.024,37	4	6.024,37	4,5	6.000,00	5	6.000,00	4	6.000,00	BKD
1.1.1.5.		Indeks Sistem Merit	Kategori	I	I	10.352,07	II	11.458,89	II	12.604,80	II	13.865,27	III	15.251,81	III	15.251,81	BKPP
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	%	100	100	718,50	100	790,34	100	869,38	100	956,32	100	1.051,96	100	1.051,96	BKPP
		Prosentase terpenuhinya formasi kebutuhan ASN	%	97	97	1.225,84	98	1.348,42	98	1.483,27	98	1.631,59	100	1.794,75	100	1.794,75	BKPP
		Prosentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan	%	20	60	828,67	65	911,53	70	1.002,69	75	1.102,95	80	1.213,25	80	1.213,25	BKPP
		Prosentase penanganan kasus kepegawaian	%	80	83	384,98	85	495,12	87	544,63	88	599,09	90	659,00	90	659,00	BKPP
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	%	82,75	82,75	7.194,08	84,5	7.913,48	86	8.704,83	87	9.575,32	88,5	10.532,85	88,5	10.532,85	BKPP
1.1.1.6.		Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	56,41	75	3.660,33	81	4.712,00	83	5.183,20	85	5.701,52	87	6.271,67	90	6.898,84	DUKCAPIL
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	%	100%	100%	2.609,91	100%	3.045,00	100%	3.349,50	100%	3.684,45	100%	4.052,90	100%	4.458,19	DISDUKCAPIL
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100%	100%	555,85	100%	645,00	100%	709,50	100%	780,45	100%	858,50	100%	944,35	DISDUKCAPIL
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100%	100%	426,56	100%	802,00	100%	882,20	100%	970,42	100%	1.067,46	100%	1.174,21	DISDUKCAPIL
		2. Persentase Validitas Data Kependudukan	%	99%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DISDUKCAPIL
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan	%	100%	100%	68,00	100%	220,00	100%	242,00	100%	266,20	100%	292,82	100%	322,10	DISDUKCAPIL

Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas																	
2.1.	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,98	77,69	325.049,10	77,73	393.944,43	77,89	301.205,07	78,06	331.264,55	78,23	347.853,42	78,4	363.681,13	SETDA
		Angka Kemiskinan	%	7,68%	8,5-7,7		8,2-7,6		7,9-7,5		7,6-7,4		7,3-7,1		7,0-6,8	SETDA	
2.1.1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat					156.748,41		124.916,56		90.697,03		109.176,63		112.395,30		114.430,53	
2.1.1.1.		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,55	77,65	156.748,41	77,7	124.916,56	77,75	90.697,03	77,8	109.176,63	77,85	112.395,30	77,9	114.430,53	DKK
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit menular	%	100%	100%	275,38	100%	300,00	100%	350,00	100%	400,00	100%	450,00	100%	500,00	DKK
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	%	100%	100%	165,90	100%	200,00	100%	300,00	100%	360,00	100%	400,00	100%	430,00	DKK
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	%	100%	100%	443,66	100%	500,00	100%	600,00	100%	650,00	100%	700,00	100%	720,00	DKK
		Persentase FKTP terakreditasi	%	18%	18%	25.063,59	22%	25.500,00	28%	26.000,00	32%	27.000,00	40%	28.000,00	50%	28.500,00	DKK
		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	%	34%	34%	-	43%	300,00	60%	350,00	78%	400,00	86%	450,00	100%	500,00	DKK
		Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	%	20%	20%	-	40%	250,00	60%	300,00	80%	350,00	100%	350,00	100%	350,00	DKK
		Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	%	50%	49%	-	49%	100,00	50%	150,00	52%	250,00	53%	300,00	53%	320,00	DKK
		Persentase Capaian UHC	%	81%	81%	31.072,55	85%	35.000,00	90%	36.000,00	95%	37.000,00	95%	38.000,00	95%	38.500,00	DKK
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	%	100%	100%	58.037,00	100%	150,00	100%	200,00	100%	300,00	100%	400,00	100%	420,00	DKK
		Persentase cakupan puskesmas dengan	%	100%	100%	26,68	100%	150,00	100%	250,00	100%	260,00	100%	300,00	100%	350,00	DKK

		peningkatan kesehatan bayi															
		Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100%	100%	67,10	100%	100,00	100%	150,00	100%	200,00	100%	300,00	100%	330,00	DKK
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	%	100%	100%	3.352,71	100%	3.500,00	100%	3.600,00	100%	3.700,00	100%	4.000,00	100%	4.250,00	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar	%	100%	100%	33,06	100%	125,00	100%	150,00	100%	200,00	100%	300,00	100%	350,00	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reproduksi	%	100%	100%	63,87	100%	156,00	100%	200,00	100%	300,00	100%	350,00	100%	400,00	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	%	100%	100%	44,49	100%	60,00	100%	75,00	100%	100,00	100%	150,00	100%	17,50	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	%	47%	58%	854,82	67%	1.000,00	78%	1.250,00	89%	1.500,00	94%	1.750,00	97%	2.000,00	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	%	33%	42%	54,97	58%	100,00	67%	150,00	75%	175,00	92%	200,00	100%	250,00	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	%	83%	92%	25,00	100%	135,00	100%	150,00	100%	175,00	100%	200,00	100%	230,00	DKK
		Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	80%	80%	5.809,90	82%	8.310,00	84%	3.650,00	85%	650,00	86%	650,00	87%	650,00	DKK
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	%	47‰	<46‰	16.872,90	<45‰	31.690,00	<40‰	74,00	<35‰	19.000,00	<30‰	19.000,00	<25‰	19.000,00	DKK
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100%	100%	50,00	100%	2.470,00	100%	1.700,00	100%	1.250,00	100%	1.200,00	100%	1.250,00	DKK

1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	%	100%	100%	270,27	100%	300,00	100%	400,00	100%	450,00	100%	500,00	100%	600,00	DKK
		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	%	100%	100%	8.895,32	100%	9.170,56	100%	8.748,03	100%	8.346,63	100%	7.965,30	100%	7.603,03	DKK
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	%	71%	71%	314,41	76%	350,00	81%	400,00	86%	460,00	91%	480,00	96%	560,00	DKK
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa siaga aktif mandiri	%	40%	45%	4.954,83	46%	5.000,00	47%	5.500,00	48%	5.700,00	49%	6.000,00	50%	6.350,00	DKK
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan					149.707,19		177.463,10		177.579,61		185.045,72		193.527,22		203.300,85	
2.1.2.1		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,1	9,34	149.707,19	9,35	177.463,10	9,36	177.579,61	9,37	185.045,72	9,38	193.527,22	9,39	203.300,85	DINAS PENDIDIKAN, DISARPUS
2.1.2.2.		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,82	13,83		13,84		13,85		13,85		13,86		13,86		DINAS PENDIDIKAN, DISARPUS
1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan	%	92,33	93,23	149.250,19	94,13	176.582,45	95,03	176.602,11	95,92	183.946,09	96,82	192.294,93	97,72	201.894,16	DINAS PENDIDIKAN
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan	%	100	100	280,00	100	355,00	100	365,00	100	375,00	100	380,00	100	390,00	DINAS PENDIDIKAN
1 01 04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	%	42,26	51,1	20,00	59,94	30,65	68,78	43,50	75	54,98	80	62,87	85	77,24	DINAS PENDIDIKAN
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	%	46	46	157,00	48	495,00	50	569,00	51	669,65	53	789,43	53	939,45	DISARPUS
2.1.3.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk					2.208,97		3.310,28		3.628,44		3.747,20		3.813,90		3.762,75	
2.1.3.1		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88%	0,88%	2.208,97	0,88%	3.310,28	0,87%	3.628,44	0,87%	3.747,20	0,86%	3.813,90	0,86%	3.762,75	DPPKBP3A

2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	70	70	230,00	70	783,28	72	938,44	72	1.012,20	75	1.043,90	75	992,75	DPPKBP3A
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	%	68,05	68,5	1.494,97	68,85	1.845,00	69,4	1.970,00	69,75	1.985,00	70	1.995,00	70	1.995,00	DPPKBP3A
2 14 04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	%	70	72	484,00	74	682,00	76	720,00	78	750,00	80	775,00	80	775,00	DPPKBP3A
2.1.4.	Meningkatnya Kualitas Perempuan, Anak, Dan Pemuda					9.184,53		67.081,50		13.400,00		17.165,00		21.245,00		24.910,00	
2.1.4.1.		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,49	96,5	875,00	96,51	1.500,00	96,52	1.610,00	96,53	1.730,00	96,54	1.890,00	96,54	1.895,00	DPPKBP3A
2 08 02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	%	20	25	475,00	30	550,00	35	575,00	40	595,00	45	620,00	50	620,00	DPPKBP3A
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	%	100	100	165,00	100	225,00	100	250,00	100	300,00	100	350,00	100	350,00	DPPKBP3A
2 08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	%	0,12	0,12	105,00	0,15	180,00	0,16	200,00	0,17	200,00	0,18	260,00	0,18	260,00	DPPKBP3A
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data informasi PPPA yang tersedia	%	50	50	15,00	60	30,00	70	30,00	80	40,00	90	40,00	100	40,00	DPPKBP3A
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	650 (Madya)	650 (Madya)	80,00	675 (Madya)	400,00	700 (Nindya)	425,00	725 (Nindya)	455,00	750 (Nindya)	470,00	750 (Nindya)	475,00	DPPKBP3A
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	%	100	100	35,00	100	115,00	100	130,00	100	140,00	100	150,00	100	150,00	DPPKBP3A
2.1.4.2.		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	39,512	39,512	8.309,53	41,902	65.581,50	44,166	11.790,00	46,482	15.435,00	49,014	19.355,00	51,665	23.015,00	DISPORA
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	45,85	45,85	2.255,01	50	3.270,00	54,17	3.900,00	58,33	4.595,00	62,5	5.060,00	66,67	5.730,00	DISPORA
		Persentase wirausaha muda	%	10,95	11		11		11,51		12,02		12,54		13,05		DISPORA

2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	60	60	5.429,52	62,5	61.536,50	65	7.095,00	67,5	9.425,00	70	11.460,00	72,5	13.430,00	DISPORA
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	11,94	11,94		17,91		20,9		23,88		29,85		35,82		DISPORA
		Cakupan pembinaan atlet muda	%	24,36	24,36		29,04		34,16		39,29		44,41		49,54		DISPORA
		Persentase atlet berprestasi	%	62,81	62,81		63,75		64,34		64,94		66,12		57,89		DISPORA
2 19 04	Program Pengembangan Kepramukaan	Persentase Pramuka berprestasi	%	10	11	625,00	12	775,00	14	795,00	16	1.415,00	17	2.835,00	18	3.855,00	DISPORA
2.1.5	Meningkatnya Kearifan Budaya Lokal					1.832,00		8.047,00		2.533,00		2.533,00		3.045,00		3.330,00	
2.1.5.1.		Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	NA	20	1.832,00	23	8.047,00	26	2.533,00	29	2.533,00	32	3.045,00	35	3.330,00	DINAS P & K
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang	%	NA	10	1.832,00	20	8.047,00	30	2.533,00	40	2.533,00	50	3.045,00	60	3.330,00	DINAS P & K
2.1.6.	Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin					5.368,00		13.126,00		13.367,00		13.597,00		13.827,00		13.947,00	
2.1.6.1.		Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,3	4,25	5.368,00	4,2	13.126,00	4,15	13.367,00	4,1	13.597,00	4,05	13.827,00	4	13.947,00	DINAS SOSIAL
2.1.6.2.		Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,94	2,9		2,85		2,8		2,75		2,7		2,65		DINAS SOSIAL
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	%	21,76	34,67	983,00	47,65	650,00	60,57	691,00	73,52	716,00	86,47	741,00	99,42	771,00	DINAS SOSIAL
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	%	13,99	14,99	981,00	15,99	1.111,00	16,99	1.221,00	17,99	1.336,00	18,99	1.451,00	19,99	1.451,00	DINAS SOSIAL
1 06 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	%	3,03	3,56	3.404,00	4,13	11.365,00	4,63	11.455,00	5,13	11.545,00	5,63	11.635,00	6,12	11.725,00	DINAS SOSIAL
Misi 3 :Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif																	
3.1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-1,7	-1,7-1,7	44.830,29	1,7-2,7	61.500,92	2,7-3,7	110.479,94	3,7-4,7	59.815,24	4,7-5,7	56.780,11	5,7-6,7	63.258,00	SETDA
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,93	4,83-4,77		4,78-4,68		4,67-4,58		4,57-4,48		4,47-4,40		4,47-4,40		SETDA

		Pendapatan Per Kapita	Rp (Juta)	40,670	40,475	35.095,58	42,652	44,954	47,363	49,909	49,909	SETDA					
3.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas					35.095,58		49.158,90		97.678,72		46.672,18		43.780,33		50.175,33	
3.1.1.1.		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	5	7	-	9	40,00	11	40,00	13	40,00	15	40,00	17	40,00	DISDAGKOP dan UKM
3 30 02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi	%	0	0	-	100	40,00	100	40,00	100	40,00	100	40,00	100	40,00	DISDAGKOP dan UKM
3.1.1.2.		Pertumbuhan usaha mikro ke Usaha kecil	%	2,6	2,7	832,30	2,8	2.565,30	3,1	2.050,30	3,5	2.215,35	3,6	2.365,30	3,7	2.484,30	DISDAGKOP dan UKM
2 17 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Prosentase Permohonan ijin pembukuan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	%	100	100	90	100,00	450	100,00	315	100,00	325	100,00	340	100,00	340	DISDAGKOP dan UKM
2 17 03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Koperasi aktif	%	81,67	82	90	82,50	225	83,00	275	83,50	305	84,00	305	84,50	305	DISDAGKOP dan UKM
2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Prosentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	%	11,74	11,74	20	14,00	40	18,00	60	22,00	80	25,00	100	30,00	100	DISDAGKOP dan UKM
2 17 05	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	60	62	415.304	65,00	1140.304	70,00	590.304	75,00	590.304	80,00	590.304	82,00	590.304	DISDAGKOP dan UKM
2 17 06	Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	-1,19	3	25	4,00	50	4,50	75	5,00	100	5,50	125	6,00	150	DISDAGKOP dan UKM
2 17 07	Program Pemberdayaan UMKM	Prosentase kemitraan KUMKM	%	5,62	6,56	45	6,66	60	7,03	75	7,33	90	7,70	105	8,18	120	DISDAGKOP dan UKM
		Prosentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM	%	25	25	45	26,00	300	27,00	330	28,00	362,05	29,00	400	30,00	439	DISDAGKOP dan UKM
2 17 08	Program Pengembangan UMKM	Prosentase Peningkatan Omset Produk UMKM	%	20	25	102	26,00	300	27,00	330	28,00	363	29,00	400	30,00	440	DISDAGKOP dan UKM
3.1.1.3.		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-3,5	4,6	17.883,55	4,69	23.080,00	5,08	66.780,00	5,3	15.370,00	5,4	10.705,00	5,6	14.755,00	DISDAGKOP dan UKM
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar Rakyat yang nyaman dan sehat	%	76,9	80,7	17.163,55	84,6	21.820,00	88,4	65.520,00	92,3	14.070,00	96,1	8.120,00	96,1	12.170,00	DISDAGKOP dan UKM

3 30 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Pengendalian Harga	%	100	100	60,00	100	190,00	100	190,00	100	230,00	100	190,00	100	190,00	DISDAGKOP dan UKM
		Prosentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)	%	6,06	6,3	20,00	6,4	50,00	6,5	50,00	6,55	50,00	6,6	50,00	6,7	50,00	DISDAGKOP dan UKM
3 30 05	Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan Ekspor	%	-16,05	0,2	525,00	0,3	820,00	0,35	820,00	0,4	820,00	0,45	820,00	0,5	820,00	DISDAGKOP dan UKM
3 30 06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Pasar Tertib Ukur	%	7,6	15,3	115,00	23,1	200,00	30,7	200,00	38,4	200,00	46,1	200,00	53,8	200,00	DISDAGKOP dan UKM
3 30 07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	%	-66,58	20	984,00	10	1.325,00	10	1.325,00	10	1.325,00	10	1.325,00	10	1.325,00	DISDAGKOP dan UKM
3.1.1.4.		Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	-2,72	4,62	1.270,00	6,37	1.290,00	5,43	1.555,17	5,74	1.550,50	6,06	1.659,50	6,4	1.746,50	DISNAKER & PERINDUSTRIAN
3 31 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase terselainya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	%	0,1	10	740,00	0,17	725,00	0,17	834,00	0,17	895,50	0,17	979,50	0,17	1.066,50	DISNAKER & PERINDUSTRIAN
3 31 03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan	%	0,9	90	165,00	0,9	180,00	90	240,00	90	260,00	90	280,00	90	280,00	DISNAKER & PERINDUSTRIAN
3 31 04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	1	1	365,00	1	385,00	1	390,00	1	395,00	1	400,00	1	400,00	DISNAKER & PERINDUSTRIAN
3.1.1.5.		Pertumbuhan investasi	%	4	8	730,00	12	2.160,00	16	2.341,00	20	2.378,00	24	2.559,00	28	2.872,00	DPMPPTSP
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi	%	100	100	150,00	100	200,00	100	375,00	100	245,00	100	270,00	100	315,00	DPMPPTSP
		Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	100	100	60,00	100	180,00	100	210,00	100	230,00	100	250,00	100	270,00	DPMPPTSP
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo	%	0	2	95,00	2	920,00	2	880,00	2	960,00	2	1.030,00	2	1.210,00	DPMPPTSP
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi	%	0	0	-	100	90,00	100	99,00	100	109,00	100	118,00	100	128,00	DPMPPTSP
		Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non	%	100	100	140,00	100	215,00	100	240,00	100	265,00	100	290,00	100	315,00	DPMPPTSP

		Berusaha Penanaman Modal															
		Cakupan Pelayanan Penanaman Modal yang Optimal	%	100	100	15,00	100	60,00	100	67,00	100	74,00	100	81,00	100	89,00	DPMPTSP
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Realisasi Investasi	%	5,3	5,3	160,00	3	200,00	3	220,00	3	240,00	3	260,00	3	280,00	DPMPTSP
2 18 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Posentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100	100	110,00	100	295,00	100	250,00	100	255,00	100	260,00	100	265,00	DPMPTSP
3.1.1.6.		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, dan perikanan	%	2,27	2,3	10.959,00	2,5	17.077,00	2,7	19.354,00	3,1	19.229,00	3,5	20.189,00	4	21.517,00	DIPERTAN
3 27 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani	%	95	95,25	633,00	95,5	759,00	96	877,00	96,5	954,00	97	1.044,00	97	1.095,00	DIPERTAN
		Prosentase penggunaan benih padi bersertifikat	%	91	91,6		92		92,7		93,1		93,8		94		DIPERTAN
3 27 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani	%	68	70	7.390,00	72	10.110,00	75	11.280,00	77	11.660,00	78	11.985,00	80	12.910,00	DIPERTAN
		Jumlah Luas Tanam (Ha)	Ha	49,354	49,521		49,75		49,815		49,907		50,079		50,216		DIPERTAN
		Prosentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi	%	40,5	42,5		44		45,5		47		49		51		DIPERTAN
3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	32	32,5	480,00	33	1.101,00	33,5	1.601,00	34	666,00	34,5	595,00	35	650,00	DIPERTAN
		Jumlah Populasi ternak (animal unit)	Unit	19,84	20.028,48		20.228,76		20.441,17		20.666,02		20.976,01		21.227,72		DIPERTAN
3 27 05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase gagal panen	%	0,01	3	500,00	3	1.060,00	3	1.190,00	3	1.280,00	3	1.435,00	3	1.525,00	DIPERTAN
		Prosentase Pengendalian penyakit Zoonosis	%	0	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		DIPERTAN
3 27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berijin	%	50	60	25,00	70	40,00	80	55,00	90	70,00	95	75,00	100	85,00	DIPERTAN

3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kenaikan kelas kelompok	%	-	2	268,00	2	2.155,00	2,5	2.215,00	2,5	2.235,00	3	2.385,00	3	2.450,00	DIPERTAN
3 25 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	ton	388,35	392,32	100,00	396,25	110,00	400,21	125,00	404,21	150,00	408,25	175,00	412,33	200,00	DIPERTAN
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	ton	13.486,40	13.907,97	1.413,00	14.329,54	1.572,00	14.751,11	1.803,00	15.172,68	1.971,00	15.594,25	2.220,00	16.015,82	2.287,00	DIPERTAN
3 25 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB	Orang	15	25	15,00	35	30,00	45	35,00	55	55,00	65	65,00	75	85,00	DIPERTAN
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	Orang	1	3		5		7		9		11		13		DIPERTAN
3 25 06	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)	%	15,68	30	135,00	45	140,00	50	173,00	60	188,00	70	210,00	75	230,00	DIPERTAN
3.1.1.8.		Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	93,3	93,5	2.413,73	93,6	949,10	93,7	3.361,75	93,8	3.515,23	93,9	3.701,03	93,9	3.767,03	DINAS PANGAN
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	%	8,38	9,58	668,63	10,78	322,00	11,12	333,00	11,97	343,00	13,17	353,00	13,17	363,00	DINAS PANGAN
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	%	156,87	118,43	1.633,53	110,73	255,81	112,9	2.666,53	115,08	2.770,03	117,25	2.879,03	117,25	2.883,03	DINAS PANGAN
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis:															DINAS PANGAN
		Telur	%	7,1	7,1		6,8		6,5		6,1		5,9		5,9		DINAS PANGAN
		Bawang Merah	%	33,17	22,17		21,7		21,5		21,2		20,9		20,9		DINAS PANGAN
		Cabe	%	47,9	47,9		47,5		47,1		46,8		46,1		46,1		DINAS PANGAN
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	%	12,5	25	52,15	37,5	245,00	50	275,00	62,5	310,00	75	370,00	75	422,00	DINAS PANGAN
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Jenis Pangan yang Dilakukan Pengawasan	%	37,5	37,5	59,42	37,5	126,29	37,5	87,22	37,5	92,20	43,75	99,00	43,75	99,00	DINAS PANGAN
3.1.1.9.		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui	%	83	83	1.007,00	84	1.997,50	84	2.196,50	84	2.374,10	85	2.561,50	85	2.993,50	DISNAKERTRANS

		Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota															
2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi proyeksi indikator dalam RTK	%	100	90	75,00	90	82,50	90	90,00	90	98,00	90	106,00	90	345,50	DISNAKERTRANS
2 07 03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	90	90	297,00	0	792,00	0	871,00	0	956,50	0	1.050,00	0	1.151,50	DISNAKERTRANS
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	83	83	275,00	0,8333	678,00	0,8333	746,00	0,8333	824,60	0,8333	905,50	0,8333	996,50	DISNAKERTRANS
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Persentase Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	%	3	3	360,00	3	445,00	3	489,50	3	495,00	3	500,00	3	500,00	DISNAKERTRANS
3.1.2	Meningkatnya Kemandirian Desa					9.734,70		12.342,02		12.801,22		13.143,06		12.999,78		13.082,67	
3.1.2.1		Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,72	0,74	9.734,70	0,77	12.342,02	0,79	12.801,22	0,8	13.143,06	0,8	12.999,78	0,8	13.082,67	DPMP
2 13 02	Program Penataan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	100	2.294,72	100	2.779,72	100	2.939,72	100	2.979,72	100	3.029,72	100	3.099,72	DPMD
2 13 03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Jumlah Desa Yang Melaksanakan Kerjasama	%	2,67	2,67	260,00	4,67	455,00	6,67	525,00	8,67	625,00	10,67	625,00	12,67	675,00	DPMD
2 13 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan Pengawasan Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	33,33	33,33	2.723,60	40	4.380,00	46,67	4.370,00	53,33	4.540,00	60	4.415,00	66,67	4.370,00	DPMD
2 13 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Jenis Lembaga kemasyarakat Desa yang dibina	%	33,33	33,33	4.456,39	50	4.727,30	50	4.966,50	50	4.998,34	50	4.930,06	50	4.937,95	DPMD
Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan																	
4.1	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	55,03	57,2	266.551,70	58,12	284.678,91	62,44	293.831,43	65,55	304.142,33	68,34	313.530,54	69,01	324.347,31	SETDA

4.1.1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur					266.551,70		280.708,91		289.551,43		299.432,33		308.340,54		318.627,31	
4.1.1.1.		Persentase Lingkungan Hunian Layak	%	72,49	75,54	48.545,00	78,59	49.195,00	81,65	49.195,00	84,7	49.195,00	87,76	49.195,00	90,81	49.195,00	DPKP
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Prosentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani	%	29,98	30,89	22.750,00	31,81	22.750,00	32,72	22.750,00	33,64	22.750,00	34,56	22.750,00	35,47	22.750,00	DPKP
1 04 04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani	%	38,27	39,49	25.270,00	40,71	25.270,00	41,93	25.270,00	43,15	25.270,00	44,38	25.270,00	45,6	25.270,00	DPKP
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah	%	4,24	5,16	525,00	6,08	1.175,00	6,99	1.175,00	7,91	1.175,00	8,83	1.175,00	9,75	1.175,00	DPKP
4.1.1.2.		Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	77,15%	80,84	184.983,67	82,74	194.799,30	86,9	200.090,00	88,01	205.668,00	88,36	210.365,24	88,41	215.682,74	DPUPR
		Akses air minum yang layak	%	92,24	94		96		98		100		100		100		DPUPR
1 03 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan	%	69,85%	70,14%	2.800,18	70,33%	3.090,00	70,53%	3.400,00	70,73%	3.740,00	70,93%	4.120,00	71,12%	4.540,00	DPUPR
		Akses Sanitasi yang layak	%	97,91	98		98,5		99		100		100		100		DPUPR
1 03 05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	%	2,13%	2,21%	1.873,00	2,24%	880,00	2,27%	880,00	2,30%	970,00	2,32%	1.070,00	2,35%	1.180,00	DPUPR
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	%	41%	43%	9.095,49	46%	12.000,00	50%	12.500,00	53%	13.000,00	55%	15.000,00	55%	15.000,00	DPUPR
1 03 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	6,06%	6,48%	5.500,00	6,56%	7.300,00	7,06%	8.100,00	7,55%	9.000,00	8,06%	9.900,00	8,54%	10.900,00	DPUPR
1 03 09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Prosentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi	%	40%	40%	-	60%	2.500,00	80,00%	2.800,00	100,00%	3.100,00	100,00%	900,00	100,00%	1.100,00	DPUPR
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	%	30,58%	30,67	165.715,00	31,07	169.029,30	31,47	172.410,00	31,87	175.858,00	32,27	179.375,24	32,67	182.962,74	DPUPR
4.1.1.3.		Indeks Fatalitas	Angka	0,0645	0,27	32.127,10	0,265	35.696,78	0,26	38.992,25	0,256	43.193,11	0,252	47.332,42	0,25	52.263,66	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	%	80%	81%	28.837,33	82%	32.041,48	83%	35.245,63	84%	38.770,19	85%	42.467,21	86%	46.911,93	DINAS PERHUBUNGAN

		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	%	10,27	10,27%	1.605,70	10,27%	1.784,11	10,27%	1.784,11	11,00%	2.158,77	11,49%	2.374,65	11,98%	2.612,11	DINAS PERHUBUNGAN
		Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	%	70,00%	70,30%	1.684,08	70,60%	1.871,20	70,90%	1.962,52	71,20%	2.264,15	71,50%	2.490,56	71,80%	2.739,62	DINAS PERHUBUNGAN
4.1.1.4.		Cakupan layanan telekomunikasi	%	45,00%	48%	895,93	50	1.017,83	68	1.274,18	78	1.376,22	88	1.447,88	100	1.485,91	DISKOMINFO
2 16 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintahan daerah	%	45	48	895,93	58	1.017,83	68	1.274,18	78	1.376,22	88	1.447,88	100	1.485,91	DISKOMINFO
		Indek Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	59,05	61,03	15.809,00	61,12	29.966,68	61,22	30.766,18	61,32	32.478,05	61,41	33.183,65	61,51	36.176,60	SETDA
4.1.2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan					17.869,00		33.200,68		34.380,18		36.465,05		37.825,65		40.818,60	
4.1.2.1		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	45	50,25	15.809,00	50,5	29.966,68	50,75	30.766,18	51	32.478,05	51,25	33.183,65	51,5	36.176,60	DLH
4.1.2.2		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,23	87,23		87,23		87,24		87,24		87,25		87,25		DLH
4.1.2.3		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,08	31,08		31,09		31,09		31,09		31,09		31,1		DLH
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	100%	16,16%	220,00	32,32%	400,00	50%	350,00	62,62%	250,00	84,84%	250,00	100%	450,00	DLH
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	%	100%	20%	865,00	40%	1.580,00	60%	1.900,00	80%	2.200,00	100%	3.425,00	100%	5.100,00	DLH
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Capaian IKTL	%	31,08	31,08	85,00	31,09	4.155,00	31,09	4.190,00	31,09	4.200,00	31,09	4.265,00	31,1	4.265,00	DLH
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten	%	100%	20%	65,00	40%	160,00	60%	195,00	80%	220,00	100%	240,00	100%	255,00	DLH

2 11 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, PUULH, dan izin yang diterbitkan oleh kabupaten	%	100%	20%	100,00	40%	200,00	60%	270,00	80%	330,00	100%	370,00	100%	410,00	DLH
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase penyelenggaraan pendidikan, dan penyuluhan lingkungan	%	100%	11%	50,00	24%	150,00	43%	230,00	62%	230,00	81%	230,00	100%	230,00	DLH
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase penghargaan lingkungan hidup	%	100%	10,00%	30,00	20%	30,00	40,00%	60,00	60%	60,00	80%	60,00	100%	60,00	DLH
2 11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100%	100%	40,00	100%	125,00	100%	160,00	100%	180,00	100%	195,00	100%	210,00	DLH
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengurangan sampah	%	19,76	24%	14.354,00	73%	23.166,68	27%	23.411,18	28%	24.808,05	30%	24.148,65	30%	25.196,60	DLH
		Prosentase penanganan sampah	%	47,01	74%		26%		72%		71%		70%		70%		DLH
		Indeks Risiko Bencana	Nilai	93,2	93,1	2.060,00	93	3.234,00	92,7	3.614,00	92,5	3.987,00	92,25	4.642,00	92	4.642,00	SETDA
3.1.2.4.		Indeks kapasitas daerah	Nilai	0,3	0,3	2.060,00	0,32	3.234,00	0,35	3.614,00	0,4	3.987,00	0,45	4.642,00	0,5	4.642,00	BPBD
01 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian penanggulangan bencana	%	100%	100%	600,00	100%	825,00	100%	965,00	100%	808,00	100%	1.145,00	100%	1.145,00	BPBD
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	95	95,2	1.460,00	95,3	2.409,00	95,4	2.649,00	95,5	3.179,00	95,6	3.497,00	95,6	3.497,00	SATPOL PP
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan																	
5.1	Terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang aman dan nyaman					10.199,00		18.657,00		11.654,00		18.284,00		12.698,00		12.698,00	
		Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	%	85,7	86,1	10.199,00	86,83	18.657,00	87,23	11.654,00	87,97	18.284,00	88,37	12.698,00	88,5	12.698,00	SETDA

5.1.1	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat					5.349,00		10.432,00		6.759,00		10.014,00		7.763,00		7.763,00	
5.1.1.1.		Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	89,9	90,34	5.349,00	90,72	10.432,00	91,11	6.759,00	91,49	10.014,00	91,88	7.763,00	91,9	7.763,00	SATPOL PP
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	97	97,2	540,00	97,3	783,00	97,4	861,00	97,5	1.076,00	97,6	1.184,00	97,6	1.184,00	SATPOL PP
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3)	%	98	98,1	3.374,00	98,2	3.712,00	98,3	4.083,00	98,4	5.308,00	98,5	4.492,00	98,5	4.492,00	SATPOL PP
		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	50	52	1.435,00	54	5.937,00	56	1.815,00	58	3.630,00	60	2.087,00	60	2.087,00	SATPOL PP
5.1.2	Meningkatnya Kesatuan Bangsa Dan Bernegara					4.850,00		8.225,00		4.895,00		8.270,00		4.935,00		4.935,00	
5.1.2.1.		Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	NA	75	4.850,00	78	8.225,00	80	4.895,00	82	8.270,00	85	4.935,00	85	4.935,00	KESBANGPOL
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila	%	NA	72	230,00	75	240,00	78	250,00	80	260,00	82	270,00	82	270,00	KESBANGPOL
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang paham politik	%	NA	72	1.265,00	75	1.275,00	78	1.285,00	80	1.290,00	82	1.300,00	82	1.300,00	KESBANGPOL
8 01 04	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase masyarakat yang paham dalam menjaga kerukunan umat beragama	%	NA	75	3.355,00	78	6.710,00	80	3.360,00	82	6.720,00	85	3.365,00	85	3.365,00	KESBANGPOL
TOTAL						762.752,08		879.493,42		848.959,55		851.554,72		873.318,78		906.173,87	

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III pada sub bab 3.3. Pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan beberapa asumsi:

1. Meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak utamadaerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
2. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
3. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Percetakan Daerah (PERCADA), BPR/BKK, dan lainnya yang dilakukan dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi BUMD.

Berdasarkan kebijakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Wali Kabupaten Sukoharjo kepada Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI terkait Revisi Laporan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Atas dasar hal tersebut maka untuk tahun dasar menggunakan data penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Sedangkan, untuk proyeksi tahun 2021 menggunakan data yang sudah diproyeksikan dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021. Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi penerimaan daerah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 7.1.
Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2021-2026

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.954.129.147.000	1.965.656.116.000	1.979.198.075.000	1.995.323.675.000	2.013.653.176.000	2.035.153.588.000
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	343.113.739.000	353.953.756.000	366.663.129.000	381.875.937.000	399.209.652.000	419.628.214.000
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	165.755.493.000	174.043.268.000	184.485.865.000	197.399.876.000	212.402.267.000	230.456.460.000
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	19.132.880.000	19.706.867.000	20.101.005.000	20.503.026.000	20.913.087.000	21.331.349.000
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.400.013.000	27.060.014.000	27.601.215.000	28.153.240.000	28.716.305.000	29.290.632.000
1. 1. 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.825.353.000	133.143.607.000	134.475.044.000	135.819.795.000	137.177.993.000	138.549.773.000
1. 2.	Pendapatan Transfer	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000	1.539.320.209.000
1. 2. 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000	1.375.762.271.000
1. 2. 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000	163.557.938.000
1. 3.	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	71.695.199.000	72.382.151.000	73.214.737.000	74.127.529.000	75.123.315.000	76.205.165.000
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1. 3. 2	Lain-2 Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan per-UU	68.695.199.000	69.382.151.000	70.214.737.000	71.127.529.000	72.123.315.000	73.205.165.000
	Jumlah Pendapatan	1.954.129.147.000	1.965.656.116.000	1.979.198.075.000	1.995.323.675.000	2.013.653.176.000	2.035.153.588.000
2.	BELANJA DAERAH	2.247.461.474.000	2.179.408.362.000	2.188.175.517.000	2.199.621.809.000	2.213.365.588.000	2.230.371.992.000
2. 1.	Belanja Operasi	1.495.770.203.224	1.495.876.682.000	1.499.869.024.000	1.506.255.661.000	1.514.692.863.000	1.526.049.036.000

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1. 1	Belanja Pegawai	900.347.880.400	922.247.139.000	946.629.019.000	972.589.612.000	997.468.937.000	1.022.425.095.000
2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	531.531.231.260	509.738.451.000	489.348.913.000	469.774.957.000	453.332.834.000	439.732.849.000
2. 1. 3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
2. 1. 4	Belanja Subsidi	6.420.312.864	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000	6.420.313.000
2. 1. 5	Belanja Hibah	48.335.122.700	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000	48.335.123.000
2. 1. 6	Belanja Bantuan Sosial	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000	9.135.656.000
2. 2.	Belanja Modal	410.126.534.480	369.113.882.000	372.805.021.000	376.533.072.000	380.298.403.000	384.101.388.000
2. 3.	Belanja Tidak Terduga	39.033.115.296	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
2. 4.	Belanja Transfer	302.531.621.000	303.417.798.000	304.501.472.000	305.833.076.000	307.374.322.000	309.221.568.000
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	27.298.997.000	28.185.174.000	29.268.848.000	30.600.452.000	32.141.698.000	33.988.944.000
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000	275.232.624.000
	Jumlah Belanja	2.247.461.474.000	2.179.408.362.000	2.188.175.517.000	2.199.621.809.000	2.213.365.588.000	2.230.371.992.000
	Surplus / (Defisit)	-293.332.327.000	-213.752.246.000	-208.977.442.000	-204.298.134.000	-199.712.412.000	-195.218.404.000
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	293.332.327.000	213.752.246.000	208.977.442.000	204.298.134.000	199.712.412.000	195.218.404.000
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan	318.320.327.000	258.740.246.000	253.965.442.000	249.286.134.000	224.700.412.000	220.206.404.000
3. 1. 1	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)</i>	<i>318.320.327.000</i>	258.740.246.000	253.965.442.000	249.286.134.000	224.700.412.000	220.206.404.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	318.320.327.000	258.740.246.000	253.965.442.000	249.286.134.000	224.700.412.000	220.206.404.000

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
3.	2.	Pengeluaran Pembiayaan	24.988.000.000	44.988.000.000	44.988.000.000	44.988.000.000	24.988.000.000	24.988.000.000	
3.	2.	1	Pembentukan Dana Cadangan	0	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
3.	2.	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.988.000.000	24.988.000.000	24.988.000.000	24.988.000.000	24.988.000.000	24.988.000.000
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.988.000.000	44.988.000.000	44.988.000.000	44.988.000.000	24.988.000.000	24.988.000.000	
		Pembiayaan Netto	293.332.327.000	213.752.246.000	208.977.442.000	204.298.134.000	199.712.412.000	195.218.404.000	
3.	3.		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0	0	0

Sumber: BKD Kabupaten Sukoharjo, 2021

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Dalam hal ini pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung.

Belanja Daerah akan digunakan untuk menyelesaikan urusan wajib yang terkait layanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sektor-sektor berdasarkan kewenangan urusan/konkuren yang wajib non layanan dasar dan pilihan. Perhitungan kerangka pendanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan diarahkan untuk:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan;
4. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
5. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Mengutamakan pembiayaan untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026;
7. Membiayai penyusunan dan penyiapan kegiatan proyek-proyek daerah yang akan memberikan kontribusi pendapatan daerah.

Mendasarkan kerangka pendanaan tersebut, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada Tabel 7.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan

belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

7.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan, dan mendukung dalam pencapaian indikator: Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, \square Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat, Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi, Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun, Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun, Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH), Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar dan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan

c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan

2. Kesehatan

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan

Masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten. Serta mendukung capaian indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita, Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, Prevalensi anemia pada ibu hamil, Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup, Kejadian Malaria per 1000 orang, Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I), Prevalensi tekanan darah tinggi, Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, Unmet need pelayanan kesehatan, Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, dan Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya dan Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten. Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten serta pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Desa siaga aktif mandiri. Serta mendukung capaian indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun, dan Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Daerah irigasi dalam kondisi baik

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak pedesaan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, dan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan system dan pengelolaan persampahan di Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi rumah tangga yang dilayani sistem pengelolaan persampahan persampahan di setiap desa/ kelurahan

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan

sanitasi layak, Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS), Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal, Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

e. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat kemantapan infrastruktur jalan poros desa

f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Prosentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Indikator kinerja program ini adalah Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator terlaksananya pengembangan jasa konstruksi

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator prosentase perwujudan terhadap perencanaan tata ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Prosentase Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang Diterbitkan dan persentase rumah korban bencana yang sudah tertangani.

b. Program Kawasan Permukiman

Dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator prosentase kawasan kumuh yang sudah tertangani, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Prosentase RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian. Program ini diarahkan pada pencapaian indicator prosentase PSU yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah, persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.

e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Prosentase penerbitan sertifikasi pengembang perumahan

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penegakan Perda dan Perkada, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) serta Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, persentase kepatuhan pelaksanaan UU

Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

c. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase capaian penanggulangan bencana, jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah, Indeks risiko bencana pada pusat pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah, jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana, dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah, dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah, dan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

6. Sosial

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya, dan mendukung capaian proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Prosentase penanganan rehabilitasi sosial, persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas, persentase penduduk

umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran, angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri, konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.

c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten, Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase pemenuhan penanganan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial, pendampingan psikososial korban bencana sosial, dan Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan

f. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan.

7.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja mikro dan makro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase Akurasi proyeksi indikator dalam RTK, persentase tenaga kerja formal, dan persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, upah rata-rata per jam pekerja, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, tingkat setengah pengangguran, dan persentase usia muda (15-24 tahun) yang

sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten, pengelolaan informasi pasar kerja dan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota, proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Lembaga yang Responsif Gender dan mendukung capaian indikator jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti, untuk mendukung capaian proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir, proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase data informasi PPPA yang tersedia

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Skor Kabupaten Layak Anak

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti

3. Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu prosentase desa/kelurahan yang mengelola lumbung pangan, serta mendukung prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*), prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan, dan Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu prosentase ketersediaan energi (kalori) dan koefisien variasi harga pangan strategis, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*), prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan kegiatan penanganan kerawanan pangan pada kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu prosentase desa/kelurahan rawan pangan yang ditangani, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*), prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu prosentase jenis pangan yang dilakukan pengawasan, proporsi kematian akibat keracunan.

4. Pertanian

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan penanganan sengketa tanah garapan

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan perencanaan penatagunaan tanah

5. Lingkungan Hidup

a. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan untuk kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase volume sampah yang dikelola.

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten dan penyelenggaraan KLHS kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator yaitu prosentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan, kualitas air danau, kualitas air sungai sebagai sumber air baku, jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001, proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai capaian IKTL, jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang, proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, dan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator kinerja yaitu prosentase pengendalian b3 dan lb3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten, jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha

dan kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu prosentase ketaatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, PUULH, dan ijin yang diterbitkan oleh kabupaten, jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indicator Prosentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan untuk kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase penghargaan lingkungan hidup

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup

j. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu prosentase pengurangan sampah dan prosentase penanganan sampah, persentase sampah perkotaan yang tertangani, Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

6. Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk. Program ini dilaksanakan untuk indicator Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelayanan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil. Serta mendukung capaian indikator median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun, proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur, persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah, dan persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. program ini dilaksanakan mencapai indicator cakupan lembaga pengguna yang kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan

persentase validitas data kependudukan, dan mendukung capaian indikator tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*vital statistics register*).

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini dilaksanakan mencapai indicator Persentase pengelolaan profil kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong penyelenggaraan penataan desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indicator kinerja yaitu Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu Prosentase Jumlah Desa Yang Melaksanakan Kerjasama

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu Prosentase Pembinaan Pengawasan Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten. Pencapaian indikator kinerja pada program ini yaitu persentase jenis lembaga kemasyarakatan desa yang dibina, jumlah daerah tertinggal yang terentaskan, jumlah desa tertinggal, jumlah desa mandiri, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.

8. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yang meliputi Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan

budaya lokal. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Peserta KB Aktif. Serta mendukung capaian indikator Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia, Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern, Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*), Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*), Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi, *Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi), Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan kelompok kegiatan yang aktif, dan mendukung capaian indikator Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan Terakhir, Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir, Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

9. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, pengelolaan terminal penumpang Tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan, Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum dan Prosentase kendaraan bermotor wajib uji

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Kinerja layanan penyeberangan sungai

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Kinerja layanan perkeretaapian

10. Komunikasi dan Informatika

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Badan Publik terbuka

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten, dan pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dan prosentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah.

11. Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Permohonan ijin pembukuan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP

b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Koperasi aktif

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya

d. Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan, Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan, Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri, Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.

e. Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi

f. Program Pemberdayaan UMKM

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase kemitraan KUMKM dan Prosentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM, Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa, Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum), dan Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.

g. Program Pengembangan UMKM

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase

Peningkatan Omset Produk UMKM

12. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi dan Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi, Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal dan Cakupan Pelayanan Penanaman Modal yang Optimal

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Realisasi Investasi

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

12. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan Persentase wirausaha muda

b. Program pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah

provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Pembinaan Olahraga, Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, Cakupan pembinaan atlet muda dan Persentase atlet berprestasi

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pramuka berprestasi

13. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dimana Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektorial di lingkup daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Ketersediaan Data Statistik Sektorial

14. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dimana Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Ketersediaan Layanan Keamanan Informasi

13. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten, dan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang

b. Program Pembinaan Sejarah

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Warisan Budaya yang dilestarikan

c. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan

14. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten, dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno

15. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten, pengelolaan arsip statis daerah kabupaten, dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna

7.1.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi perikanan Tangkap

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Produksi Perikanan Budidaya (ton)

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah Pembudisaya bersertifikat CBIB dan Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan

d. Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)

2. Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Daya

Tarik/Destinasasi Wisata yang ditingkatkan, Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB, Jumlah wisatawan mancanegara, Jumlah devisa sektor pariwisata, Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase event pariwisata yang diadakan

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program

ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan, jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.

3. Pertanian

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten, dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan Prosentase penggunaan benih padi bersertifikat, Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani, Jumlah Luas Tanam (Ha) dan Prosentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi, Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten, dan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan Jumlah Populasi ternak (animal unit)

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase gagal panen dan Prosentase Pengendalian penyakit Zoonosis

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang

kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berijin

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase kenaikan klas kelompok

4. Perdagangan

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan untuk kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Pasar Rakyat yang nyaman dan sehat

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk kegiatan yang meliputi pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Pengendalian Harga dan Prosentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Peningkatan Ekspor

e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini difokuskan untuk kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Pasar Tertib Ukur

f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Hasil Transaksi Dalam Pameran

5. Perindustrian

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase terselaikannya dokumen RPIP sampai dengan

ditetapkannya menjadi perda, dan mendukung Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita, serta Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten

Program ini diarahkan untuk kegiatan penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan untuk kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

6. Transmigrasi

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan untuk kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Prosentase Pemenuhan Alokasi Tujuan Transmigran

7.1.4. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program Administrasi Umum

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD dan Cakupan kinerja pelayanan kedinasan/KDH/Wakil KDH. Serta mendukung capaian indikator Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah, Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum, Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, dan mendukung capaian indikator Indeks Kebebasan Sipil, dan Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA; Cakupan pengadaan barang dan jasa dan Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan. Serta mendukung

capaian indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita., PDB per kapita, Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun, dan Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.

2. Sekretariat DPRD

a. Program Administrasi Umum

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang mendapatkan dukungan

7.1.5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini yaitu Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan ketercapaian target tahunan terhadap sasaran RPJMD melalui penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase koordinasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Prosentase Dokumen Penganggaran yang tepat waktu, Prosentase Pengendalian Luquiditas Kas Daerah dan Prosentase Ketepatan Penyampaian Laporan Akuntansi Keuangan. Serta mendukung capaian indikator Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan, Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah, dan Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase penatausahaan aset daerah yang tertib

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan guna mewujudkan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase Peningkatan Target PAD. Serta mendukung capaian indikator Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, dan Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

3. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diorientasikan untuk kegiatan peningkatan kapasitas ASN, pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian, Prosentase terpenuhinya formasi kebutuhan ASN, Prosentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan dan Prosentase penanganan kasus kepegawaian

4. Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diorientasikan untuk kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Prosentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana

4. Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan guna mendukung pengembangan daerah dengan penerapannya diarahkan pada kegiatan pengelolaan data kelitbangan, pengembangan inovasi serta perekayasaan di bidang teknologi. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

7.1.6. Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut temuan hasil Pemeriksaan BPK, Presentase Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP, Cakupan penilaian mandiri SPIP dan Persentase jumlah PDTT yang selesai ditangani

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di

bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase pemenuhan kebijakan teknis di bidang pengawasan, Cakupan pendampingan dan Sistensi di bidang Pengawasan, Persentase jumlah kasus yang ditangani sesuai kewenangannya dan Presentase OPD yang menerapkan manajemen risiko.

7.1.7. Unsur Kewilayahan

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

7.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase Peningkatan masyarakat yang paham ideologi pancasila dan karakter bangsa

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Peningkatan pemahaman politik bagi pemilih pemula

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Prosentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas perangkat daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**.

Program ini diarahkan untuk kegiatan pendukung operasional yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Peningkatan pelayanan dan ketepatan pelaporan .

7.2. Kerangka Pendanaan Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Mendasarkan pada kemampuan fiskal yang berpotensi tidak sepenuhnya dapat membiayai kebutuhan belanja pembangunan maka kerangka pendanaan non APBD akan diperoleh dari:

1. Pengembangan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
2. Pendayagunaan peran BUMD untuk menangani proyek-proyek strategis kabupaten. Penyertaan modal akan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong bisnis-bisnis BUMD untuk menyelesaikan urusan daerah yang bersifat strategis;
3. Optimalisasi peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP);
4. Pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang berasal dari Lembaga Donor, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), partisipasi masyarakat dan swasta.

Apabila pendanaan non APBD ini dapat dilaksanakan maka kerangka pendanaan APBD tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo akan dilakukan penyesuaian.

Sedangkan penjabaran program seluruh perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo, tertuang dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	URUSAN WAJIB				711.164,15		741.691,98		664.053,43		712.580,98		732.444,35		740.434,27		4.302.369,15	
I	Terkait Pelayanan Dasar				624.067,67		573.906,06		539.702,97		576.084,99		586.725,03		586.740,06		3.487.226,79	
1,1	Pendidikan				149.550,19		163.076,10		170.372,71		177.738,53		182.908,16		182.209,48		1.025.855,17	DINAS P & K
1 01 02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan	92,33	93,23	149.250,19	94,13	162.720,72	95,03	169.979,53	95,92	177.324,03	96,82	182.487,89	97,72	182.209,48	97,72	1.023.971,83	DINAS P & K
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum pendidikan yang dikembangkan	100	100	280,00	100	327,13	100	351,31	100	361,50	100	360,62	100	351,98	100	2.032,54	DINAS P & K
1 01 04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	42,26	51,1	20,00	59,94	28,24	68,78	41,87	75	53,00	80	59,66	85	69,71	85	272,48	DINAS P & K
1,2	Kesehatan				156.748,41		115.110,61		87.295,89		105.246,27		106.663,14		103.273,56		674.337,87	DKK
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit menular	100%	100%	275,38	100%	276,45	100%	336,88	100%	385,60	100%	427,05	100%	451,25	100%	2.152,60	DKK
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100%	100%	165,90	100%	184,30	100%	288,75	100%	347,04	100%	379,60	100%	388,08	100%	1.753,66	DKK
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan	100%	100%	443,66	100%	460,75	100%	577,50	100%	626,60	100%	664,30	100%	649,80	100%	3.422,61	DKK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		pelayanan imunisasi dan surveilans																
		Persentase FKTP terakreditasi	18%	18%	25.063,59	22%	23.498,25	28%	25.025,00	32%	26.028,00	40%	26.572,00	50%	25.721,25	50%	151.908,09	DKK
		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	34%	34%	-	43%	276,45	60%	336,88	78%	385,60	86%	427,05	100%	451,25	100%	1.877,23	DKK
		Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	20%	20%	-	40%	230,38	60%	288,75	80%	337,40	100%	332,15	100%	315,88	100%	1.504,55	DKK
		Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	50%	49%	-	49%	92,15	50%	144,38	52%	241,00	53%	284,70	53%	288,80	53%	1.051,03	DKK
		Persentase Capaian UHC	81%	81%	31.072,55	85%	32.252,50	90%	34.650,00	95%	35.668,00	95%	36.062,00	95%	34.746,25	95%	204.451,30	DKK
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	100%	100%	58.037,00	100%	138,23	100%	192,50	100%	289,20	100%	379,60	100%	379,05	100%	59.415,58	DKK
		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	100%	100%	26,68	100%	138,23	100%	240,63	100%	250,64	100%	284,70	100%	315,88	100%	1.256,75	DKK
		Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	100%	67,10	100%	92,15	100%	144,38	100%	192,80	100%	284,70	100%	297,83	100%	1.078,95	DKK
		Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	100%	100%	3.352,71	100%	3.225,25	100%	3.465,00	100%	3.566,80	100%	3.796,00	100%	3.835,63	100%	21.241,38	DKK
		persentase Puskesmas dengan cakupan	100%	100%	33,06	100%	115,19	100%	144,38	100%	192,80	100%	284,70	100%	315,88	100%	1.085,99	DKK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		yankes pada usia pendidikan dasar																
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reprduksi	100%	100%	63,87	100%	143,75	100%	192,50	100%	289,20	100%	332,15	100%	361,00	100%	1.382,47	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia	100%	100%	44,49	100%	55,29	100%	72,19	100%	96,40	100%	142,35	100%	15,79	100%	426,52	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	47%	58%	854,82	67%	921,50	78%	1.203,13	89%	1.446,00	94%	1.660,75	97%	1.805,00	97%	7.891,19	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	33%	42%	54,97	58%	92,15	67%	144,38	75%	168,70	92%	189,80	100%	225,63	100%	875,62	DKK
		Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	83%	92%	25,00	100%	124,40	100%	144,38	100%	168,70	100%	189,80	100%	207,58	100%	859,85	DKK
		Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	80%	80%	5.809,90	82%	7.657,67	84%	3.513,13	85%	626,60	86%	616,85	87%	586,63	87%	18.810,77	RSUD
		NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	47% ^{oo}	<46% ^{oo}	16.872,90	<45% ^{oo}	29.202,34	<40% ^{oo}	71,23	<35% ^{oo}	18.316,00	<30% ^{oo}	18.031,00	<25% ^{oo}	17.147,50	<25% ^{oo}	99.640,96	RSUD
		Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100%	100%	50,00	100%	2.276,11	100%	1.636,25	100%	1.205,00	100%	1.138,80	100%	1.128,13	100%	7.434,28	RSUD
1 02 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya	100%	100%	270,27	100%	276,45	100%	385,00	100%	433,80	100%	474,50	100%	541,50	100%	2.381,52	DKK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Daya Manusia Kesehatan	Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya																
		Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	100%	100%	8.895,32	100%	8.450,67	100%	8.419,98	100%	8.046,15	100%	7.559,07	100%	6.861,74	100%	48.232,92	RSUD
1 02 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman	persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	71%	71%	314,41	76%	322,53	81%	385,00	86%	443,44	91%	455,52	96%	505,40	96%	2.426,30	DKK
1 02 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa siaga aktif mandiri	40%	45%	4.954,83	46%	4.607,50	47%	5.293,75	48%	5.494,80	49%	5.694,00	50%	5.730,88	50%	31.775,75	DKK
																	-	
1,3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				255.237,07		229.459,30		215.327,00		222.131,00		228.157,24		235.146,74		1.385.458,35	DPUPR
1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	41%	43%	9.095,49	46%	12.000,00	50%	12.500,00	53%	13.000,00	55%	15.000,00	55%	15.000,00	55%	76.595,49	DPUPR
1 03 03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan	69,85%	70,14%	2.800,18	70,33%	3.090,00	70,53%	3.400,00	70,73%	3.740,00	70,93%	4.120,00	71,12%	4.540,00	71,12%	21.690,18	DPUPR
1 03 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Proporsi rumah tangga yang dilayani sistem pengelolaan persampahan persampahan di	2,99%	3,59%	563,03	4,19%	630,00	4,79%	700,00	5,39%	770,00	5,99%	940,00	6,59%	940,00	6,59%	4.543,03	DPUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		setiap desa/ kelurahan																
1 03 05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	2,13%	2,21%	1.873,00	2,24%	880,00	2,27%	880,00	2,30%	970,00	2,32%	1.070,00	2,35%	1.180,00	2,35%	6.853,00	DPUPR
1 03 06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	6,06%	6,48%	5.500,00	6,56%	7.300,00	7,06%	8.100,00	7,55%	9.000,00	8,06%	9.900,00	8,54%	10.900,00	8,54%	50.700,00	DPUPR
1 03 07	Program Pengembangan Permukiman	capaian peningkatan infrastruktur jalan poros desa dalam kondisi mantap	15,55%	21,26%	12.099,00	26,10%	11.300,00	30,94%	12.500,00	35,79%	13.800,00	40,63%	15.200,00	45,47%	16.800,00	45,47%	81.699,00	DPUPR
1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber PBG dan SLF	25,47%	25,86%	57.356,37	26,24%	21.400,00	26,63%	240,00	27,01%	240,00	27,40%	240,00	27,78%	250,00	27,78%	79.726,37	DPUPR
1 03 09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Prosentase penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi	40%	40%	-	60%	2.500,00	80,00%	2.800,00	100,00%	3.100,00	100,00%	900,00	100,00%	1.100,00	100,00%	10.400,00	DPUPR
1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	30,58%	30,67	165.715,00	31,07	169.029,30	31,47	172.410,00	31,87	175.858,00	32,27	179.375,24	32,67	182.962,74	32,67	1.045.350,28	DPUPR
1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100%	100%	85,00	100%	110,00	100%	120,00	100%	130,00	100%	140,00	100%	150,00	100%	735,00	DPUPR
1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase perwujudan terhadap perencanaan tata ruang	45%	50%	150,00	55%	1.220,00	60%	1.677,00	65%	1.523,00	70%	1.272,00	70%	1.324,00	70%	7.166,00	DPUPR
																	-	
1,4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				49.570,00		46.277,73		48.336,75		48.412,08		47.658,78		45.323,55		285.578,89	DPKP
1 04 02	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Sertifikat Kepemilikan	0	0	50,00	0	46,08	0	48,13	0	48,20	0	47,45	0	45,13	0	284,98	DPKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Bagunan Gedung yang Diterbitkan																
		Prosentase rumah korban bencana yang sudah tertangani	0	8	950,00	10	875,43	15	914,38	15	915,80	20	901,55	68	857,38	68	5.414,53	DPKP
1 04 03	Program Kawasan Permukiman	Prosentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani	29,98	30,89	22.750,00	31,81	20.964,13	32,72	21.896,88	33,64	21.931,00	34,56	21.589,75	35,47	20.531,88	35,47	129.663,63	DPKP
1 04 04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani	38,27	39,49	25.270,00	40,71	23.286,31	41,93	24.322,38	43,15	24.360,28	44,38	23.981,23	45,6	22.806,18	45,6	144.026,37	DPKP
1 04 05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah	4,24	5,16	525,00	6,08	1.082,76	6,99	1.130,94	7,91	1.132,70	8,83	1.115,08	9,75	1.060,44	9,75	6.046,91	DPKP
2 04 06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Prosentase penerbitan sertifikasi pengembang perumahan	0	6,25	25,00	18,75	23,04	18,75	24,06	18,75	24,10	25	23,73	25	22,56	25	142,49	DPKP
																	-	
1,5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat				7.409,00		12.593,22		9.984,01		13.496,96		11.772,35		11.195,51		66.451,05	SATPOL PP dan BPBD
1 05 02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan Perda dan Perkada	97	97,2	540,00	97,3	721,53	97,4	828,71	97,5	1.037,26	97,6	1.123,62	97,6	1.068,56	97,6	5.319,69	SATPOL PP
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban	98	98,1	3.374,00	98,2	3.420,61	98,3	3.929,89	98,4	5.116,91	98,5	4.262,91	98,5	4.054,03	98,5	24.158,35	SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ketentraman dan Keindahan (K3)																
		Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	50	52	1.435,00	54	5.470,95	56	1.746,94	58	3.499,32	60	1.980,56	60	1.883,52	60	16.016,28	SATPOL PP
01 05 03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian penanggulangan bencana	100%	100%	600,00	100%	760,24	100%	928,81	100%	778,91	100%	1.086,61	100%	1.033,36	100%	5.187,93	BPBD
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	95	95,2	1.460,00	95,3	2.219,89	95,4	2.549,66	95,5	3.064,56	95,6	3.318,65	95,6	3.156,04	95,6	15.768,81	SATPOL PP
																	-	
1,6	Sosial				5.553,00		7.389,10		8.386,61		9.060,15		9.565,37		9.591,23		49.545,46	DINAS SOSIAL
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	21,76	34,67	983,00	47,65	598,98	60,57	665,09	73,52	690,22	86,47	703,21	99,42	695,83	99,42	4.336,32	DINAS SOSIAL
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan	26,67	32	75,00	100	78,33	100	91,44	100	101,22	100	109,14	100	112,81	100	567,93	DINAS SOSIAL
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	13,99	14,99	981,00	15,99	1.023,79	16,99	1.175,21	17,99	1.287,90	18,99	1.377,00	19,99	1.309,53	19,99	7.154,43	DINAS SOSIAL
1 06 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	3,03	3,56	3.404,00	4,13	5.529,00	4,63	6.256,25	5,13	6.748,00	5,63	7.117,50	6,12	7.220,00	6,12	36.274,75	DINAS SOSIAL
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Prosentase pemenuhan penanganan bencana	60,87	73,91	110,00	73,91	129,01	73,91	163,63	73,91	192,80	73,91	213,53	73,91	203,06	73,91	1.012,02	DINAS SOSIAL
1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan	1	1	25,00	1	30,00	1	35,00	1	40,00	1	45,00	1	50,00	1	#VALUE!	DINAS SOSIAL
																	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar				87.096,48	-	167.785,92	-	124.350,45	-	136.495,98	-	145.719,32	-	153.694,21	-	815.142,36	
2,7	Tenaga Kerja;				1.007,00		1.840,70		2.114,13		2.288,63		2.430,86		2.701,63		12.382,96	DISNAKERTRANS
2 07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Akurasi proyeksi indikator dalam RTK	100	90%	75,00	90%	76,02	90%	86,63	90%	94,47	90%	100,59	90%	311,81	90%	744,53	DISNAKERTRANS
2 07 03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	90	90	297,00	0	729,83	0	838,34	0	922,07	0	996,45	0	1.039,23	0	4.822,91	DISNAKERTRANS
2 07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	83	83	275,00	83%	624,78	83%	718,03	83%	794,91	83%	859,32	83%	899,34	83%	4.171,38	DISNAKERTRANS
2 07 05	Program Hubungan Industrial	Prosentase Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	3	3	360,00	3	410,07	3	471,14	3	477,18	3	474,50	3	451,25	3	2.644,14	DISNAKERTRANS
2,8	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak				875,00		1.382,25		1.549,63		1.667,72		1.793,61		1.710,24		8.978,44	DPPKBP3A
2 08 02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase Lembaga yang Responsif Gender	20	25	475,00	30	506,83	35	553,44	40	573,58	45	588,38	50	559,55	50	3.256,77	DPPKBP3A
2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti	100	100	165,00	100	207,34	100	240,63	100	289,20	100	332,15	100	315,88	100	1.550,19	DPPKBP3A
2 08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan	0,12	0,12	105,00	0,15	165,87	0,16	192,50	0,17	192,80	0,18	246,74	0,18	234,65	0,18	1.137,56	DPPKBP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		jadi pelaku usaha ekonomi																
2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data informasi PPPA yang tersedia	50	50	15,00	60	27,65	70	28,88	80	38,56	90	37,96	100	36,10	100	184,14	DPPKBP3A
2 08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	650 (Madya)	650 (Madya)	80,00	675 (Madya)	368,60	700 (Nindya)	409,06	725 (Nindya)	438,62	750 (Nindya)	446,03	750 (Nindya)	428,69	750 (Nindya)	2.171,00	DPPKBP3A
2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti	100	100	35,00	100	105,97	100	125,13	100	134,96	100	142,35	100	135,38	100	678,78	DPPKBP3A
2,9	Pangan				2.413,73		3.019,15		3.259,72		3.412,75		3.535,97		3.438,53		19.079,85	DINAS PANGAN
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	8,38	9,58	668,63	10,78	296,72	11,12	320,51	11,97	330,65	13,17	335,00	13,17	327,61	13,17	2.279,12	DINAS PANGAN
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	171,13	118,43	1.633,53	120,8	2.380,28	123,17	2.590,57	125,54	2.694,38	127,91	2.755,90	127,91	2.624,47	127,91	14.679,13	DINAS PANGAN
		Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis:					-		-		-		-		-		-	DINAS PANGAN
		Telur	7,1	7,1		6,8		6,5		6,1		5,9		5,9		5,9		DINAS PANGAN
		Bawang Merah	33,17	22,17		21,7		21,5		21,2		20,9		20,9		20,9		DINAS PANGAN
		Cabe	47,9	47,9		47,5		47,1		46,8		46,1		46,1		46,1		DINAS PANGAN
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	12,5	25	52,15	37,5	225,77	50	264,69	62,5	298,84	75	351,13	75	397,10	75	1.589,68	DINAS PANGAN
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Jenis Pangan yang	37,5	37,5	59,42	37,5	116,38	37,5	83,95	37,5	88,88	43,75	93,95	43,75	89,35	43,75	531,92	DINAS PANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Dilakukan Pengawasan																
2,10.	Pertanahan				150,00		215,00		280,00		315,00		380,00		445,00		1.785,00	DPUPR
2 10 05	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Cakupan penanganan sengketa tanah garapan	10%	16%	20,00	24%	25,00	34%	30,00	46%	35,00	60%	40,00	76%	45,00	76%	195,00	DPUPR
2 10 04	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	13%	27%	30,00	40%	40,00	53%	50,00	67%	60,00	80%	70,00	93%	80,00	93%	330,00	DPUPR
2 10 10	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan perencanaan penatagunaan tanah	26%	33%	100,00	48%	150,00	50%	200,00	57%	220,00	75%	270,00	93%	320,00	93%	1.260,00	DPUPR
2,11	Lingkungan Hidup				15.809,00		27.614,29		29.612,44		31.308,84		31.491,28		32.649,38		168.485,24	DLH
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	16,16%	220,00	32,32%	368,60	50%	336,88	62,62%	241,00	84,84%	237,25	100%	406,13	100%	1.809,85	DLH
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian pencemaran dan kerusakan pada sumber pencemaran dan perusakan lingkungan	100%	20%	865,00	40%	1.455,97	60%	1.828,75	80%	2.120,80	100%	3.250,33	100%	4.602,75	100%	14.123,60	DLH
2 11 04	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Capaian IKTL	31,08	31,08	85,00	31,09	3.828,83	31,09	4.032,88	31,09	4.048,80	31,09	4.047,49	31,1	3.849,16	31,1	19.892,16	DLH
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya	Prosentase pengendalian B3 dan LB3 pada penghasil dan pengumpul skala kabupaten	100%	20%	65,00	40%	147,44	60%	187,69	80%	212,08	100%	227,76	100%	230,14	100%	1.070,11	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Dan Beracun (Limbah B3)																	
2 11 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase ketaatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH, PUULH, dan ijin yang diterbitkan oleh kabupaten	100%	20%	100,00	40%	184,30	60%	259,88	80%	318,12	100%	351,13	100%	370,03	100%	1.583,45	DLH
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan	100%	11%	50,00	24%	138,23	43%	221,38	62%	221,72	81%	218,27	100%	207,58	100%	1.057,17	DLH
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase penghargaan lingkungan hidup	100%	10,00%	30,00	20%	27,65	40,00%	57,75	60%	57,84	80%	56,94	100%	54,15	100%	284,33	DLH
2 11 10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	40,00	100%	115,19	100%	154,00	100%	173,52	100%	185,06	100%	189,53	100%	857,29	DLH
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengurangan sampah	19,76	24%	14.354,00	73%	21.348,09	27%	22.533,26	28%	23.914,96	30%	22.917,07	30%	22.739,93	30%	127.807,31	DLH
		Prosentase penanganan sampah	47,01	74%		26%	-	72%	-	71%	-	70%	-	70%	-	70%	-	DLH
																	-	
2,12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				3.660,33		4.342,11		4.988,83		5.496,27		5.951,82		6.226,20		30.665,55	DISDUKCAPIL
2 12 02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	100%	100%	2.609,91	100%	2.805,97	100%	3.223,89	100%	3.551,81	100%	3.846,20	100%	4.023,51	100%	20.061,29	DISDUKCAPIL
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	555,85	100%	594,37	100%	682,89	100%	752,35	100%	814,71	100%	852,27	100%	4.252,45	DISDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Cakupan Lembaga Pengguna yang Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	426,56	739,04	849,12	935,48	1.013,02	1.059,72	5.022,95	DISDUKCAPIL						
		2. Persentase Validitas Data Kependudukan	99%	100%	-	-	-	-	-	-	-	DISDUKCAPIL						
2 12 05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	68,00	202,73	232,93	256,62	277,89	290,70	1.328,86	DISDUKCAPIL						
2,13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				9.734,70	11.744,26	12.507,42	12.849,85	12.588,22	12.288,56	71.713,00	DPMD						
2 13 02	Program Penataan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100	100	2.294,72	2.561,51	2.829,48	2.872,45	2.875,20	2.797,50	16.230,85	DPMD						
2 13 03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Jumlah Desa Yang Melaksanakan Kerjasama	2,67	2,67	260,00	419,28	505,31	602,50	593,13	609,19	2.989,41	DPMD						
2 13 04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan Pengawasan Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	33,33	33,33	2.723,60	4.036,17	4.206,13	4.376,56	4.189,84	3.943,93	23.476,22	DPMD						
2 13 05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Jenis Lembaga kemasyarakatan Desa yang dibina	33,33	33,33	4.456,39	4.727,30	4.966,50	4.998,34	4.930,06	4.937,95	29.016,53	DPMD						
2,14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				2.208,97	3.111,91	3.527,56	3.648,74	3.672,63	3.492,68	19.662,48	DPPKBP3A						
2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah yang berperan	70	70	230,00	783,28	938,44	1.012,20	1.043,90	992,75	5.000,56	DPPKBP3A						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB																
2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	68,05	68,5	1.494,97	68,85	1.700,17	69,4	1.896,13	69,75	1.913,54	70	1.893,26	70	1.800,49	70	10.698,55	DPPKBP3A
2 14 04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	70	72	484,00	74	628,46	76	693,00	78	723,00	80	735,48	80	699,44	80	3.963,38	DPPKBP3A
2,15	Perhubungan				32.221,60		32.991,34		37.641,21		41.760,63		45.051,10		47.306,69		236.972,57	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	80%	81%	28.837,33	82%	29.526,22	83%	33.923,92	84%	37.374,46	85%	40.301,38	86%	42.338,02	86%	212.301,33	DINAS PERHUBUNGAN
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	10,27	10,27%	1.605,70	10,27%	1.644,05	10,27%	1.717,20	11,00%	2.081,05	11,49%	2.253,54	11,98%	2.357,43	11,98%	11.658,98	DINAS PERHUBUNGAN
		Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	70,00%	70,30%	1.684,08	70,60%	1.724,31	70,90%	1.888,92	71,20%	2.182,64	71,50%	2.363,54	71,80%	2.472,50	71,80%	12.315,99	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 03	Program Pengelolaan Pelayaran	Kinerja layanan penyeberangan sungai	100%	100	22,50	100	23,04	100	26,47	100	29,16	100	31,58	100	33,03	100	165,78	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Kinerja layanan perkeretaapian	100%	100	72,00	100	73,72	100	84,70	100	93,32	100	101,05	100	105,71	100	530,49	DINAS PERHUBUNGAN
2,16	Komunikasi Dan Informatika				6.504,81		7.551,69		8.744,31		9.582,00		10.149,57		11.294,79		53.827,17	DISKOMINFO
2 16 02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Prosentase Badan Publik terbuka	15	25	1.660,00	35	1.584,98	45	2.021,25	55	2.356,90	65	2.552,81	75	3.610,00	95,1	13.785,94	DISKOMINFO
2 16 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	75	75	3.948,88	80	4.948,88	85	5.448,88	90	5.848,88	95	6.148,88	100	6.198,88	3,4	32.543,28	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase penyelenggaraan jaringan intra pemerintahan daerah	45	48	895,93	58	1.017,83	68	1.274,18	78	1.376,22	88	1.447,88	100	1.485,91	100	7.497,95	DISKOMINFO
																	-	
2,17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				832,30		2.363,93		1.973,42		2.135,60		2.244,67		2.242,08		11.792,01	DISDAGKOP dan UKM
2 17 02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Prosentase Permohonan ijin pembukuan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	100	100	90,00	100	414,68	100	303,19	100	313,30	100	322,66	100	306,85	100	1.750,67	DISDAGKOP dan UKM
2 17 03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Koperasi aktif	81,67	82	90,00	82,5	207,34	83	264,69	83,5	294,02	84	289,45	84,5	275,26	84,5	1.420,75	DISDAGKOP dan UKM
2 17 04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Prosentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	11,74	11,74	20,00	14	36,86	18	57,75	22	77,12	25	94,90	30	90,25	30	376,88	DISDAGKOP dan UKM
2 17 05	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	60	62	415,30	65	1.050,79	70	568,17	75	569,05	80	560,20	82	532,75	82	3.696,26	DISDAGKOP dan UKM
2 17 06	Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	-1,19	3	25,00	4	46,08	4,5	72,19	5	96,40	5,5	118,63	6	135,38	6	493,66	DISDAGKOP dan UKM
2 17 07	Program Pemberdayaan UMKM	Prosentase kemitraan KUMKM	5,62	6,56	45,00	6,66	55,29	7,03	72,19	7,33	86,76	7,7	99,65	8,18	108,30	8,18	467,18	DISDAGKOP dan UKM
		Prosentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM	25	25	45,00	26	276,45	27	317,63	28	349,02	29	379,60	30	396,20	30	1.763,89	DISDAGKOP dan UKM
2 17 08	Program Pengembangan UMKM	Prosentase Peningkatan	20	25	102,00	26	276,45	27	317,63	28	349,93	29	379,60	30	397,10	30	1.822,71	DISDAGKOP dan UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Omset Produk UMKM																
2,18	Penanaman Modal				730,00		1.990,44		2.253,21		2.292,39		2.428,49		2.591,98		12.286,52	DPMPTSP
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Regulasi yang mendukung iklim investasi	100	100	150,00	100	184,30	100	360,94	100	236,18	100	256,23	100	284,29	100	1.471,94	DPMPTSP
		Cakupan Potensi Unggulan dan Peluang Investasi di Kabupaten Sukoharjo	100	100	60,00	100	165,87	100	202,13	100	221,72	100	237,25	100	243,68	100	1.130,64	DPMPTSP
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Kepeminatan Investasi di Kabupaten Sukoharjo	0	2	95,00	2	847,78	2	847,00	2	925,44	2	977,47	2	1.092,03	2	4.784,72	DPMPTSP
2 18 04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang mendukung Investasi	0	0	-	100	82,94	100	95,29	100	105,08	100	111,98	100	115,52	100	510,80	DPMPTSP
		Prosentase Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Penanaman Modal	100	100	140,00	100	198,12	100	231,00	100	255,46	100	275,21	100	284,29	100	1.384,08	DPMPTSP
		Cakupan Pelayanan Penanaman Modal yang Optimal	100	100	15,00	100	55,29	100	64,49	100	71,34	100	76,87	100	80,32	100	363,31	DPMPTSP
2 18 05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Realisasi Investasi	5,3	5,3	160,00	3	184,30	3	211,75	3	231,36	3	246,74	3	252,70	3	1.286,85	DPMPTSP
2 18 06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem	Prosentase Pengelolaan Data dan Sistem	100	100	110,00	100	271,84	100	240,63	100	245,82	100	246,74	100	239,16	100	1.354,19	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Informasi Penanaman Modal	Informasi Penanaman Modal																
																	-	
2,19	Kepemudaan Dan Olah Raga				8.309,53		60.433,35		11.347,88		14.879,34		18.367,90		20.771,04		134.109,03	DINAS PEMUDA OR
2 19 02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	45,85	45,85	2.255,01	50	3.013,31	54,17	3.753,75	58,33	4.429,58	62,5	4.801,94	66,67	5.171,33	66,67	23.424,91	DINAS PEMUDA OR
		Persentase wirausaha muda	10,95	11		11	-	11,51	-	12,02	-	12,54	-	13,05	-	13,05	-	DINAS PEMUDA OR
2 19 03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	60	60	5.429,52	62,5	56.705,88	65	6.828,94	67,5	9.085,70	70	10.875,54	72,5	12.120,58	72,5	101.046,16	DINAS PEMUDA OR
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	11,94	11,94		17,91	-	20,9	-	23,88	-	29,85	-	35,82	-	35,82	-	DINAS PEMUDA OR
		Cakupan pembinaan atlet muda	24,36	24,36		29,04	-	34,16	-	39,29	-	44,41	-	49,54	-	49,54	-	DINAS PEMUDA OR
		Persentase atlet berprestasi	62,81	62,81		63,75	-	64,34	-	64,94	-	66,12	-	57,89	-	57,89	-	DINAS PEMUDA
2 19 04	Program Pengembangan Kepramukaan	Persentase Pramuka berprestasi	10	11	625,00	12	714,16	14	765,19	16	1.364,06	17	2.690,42	18	3.479,14	18	9.637,96	DINAS PEMUDA OR
																	-	
2,20.	Statistik;				155,00		157,12		179,99		199,55		216,37		225,63		1.133,65	DISKOMINFO
2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	100	155,00	100	157,12	100	179,99	100	199,55	100	216,37	100	225,63	100	1.133,65	DISKOMINFO
																	-	
2,21	Persandian				255,50		263,09		302,23		333,54		361,57		857,38		2.373,30	DISKOMINFO
2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Prosentase Ketersediaan Layanan Keamanan Informasi	100%	100	255,50	100	263,09	100	302,23	100	333,54	100	361,57	100	857,38	100	2.373,30	DISKOMINFO
																	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2,22	Kebudayaan;				1.932,00		7.922,14		3.082,89		3.203,37		3.800,75		4.088,33		24.029,47	DINAS P & K
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Obyek Pemajuan kebudayaan yang berkembang	NA	10	1.832,00	20	7.415,31	30	2.438,01	40	2.441,81	50	2.889,71	60	3.005,33	60	20.022,17	DINAS P & K
2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Prosentase Warisan Budaya yang dilestarikan	NA	NA		10	184,30	20	240,63	20	289,20	20	379,60	20	451,25	20	1.544,98	DINAS P & K
2 22 05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	2	2	100,00	2,5	322,53	5,5	404,25	9	472,36	13	531,44	18	631,75	18	2.462,33	DINAS P & K
2,23	Perpustakaan				182,00		483,79		576,54		678,32		784,76		885,76		3.591,16	DISARPUS
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	46	46	157,00	48	456,14	50	547,66	51	645,54	53	749,17	53	847,85	53	3.403,37	DISARPUS
02 23 03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	NA	0	25,00	14	27,65	21	28,88	21	32,78	21	35,59	98	37,91	98	187,79	DISARPUS
2,24	Kearsipan.				115,00		359,39		409,06		443,44		469,76		478,33		2.274,97	DISARPUS
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			90,00		322,53		360,94		385,60		403,33		406,13		1.968,51	DISARPUS
02.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna			25,00		36,86		48,13		57,84		66,43		72,20		306,46	DISARPUS
B.	PELAYANAN URUSAN PILIHAN				33.204,13		41.881,79		88.963,88		38.947,05		34.390,37		37.690,66		275.077,87	
3,25	Kelautan Dan Perikanan;				1.663,00		1.706,62		2.055,90		2.278,90		2.533,83		2.528,81		12.767,05	DISPERTAN
3 25 03	Program Pengelolaan	Produksi perikanan Tangkap	388,35	392,32	100,00	396,25	101,37	400,21	120,31	404,21	144,60	408,25	166,08	412,33	180,50	412,33	812,85	DISPERTAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Perikanan Tangkap																	
3 25 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	13.486,40	13.907,97	1.413,00	14.329,54	1.448,60	14.751,11	1.735,39	15.172,68	1.900,04	15.594,25	2.106,78	16.015,82	2.064,02	16.015,82	10.667,83	DISPERTAN
3 25 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pembudisaya bersertifikat CBIB	15	25	15,00	35	27,65	45	33,69	55	53,02	65	61,69	75	76,71	75	267,75	DISPERTAN
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan	1	3		5	-	7	-	9	-	11	-	13	-	13	-	DISPERTAN
3 25 06	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki izin Usaha (RTP)	15,68	30	135,00	45	129,01	50	166,51	60	181,23	70	199,29	75	207,58	75	1.018,62	DISPERTAN
																	-	
3,26	Pariwisata				1.857,58		2.246,23		3.125,24		2.558,46		2.910,58		3.091,06		15.789,15	DINAS P & K
03 26 02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik/Destinas Wisata yang ditingkatkan	0	10	600,00	20	1.022,87	30	1.573,69	45	636,24	50	650,07	50	640,78	50	5.123,63	DINAS P & K
03 26 03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase event pariwisata yang diadakan	0	0	305,00	11	322,53	13	382,11	15	428,02	17	466,91	19	536,99	19	2.441,55	DINAS P & K
03 26 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikembangkan	0	300	952,58	400	900,84	500	1.169,44	650	1.494,20	800	1.793,61	900	1.913,30	900	8.223,97	DINAS P & K
																	-	
3,27	Pertanian				9.296,00		14.029,84		16.572,33		16.257,86		16.625,53		16.890,29		89.671,84	DIPERTAN
3 27 02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani	95	95,25	633,00	95,5	699,42	96	844,11	96,5	919,66	97	990,76	97	988,24	97	5.075,18	DISPERTAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Prosentase penggunaan benih padi bersertifikat	91	91,6		92	-	92,7	-	93,1	-	93,8	-	94	-	94	-	DISPERTAN
3 27 03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani	68	70	7.390,00	72	9.316,37	75	10.857,00	77	11.240,24	78	11.373,77	80	11.651,28	80	61.828,65	DISPERTAN
		Jumlah Luas Tanam (Ha)	49,354	49,521		49,75	-	49,815	-	49,907	-	50,079	-	50,216	-	50,216	-	DISPERTAN
		Prosentase BPP Kecamatan sesuai Standar Kompetensi	40,5	42,5		44	-	45,5	-	47	-	49	-	51	-	51	-	DISPERTAN
3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	32	32,5	480,00	33	1.014,57	33,5	1.540,96	34	642,02	34,5	564,66	35	586,63	35	4.828,84	DISPERTAN
		Jumlah Populasi ternak (animal unit)	19,84	20.028,48		20.228,76	-	20.441,17	-	20.666,02	-	20.976,01	-	21.227,72	-	21.227,72	-	DISPERTAN
3 27 05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase gagal panen	0,01	3	500,00	3	976,79	3	1.145,38	3	1.233,92	3	1.361,82	3	1.376,31	3	6.594,21	DISPERTAN
		Prosentase Pengendalian penyakit Zoonosis	0	0,1		0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	DISPERTAN
3 27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berijin	50	60	25,00	70	36,86	80	52,94	90	67,48	95	71,18	100	76,71	100	330,17	DISPERTAN
3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kenaikan klas kelompok	-	2	268,00	2	1.985,83	2,5	2.131,94	2,5	2.154,54	3	2.263,37	3	2.211,13	3	11.014,80	DISPERTAN
																	-	
3,30.	Perdagangan				18.917,55		22.526,07		65.589,56		16.132,54		10.195,15		13.352,49		146.713,35	DISDAGKOP dan UKM
3 30 02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase permohonan izin usaha perdagangan yang	0	0	50,00	100	36,86	100	38,50	100	38,56	100	36,10	100	36,10	100	236,12	DISDAGKOP dan UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		memperoleh rekomendasi																
3 30 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar Rakyat yang nyaman dan sehat	76,9	80,7	17.163,55	84,6	20.107,13	88,4	63.063,00	92,3	13.563,48	96,1	7.705,88	96,1	10.983,43	96,1	132.586,47	DISDAGKOP dan UKM
3 30 04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Pengendalian Harga	100	100	60,00	100	175,09	100	182,88	100	221,72	100	180,31	100	171,48	100	991,47	DISDAGKOP dan UKM
		Prosentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)	6,06	6,3	20,00	6,4	46,08	6,5	48,13	6,55	48,20	6,6	47,45	6,7	45,13	6,7	254,98	DISDAGKOP dan UKM
3 30 05	Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan Ekspor	-16,05	0,2	525,00	0,3	755,63	0,35	789,25	0,4	790,48	0,45	778,18	0,5	740,05	0,5	4.378,59	DISDAGKOP dan UKM
3 30 06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Pasar Tertib Ukur	7,6	15,3	115,00	23,1	184,30	30,7	192,50	38,4	192,80	46,1	189,80	53,8	180,50	53,8	1.054,90	DISDAGKOP dan UKM
3 30 07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	-66,58	20	984,00	10	1.220,99	10	1.275,31	10	1.277,30	10	1.257,43	10	1.195,81	10	7.210,84	DISDAGKOP dan UKM
3,31	Perindustrian				1.270,00		1.188,74		1.409,10		1.494,68		1.574,87		1.576,22		8.513,60	DISNAKERTRANS
3 31 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase terselainya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	10%	10	740,00	17%	668,09	17%	802,73	17%	863,26	17%	929,55	17%	962,52	17%	4.966,14	DISNAKERTRANS
3 31 03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan	90%	90	165,00	90%	165,87	90	231,00	90	250,64	90	265,72	90	252,70	90	1.330,93	DISNAKERTRANS
3 31 04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	365,00	100%	354,78	100%	375,38	100%	380,78	100%	379,60	100%	361,00	100%	2.216,53	DISNAKERTRANS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3,32	Transmigrasi				200,00		184,30		211,75		224,61		550,42		251,80		1.622,88	DISNAKERTRANS
3 32 02	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase Pemenuhan Alokasi Tujuan Transmigrasi	0	100	200,00	100	184,30	100	211,75	100	224,61	100	550,42	100	251,80	100	1.622,88	DISNAKERTRANS
C.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				123.453,44	-	120.446,77	-	131.727,70	-	139.671,10	-	140.923,18	-	138.013,29	-	794.235,48	
4,1	Sekretariat Daerah				60.865,60		52.969,07		57.161,26		59.240,78		60.201,36		57.939,38		348.377,44	SETDA
4 01 01	Program Administrasi Umum				49.025,18		39.695,14		42.485,39		43.589,83		43.848,22		41.699,71		260.343,47	
		Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	100	100	44.060,10	100	34.751,22	100	36.936,49	100	37.646,68	100	37.617,96	100	35.774,72	100	226.787,16	Bagian Umum
		Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH	100	100	4.965,09	100	4.943,93	100	5.548,90	100	5.943,14	100	6.230,27	100	5.924,99	100	33.556,31	Bagian Prokompim
4 01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				9.214,52		8.712,78		9.528,75		10.073,80		10.405,79		10.311,06		58.246,70	
		Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	100	100	1.205,00	100	1.290,10	100	1.540,00	100	1.735,20	100	1.898,00	100	1.805,00	100	9.473,30	Bagian Pemerintahan
		Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	93,5	95,5	1.600,00	96	1.571,16	96,5	1.732,50	97	1.826,78	97,5	1.945,45	97,5	1.850,13	97,5	10.526,01	Bagian Hukum
		Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan	100	100	6.650,00	100	6.261,59	100	6.785,63	100	7.008,28	100	6.998,88	100	6.655,94	100	40.360,31	Bagian Kesra

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rakyat dan Kemasyarakata																
4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan				2.625,90		4.561,14		5.147,12		5.577,15		5.947,35		5.928,61		29.787,27	
		Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	100	100	1.554,30	100	1.575,52	100	1.810,18	100	1.994,30	100	2.159,59	100	2.053,77	100	11.147,66	Bagian Perekonomian dan SDA
		Cakupan pengadaan barang dan jasa	99,7	100	206,60	100	2.091,77	100	2.403,32	100	2.647,77	100	2.867,23	100	2.999,41	100	13.216,10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	86,71	88	865,00	89	893,86	90	933,63	91	935,08	92	920,53	92	875,43	92	5.423,52	Bagian Administrasi Pembangunan
4,2	Sekretariat DPRD				62.587,84		67.477,70		74.566,44		80.430,33		80.721,82		80.073,91		445.858,04	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01	Program Administrasi Umum	Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	39.928,19	100%	43.799,76	100%	48.242,07	100%	52.769,60	100%	52.206,45	100%	51.770,11	100%	288.716,18	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang mendapatkan dukungan	100%	100%	22.659,65	100%	23.677,94	100%	26.324,38	100%	27.660,72	100%	28.515,37	100%	28.303,80	100%	157.141,86	SEKRETARIAT DPRD
D.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.291,60		28.395,66		32.149,81		33.523,15		34.126,78		32.651,24		182.138,25	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5,1	Perencanaan				2.660,00		3.243,68		4.626,63		4.706,28		4.599,07		4.795,98		24.631,63	BAPPELBANGDA
5 01 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	80	80	1.600,00	80	1.359,21	80	1.626,63	80	1.706,28	80	1.599,07	80	1.795,98	80	9.687,16	BAPPELBANGDA
5 01 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase koordinasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah	80	80%	1.060,00	84%	1.884,47	88%	3.000,00	92%	3.000,00	96%	3.000,00	100%	3.000,00	100%	14.944,47	BAPPELBANGDA
																	-	
5,2	Keuangan				8.054,53		14.274,70		14.909,82		15.026,59		14.792,77		13.842,32		80.900,73	BKD
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Dokumen Penganggaran yang tepat waktu	100	100	1.709,00	100	2.707,14	100	2.827,58	100	2.831,99	100	2.787,92	100	2.651,32	100	15.514,96	BKD
		Prosentase Pengendalian Luquiditas Kas Daerah	100	100	500,00	100	1.036,69	100	1.082,81	100	1.156,80	100	1.138,80	100	1.083,00	100	5.998,10	BKD
		Prosentase Ketepatan Penyampaian Laporan Akuntansi Keuangan	100	100	515,00	100	1.036,32	100	1.082,43	100	1.156,80	100	1.138,80	100	1.083,00	100	6.012,35	BKD
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase penatausahaan aset daerah yang tertib	100	100	1.430,00	100	3.943,10	100	4.118,54	100	4.097,00	100	4.033,25	100	3.610,00	100	21.231,88	BKD
5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Target PAD	2,35	3	3.900,53	3,5	5.551,46	4	5.798,46	4,5	5.784,00	5	5.694,00	4	5.415,00	4	32.143,44	BKD
																	-	
5,3	Kepegawaian				3.157,99		3.267,10		3.753,72		4.135,51		4.478,29		4.258,86		23.051,47	BKPP
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah	Prosentase penyelesaian	100	100	718,50	100	728,30	100	836,78	100	921,89	100	998,31	100	949,39	100	5.153,17	BKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		administrasi kepegawaian																
		Prosentase terpenuhinya formasi kebutuhan ASN	97	97	1.225,84	98	1.242,57	98	1.427,65	98	1.572,85	100	1.703,22	100	1.619,76	100	8.791,89	BKPP
		Prosentase jabatan yang terisi sesuai syarat jabatan	20	60	828,67	65	839,97	70	965,09	75	1.063,24	80	1.151,37	80	1.094,96	80	5.943,31	BKPP
		Prosentase penanganan kasus kepegawaian	80	83	384,98	85	456,25	87	524,21	88	577,52	90	625,39	90	594,75	90	3.163,10	BKPP
																	-	
5,4	Pendidikan dan Pelatihan				7.194,08		7.292,27		8.378,40		9.230,61		9.995,67		9.505,90		51.596,93	BKPP
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana	82,75	82,75	7.194,08	84,5	7.292,27	86	8.378,40	87	9.230,61	88,5	9.995,67	88,5	9.505,90	88,5	51.596,93	BKPP
																	-	
5,5	Penelitian dan Pengembangan				225,00		317,92		481,25		424,16		260,98		248,19		1.957,49	BAPPELBANGDA
5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	10	10	225,00	20	317,92	20	481,25	30	424,16	30	260,98	40	248,19	40	1.957,49	BAPPELBANGDA
																	-	
E.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				1.700,00		1.612,63		1.828,75		1.879,80		1.992,90		1.985,50		10.999,58	
6,1	Inspektorat				1.700,00		1.612,63		1.828,75		1.879,80		1.992,90		1.985,50		10.999,58	INSPEKTORAT
6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil Pemeriksaan BPK	83,36	88,5	1.000,00	88,75	921,50	89	1.058,75	89,25	1.060,40	89,5	1.138,80	90	1.083,00	90	6.262,45	INSPEKTORAT
		Presentase Tindak lanjut temuan	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		hasil pemeriksaan APIP																
		Cakupan penilaian mandiri SPIP	-	-		15	-	30	-	45	-	60	-	75	-	75	-	INSPEKTORAT
		Persentase jumlah PDDT yang selesai ditangani	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemenuhan kebijakan teknis di bidang pengawasan	100	100	700,00	100	691,13	100	770,00	100	819,40	100	854,10	100	902,50	100	4.737,13	INSPEKTORAT
		Cakupan pendampingan dan Sistensi di bidang Pengawasan	70	80		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
		Persentase jumlah kasus yang ditangani sesuai kewenangannya	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
		Presentase OPD yang menerapkan manajemen risiko		-		15%	-	30%	-	45%	-	60%	-	93%	-	93%	-	INSPEKTORAT
																	-	
F.	UNSUR KEWILAYAHAN				31.540,08	1.036,00	21.320,02	1.046,50	22.953,60	1.057,50	24.064,52	1.069,50	24.275,32	1.079,50	26.120,68	1.079,50	150.274,21	
7,1	Kecamatan				31.540,08	1.036,00	21.320,02	1.046,50	22.953,60	1.057,50	24.064,52	1.069,50	24.275,32	1.079,50	26.120,68	1.079,50	150.274,21	KECAMATAN
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				445,94	988,00	447,85	998,50	580,39	1.009,50	646,36	1.021,50	695,62	1.031,50	1.013,51	1.031,50	3.829,66	
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Kartasura	82,61	83	25,00	83,5	23,04	84	24,06	84,5	24,10	85	23,73	85,5	22,56	85,5	142,49	KECAMATAN KARTASURA
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sukoharjo	86,9	87	80,00	87,5	110,58	88	154,00	88,5	192,80	89	223,02	89,5	239,16	89,5	999,56	KECAMATAN SUKOHARJO
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Grogol	77	78	50,00	79	46,08	80	86,63	82	95,44	85	103,44	86	289,70	86	671,28	KECAMATAN GROGOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Mojolaban	77	80	20,00	81	22,12	82	40,43	83	41,45	84	40,81	86	155,23	86	320,03	KECAMATAN MOJOLABAN
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bendosari	77,88	79	15,00	80	32,25	81	48,13	82	53,02	83	66,43	84	67,69	84	282,52	KECAMATAN BENDOSARI
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Polokarto	78,1	79	40,00	80	36,86	81	38,50	82	46,27	83	45,55	84	54,15	84	261,33	KECAMATAN POLOKARTO
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Baki	80	81	42,00	82	38,70	83	40,43	84	40,49	85	39,86	86	37,91	86	239,38	KECAMATAN BAKI
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Weru	77,66	78	39,94	78,5	36,86	79,5	40,43	80	42,90	80,5	42,71	81	41,52	81	244,34	KECAMATAN WERU
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Gatak	86,74	87	42,00	87,5	38,70	88	40,43	88,5	40,49	89	39,86	89,5	37,91	89,5	239,38	KECAMATAN GATAK
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Tawang Sari	85	86	30,00	87	13,82	88	15,40	89	16,39	90	17,08	90	16,25	90	108,94	KECAMATAN TAWANGSARI
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Nguter	80	81	42,00	82	38,70	83	40,43	84	40,49	85	39,86	86	37,91	86	239,38	KECAMATAN NGUTER
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Bulu	75,28	79	20,00	80	10,14	81	11,55	82	12,53	83	13,29	84	13,54	84	81,04	KECAMATAN BULU
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				18.194,35	12,00	13.659,37	12,00	14.697,18	12,00	15.263,59	12,00	15.442,89	12,00	14.667,79	12,00	91.925,17	
		Persentase pemberdayaan	100%	100%	2.209,50	100%	2.160,92	100%	2.310,00	100%	2.366,62	100%	2.429,44	100%	2.360,04	100%	13.836,52	KECAMATAN KARTASURA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		masyarakat desa dan kelurahan																
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	14.480,78	100%	9.578,81	100%	10.067,56	100%	10.411,78	100%	10.408,44	100%	9.382,75	100%	64.330,11	KECAMATAN SUKOHARJO
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	89,89	100%	97,84	100%	104,91	100%	117,61	100%	120,52	100%	124,55	100%	655,32	KECAMATAN GROGOL
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	80,00	100%	87,54	100%	101,06	100%	107,97	100%	113,88	100%	462,08	100%	952,53	KECAMATAN MOJOLABAN
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	561,19	100%	979,55	100%	1.221,41	100%	1.320,68	100%	1.393,13	100%	1.380,83	100%	6.856,79	KECAMATAN BENDOSARI
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	120,00	100%	129,93	100%	155,93	100%	176,41	100%	193,60	100%	203,06	100%	978,93	KECAMATAN POLOKARTO
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	85,00	100%	78,33	100%	110,69	100%	110,86	100%	109,14	100%	103,79	100%	597,80	KECAMATAN BAKI
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	113,00	100%	105,97	100%	107,80	100%	107,97	100%	108,19	100%	102,89	100%	645,81	KECAMATAN WERU
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	90,00	100%	96,76	100%	101,06	100%	101,22	100%	99,65	100%	94,76	100%	583,45	KECAMATAN GATAK
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	195,00	100%	179,69	100%	189,61	100%	205,33	100%	223,96	100%	212,99	100%	1.206,59	KECAMATAN TAWANGSARI
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	85,00	100%	78,33	100%	110,69	100%	110,86	100%	109,14	100%	103,79	100%	597,80	KECAMATAN NGUTER
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	85,00	100%	85,70	100%	116,46	100%	126,28	100%	133,81	100%	136,28	100%	683,53	KECAMATAN BULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				8.777,60	12,00	2.714,04	12,00	2.363,99	12,00	2.345,50	12,00	2.377,33	12,00	3.199,52	12,00	21.777,98	
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	150,00	100%	138,23	100%	144,38	100%	144,60	100%	142,35	100%	225,63	100%	945,18	KECAMATAN KARTASURA
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum		100%	4.798,41	100%	105,97	100%	202,13	100%	139,78	100%	161,33	100%	180,50	100%	5.588,12	KECAMATAN SUKOHARJO
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	417,25	100%	304,10	100%	173,25	100%	173,52	100%	174,62	100%	171,48	100%	1.414,21	KECAMATAN GROGOL
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum		100%	355,86	100%	319,90	100%	28,88	100%	31,81	100%	32,27	100%	722,01	100%	1.490,72	KECAMATAN MOJOLABAN
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.010,48	100%	41,47	100%	51,98	100%	62,66	100%	75,92	100%	85,74	100%	1.328,24	KECAMATAN BENDOSARI
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum		100%	517,50	100%	499,45	100%	388,85	100%	401,02	100%	406,17	100%	442,23	100%	2.655,23	KECAMATAN POLOKARTO
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	417,58	100%	384,80	100%	401,92	100%	402,55	100%	396,29	100%	376,87	100%	2.380,02	KECAMATAN BAKI
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	33,00	100%	35,02	100%	40,43	100%	40,49	100%	41,76	100%	42,42	100%	233,10	KECAMATAN WERU
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum		100%	474,92	100%	437,64	100%	457,11	100%	464,57	100%	458,29	100%	440,42	100%	2.732,97	KECAMATAN GATAK
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum		100%	40,00	100%	36,86	100%	43,31	100%	49,16	100%	56,94	100%	99,28	100%	325,55	KECAMATAN TAWANGSARI
		Persentase capaian	100%	100%	417,58	100%	384,80	100%	401,92	100%	402,55	100%	396,29	100%	376,87	100%	2.380,02	KECAMATAN NGUTER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ketentraman dan ketertiban umum																
		Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum		100%	145,00	100%	25,80	100%	29,84	100%	32,78	100%	35,11	100%	36,10	100%	304,63	KECAMATAN BULU
7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				3.240,00	12,00	3.216,96	12,00	3.595,90	12,00	3.726,82	12,00	3.766,58	12,00	4.785,96	12,00	22.332,22	
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	290,00	100%	267,24	100%	279,13	100%	279,56	100%	275,21	100%	261,73	100%	1.652,86	KECAMATAN KARTASURA
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	130,00	100%	138,23	100%	168,44	100%	192,80	100%	237,25	100%	248,19	100%	1.114,90	KECAMATAN SUKOHARJO
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	280,00	100%	263,55	100%	337,84	100%	342,22	100%	277,11	100%	266,24	100%	1.766,95	KECAMATAN GROGOL
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	280,00	100%	258,02	100%	327,25	100%	347,04	100%	365,37	100%	1.484,61	100%	3.062,29	KECAMATAN MOJOLABAN
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	280,00	100%	285,67	100%	308,00	100%	318,12	100%	322,66	100%	320,39	100%	1.834,83	KECAMATAN BENDOSARI
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	280,00	100%	294,88	100%	356,13	100%	404,88	100%	455,52	100%	451,25	100%	2.242,66	KECAMATAN POLOKARTO
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	280,00	100%	271,84	100%	283,94	100%	284,38	100%	279,96	100%	266,24	100%	1.666,35	KECAMATAN BAKI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	290,00	100%	271,84	100%	283,94	100%	289,20	100%	284,70	100%	270,75	100%	1.690,43	KECAMATAN WERU
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	280,00	100%	359,39	100%	380,19	100%	385,60	100%	379,60	100%	361,00	100%	2.145,77	KECAMATAN GATAK
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	290,00	100%	267,24	100%	288,75	100%	289,20	100%	294,19	100%	279,78	100%	1.709,15	KECAMATAN TAWANGSARI
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	280,00	100%	271,84	100%	283,94	100%	284,38	100%	279,96	100%	266,24	100%	1.666,35	KECAMATAN NGUTER
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	280,00	100%	267,24	100%	298,38	100%	309,44	100%	315,07	100%	309,56	100%	1.779,68	KECAMATAN BULU
7 01 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				882,20	12,00	1.281,81	12,00	1.716,14	12,00	2.082,24	12,00	1.992,90	12,00	2.453,90	12,00	10.409,18	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	75,00	100%	59,90	100%	62,56	100%	62,66	100%	61,69	100%	58,66	100%	380,47	KECAMATAN KARTASURA
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	141,20	100%	138,23	100%	154,00	100%	159,06	100%	161,33	100%	180,50	100%	934,32	KECAMATAN SUKOHARJO
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	70,00	100%	119,80	100%	144,38	100%	208,22	100%	160,38	100%	154,33	100%	857,10	KECAMATAN GROGOL
		Cakupan pembinaan dan		100%	55,00	100%	54,37	100%	111,65	100%	175,45	100%	124,32	100%	490,06	100%	1.010,84	KECAMATAN MOJOLABAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		pengawasan pemerintahan desa																
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	60,00	100%	202,73	100%	283,94	100%	342,22	100%	393,84	100%	428,69	100%	1.711,41	KECAMATAN BENDOSARI
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	142,00	100%	155,73	100%	189,61	100%	216,90	100%	234,40	100%	270,75	100%	1.209,40	KECAMATAN POLOKARTO
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	45,00	100%	137,30	100%	128,98	100%	143,64	100%	141,40	100%	120,94	100%	717,25	KECAMATAN BAKI
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	80,00	100%	77,41	100%	80,85	100%	86,76	100%	85,41	100%	81,23	100%	491,65	KECAMATAN WERU
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	55,00	100%	69,11	100%	147,26	100%	219,79	100%	204,04	100%	261,73	100%	956,93	KECAMATAN GATAK
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	64,00	100%	78,33	100%	128,01	100%	186,05	100%	137,61	100%	135,38	100%	729,37	KECAMATAN TAWANGSARI
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	45,00	100%	137,30	100%	128,98	100%	143,64	100%	141,40	100%	120,94	100%	717,25	KECAMATAN NGUTER
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	50,00	100%	51,60	100%	155,93	100%	137,85	100%	147,10	100%	150,72	100%	693,19	KECAMATAN BULU
																	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
G.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				7.255,00		9.813,98		7.064,75		10.348,54		7.041,58		6.696,55		48.220,40	
8,1	Kesatuan Bangsa dan Politik				7.255,00		9.813,98		7.064,75		10.348,54		7.041,58		6.696,55		48.220,40	KESBANGPOL
8 01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan masyarakat yang paham ideologi pancasila dan karakter bangsa	NA	72	230,00	75	221,16	78	240,63	80	250,64	82	256,23	82	243,68	82	1.442,33	KESBANGPOL
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan pemahaman pemahaman politik bagi pemilih pemula	NA	72	1.265,00	75	1.174,91	78	1.236,81	80	1.243,56	82	1.233,70	82	1.173,25	82	7.327,24	KESBANGPOL
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan	NA	20	170,00	40	165,87	60	182,88	80	192,80	100	199,29	100	189,53	100	1.100,36	KESBANGPOL
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	NA	75	3.355,00	78	6.183,27	80	3.234,00	82	6.478,08	85	3.193,39	85	3.036,91	85	25.480,64	KESBANGPOL
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	NA	20	2.235,00	40	2.068,77	60	2.170,44	80	2.183,46	100	2.158,98	100	2.053,19	100	12.869,83	KESBANGPOL
	JUMLAH				929.608,40		965.162,82		948.741,91		961.015,13		975.194,49		983.592,18		5.763.314,93	

KETERANGAN :

No	Urusan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD
		(000.000)	(000.000)	(000.000)	(000.000)	(000.000)	(000.000)	
A.	URUSAN WAJIB	711.164,15	741.691,98	664.053,43	712.580,98	732.444,35	740.434,27	4.302.369,15
I	Terkait Pelayanan Dasar	624.067,67	573.906,06	539.702,97	576.084,99	586.725,03	586.740,06	3.487.226,79
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	87.096,48	167.785,92	124.350,45	136.495,98	145.719,32	153.694,21	815.142,36
B.	PELAYANAN URUSAN PILIHAN	33.204,13	41.881,79	88.963,88	38.947,05	34.390,37	37.690,66	275.077,87
C.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	123.453,44	120.446,77	131.727,70	139.671,10	140.923,18	138.013,29	794.235,48
D.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	21.291,60	28.395,66	32.149,81	33.523,15	34.126,78	32.651,24	182.138,25
E.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1.700,00	1.612,63	1.828,75	1.879,80	1.992,90	1.985,50	10.999,58
F.	UNSUR KEWILAYAHAN	31.540,08	21.320,02	22.953,60	24.064,52	24.275,32	26.120,68	150.274,21
G.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.255,00	9.813,98	7.064,75	10.348,54	7.041,58	6.696,55	48.220,40
	TOTAL	929.608,40	965.162,82	948.741,91	961.015,13	975.194,49	983.592,18	5.763.314,93

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Pendukung Pemerintahan Perangkat Daerah disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Kabupaten																	
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	3.524,31	100	3.614,99	100	3.711,51	100	3.753,71	100	3.806,83	100	3.931,50	100	22.342,85	DISKOMINFO
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	3.011,04	100	3.088,51	100	3.170,97	100	3.207,03	100	3.252,41	100	3.358,92	100	19.088,88	DINAS PANGAN
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	4.232,86	100	4.341,77	100	4.457,69	100	4.508,38	100	4.572,17	100	4.721,91	100	26.834,78	DPPKBP3A
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	7.531,09	100	7.724,86	100	7.931,12	100	8.021,30	100	8.134,80	100	8.401,21	100	47.744,38	DLH
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	4.426,53	100	4.540,42	100	4.661,65	100	4.714,65	100	4.781,36	100	4.715,56	100	27.840,17	DPMD
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	25.670,85	100	26.331,36	100	27.034,40	100	27.341,79	100	27.728,67	100	28.636,79	100	162.743,85	BKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	2.884,03	100	2.958,23	100	3.037,22	100	3.071,75	100	3.115,22	100	3.217,24	100	18.283,68	Kecamatan Grogol
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	2.786,88	100	2.858,58	100	2.934,91	100	2.968,28	100	3.010,28	100	3.108,87	100	17.667,79	Kecamatan Bulu
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	29.480,69	100	30.239,23	100	31.046,62	100	31.399,62	100	31.843,92	100	32.886,81	100	186.896,90	DPMPTSP
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	11.308,69	100	11.599,66	100	11.909,37	100	12.044,78	100	12.215,22	100	12.615,26	100	71.692,99	Sekretariat DPRD
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	20.289,44	100	20.811,49	100	21.367,15	100	21.610,10	100	21.915,88	100	22.633,63	100	128.627,68	BKD
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	8.585,09	100	8.805,98	100	9.041,10	100	9.143,90	100	9.273,29	100	9.576,99	100	54.426,35	DISPENDUKCAPIL
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	3.125,26	100	3.205,67	100	3.291,27	100	3.328,69	100	3.375,79	100	3.486,35	100	19.813,03	Kecamatan Mojolaban
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	6.160,00	100	6.318,50	100	6.487,20	100	6.560,96	100	6.653,80	100	6.871,71	100	39.052,16	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	2.497,96	100	2.562,24	100	2.630,65	100	2.660,56	100	2.698,21	100	2.786,57	100	15.836,19	Kecamatan Weru
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	2.636,41	100	2.704,24	100	2.776,45	100	2.808,01	100	2.847,75	100	2.941,01	100	16.713,87	Kecamatan Nguter
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	11.966,00	100	12.273,89	100	12.601,60	100	12.744,88	100	12.925,22	100	13.348,52	100	75.860,10	Satpol PP
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	9.717,63	100	9.967,66	100	10.233,80	100	10.350,16	100	10.496,61	100	10.840,38	100	61.606,25	Disnaker
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	4.704,03	100	4.825,07	100	4.953,89	100	5.010,22	100	5.081,12	100	5.247,52	100	29.821,85	Bappelbangda
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	523.208,76	100	536.670,92	100	551.000,04	100	557.264,91	100	565.150,21	100	583.658,88	100	3.316.953,72	Dinas P & K
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	2.674,42	100	2.743,23	100	2.816,48	100	2.848,50	100	2.888,81	100	2.983,41	100	16.954,85	Kecamatan Polokarto
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	2.987,05	100	3.063,91	100	3.145,71	100	3.181,48	100	3.226,50	100	3.332,16	100	18.936,81	Kecamatan Gatak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	16.393,91	100	16.815,73	100	17.264,71	100	17.461,01	100	17.708,08	100	18.288,02	100	103.931,47	Kecamatan Sukoharjo
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	18.675,37	100	19.155,88	100	19.667,35	100	19.890,96	100	20.172,42	100	20.833,07	100	118.395,05	DPUPR
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	5.641,84	100	5.787,00	100	5.941,51	100	6.009,07	100	6.094,10	100	6.293,68	100	35.767,19	DPKP
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	2.269,50	100	2.327,89	100	2.390,05	100	2.417,22	100	2.451,43	100	2.531,71	100	14.387,81	BPBD
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	4.190,06	100	4.297,87	100	4.412,62	100	4.462,80	100	4.525,94	100	4.674,17	100	26.563,47	Kecamatan Bendosari
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	3.123,36	100	3.203,73	100	3.289,26	100	3.326,66	100	3.373,74	100	3.484,23	100	19.800,98	Kecamatan Tawang Sari
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	2.636,41	100	2.704,24	100	2.776,45	100	2.808,01	100	2.847,75	100	2.941,01	100	16.713,87	Kecamatan Baki
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	5.213,44	100	5.347,58	100	5.490,36	100	5.552,79	100	5.631,36	100	5.815,79	100	33.051,32	Kecamatan Kartasura

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	288.131,66	100	295.545,29	100	303.436,35	100	306.886,42	100	311.228,86	100	321.421,61	100	1.826.650,18	DKK
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	30.630,55	100	31.418,67	100	32.257,55	100	32.624,32	100	33.085,95	100	34.169,52	100	194.186,55	SETDA
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	3.090,94	100	3.170,47	100	3.255,12	100	3.292,13	100	3.338,72	100	3.448,06	100	19.595,44	KESBANGPOL
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	12.854,97	100	13.185,73	100	13.537,79	100	13.691,72	100	13.885,45	100	14.340,20	100	81.495,87	DISDAGKOP UKM
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	5.181,81	100	5.315,14	100	5.457,06	100	5.519,10	100	5.597,20	100	5.780,51	100	32.850,82	DINSOS
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	3.350,00	100	3.436,19	100	3.527,94	100	3.568,05	100	3.618,54	100	3.737,05	100	21.237,77	DISPORA
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	7.559,54	100	8.399,49	100	9.239,43	100	10.167,38	100	11.179,72	100	12.297,68	100	58.843,24	DISHUB
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	3.897,49	100	3.997,77	100	4.104,51	100	4.151,18	100	4.209,92	100	4.347,79	100	24.708,65	DISARPUS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kinerja dan pendanaan sampai akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	17.130,94	100	17.571,72	100	18.040,88	100	18.246,01	100	18.504,19	100	19.110,20	100	108.603,92	DISPERTAN
	JUMLAH				1.123.380,79		1.152.930,82		1.184.329,74		1.198.618,47		1.216.447,39		1.256.815,48		7.132.522,68	

A.	JUMLAH PROGRAM	1.096.247,82	1.101.673,62	1.104.024,89	1.120.003,34	1.133.347,11	1.124.897,30	6.680.194,08
B.	JUMLAH PROGRAM PENDUKUNG	1.123.380,79	1.152.930,82	1.184.329,74	1.198.618,47	1.216.447,39	1.256.815,48	7.132.522,68
	TOTAL	2.219.628,61	2.254.604,43	2.288.354,63	2.318.621,82	2.349.794,50	2.381.712,77	13.812.716,76
C.	PROYEKSI BELANJA	2.247.461,47	2.251.426,24	2.284.472,94	2.313.867,72	2.344.110,97	2.375.314,39	13.816.653,74

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pepres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional dan propinsi. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2021 – 2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun kedepan menurut tujuan dan sasaran pada setiap Misi yang disajikan dalam Tabel 8.1.

**Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2026**

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Capaian setiap Tahun							PENANGGUNG JAWAB
			Kondisi Awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	56,02	62	65	68	70	79	80	SETDA
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,98	77,69	77,73	77,89	78,06	78,23	78,40	SETDA
3	Angka Kemiskinan	%	7,68	8,5-7,7	8,2-7,6	7,9-7,5	7,6-7,4	7,3-7,1	7,0-6,8	SETDA
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,7	2,5-3,5	3,5-4,3	4,3-4,9	4,9-5,3	4,3-5,94	5,94-6,28	SETDA
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,93	4,83-4,79	4,78-4,66	4,67-4,58	4,57-4,48	4,47-4,0	4,47-4,0	SETDA
6	Pendapatan perkapita	Rp	40.670.000	40.474.667	42.651.502	44.945.411	47.362.699	49.909.989	49.909.989	SETDA
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	54,46	55,67	55,41	57,64	59,78	61,5	61,91	SETDA
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	59,05	61,03	61,12	61,22	61,32	61,41	61,51	SETDA

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Capaian setiap Tahun							PENANGGUNG JAWAB
			Kondisi Awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Indeks Resiko Bencana	Nilai	93,2	93,10	93,00	92,70	92,50	92,25	92,00	SETDA
10	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman Masyarakat, dan Ketertiban Umum	%	85,7	86,1	86,83	87,23	87,97	88,37	88,5	SETDA

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Target indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 1926 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2019 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2026, sebagaimana pada Tabel 8.2:

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Sukoharjo

No	Penanggung Jawab	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	KECAMATAN, SETWAN, DISDUKCAPIL, DPMPSTP, DKK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78,39	80	81	82	83	84	85
2.	DISKOMINFO	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,54	3,6	3,64	3,7	3,74	3,8	3,84
3.	SETDA, BAPPELBANGDA, INSPEKTORAT, DISARPUS	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	A
4.	BKD	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Nilai	1,544	1,386	1,461	1,547	1,646	1,758	1,885
5.	BKPP	Indeks Sistem Merit	Kategori	NA	I	II	II	II	III	III
6.	DISDUKCAPIL	Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	56,41	75	81	83	85	87	90
7.	DKK	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,55	77,65	77,70	77,75	77,80	77,85	77,90
8.	DINAS P & K	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,10	9,34	9,35	9,36	9,37	9,38	9,39
9.	DINAS P & K	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,82	13,83	13,84	13,85	13,85	13,86	13,86
10.	DPPKBP3A	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86
11.	DPPKBP3A	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,49	96,50	96,51	96,52	96,53	96,54	96,55
12.	DISPORA	Indek Pembangunan Pemuda	%	NA	39,512	41,902	44,166	46,482	49,014	51,665
13.	DINAS P & K	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	NA	20	23	26	29	32	35

No	Penanggung Jawab	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14.	DINAS SOSIAL	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4,05	4,00
15.	DINAS SOSIAL	Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	%	2,94	2,9	2,85	2,8	2,75	2,7	2,65
16.	DISDAGKOP dan UKM	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	10	20	22	25	28	31	33
17.	DISDAGKOP dan UKM	Pertumbuhan usaha mikro ke usaha kecil	%	2,60	2,70	2,80	3,10	3,50	3,60	3,70
18.	DISDAGKOP dan UKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-3,50	4,60	4,69	5,08	5,30	5,40	5,60
19.	DISNAKERTRANS	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	ADHK (%)	-2,72	4,62	4,37	5,43	5,74	6,06	6,40
20.	DPMPSTP	Pertumbuhan investasi	%	4	8	12	16	20	24	28
21.	DISPERTAN	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, dan Perikanan	%	2,27	2,30	2,40	2,60	2,80	3,00	3,10
22.	DINAS PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan	%	93,3	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	93,9
23.	DISNAKERTRANS	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	83	83	84	84	84	85	85
24.	DPMD	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7156	0,7256	0,7356	0,7456	0,7556	0,7656	0,7656
25.	DPUPR, DKK, DPKP	Akses air minum yang layak	%	92,24	94,00	96,00	98,00	100	100	100
26.	DPUPR, DKK, DPKP	Akses Sanitasi yang layak	%	97,91	98,00	98,50	99,00	100	100	100
27.	DPKP	Persentase Lingkungan Hunian Layak	%	72,49	75,54	78,59	81,65	84,70	87,76	90,81
28.	DPUPR	Indeks Layanan Infrastruktur	Nilai	37,37	38,73	39,61	40,85	41,83	42,56	42,7
29.	DISHUB	Indeks Fatalitas	Angka	0,0645	0,270	0,265	0,260	0,256	0,252	0,250
30.	DISKOMINFO	Cakupan layanan telekomunikasi	%	1,6	2	10	20	30	40	40
31.	DLH	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	45,00	50,25	50,50	50,75	51,00	51,25	51,50
32.	DLH	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,23	87,23	87,23	87,24	87,24	87,25	87,25
33.	DLH	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,08	31,08	31,09	31,09	31,09	31,09	31,10
34.	BPBD	Indeks Kapasitas Daerah	Nilai	0,300	0,300	0,325	0,350	0,400	0,450	0,500
35.	SATPOL PP	Cakupan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	89,90	90,34	90,72	91,11	91,49	91,88	91,90
36.	KESBANGPOL	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	NA	75	78	80	82	85	87

8.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode Tahun 2021 – 2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sukoharjo tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021-2026

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1		Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,7	2,5-3,5	3,5-4,3	4,3-4,9	4,9-5,3	4,3-5,94	5,94-6,28	5,94-6,28	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
2		Pendapatan perkapita	Rp (Juta)	40670	40474	42651	44945	47362	49909	49909	49909	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
3		Angka kemiskinan	%	7,68	8,5-7,7	8,2-7,6	7,9-7,5	7,6-7,4	7,3-7,3	7,0-6,8	7,0-6,8	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	76,98	77,69	77,73	77,89	78,06	78,23	78,40	78,40	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
5		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Tahun	9,10	9,34	9,35	9,36	9,37	9,38	9,39	9,39	Indikator Sasaran Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
6		Angka usia harapan hidup	Tahun	77,55	77,65	77,70	77,75	77,80	77,85	77,90	77,90	Indikator Sasaran Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
7		Tingkat pengangguran terbuka	%	6,93	4,83-4,79	4,78-4,66	4,67-4,58	4,57-4,48	4,47-4,0	4,47-4,0	4,47-4,0	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
8		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,39	80	81	82	83	84	85	85	Indikator Sasaran Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
9		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
10		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	93,3	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	93,9	93,9	Indikator Sasaran Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11		Penguatan cadangan pangan	%	23.3	26.155	27	28	29	31	31	31	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
12		Penanganan daerah rawan pangan	%	9.58	8.38	7.18	5.99	4.79	3.59	3.59	3.59	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
13		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2.27	2.3	2.4	2.6	2.8	3	3.1	3.1	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
14		Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	40.1	40.21	40.29	40.37	40.44	40.50	40.55	40.55	Komponen Sasaran Daerah (Pertumbuhan PDRB Sektor Industri)	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERINDUSTRIAN
ASPEK PELAYANAN UMUM													
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR													
1	PENDIDIKAN												
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rata – rata lama sekolah Penduduk	Tahun	9,88	10,24	10,58	10,93	11,28	11,6	11,98	11,98	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.2		Harapan lama sekolah	Tahun	13,82	13,83	13,84	13,85	13,86	13,9	13,88	13,88	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.3		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	63,07	66,30	69,53	72,76	75,99	79,22	82,45	82,45	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM)											
1.4		SD/MI/Paket A	%	99,79	99,82	99,85	99,88	99,91	99,94	99,97	99,97	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.5		SMP/MTs/Paket B	%	78,62	79,37	80,12	80,87	81,62	82,37	83,12	83,12	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK)											
1.6		SD/MI/Paket A	%	111,84	110,56	109,28	108,00	106,72	105,44	104,16	104,16	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.7		SMP/MTs/Paket B	%	110,15	109,13	108,1	107,08	106,05	105,03	104	104	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		Angka Kelulusan										Indikator sasaran PD	
1.8		SD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.9		SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan											
1.10		SD ke SMP	%	106,90	105,75	104,6	103,45	102,3	101,15	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.11		SMP ke SMA	%	103,15	102,625	102,1	101,575	101,05	100,525	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
		6) APS											
1.12		- SD	%	0,02	0,02	0,019	0,017	0,016	0,014	0,013	0,013	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.13		- SMP	%	0,04	0,04	0,04	0,034	0,028	0,022	0,017	0,017	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
1.14		Persentase capaian SPM Pendidikan	%	81,25	84,38	87,51	90,64	93,77	96,9	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENDIDIKAN
2	KESEHATAN												

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.1	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,55	77,65	77,70	77,75	77,80	77,85	77,90	77,90	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.2		AKI (Angka Kematian Ibu)	Per 100.000 KH	98	97	96	95	94	93	92	92	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.3		AKB (Angka Kematian Bayi)	Per 1.000 KH	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7	6.9	6.9	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.4		AKABA (Angka Kematian Balita)	Per 1.000 KH	8.5	8.5	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.5		Stunting	%	8	7.75	7.7	7.65	7.6	7.55	7.5	7.5	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.6		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.7		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	%	60	62	64	66	69	72	75	75	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.8		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	20	21	27	36	45	54	65	65	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.9		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.10		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.11		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.12		Pelayanan Kesehatan Balita	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.13		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.14		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.15		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.16		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.17		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.18		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.19		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
2.20		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KESEHATAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
3.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Nilai	54.46	55.67	55.41	57.64	59.78	61.50	61.91	61.91	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.2		Indek layanan infrastruktur	Nilai	37.37	38.73	39.61	40.85	41.83	42.56	42.70	42.70	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.3		Akses air minum yang layak	%	92,24	92.24	94	96	98	100	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.4		Akses sanitasi yang layak	%	97,91	98	98.5	99	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.5		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	80	85	85.05	85.1	85.15	85.2	85.25	85,25	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.6		Cakupan layanan irigasi	%	43	43	46	50	53	55	55	55	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.7		Prosentase drainase dalam kondisi baik	%	6,48	6.48	6.56	7.06	7.55	8.05	8.54	8,54	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.8		Rasio bangunan ber-PBG	%	20	20.43	20.82	21.22	21.61	22	22	22	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.9		Ketaatan terhadap RTRW	%	45	50	55	60	65	70	70	70	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEKERJAAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
4.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prosentase lingkungan hunian layak	%	72.49	75.54	78.59	81.65	84.7	87.76	90.81	90.81	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.2		Prosentase pelayanan SPM Perumahan Rakyat	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.3		Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	0	87.12	74.24	61.36	48.48	35.6	22.72	22.72	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.4		Prosentase penurunan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	%	0	86.67	73.35	60.01	46.68	33.35	20.02	20.02	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.5		Prosentase PSU Perumahan yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah dan tertangani dengan baik	%	0	8.82	17.64	26.46	35.28	44.1	52.92	52.92	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	89.9	90.34	90.72	91.11	91.49	91.88	91.9	91.9	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.2		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perundang - undangan Daerah	%	97	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	97.7	97.7	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.3		Persentase Penyelesaian gangguan tibum tranmas	%	98	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.6	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.4		Persentase anggota satlinmas terlatih	%	52	52	54	56	58	60	62	62	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.5		Persentase tanggap kebakaran (respon time)	%	95	95.2	95.3	95.4	95.5	95.6	95.7	95.7	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	93,2	93,10	93,00	92,70	92,50	92,25	92,00	92,00	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
5.7		Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0.3	0.3	0.32	0.35	0.4	0.45	0.5	0.5	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.8		Cakupan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana	Angka	0.3	0.3	0.32	0.35	0.4	0.45	0.5	0.5	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6	SOSIAL												
6.1	Dinas Sosial	Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	4,30	4,25	4,20	4,15	4,10	4,05	4,00	4,00	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.2		Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	%	2,94	2,90	2,85	2,80	2,75	2,70	2,65	2,65	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.3		Prosentase PMKS baik Individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani	%	9,31	10,31	11,31	12,31	13,31	14,31	15,31	15,31	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.4		Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	%	21,73	34,67	47,65	60,57	73,52	86,47	99,42	99,42	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
6.5		Prosentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	80	80	80	80	80	80	80	80	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. SOSIAL
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR													
1	TENAGA KERJA												

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Produktifitas Tenaga Kerja	Angka	85	88.20	92.78	97.38	101.90	106.51	106.55	106.55	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. TENAGA KERJA
1.2		Angka Pengangguran Terbuka	Angka	23	22.94	22.432	21.925	21.417	20.909	20.5	20.5	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. TENAGA KERJA
1.3		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	%	83,00	83,00	84,00	84,00	84,00	85,00	85,00	85,00	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. TENAGA KERJA
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2.1	Dinas PPKBP3A	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,49	96,50	96,51	96,52	96,53	96,54	96,55	96,55	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2		Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	76.17	76.17	76.22	76.27	76.32	76.37	76.37	76.37	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.3		Rasio Kekerasan terhadap anak	Rasio	1 : 8419	1 : 8419	1 : 8450	1 : 8475	1 : 8500	1 : 8525	1 : 8550	1 : 8550	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.4		Rasio Kekerasan terhadap perempuan	Rasio	1 : 10.397	1 : 10.397	1 : 10.400	1 : 10.405	1 : 10.407	1 : 10.410	1 : 10.410	1 : 10.410	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	PANGAN												
3.1	Dinas Pangan	Skor pola pangan harapan	%	93.3	93.5	93.6	93.7	93.8	93.9	93.9	93.9	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.2		Tingkat konsumsi energi (kalori)	%	97.68	98.05	98.15	98.23	98.32	98.4	98.4	98.4	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.3		Tingkat konsumsi protein	%	109.12	94.74	96.49	97.89	98.95	99.82	99.82	99.82	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.4		Penguatan cadangan pangan	%	23.3	26.155	27	28	29	31	31	31	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.5		Penanganan daerah rawan pangan	%	9.58	8.38	7.18	5.99	4.79	3.59	3.59	3.59	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.6		Ketersediaan pangan utama	%	240	213.2	214.6	218.8	222.8	226.9	226.9	226.9	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
3.7		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	94.19	86.67	87.78	88.89	90	91.11	91.11	91.11	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
4	LINGKUNGAN HIDUP												
4.1	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	59,05	61,03	61,12	61,22	61,32	61,41	61,51	61,51	Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
4.2		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	45,00	50,25	50,50	50,75	51,00	51,25	51,50	51,50	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.3		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,23	87,23	87,23	87,24	87,24	87,25	87,25	87,25	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.4		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	31,08	31,08	31,09	31,09	31,09	31,09	31,10	31,10	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.5		Prosentase Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	30	40	50	60	65	70	75	75	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.6		Prosentase timbulan sampah yang dikelola	%	66,77	98	99	99	99	100	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
4.7		Prosentase Luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	39	39	39	39	39	39	39	39	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. LINGKUNGAN HIDUP
5	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
5.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75	78	80	82	84	86	88	88	Komponen Sasaran Daerah (IKM)	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.2		Persentase terlayannya pemohon dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.3		Rata-rata lamanya waktu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jam	24	24	24	6	6	1	1	1	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
6.1	Dinas Pemberdayaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,7156	0,7256	0,7356	0,7456	0,7556	0,7656	0,7656	0,7656	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID.

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Masyarakat Desa												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.2		Prosentase Desa Mandiri	%	2,67	3,33	4,00	4,67	5,33	6,00	6,67	6,67	Indikator tujuan PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.3		Prosentase berdirinya BumDes	%	83.33	83.33	86,67	90	93.33	96,67	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
6.4		Prosentase aparatur pemerintah desa yang dibina	%	0	9.33	18.66	27.99	37.31	46.64	55.97	55.97	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
7	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
7.1	Dinas PPKBP3A	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,88	0,88	0,88	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.2		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	1.89	1.88	1.87	1.86	1.85	1.84	1.84	1.84	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.3		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun(Age Spesifik Fertilityrate/ASFR)	Angka	5.02	5.01	4.98	4.95	4.90	4.85	4.85	4.85	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.4		Indek Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	NA	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20	58.20	58.20	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													BID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.5		Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Tahun	NA	22	22	22	22	23	23	23	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	PERHUBUNGAN												
8.1	Dinas Perhubungan	Indeks Fatalitas	Angka	0,0645	0,270	0,265	0,260	0,256	0,252	0,250	0,250	Sasaran Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
8.2		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,270	0,310	0,305	0,300	0,296	0,292	0,290	0,290	Komponen Sasaran Daerah (Indeks Fatalitas)	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
8.3		Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	%	0,50%	2%	1,50%	1,25%	1%	0,75%	0,50%	0,50%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
8.4		Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	%	23,50%	26,50%	26%	25,50%	25%	24,50%	24%	24%	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERHUBUNGAN
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
9.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai/Indeks Internal SPBE	Nilai	3.54	3.65	3.7	3.75	3.8	3.85	3.95	3.95	Indikator Tujuan PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.2		Nilai SAKIP PD	Nilai	50	61	65	70	75	78	80	85	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.3		Nilai/Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	93,1	93,5	93,5	94	94,5	95	96	96	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9.4		Nilai/Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,76	3,80	3,82	3,85	3,90	3,92	3,95	3,95	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.5		Nilai/Indeks Keamanan Informasi	Nilai	0	350	300	350	400	450	500	500	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERSANDIAN
9.6		Persentase/Cakupan Data Statistik Sektoral	%	45,28	62,96	70,37	77,78	85,19	95,59	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. STATISTIK
9.7		Nilai/Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,24	3,35	3,40	3,45	3,50	3,65	3,70	3,70	Indikator Tujuan PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9.8		Cakupan Infrastruktur TI	Perangkat Daerah	45	48	58	68	78	88	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
10.1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Prosentase koperasi aktif	%	81.67	82	82.5	83	83.5	84	84.5	84.5	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM
10.2		Prosentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dinilai Kesehatan untuk Koperasi	%	11.74	12	14	18	22	25	30	30	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM
10.3		Prosentase Usaha Mikro dan Kecil	%	2,60	2,70	2,80	3,10	3,50	3,60	3,70	3,70	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM
11	PENANAMAN MODAL												
11.1	Dinas Penanaman Modal dan	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85 (A)	85 (A)	85 (A)	85 (A)	85 (A)	85 (A)	85 (A)	85 (A)	Komponen Sasaran Daerah (IKM)	URUSAN PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu												BID. PENANAMAN MODAL
11.2		Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	85	85	85	85	85	85	85	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL
11.3		Realisasi Investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Komponen Sasaran Daerah (Pertumbuhan Investasi)	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL
11.4		Persentase Peningkatan Investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL
12	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												
12.1	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	NA	39,51	41,90	44,16	46,48	49,01	51,66	51,66	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
12.2		Cakupan pemberdayaan pemuda	%	13.60	13.60	13.75	14.00	14.25	14.50	14.75	14.75	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
12.3		Cakupan prestasi olahraga	%	2.50	2.50	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.25	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
13	KEBUDAYAAN												
13.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Partisipasi Pelaku Seni dan Budaya	%	NA	20	23	26	29	32	35	35	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN
13.2		Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang terlayani	%	10	15	20	30	40	50	60	60	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
13.3		Persentase Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	%	10	15	22	33	44	55	66	66	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN
13.4		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	1,5	2	2,5	5,5	9	13	18	18	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEBUDAYAAN
14	PERPUSTAKAAN												
14.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	NA	20	21	22	23	24	26	26	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERPUSTAKAAN
14.2		Prosentase Pengunjung Perpustakaan Per tahun	%	1	1	1	1	2	2	3	3	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERPUSTAKAAN
15	KEARSIPAN												
15.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Manajemen Kearsipan	%	43	45	49	53	55,5	58	58	58	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEARSIPAN
15.2		Pengawasan Kearsipan Internal	%	15	16	17	20	23	25	25	25	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEARSIPAN
LAYANAN URUSAN PILIHAN													
1	PARIWISATA												
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Destinasi Pariwisata yang direvitalisasi	%	13,63	16,66	27	36	53	61	68	68	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PARIWISATA
1.2		Jumlah kunjungan wisatawan domestik	Orang	19	118	128	138	158	178	178	178	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PARIWISATA
2.3		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	0	195	225	235	245	255	255	255	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PARIWISATA
2	PERTANIAN												
2.1	Dinas Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan	%	2.27	2.3	2.4	2.6	2.8	3	3.1	3.1	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.2		Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Ku/Ha	68.71	68.95	69.21	69.48	69.61	69.72	70.45	70.45	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.3		Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Ku/Ha	78.16	78.63	78.91	79.23	79.48	79.65	79.81	79.81	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.4		Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Ku/Ha	15.36	15.61	16.21	17.05	18.43	18.94	19.15	19.15	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.5		Peningkatan Produksi Padi (Ton)	Ton	4,900.00	5,000.00	5,684.00	6,429.24	7,541.50	8,385.82	8,595.46	8,595.46	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.6		Peningkatan Produksi Jagung (Ton)	Ton	152	70	96.6	145.77	244.76	331.61	422.97	422.97	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.7		Peningkatan Produksi Kedelai (Ton)	Ton	22.00	27.00	30.91	34.95	42.79	51.12	56.30	56.30	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.8		Peningkatan Produksi bawang merah (Ton)	Ton	-	6.00	5.93	5.93	5.95	5.95	5.96	5.96	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.9		Peningkatan Produksi Cabe (Ton)	Ton	0	8	9.36	10.572	10.618	10.67	10.71	10.71	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.10		Peningkatan Produksi Biofarmaka (Ton)	Ton	0	5	5	5	5	5	5	5	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.11		Peningkatan Produksi Tebu	Ton	-	24.70	24.95	25.20	25.45	25.71	25.96	25.96	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.12		Peningkatan Produksi Pisang	Ton	-	45	21	13	6	11	15	15	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.13		Peningkatan Produksi Tembakau (Ton)	Ton	-	2.104	3.219	4.421	5.747	6.034	7.604	7.604	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.14		Peningkatan Produksi Daging (Ton)	Ton	-	128.20	244.40	165.81	154.12	163.44	300.79	300.79	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.15		Peningkatan Produksi Daging Sapi (Ton)	Ton	2,020.50	19.20	20.40	41.81	23.12	24.44	25.79	25.79	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.16		Peningkatan Produksi Daging Kambing (Ton)	Ton	755.00	7.00	14.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.17		Peningkatan Produksi Daging Itik (ayam, bebek) (Ton)	Ton	10,778.00	102.00	210.00	116.00	123.00	130.00	266.00	266.00	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
2.18		Prosentase Daging ASUH	%	91.30	91.60	92.00	92.40	92.80	93.20	93.40	93.40	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERTANIAN
3	PERDAGANGAN												
3.1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Prosentase Kenaikan Nilai Ekspor Non-Migas	%	-16,05	0.2	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.5	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
3.2		Prosentase Peredaran Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Standart	%	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
3.3		Prosentase Pasar Dalam Kondisi Baik	%	76.9	80.7	84.6	88.4	92.3	96.1	99	99	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
3.4		Prosentase Pasar Tertib Ukur	%	7.6	15.3	23.1	30.7	38.4	46.1	53.8	53.8	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
4	PERINDUSTRIAN												
4.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Prosentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	40.10	40.21	40.29	40.37	40.44	40.50	40.55	40.55	Komponen Sasaran Daerah (Pertumbuhan PDRB Sektor Industri)	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERINDUSTRIAN
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN												
5.1	Dinas Petanian dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	Ton	420	421.57	421.57	421.57	421.57	421.57	421.57	421.57	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													BID. KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.2		Nilai Produksi Ikan (Rp.000)	Rp.000	239,075	246,587	254,098	261,609	269,121	276,632	284,143	284,143	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.3		Angka Konsumsi Ikan	Angka	0.2	0.27	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	Indikator sasaran PD	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
1	SEKRETARIAT DAERAH												
1.1	Sekretariat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	54,98	62	65	68	70	79	80	80	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
1.2		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78.39	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	85.00	Sasaran daerah	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.3		Evaluasi kepatuhan standart pelayanan publik	Nilai	56.41	75.00	81.00	83.00	85.00	87.00	90.00	90.00	Sasaran daerah	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.4		Nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	B	B	B	B	BB	BB	A	A	Sasaran daerah	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.5		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	%	80	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.6		cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	95	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
1.7		cakupan perumusan dan pengendalian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		kebijakan Administrasi Umum											(SEKRETARIAT DAERAH)
1.8		Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)
2	SEKRETARIAT DPRD												
2.1	Sekretariat Dewan	Persentase ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)
2.2		Persentase harmonisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Indikator sasaran PD	UNSUR PENDUKUNG UR. PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
1	PERENCANAAN												
1.1	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Capaian target kinerja sasaran perencanaan pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	80	80	80	80	80	80	80	Indikator tujuan PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
1.2		Persentase sinkronisasi dan sinergitas program perencanaan pembangunan daerah	%	80	80	80	80	80	80	80	80	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
1.3		Persentase capaian program RPJMD terhadap target program RPJMD	%	80	80	80	80	80	80	80	80	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
2	KEUANGAN												
2.1	Badan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1.544	1.386	1.461	1.547	1.646	1.758	1.885	1.885	Sasaran daerah	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.2		Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.3		Prosentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.4		Prosentase OPD yg taat penyerapan anggaran berdasarkan kas yg telah ditetapkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.5		Prosentase jumlah OPD yg tepat waktu dalam penyampaian laporan akuntansi keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.6		Prosentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
2.7		Prosentase peningkatan target PAD	%	2,35%	3 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5 %	5 %	5 %	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
3	KEPEGAWAIAN												
3.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Sistem Merit	Indeks	NA	NA	Kategori I (Buruk)	Kategori II (Kurang)	Kategori II (Kurang)	Kategori III (Baik)	Kategori III (Baik)	Kategori III (Baik)	Sasaran daerah	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)
3.2		Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	%	85	86	87	89	90	93	93	93	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
4.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pengembangan ASN	%	80	81	82.75	84.5	86	87	88.5	88.5	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5.1	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	10	10	20	20	30	30	40	40	Indikator sasaran PD	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	INSPEKTORAT DAERAH												
1.1	Inspektorat	Nilai Penguatan pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	8	8	9	9	9	10	10	10	Indikator sasaran PD	UNSUR PENGAWASAN UR. PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)
1.2		Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Indikator sasaran PD	UNSUR PENGAWASAN UR. PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)
1.3		Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	Indikator sasaran PD	UNSUR PENGAWASAN UR. PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH)
UNSUR KEWILAYAHAN													
1	KECAMATAN												
1.1	Kecamatan Baki	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	97,00	97,20	97,20	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.2	Kecamatan Grogol	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	95,40	95,60	95,80	96,00	96,40	97,00	97,20	97,20	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.3	Kecamatan Kartasura	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,52	96,60	96,70	96,80	96,90	97,00	97,10	97,10	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.4	Kecamatan Tawang Sari	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	97,00	97,20	97,40	97,60	97,80	98,00	98,00	98,00	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.5	Kecamatan Nguter	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	97,00	97,20	97,20	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.6	Kecamatan Mojolaban	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	95,40	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	97,20	97,20	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.7	Kecamatan Gatak	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	97,35	97,40	97,50	97,60	97,70	97,80	97,90	97,90	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.8	Kecamatan Sukoharjo	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	97,38	97,40	97,50	97,60	97,70	97,80	97,90	97,90	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.9	Kecamatan Polokarto	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	95,62	95,80	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	96,80	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.10	Kecamatan Bendosari	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	95,58	95,80	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	96,80	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.11	Kecamatan Bulu	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	95,06	95,80	96,00	96,20	96,40	96,60	96,80	96,80	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
1.12	Kecamatan Weru	Persentase peningkatan pelayanan kecamatan	%	95,53	95,60	95,70	95,80	95,90	96,00	96,20	96,20	Indikator sasaran PD	UNSUR KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Prosentase kesadaran berbangsa dan bernegara	%	NA	75	78	80	82	85	87	87	Sasaran daerah	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
1.2		Persentase masyarakat yang telah mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	%	NA	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
1.3		Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	NA	20%	40%	60%	80%	99%	99%	99%	Indikator sasaran PD	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
1.4		Persentase Kegiatan kerukunan umat beragama	%	NA	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	Indikator sasaran PD	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM (KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)
ASPEK DAYA SAING DAERAH													
1		Pertumbuhan investasi	%	4	8	12	16	20	24	28	28	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PENANAMAN MODAL
2		Prosentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,57	99,58	99,59	99,6	99,62	99,63	99,64	99,64	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI DAN UMKM
3		Skor Pola Pangan Harapan	%	93,3	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	93,9	93,9	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PANGAN
4		Persentase penanganan gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	%	85,70	86,10	86,83	87,23	87,97	88,37	88,50	88,50	Indikator Tujuan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Tahun						Kondisi Akhir Kinerja	Keterangan	Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5		Cakupan layanan telekomunikasi	%	2%	10%	20%	30%	40%	40%	40%	40%	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	NA	39,51	41,90	44,16	46,48	49,01	51,66	51,66	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
7		Indek Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Nilai	1,544	1,386	1,461	1,547	1,646	1,758	1,885	1,885	Sasaran daerah	UNSUR PENUNJANG UR. PEMERINTAHAN (KEUANGAN)
8		Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	5	7	9	11	13	15	17	17	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. KOPERASI, USAHA KECIL DAN UKM
9		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-3,50	4,60	4,69	5,08	5,30	5,40	5,60	5,60	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERDAGANGAN
10		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	-2,72	4,62	5,37	5,43	5,74	6,06	6,40	6,40	Sasaran daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BID. PERINDUSTRIAN

BAB IX P E N U T U P

9.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan.

RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan Urusan Pilihan.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sukoharjo periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Sukoharjo yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar

negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

5. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.
6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/ Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
8. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Sukoharjo tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

9.2. Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 telah berakhir dan belum tersusun RPJMD berikutnya, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2027 mengacu pada RPJPD Kabupaten Sukoharjo, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI